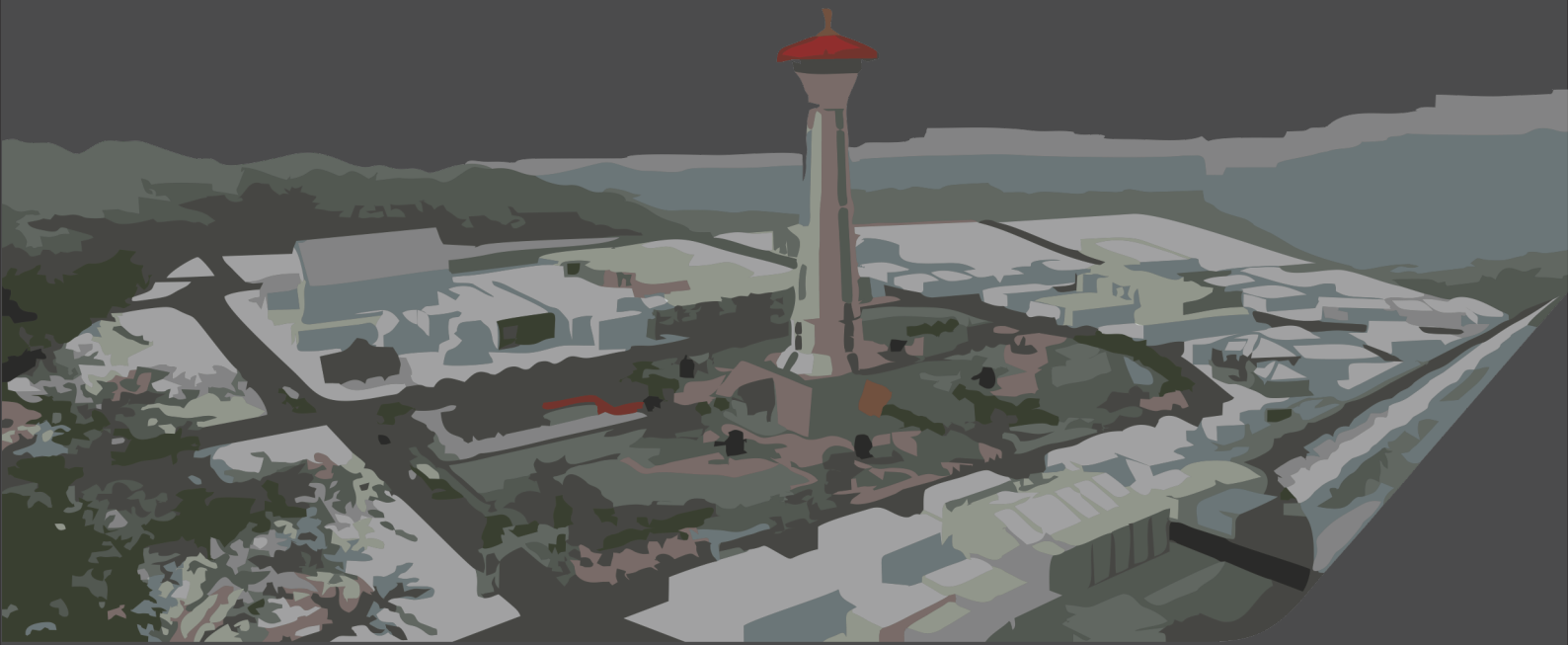




PEMERINTAH KOTA PALOPO



RKPD 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2020





**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palopo ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2021;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang selanjutnya disingkat APBD Kota Palopo adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2021

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun 2021 disajikan dengan Sistematika yang menuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Penutup.

Pasal 3

- (1) RKPD Kota Palopo Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Palopo pada Tahun Anggaran 2021;

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan Visi, Misi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Pasal 4

RKPD Kota Palopo Tahun 2021 merupakan dasar Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo.

Pasal 5

Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam Naskah RKPD Kota Palopo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 20 Juli 2020

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 14

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-7
	1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I-7
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
	2.1.1.1. Aspek Geografi	II-1
	2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi.....	II-2
	2.1.1.3. Topografi	II-2
	2.1.1.4. Geologi.....	II-3
	2.1.1.5. Hidrologi	II-5
	2.1.1.6. Klimatologi	II-7
	2.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-7
	2.1.1.8. Demografi	II-22
	2.1.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	II-23
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-30
	2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-30
	2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....	II-30
	2.1.2.1.2. Inflasi.....	II-33
	2.1.2.1.3. PDRB Perkapita	II-34
	2.1.2.1.4. Indeks Gini.....	II-36
	2.1.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin	II-36
	2.1.2.1.6. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	II-40
	2.1.2.1.7. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	II-40
	2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-41
	2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-41
	2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)	II-42
	2.1.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-42
	2.1.2.2.4. Angka Harapan Hidup	II-44
	2.1.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk	II-44
	2.1.2.2.6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-45
	2.1.2.2.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	II-46
	2.1.2.2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-47

2.1.2.2.9.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	II-49
2.1.2.2.10.	Survey Kepuasan Layanan Masyarakat	II-49
2.1.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-50
2.1.2.3.1.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga	II-50
2.1.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-50
2.1.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib	II-51
2.1.3.1.1.	Bidang Urusan Pendidikan	II-51
2.1.3.1.2.	Bidang Urusan Kesehatan	II-70
2.1.3.1.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	II-97
2.1.3.1.3.1.	Pekerjaan Umum	II-97
2.1.3.1.3.2.	Penataan Ruang	II-108
2.1.3.1.4.	Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-110
2.1.3.1.5.	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-115
2.1.3.1.6.	Bidang Urusan Sosial	II-117
2.1.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-122
2.1.3.2.1.	Bidang Urusan Tenaga Kerja	II-122
2.1.3.2.2.	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-127
2.1.3.2.3.	Bidang Urusan Pangan	II-131
2.1.3.2.4.	Bidang Urusan Pertanahan	II-133
2.1.3.2.5.	Bidang Urusan Lingkungan Hidup	II-134
2.1.3.2.6.	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-140
2.1.3.2.7.	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	II-143
2.1.3.2.8.	Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-145
2.1.3.2.9.	Bidang Urusan Perhubungan	II-156
2.1.3.2.10.	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika	II-159
2.1.3.2.11.	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-161
2.1.3.2.12.	Bidang Urusan Penanaman Modal	II-162
2.1.3.2.13.	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-163
2.1.3.2.14.	Bidang Urusan Statistik	II-164
2.1.3.2.15.	Bidang Urusan Persandian	II-166
2.1.3.2.16.	Bidang Urusan Kebudayaan	II-167

2.1.3.2.17.	Bidang Urusan Perpustakaan	II-168
2.1.3.2.18.	Bidang Urusan Kearsipan	II-170
2.1.3.3.	Layanan Urusan Pilihan	II-171
2.1.3.3.1.	Bidang Urusan Perikanan	II-171
2.1.3.3.2.	Bidang Urusan Pariwisata	II-173
2.1.3.3.3.	Bidang Urusan Pertanian	II-174
2.1.3.3.4.	Bidang Urusan Perdagangan	II-175
2.1.3.3.5.	Bidang Urusan Perindustrian	II-176
2.1.3.3.6.	Bidang Urusan Transmigrasi	II-177
2.1.3.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-177
2.1.3.4.1.	Sekretariat DPRD	II-177
2.1.3.5.	Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-178
2.1.3.5.1.	Bidang Urusan Perencanaan	II-178
2.1.3.5.2.	Bidang Urusan Keuangan	II-181
2.1.3.5.3.	Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	II-185
2.1.3.5.4.	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-187
2.1.3.5.5.	Bidang Urusan Pengawasan	II-188
2.1.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-189
2.1.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-189
2.1.4.2.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-193
2.1.4.3.	Iklim Berinvestasi	II-197
2.1.4.4.	Sumber Daya Manusia	II-199
2.1.5.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-200
2.1.5.1.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-200
2.1.5.2.	Capaian Standar Pelayanan Minimal	II-229
2.1.5.3.	Capaian Kinerja SDG's/TPB	II-231
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-248
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-254
2.3.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-258
2.3.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-262
2.3.2.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-262
2.3.2.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-266
2.3.2.3.	Urusan Pilihan	II-273
2.3.2.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-275
2.3.2.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-275

	2.3.2.6. Unsur Kewilayahan.....	II-276
	2.3.3. Isu Strategis Daerah.....	II-276
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
	3.1.1. Kondisi Eksisiting Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai PDRB.....	III-1
	3.1.1.2. PDRB Per Kapita	III-5
	3.1.1.3. Inflasi	III-6
	3.1.1.4. Ketenagakerjaan.....	III-7
	3.1.1.5. Kemiskinan	III-9
	3.1.1.6. Gini Ratio	III-11
	3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah.....	III-11
	3.1.2.1. Prospek Ekonomi Daerah.....	III-11
	3.1.2.2. Tantangan Ekonomi Daerah	III-13
	3.1.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah.....	III-14
	3.1.3.1. Sasaran Ekonomi Makro.....	III-14
	3.1.3.2. Arah Kebijakan Perekonomian	III-14
	3.1.4. Proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-15
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-16
	3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan....	III-16
	3.2.1.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah.....	III-17
	3.2.1.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah	III-21
	3.2.1.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-24
	3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-27
	3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-27
	3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-28
	3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-29
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo	IV-1
	4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021	IV-14
	4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2021	IV-14
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	IV-15
	4.2.2.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-19
	4.2.2.2. Tema Rencana Pembangunan Tahun 2021	IV-22
	4.2.2.3. Target Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	IV-22
	4.2.2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita.....	IV-22

4.2.2.3.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran.....	IV-22
4.2.2.3.3.	Tingkat Kemiskinan (% dan Jumlah Kemiskinan, Perubahan Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan)	IV-22
4.2.2.3.4.	Indeks Pembangunan Manusia	IV-23
4.2.2.3.5.	Ketimpangan (Gini Ratio dan Indeks Williamson)	IV-23
4.2.2.3.6.	Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan (Penetapan APBD, e-procurement, e-budgeting, IKM kesehatan, investasi, pelayanan publik lainnya.....	IV-23
4.2.2.3.7.	Transparansi (PPID, e-planning, Publikasi APBD secara Online) dan Akuntabilitas (Opini BPK dan SAKIP) ...	IV-25
4.2.2.4.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-27
4.2.3.	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional	IV-33
4.2.3.1.	Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2021	IV-33
4.2.3.2.	Dukungan Sasaran RKPD Terhadap Sasaran RKP Tahun 2021	IV-34
4.2.3.3.	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2021	IV-36
4.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	IV-36
4.3.1.	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Terhadap Strategi dan Kebijakan RKPD Kota Palopo Tahun 2021	IV-39
4.3.2.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo	IV-42
4.4.	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	IV-43
4.5.	Integrasi dan Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's	IV-44
4.6.	Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	IV-47
4.7.	Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Gender ..	IV-49
4.8.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-50
4.9.	Inovasi Daerah	IV-51
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1

BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
	6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
	6.2. Standar Pelayanan Minimal	VI-21
	6.3. Sustainable Development Goals	VI-25
BAB VII	P E N U T U P	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palopo	II-1
Tabel 2.2.	Luas dan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo 2019.....	II-3
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kota Palopo 2019	II-8
Tabel 2.4	Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-23
Tabel 2.5	Pola Tutupan Lahan Wilayah Kota Palopo Tahun 2018	II-24
Tabel 2.6	Luas Lahan Kritis Kota Palopo 2017 (Ha)	II-26
Tabel 2.7	Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya, 2016	II-26
Tabel 2.8	Angka Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo 2018	II-27
Tabel 2.9	Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo Tahun 2032.....	II-29
Tabel 2.10	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-30
Tabel 2.11	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (milyar Rupiah) Tahun 2015 – 2019.....	II-31
Tabel 2.12	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015 – 2019.....	II-32
Tabel 2.13	Kontribusi PDRB Kota Palopo Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2018 (Persen)	II-33
Tabel 2.14	Perbandingan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019	II-35
Tabel 2.15	Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah di Sulsel Tahun 2015 – 2019	II-36
Tabel 2.16	Kondisi Kemiskinan Kota Palopo 2015 – 2019.....	II-39
Tabel 2.17	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Palopo Tahun Anggaran 2019	II-40
Tabel 2.18	Perkembangan dan Perbandingan IPM Kota Palopo dengan Wilayah Lain Tahun 2015 – 2019.....	II-41
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo 2015-2019	II-42
Tabel 2.20	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah 2015 – 2019	II-43
Tabel 2.21	Perbandingan Harapan Lama Sekolah 2015 – 2019	II-43
Tabel 2.22	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-45
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 ..	II-45
Tabel 2.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2015 – 2019..	II-46
Tabel 2.25	Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I ..	II-49

Tabel 2.26	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019	II-50
Tabel 2.27	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-50
Tabel 2.28	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-51
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-52
Tabel 2.30	Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kota Palopo yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2018	II-53
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.....	II-54
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	II-54
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	II-55
Tabel 2.34	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-55
Tabel 2.35	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-56
Tabel 2.36	Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-56
Tabel 2.37	Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-57
Tabel 2.38	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-57
Tabel 2.39	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-57
Tabel 2.40	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-58
Tabel 2.41	Angka Kelulusan Kota Palopo 2014 – 2019	II-59
Tabel 2.42	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-59
Tabel 2.43	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-60
Tabel 2.44	Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-60
Tabel 2.45	Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-60
Tabel 2.46	Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-62

Tabel 2.47	Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-62
Tabel 2.48	Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-63
Tabel 2.49	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-63
Tabel 2.50	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-64
Tabel 2.51	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-65
Tabel 2.52	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-66
Tabel 2.53	Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar Kota Palopo 2015 – 2019	II-67
Tabel 2.54	Persentase Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah Kota Palopo 2015 – 2019	II-67
Tabel 2.55	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan Laki-Laki Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-69
Tabel 2.56	Persentase Penduduk Berusia ≥ 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	II-69
Tabel 2.57	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-70
Tabel 2.58	Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-71
Tabel 2.59	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-72
Tabel 2.60	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-73
Tabel 2.61	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-74
Tabel 2.62	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-75
Tabel 2.63	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2013 – 2018..	II-76
Tabel 2.64	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-76

Tabel 2.65	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-77
Tabel 2.66	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Tahun 2015 – 2019.....	II-77
Tabel 2.67	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-78
Tabel 2.68	Cakupan Ko,likasi Kebidanan yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-78
Tabel 2.69	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-79
Tabel 2.70	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-80
Tabel 2.71	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-80
Tabel 2.72	Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 1.200 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-81
Tabel 2.73	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-81
Tabel 2.74	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-82
Tabel 2.75	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-83
Tabel 2.76	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-83
Tabel 2.77	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-84
Tabel 2.78	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-85
Tabel 2.79	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-85
Tabel 2.80	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-86
Tabel 2.81	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-87
Tabel 2.82	Penderita Diare yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-87
Tabel 2.83	Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-88

Tabel 2.84	Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 ...	II-88
Tabel 2.85	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-88
Tabel 2.86	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-89
Tabel 2.87	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-89
Tabel 2.88	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-90
Tabel 2.89	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-91
Tabel 2.90	Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-91
Tabel 2.91	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-92
Tabel 2.92	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 .	II-92
Tabel 2.93	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-93
Tabel 2.94	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-93
Tabel 2.95	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2015 – 2019...	II-94
Tabel 2.96	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-12 Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-95
Tabel 2.97	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-95
Tabel 2.98	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-96
Tabel 2.99	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epideminologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-96
Tabel 2.100	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik 2015 – 2019	II-97
Tabel 2.101	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-98
Tabel 2.102	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-99
Tabel 2.103	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019...	II-99

Tabel 2.104	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-100
Tabel 2.105	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-100
Tabel 2.106	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-101
Tabel 2.107	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-101
Tabel 2.108	Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-101
Tabel 2.109	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 .	II-102
Tabel 2.110	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-103
Tabel 2.111	Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-103
Tabel 2.112	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-104
Tabel 2.113	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-105
Tabel 2.114	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-106
Tabel 2.115	Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-106
Tabel 2.116	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-107
Tabel 2.117	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-107
Tabel 2.118	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-108
Tabel 2.119	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-109
Tabel 2.120	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-109
Tabel 2.121	Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-110
Tabel 2.122	Rasio Permukiman Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-111

Tabel 2.123	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-111
Tabel 2.124	Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-112
Tabel 2.125	Persentase Pemukiman yang Tertata Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-112
Tabel 2.126	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-113
Tabel 2.127	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-114
Tabel 2.128	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-114
Tabel 2.129	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Disukung dengan PSU Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-115
Tabel 2.130	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-115
Tabel 2.131	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-116
Tabel 2.132	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-116
Tabel 2.133	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-117
Tabel 2.134	Persentase Penegakan PERDA Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-117
Tabel 2.135	PMKS yang Meperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-118
Tabel 2.136	Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-119
Tabel 2.137	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019...	II-119
Tabel 2.138	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-120
Tabel 2.139	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-120

Tabel 2.140	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-121
Tabel 2.141	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-121
Tabel 2.142	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-122
Tabel 2.143	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-122
Tabel 2.144	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-123
Tabel 2.145	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Palopo Tahun 2015-2019 .	II-123
Tabel 2.146	Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-124
Tabel 2.147	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-124
Tabel 2.148	Persentase Pemeriksaan Perusahaan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-125
Tabel 2.149	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-126
Tabel 2.150	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-126
Tabel 2.151	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-126
Tabel 2.152	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-127
Tabel 2.153	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-127
Tabel 2.154	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-128
Tabel 2.155	Rasio KDRT di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018.....	II-128
Tabel 2.156	Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-129

Tabel 2.157	Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-129
Tabel 2.158	Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-130
Tabel 2.159	Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-130
Tabel 2.160	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-130
Tabel 2.161	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-131
Tabel 2.162	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-131
Tabel 2.163	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-131
Tabel 2.164	Persentase Ketersediaan Pangan Utama di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-132
Tabel 2.165	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-132
Tabel 2.166	persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-133
Tabel 2.167	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-133
Tabel 2.168	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-134
Tabel 2.169	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-134
Tabel 2.170	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-135
Tabel 2.171	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-135
Tabel 2.172	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-135
Tabel 2.173	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-135

Tabel 2.174	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-136
Tabel 2.175	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-136
Tabel 2.176	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-137
Tabel 2.177	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-137
Tabel 2.178	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-137
Tabel 2.179	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-138
Tabel 2.180	Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-138
Tabel 2.181	Persentase Cakupan Area Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-339
Tabel 2.182	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-140
Tabel 2.183	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019....	II-140
Tabel 2.184	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-140
Tabel 2.185	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-141
Tabel 2.186	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019...	II-141
Tabel 2.187	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-142
Tabel 2.188	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-142
Tabel 2.189	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-142
Tabel 2.190	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-143
Tabel 2.191	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-143
Tabel 2.192	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-143

Tabel 2.193	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-144
Tabel 2.194	Persentase LSN Aktif di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-144
Tabel 2.195	Persentase LPM Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-144
Tabel 2.196	Persentase PKK Aktif di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-145
Tabel 2.197	Persentase Posyandu Aktif di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-145
Tabel 2.198	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-146
Tabel 2.199	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-146
Tabel 2.200	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-146
Tabel 2.201	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-147
Tabel 2.202	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-147
Tabel 2.203	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-148
Tabel 2.204	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-148
Tabel 2.205	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-149
Tabel 2.206	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-149
Tabel 2.207	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-150
Tabel 2.208	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-150
Tabel 2.209	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-151
Tabel 2.210	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-151
Tabel 2.211	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-152

Tabel 2.212	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan.....	II-152
Tabel 2.213	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-153
Tabel 2.214	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-153
Tabel 2.215	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Di Gudang Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-154
Tabel 2.216	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-154
Tabel 2.217	Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-154
Tabel 2.218	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-155
Tabel 2.219	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-155
Tabel 2.220	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-156
Tabel 2.221	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-156
Tabel 2.222	Rasio Ijin Trayek di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-157
Tabel 2.223	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019..	II-157
Tabel 2.224	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-157
Tabel 2.225	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-158
Tabel 2.226	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-158
Tabel 2.227	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	II-159

Tabel 2.228	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-159
Tabel 2.229	Cakupan Layanan Komunikasi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 ..	II-159
Tabel 2.230	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-160
Tabel 2.231	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-160
Tabel 2.232	Persentase Koperasi Aktif di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-161
Tabel 2.233	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-161
Tabel 2.234	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 .	II-162
Tabel 2.235	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-162
Tabel 2.236	Jumlah Nilai Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-162
Tabel 2.237	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018.	II-163
Tabel 2.238	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-163
Tabel 2.239	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-164
Tabel 2.240	Persentase Wirausaha Muda di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-164
Tabel 2.241	Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-164
Tabel 2.242	Persentase Pelatih yang Berseertifikat di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-165
Tabel 2.243	Persentase Pembinaan Atlet Muda di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-165
Tabel 2.244	Persentase Atlet Berprestasi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-165
Tabel 2.245	Persentase Prestasi Olahraga di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-165
Tabel 2.246	Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-166
Tabel 2.247	Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka” Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-166
Tabel 2.248	Ketersediaan Buku “PDRB” Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-166

Tabel 2.249	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi di Kota Palopo Tahun 2015 – 20198.....	II-166
Tabel 2.250	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-167
Tabel 2.251	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-167
Tabel 2.252	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-168
Tabel 2.253	Jumlah Cagar Budaya yang Diekola Secara Terpadu di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-168
Tabel 2.254	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-168
Tabel 2.255	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-169
Tabel 2.256	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-169
Tabel 2.257	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-169
Tabel 2.258	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-170
Tabel 2.259	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-170
Tabel 2.260	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-170
Tabel 2.261	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-171
Tabel 2.262	Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-171
Tabel 2.263	Persentase Konsumsi Ikan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-171
Tabel 2.264	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-172
Tabel 2.265	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-172
Tabel 2.266	Persentase Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-173
Tabel 2.267	Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-173
Tabel 2.268	Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2015 – 2019 ..	II-174

Tabel 2.269	Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018	II-174
Tabel 2.270	Persentase Pembinaan Kelompok Tani di Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-175
Tabel 2.271	Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-175
Tabel 2.272	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-176
Tabel 2.273	Tersedianya RKT Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-177
Tabel 2.274	Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-178
Tabel 2.275	Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-178
Tabel 2.276	Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo	II-178
Tabel 2.277	Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo	II-179
Tabel 2.278	Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-179
Tabel 2.279	Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo	II-180
Tabel 2.280	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-180
Tabel 2.281	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-181
Tabel 2.282	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-181
Tabel 2.283	Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2016 – 2018	II-182
Tabel 2.284	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-182
Tabel 2.285	Persentase Belanja Pendidikan (205) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-182
Tabel 2.286	Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-183
Tabel 2.287	Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-184
Tabel 2.288	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-184

Tabel 2.289	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-185
Tabel 2.290	Rata –Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015 – 2019	II-185
Tabel 2.291	Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2015 – 2019	II-185
Tabel 2.292	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2015 – 2019	II-186
Tabel 2.293	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-186
Tabel 2.294	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-186
Tabel 2.295	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-187
Tabel 2.296	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-187
Tabel 2.297	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-187
Tabel 2.298	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-188
Tabel 2.399	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-188
Tabel 2.300	Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-188
Tabel 2.301	Jumlah Temuan BPK di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-189
Tabel 2.302	Pengeluaran Kondumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-190
Tabel 2.303	Pengeluaran Per Kapita 2015 – 2019 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) ...	II-191
Tabel 2.304	Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-191
Tabel 2.305	Produktivitas Total Daerah Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-192
Tabel 2.306	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-192
Tabel 2.307	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-193

Tabel 2.308	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-193
Tabel 2.309	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-194
Tabel 2.310	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-194
Tabel 2.311	Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo	II-195
Tabel 2.312	Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016	II-195
Tabel 2.313	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-196
Tabel 2.314	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-197
Tabel 2.315	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-197
Tabel 2.316	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-198
Tabel 2.317	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan	II-198
Tabel 2.318	Rasio Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019	II-199
Tabel 2.319	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018	II-199
Tabel 2.320	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo	II-200
Tabel 2.321	Capaian SPM Pendidikan Kota Palopo Tahun 2019	II-229
Tabel 2.322	Capaian Kinerja SDG's/TPB	II-231
Tabel 2.323	Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan IV 2019	II-249
Tabel 2.324	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Hasil Evaluasi Pembangunan Kota Palopo	II-254
Tabel 2.325	Keterkaitan Sasaran, Permasalahan Pembangunan dan Prioritas RKPD 2021	II-258
Tabel 2.326	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	II-259

Tabel 2.327	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Capaian Pembangunan Kota Palopo	II-260
Tabel 2.328	Isu Strategis 2021	II-2679
Tabel 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019.....	III-1
Tabel 3.2	Kontribusi PDRB Kota Palopo Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen)	III-2
Tabel 3.3	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015 – 2019	III-2
Tabel 3.4	PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015 – 2019.....	III-3
Tabel 3.5	Distribusi Persentase PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015 – 2019	III-4
Tabel 3.6	Perubahan TPT Kota Palopo 2015 – 2019.....	III-8
Tabel 3.7	Kondisi Kemiskinan Kota Palopo 2015 – 2019.....	III-10
Tabel 3.8	Perkembangan Gini Rasio beberapa Wilayah di Sulsel 2015 – 2019 dan Nasional	III-11
Tabel 3.9	Indikator Makro Ekonomi Kota Palopo 2021	III-14
Tabel 3.10	Proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah Kota Palopo 2020 dan 2021 Dampak Pandemic Covid 19	III-15
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palopo Tahun 2019 – 2022.....	III-19
Tabel 3.12	Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD 2021 Kota Palopo	III-20
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2019 – 2022	III-22
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2019-2022 (Berdasarkan Kode Rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	III-23
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2019– 2022	III-25
Tabel 3.16	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Palopo Tahun 2019-2022 (Berdasarkan Kode Rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)	III-26
Tabel 4.1	Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi.....	IV-5
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	IV-6

Tabel 4.3	Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-13
Tabel 4.4	Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Sulsel dan Kota Palopo Tahun 2021	IV-16
Tabel 4.5	Keterkaitan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palopo 2021	IV-21
Tabel 4.6	Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo	IV-28
Tabel 5.1	Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 Kota Palopo	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Jumlah Program Prioritas Perangkat Daerah, Kegiatan dan Pagu Indikatif serta Perangkat Daerah Tahun 2021	V-2
Tabel 6.1	Capaian, Target dan Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 ...	VI-2
Tabel 6.3	Target Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2029 dan Target 2021	VI-21
Tabel 6.4	Capaian dan Target SDGs Kota Palopo 20120 dan Target 2021	VI-25

DAFTAR GRAFIK

Grafik	2.1.	Piramida Penduduk Kota Palopo Tahun 2019.....	II-22
Grafik	2.2.	Status Keterasediaan dan kebutuhan Bahan Pangan 2019	II-27
Grafik	2.3.	Perkembangan Produksi Pangan Utama Kota Palopo (2015-2019).	II-27
Grafik	2.4.	Perkembangan Produksi Daging Kota Palopo (2015 – 2019)	II-28
Grafik	2.5.	Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo 2015-2019	II-29
Grafik	2.6.	Inflasi Kota Palopo 2015 -2019	II-32
Grafik	2.7.	Perbandingan PDRB per Kapita antar Wilayah	II-33
Grafik	2.8.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo 2019 Dibandingkan dengan Daerah Lain di Luwu Raya.....	II-36
Grafik	2.9.	Perbandingan Capaian AMH Kota Palopo dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 – 2018	II-40
Grafik	2.10.	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dengan Wilayah Lain	II-42
Grafik	2.11.	Perbandingan Tingkat Pengangguran antar Wilayah	II-45
Grafik	2.12.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2016 – 2018.....	II-68
Grafik	2.13.	Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2016 – 2018	II-69
Grafik	2.14.	Angka Kematian Bayi di Kota Palopo Tahun 2016 – 2018.....	II-70
Grafik	2.15.	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Palopo Tahun 2016 – 2018.....	II-71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-5
Gambar 2.1. Peta Letak dan Kondisi Geografis.....	II-2
Gambar 2.2. Peta Topografi	II-2
Gambar 2.3. Peta Geologi.....	II-4
Gambar 2.4. Peta Hidrolik.....	II-5
Gambar 2.5. Peta DAS Kota Palopo	II-6

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah dan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang

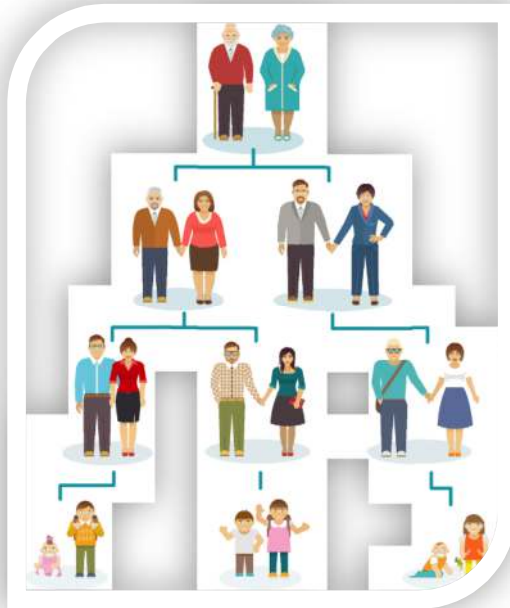
mengamanatkan bahwa penyusunan

RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun APBD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilakukan melalui serangkaian tahapan dan tatacara yang antara lain meliputi:

- (a) Penyusunan rancangan awal RKPD,
- (b) Penyusunan rancangan RKPD,
- (c) Pelaksanaan Musrenbang RKPD,



-
- (d) Perumusan rancangan akhir, serta
 - (e) Penetapan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

-
- 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
 23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

-
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 33. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38);
 34. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
 36. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);

-
37. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2019 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2021

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021

Penyusunan RKPD 2021 Kota Palopo memperhatikan isu strategis dalam RKP Nasional dan sesuai dengan perkembangan kondisi daerah sehingga terjadi keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah. Pembangunan Daerah sendiri sejatinya merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten/Kota harus mengacu kepada RKP.

RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 Dengan RKPD Kota Palopo Tahun 2021

Penyusunan RKPD 2021 Kota Palopo diselaraskan dengan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 sebab merupakan periode ketiga dari RPJMD dimana konsistensi antara semua dokumen perencanaan harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD 2021.

RKPD Kota Palopo Tahun 2021, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

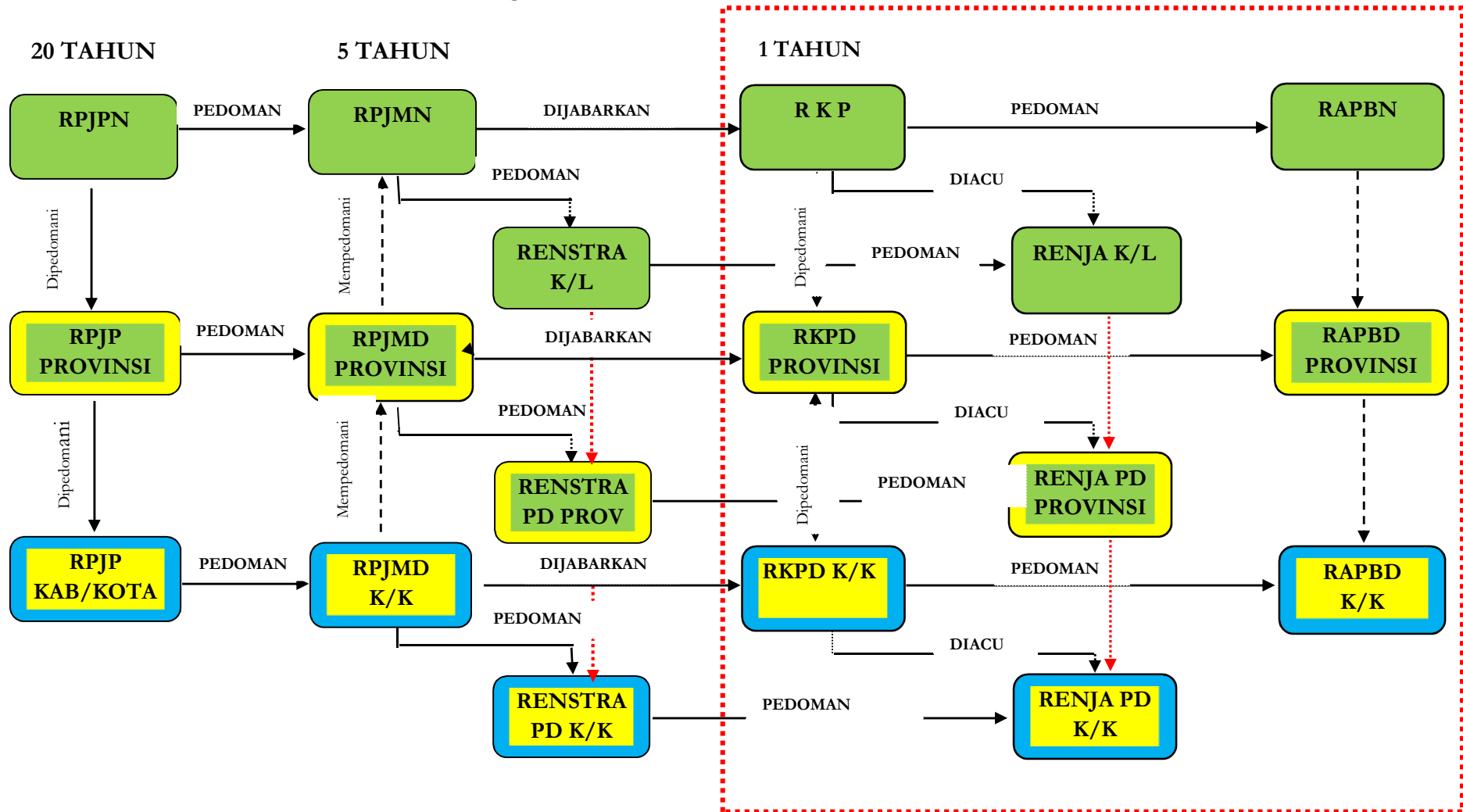
Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja-PD lingkup Pemerintah Kota Palopo mengacu pada RKPD Kota Palopo Tahun 2021.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 selanjutnya, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Tahapan Penyusunan RKPD

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan hasil kinerja Tim melalui proses yang sistematis yaitu : pembentukan tim, pengumpulan data, identifikasi permasalahan, telaah dokumen, diskusi dan perumusan secara keseluruhan.

Gambar 1.1.
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Palopo Tahun 2021 sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan di Kota Palopo.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2021 ini adalah :

1. Menyediakan pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021;
2. Menjaga sinergi perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat, dan Daerah serta menjabarkan sasaran dalam RPJMD ke dalam rencana yang lebih operasional;
3. Menjaga keselarasan antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang daerah Kota Palopo dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menyediakan tolak ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.3.1. RKP dan RKPD Kota Palopo Tahun 2021
 - 1.3.2. RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan RKPD Kota Palopo Tahun 2021
 - 1.3.3. RKPD Kota Palopo Tahun 2021, Renja OPD Kota Palopo dan KUA-PPAS
 - 1.3.4. Tahapan Penyusunan RKPD
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2021
- 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Pokok – Pokok Pikiran DPRD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

5.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

1.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

BAB VII PENUTUP

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah



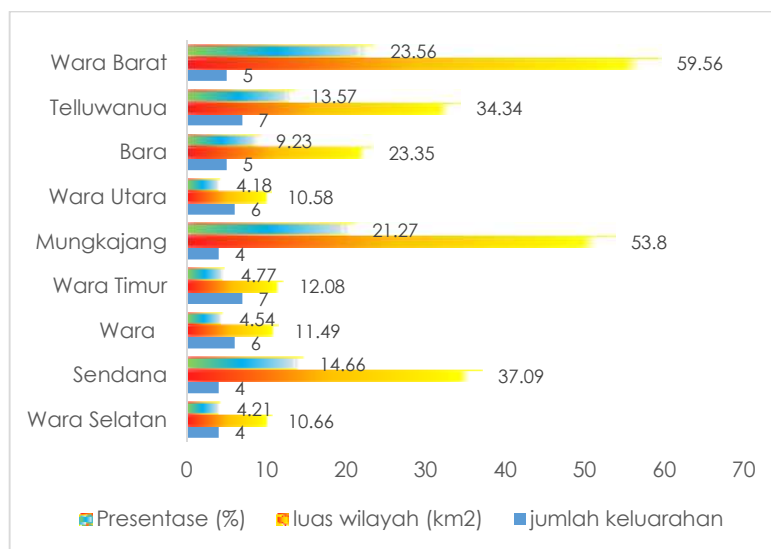
Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Kota Palopo mempunyai luas wilayah **252,99** km², memiliki **9 Kecamatan**, dan **48 Kelurahan**. Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah Timur dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah Selatan serta Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara di sebelah Barat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan Kota Palopo Tahun 2019



Sumber : Buku Palopo Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan yang terkecil adalah Wara Utara. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Wara Timur dan kelurahan yang paling sedikit adalah Wara Selatan, Sendana, Mungkajang.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Gambar 2.1 Peta Letak dan Kondisi Geografis

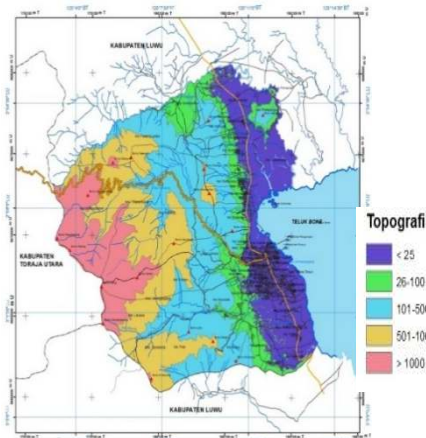


Kota Palopo terletak antara $2^{\circ}53'.15''$ - $3^{\circ}04'.08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'.10''$ - $120^{\circ}14'.34''$ Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan

lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

2.1.1.3 Topografi

Gambar 2.2 Peta Topografi



Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah

berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Luas dan Tingkat Kemiringan Lereng Kota Palopo 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km ²)			
			0-2 %	2-15 %	15-40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	54,13	-	-	5,413	48,717
Jumlah		247,52	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber : Palopo Dalam Angka

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 md, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 md, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 md. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

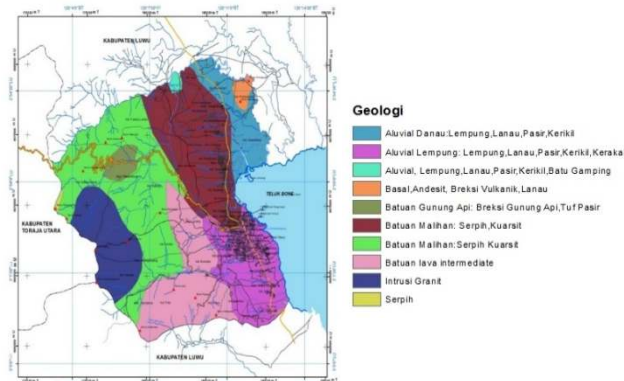
Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi

2.1.1.4 Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gabbro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran lava yang telah membeku yang bersusunan basaltik hingga andesitik

Gambar: 2.3 Peta Geologi



Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-

endapan alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakal, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Di wilayah Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata*, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara, dan Wara selatan.
- Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu)*, banyak terdapat di sungai latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
- Bahan galian atau butiran emas*, terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman belanda. Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional.
- Batuan sedimen*, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Batuan terobosan*, yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.

Jenis batuan lainnya yang meruokan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;

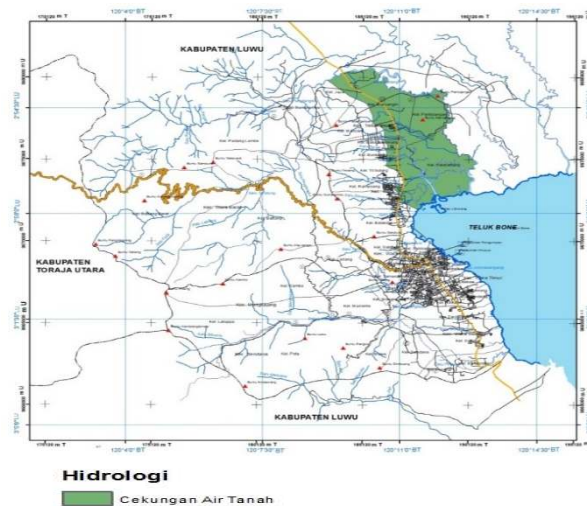
- Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble)*, dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Telluwanua.
- Batuan Granit dan Granodiorit*, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (aggrogat) dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
- Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau*, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umur pembentukannya yang diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu;

- Kelompok endapan alluvial* (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal) yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa.
- Batuan Tmb*; terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat, mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- Batu Tol*, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga *andesitic*, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini terususun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.
- Batuan Tet*, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konlomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- Batuan TKI*, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmar, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

2.1.1.5 Hidrologi

Gambar 2.4 Peta Hidrolik



Keadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan

rafting. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut;

- Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
- Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

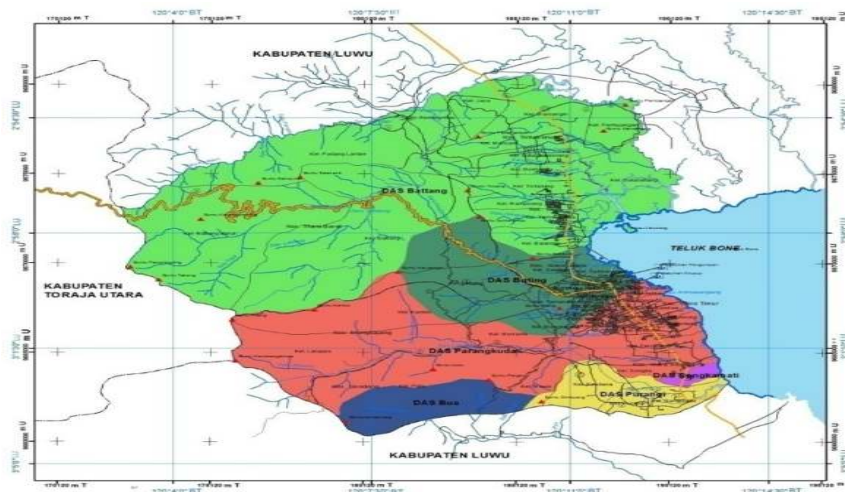
Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi

klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah termanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupan kesehariannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

Gambar 2.5 Peta DAS Kota Palopo



Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) baik yang melintas dalam pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopoterdiri dari 6 daerah terdiri dari :

1. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar.
2. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 hektar.
3. DAS Songkama'ti dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar.
4. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar.
5. DAS Botting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar.
6. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar.

2.1.1.6 Klimatologi

Curah hujan yang dicatat dari data Badan Meteorologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan air tanah (*ground water*) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diupkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya sewaktu-waktu menjadi hujan di Kota Palopo. Dalam hal ini dapat dirasakan, pada waktu musim kemarau masih dapat dirasakan hujan, sebaliknya pada musim hujan masih banyak didapatkan hari tanpa hujan, ini menjadi ciri khusus yang memungkinkan berbagai jenis tanaman buah bergantian berbuah sepanjang tahun. Demikian pula, panjang hari hujan lebih relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan wilayah lain di Luwu Raya, sehingga lebih tepat untuk usaha pengeringan, baik untuk hasil laut maupun hasil pertanian.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata 25,5^o C – 27,9^o C, angka ini berkurang 0,6^o C setiap kenaikan 100 Meter, sehingga makin tinggi keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya semakin tinggi. Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85 % tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antar 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan mengumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang kebanyakan di wilayah pengunungan dan wilayah daratan sewaktu-waktu. Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimukimi oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masing – masing masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Luas dari masing – masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Penggunaan Lahan di Kota Palopo 2019

No	Kecamatan	Lahan Pertanian (Ha)		Lahan Non Pertanian (Ha)
		Sawah	Bukan Sawah	
1	Wara Selatan	136	465	465
2	Sendana	263	2426	1020
3	Wara	83	8	1058
4	Wara Timur	-	199	1009
5	Mungkajang	47	1158	4175
6	Wara Utara	5	246	807
7	Bara	-	1481	854
8	Tellu Wanua	860	2074	500
9	Wara Barat	180	1646	3587

Sumber : Palopo Dalam Angka 2010

KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya :

- Perikanan budidaya tambak seluas lebih Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
- Budidaya air tawar seluas 355,8 Ha di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Telluwanua;
- Kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi tambak dan pantai yang berada di Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 150 Ha di wilayah Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
- Balai Benih Ikan Salopao dengan luas 1,3 Ha di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.



KAWASAN LINDUNG

- **Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung dengan luas $\pm 8.297,58$ hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.



- **Kawasan Pelestarian Alam**

Kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III seluas 891 hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

- **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya ± 12 hektar merupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang.

WILAYAH RAWAN BENCANA

Berikut adalah analisis kerentanan wilayah rawan bencana di Kota Palopo :

a. Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Berada di kawasan Battang Barat, dan Battang (Kecamatan Wara Barat), kawasan Latuppa, dan kawasan Kambo (Kecamatan Mungkajang), kawasan Peta (Kecamatan Sendana). Intensitas terjadinya bencana gerakan tanah dalam beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi di wilayah Kota Palopo cenderung meningkat frekuensinya.

Bencana ini relatif sering terjadi di kawasan Kota Palopo, khususnya di wilayah Kelurahan Barat dan Kelurahan Battang.

Fenomena ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan di daerah rentan gerakan tanah. Kondisi ini diperparah saat intensitas hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana tanah longsor di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah.



b. Banjir

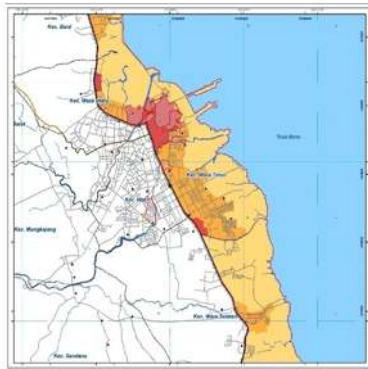
Kawasan rawan banjir berada di Berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, (Kecamatan Telluwanua), Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE

(Kecamatan Wara Timur),
Kelurahan Amassangan,
Kelurahan Lagaligo,
Kelurahan Dangerakko,
Kelurahan Tompotikka
(Kecamatan Wara), dan
Kelurahan Padanglambe
(Kecamatan Wara Barat)



c. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Peta Rawan Kebakaran



Kawasan rawannya berada di Berada di kawasan permukiman kepadatan tinggi pada wilayah Kelurahan Penggoli, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, dan Kelurahan Dangerakko.

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 – 1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32 – 1,66, dan 3,00 – 2,23.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Telluwanua. Ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23.



e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

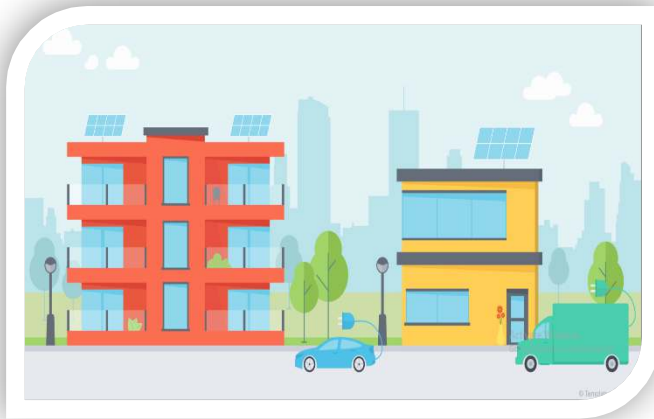
Kawasan rawannya berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara. Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi Kota Palopo berada pada klasifikasi/kategori Rendah yakni pada skor 1,50 atau masih dalam kelas interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23. Indikator yang digunakan untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan (*current*) tutupan vegetasi



di wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi pantai.

2.1.1.8 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah



Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Posisi Kota Palopo untuk mendukung pengembangan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) Di Wilayah Kota Palopo

1. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, dan sebagian wilayah Kecamatan Telluwana.
2. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone Utara..
3. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
 - b. Kawasan Taman Hutan Raya Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat.

KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :



1. Kawasan Reklamasi Salemo seluas ± 700 Ha di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara;
2. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha wilayah Kelurahan Mancani;
3. Kawasan Perumahan Terpadu seluas $\pm 100,0$ Ha di wilayah Kelurahan Purangi;
4. Kawasan Pusat Kota Palopo meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe;
5. Kawasan Pusat Niaga Palopo di wilayah Kelurahan Dangerakko;
6. Kawasan Pusat Perbelanjaan di wilayah Kelurahan Salobulo;
7. Kawasan Peruntukan Industri seluas ± 360 Ha di wilayah Kelurahan Maroangin;
8. Kawasan Terminal tipe A seluas $\pm 5,0$ Ha di wilayah Kelurahan Songka;
9. Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;
10. Kawasan Koridor Jalan Andi Kambo;
11. Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;
12. Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit di wilayah Kelurahan Pontap;
13. Kawasan Hiburan Labombo di wilayah Kelurahan Salekoe;
14. Kawasan Transmigrasi seluas $\pm 976,73$ Ha di wilayah Kelurahan Peta;
15. Kawasan Resor Kambo seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Kambo.

KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya terdiri atas :

1. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Ammassangan;
2. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Boting;
3. Kawasan Menara Payung Luwu terintegrasi dengan Pusat Kuliner Tradisional seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Batupasi;
4. Kawasan Islamic Centre Palopo seluas $\pm 2,0$ Ha di wilayah Kelurahan Takkalala;
5. Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Battang;
6. Kawasan Desa Wisata Peta, Murante, dan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
7. Kawasan Olah Raga Terpadu (kawasan stadion olah raga Lagaligo) seluas $\pm 2,0$ Ha di wilayah Kelurahan Lagaligo;
8. Kawasan Sirkuit Road Race seluas $\pm 8,0$ Ha di wilayah Kelurahan Rampoang.

KSK dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Kecamatan Mungkajang, dan di wilayah Kecamatan Wara Barat dengan luas keseluruhan 8.666 Ha;

2. Kawasan DAS Pacangkuda (sumber utama air baku air minum kota) seluas $\pm$ 6.646,66 di wilayah Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Murante;
3. Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.

KSK dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi

- Kawasan Sagu Teknopark Palopo seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Salubattang.

KAWASAN PERUNTUKAN PERKANTORAN

❖ Kawasan Perkantoran Pemerintah Skala Kota :

Tersebar di beberapa sub wilayah sesuai dengan kondisi eksisting, yakni : Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, dan Kelurahan Boting (Kecamatan Wara), Kelurahan Salekoe, dan Kelurahan Pontap (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan To'bulung (Kecamatan Bara), Kelurahan Tomarundung (Kecamatan Wara Barat), Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), dan Kelurahan Mungkajang (Kecamatan Mungkajang).

❖ Kawasan Perkantoran Pemerintah skala kecamatan dan kelurahan (skala lokal)

Tersebar di masing sub-sub wilayah kota di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan, yang akan lebih mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

❖ Kawasan peruntukan perkantoran swasta, direncanakan pada :

- a. Kawasan pusat kota;
- b. Koridor jalan-jalan utama kota, yakni koridor jalan arteri primer, jalan kolektor primer, serta jalan lokal primer yang memiliki akses yang tinggi dengan kawasan lainnya;
- c. Kawasan reklamasi Salemo.

KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN

❖ Kawasan Peruntukan Industri:

Di wilayah Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua direncanakan seluas 360Ha.

❖ Kawasan industri kecil dan usaha mikro

Tidak menimbulkan limbah berbahaya, peruntukannya tersebar di sub-sub wilayah KotaPalopo.

❖ Kawasan peruntukan pergudangan

- a. Lokasinya berdekatan atau teraglomerasi dengan kawasan peruntukan IndustriKelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua seluas 25,0 Ha.
- b. Kawasan Pergudangan lainnya (eksisting) berada di Kelurahan Batu Walenrang yang direncanakan seluas 25, 0 Ha.



KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

❖ **Kawasan pariwisata budaya meliputi:**

- a. Istana Kedatuan Luwu (Kawasan Lalebata) terletak di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
- b. Rumah adat Peta dan tempat tarian adat di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
- c. Rumah adat Mungkajang dan Latuppa dan tempat tarian adat di Kecamatan Mungkajang;
- d. Maccera Tasi (Pesta Laut) di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara;
- e. Tempat pendaratan Belanda di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
- f. Tempat pementasan kesenian di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara.

❖ **Kawasan pariwisata alam meliputi:**



a.

- Kawasan Agrowisata Latuppa di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dan Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.
- b. Kawasan Air Terjun Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - c. Kawasan Air Terjun Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - d. Kawasan Air Terjun Rantenase di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
 - e. Kawasan Kali Jodoh di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
 - f. Pemandangan alam Kambo di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang;
 - g. Kawasan Air Terjun Mawa di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana;
 - h. Puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;
 - i. Kawasan wisata Pantai Labombo di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur;
 - j. Kawasan wisata Permandian alam Batupapan, Batiok dan Lumarrang (kurungan batu) di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;

- k. Gua Kalo Dewata di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- l. Kawasan wisata Pantai Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
- m. Kawasan wisata Permandian alam Batutongkon di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- n. Kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur;
- o. Kawasan wisata Pulau Libukang di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
- p. Kawasan wisata Lembah Kattun di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Buatan:

- a. Kawasan wisata seni kreatif di pedestrian jalan Jenderal Ahmad Yani di Kelurahan Amassangan;
- b. Kawasan wisata seni kreatif di koridor lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
- c. Rencana pengembangan kawasan Resor Kambo di Kelurahan Kambo;
- d. Rencana pengembangan kawasan wisata kuliner di Kawasan Menara Payung Luwu di Kelurahan Batupasi.

KAWASAN PERUNTUKAN RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)

❖ Plaza

Pelataran tempat berkumpulnya massa (*assembly point*) dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, aktivitas massa, dan lain-lain.

- Rencana pengembangannya berada di kawasan Menara Payung (*Landmark Kota Palopo*), serta di kawasan reklamasi Pantai Salemo berada di Kelurahan Sabbamparu (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Ponjale (Kecamatan Wara Timur), dan di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Takkalala (Kecamatan Wara Selatan).

❖ Pelataran Parkir



Pelataran parkir merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama meletakkan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor; serta kendaraan lainnya seperti sepeda. Lahan parkir dikenal sebagai salah satu

bentuk RTNH yang memiliki fungsi ekonomis.

- Rencana pengembangan lahan parkir umum di Kota Palopo direncanakan terintegrasi dengan Plasa, juga pada terminal tipe A Songka dan terminal C Dangerakko, fasilitas *park and ride* stasiun kereta api, serta di masing-masing kawasan pariwisata di beberapa sub wilayah.

❖ Lapangan Olahraga

Lapangan olah raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olah raga :

- Berupa lapangan olah raga bulutangkis dan basket. Pengembangannya di beberapasub wilayah, termasuk di lahan kawasan reklamasi Salemo nantinya.

❖ Tempat Bermain dan Rekreasi



Tempat bermain dan rekreasi merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan berbagai kelengkapan tertentu untuk mewadahi kegiatan utama bermain atau rekreasi masyarakat.

- Direncanakan berada di kawasan reklamasi Salemo, di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), Kelurahan Songka (Kecamatan Wara Timur), dan di wilayah Kelurahan Sampoddo berupa Anjungan Cerdas.

❖ Koridor

Koridor merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai jalur dengan fungsi utama sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki yang bukan merupakan trotoar (jalur pejalan kaki yang berada di sisi jalan). Koridor sebagai ruang terbuka non hijau dibentuk diantara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu.

- Rencana pengembangan Koridor berada pada kawasan Reklamasi Salemo.
- Dipriotaskan pada kawasan Perdagangan dan Jasa sebagai pembatas antar blok-blok bangunan sehingga pengunjung lebih leluasa, nyaman, dan aman dalam beraktivitas berkeliling.
- Sementara untuk Koridor di kawasan pariwisata digunakan sebagai lintasan *jogging*, dan kegiatan sejenis lainnya.

❖ Ruang Terbuka Biru (RTB)

RTB tidak hanya sebagai penyimpan air, ruang terbuka biru (seperti kanal, danau, sungai, dll) juga memiliki fungsi sebagai tempat wisata, sarana transportasi air, dan fungsi lainnya.

- Badan air : Sungai Latuppa, Sungai Boting, Sungai Takkalala, Sungai Amassangan, Sungai Pikun, Sungai Salubattang, Sungai Batu, Sungai Songka Mati, Sungai Ponjalae, dan Sungai Andoli.
- Kanal Labombo di Kelurahan Salekoe dan Kanal Takkalala di Kelurahan Takkalala dalam kawasan reklamasi Salemo.

KAWASAN PERUNTUKAN RUANG KEGIATAN SEKTOR INFORMAL



Rencana pengembangan peruntukan ruang kegiatan sektor informal, meliputi :

1. Kawasan pelataran Lagota Pusat Niaga Palopo di Kelurahan Lagaligo;
2. Kawasan sekitar lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
3. Koridor jalan akses Pelabuhan – Lemo-Lemo di Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Salobulo.
4. Koridor Jalan Guttu Patalo dan Jalan Wecudai sekitar stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo
5. Kawasan terminal Tipe A Songka di Kelurahan Songka;
6. Kawasan terminal Tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko;
7. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Songka;
8. Kawasan park and ride kereta api di Kelurahan Songka;
9. Kawasan reklamasi Salemo;
10. Kawasan puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo;
11. Kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap;
12. Koridor jalan poros Latuppa di Kelurahan Latuppa;
13. Koridor jalan poros terminal tipe A Songka di Kelurahan Songka;
14. Koridor jalan poros Battang di Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat.

KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN

Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan:

- a. Rumah Sakit Umum Sawerigading kelas/tipe B dengan cakupan/skala pelayanan regional ditetapkan di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara;
- b. Rumah Sakit Umum At Medika di Kelurahan Tompotikka;
- c. Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Madyang di Kelurahan Salekoe;
- d. Rumah Sakit Tentara di Kelurahan Amassangan;
- e. Rumah Sakit Bintang Laut di Kelurahan Pattene;
- f. Rumah Sakit Mega Buana di Kelurahan Binturu;
- g. Rumah Sakit Mujaisyah di Kelurahan Balandai;
- h. Rencana pengembangan Rumah Sakit Jiwa Kalang-Kalang di Kelurahan To'bulung;
- i. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di kawasan Reklamasi Salemo;
- j. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Utara.
- k. Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar merata di setiap wilayah kecamatan, agar lebih mudah diakses oleh warga setempat.

KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PERIBADATAN

Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting Kecamatan Wara.

- a. Kawasan Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan.
- b. Sementara untuk pengembangan kawasan peruntukan peribadatan lainnya yang berskala lingkungan akan disesuaikan dengan kebutuhan umat masing-masing.

KAWASAN PERUNTUKAN PERTEMUAN, PAMERAN DAN SOSIAL BUDAYA



Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, pameran, dan sosial budaya meliputi :

- a. Kompleks Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;
- b. SaodenraE Convention Centre di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara;
- c. Rencana peruntukan perhotelan kelas berbintang di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Mungkajang;

- d. Pengembangan perhotelan kelas berbintang di kawasan reklamasi Salemo;
- e. Pengembangan Plasa Menara Payung (landmark Kota Palopo) di Kelurahan Batupasi;
- f. Gedung Kesenian di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- g. Gedung Pemuda di Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan;
- h. Gedung Merdeka Convention Hall di Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur; dan
- i. Gedung Rasdiana Convention Hall di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- j. Kawasan Perkemahan di Kelurahan Padang Lambe.

KAWASAN PERUNTUKAN OLAHRAGA



Kawasan Peruntukan Olah Raga :

- a. Kawasan olahraga terpadu Lagaligo di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- b. Kawasan Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- c. Rencana pengembangan lapangan sepakbola di setiap wilayah kecamatan;
- d. Rencana pengembangan lapangan bulutangkis dan sepak takraw di setiap wilayah kelurahan;
- e. Rencana pengembangan kawasan sirkuit Road Race seluas 8,0 Ha di Kelurahan Rampoang Kecamatan Wara Selatan;
- f. Rencana pengembangan kawasan lapangan Golf seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana.

KAWASAN PERUNTUKAN TRANSMIGRASI

Rencana pengembangan kawasan peruntukan Transmigrasi di wilayah Kota Palopo seluas 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

- a. Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara;
- b. Rumah jabatan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Wolter Mongsi Kecamatan Wara;

- c. Kantor Polisi Militer (PM) di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara Utara;
- d. Kawasan Lapangan Tembak di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
- e. Lapangan Kodim di Jalan Dr. Samratulangi Kecamatan Wara Utara;
- f. Lapangan Asrama TNI AD 721 Makassar di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- g. Kantor Polisi Resort Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- h. Zibang Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- i. Tepbek Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- j. Koramil di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Polsektersebar di masing-masing wilayah kecamatan.

KAWASAN HUTAN PRODUKSI



Kawasan Hutan Produksi terletak di Kelurahan alubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas 608 hektar (Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar)

KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

➤ Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang direncanakan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kota Palopo seluas 1.100 Ha, yang tersebar di beberapa sub wilayah, meliputi :

1. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:

a. Wilayah Kecamatan Telluwanua :

- 1) Di wilayah Kelurahan Jaya seluas 400 Ha;
- 2) Di wilayah Kelurahan Salubattang seluas 180 Ha;



- 3) Di wilayah Kelurahan Pentojangan seluas 150 Ha;
- 4) Di wilayah Kelurahan Sumarambu seluas 130 Ha;
- 5) Di wilayah Kelurahan Maroangin seluas 80 Ha.
- b. Wilayah Kecamatan Sendana :
 - Di wilayah Kelurahan Sendana seluas 80 Ha.
- c. Wilayah Kecamatan Wara Barat
 - Di wilayah Kelurahan Padang Lambe seluas 80 Ha.
2. Kawasan Sentra Pengolahan Hasil Pertanian masing-masing seluas 1,0 Ha di Kelurahan Songka dan Kelurahan Battang Barat.
 - **Kawasan Peruntukan Perkebunan**
Kawasan peruntukan perkebunan berupa kawasan perkebunan rakyat seluas 2.724 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Telluwanua.
 - **Kawasan peruntukan pertanian Holtikultura**
Kawasan peruntukan pertanian holtikultura seluas 2.083 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua.

KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN



- Kawasan peruntukan Peternakan di wilayah Kota Palopo meliputi :
- a. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha di Kelurahan Mancani, dan seluas 1,0 Ha di Kelurahan Maroangin;
 - b. Kawasan Rumah Tahanan Hewan seluas 2,0 Ha di Kelurahan Padang Lambe;
 - c. Kawasan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan ladang pembesaran kandang seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.
 - d. Kawasan pakan ternak seluas 1,0 Ha termasuk didalamnya gudang dan tempat mesin pakan di wilayah Kelurahan Padang Lambe;
 - e. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) seluas 1,5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;
 - f. Ternak unggas di dikembangkan di daerah pinggiran kota di wilayah Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Sendana;
 - g. Kawasan penggembalaan ternak sapi seluas 100 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
 - h. Kawasan Pusat Kesehatan Hewan seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Mancani.

-
- i. Kawasan Penampungan Ternak seluas 4 Ha Lewadang Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;

KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap, meliputi :

Perikanan tangkap berada di Perairan Teluk Bone dan didukung oleh ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PonjalaE/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

1. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas terletak di Blok Bone Utara.
2. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral terdiri atas :
 - a. Penambangan emas terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - b. Penambangan galena terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat;
 - c. Penambangan marmer terletak di Kelurahan Battang, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
 - d. Penambangan granit terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwana.
3. Potensi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan rakyat berupa pertambangan **Golongan Batuan** yang terdapat di wilayah :
 - a. Kecamatan Mungkajang;
 - b. Kecamatan Wara Selatan;
 - c. Kecamatan Wara Barat;
 - d. Kecamatan Sendana;
 - e. Kecamatan Telluwana;
 - f. Kecamatan Bara;
 - g. Kecamatan Wara Utara;
 - h. Kecamatan Wara.

Golongan Batuan ada 47 jenis, salah satunya adalah kerikil berpasir alami (Sirtu)

2.1.1.8 Demografi

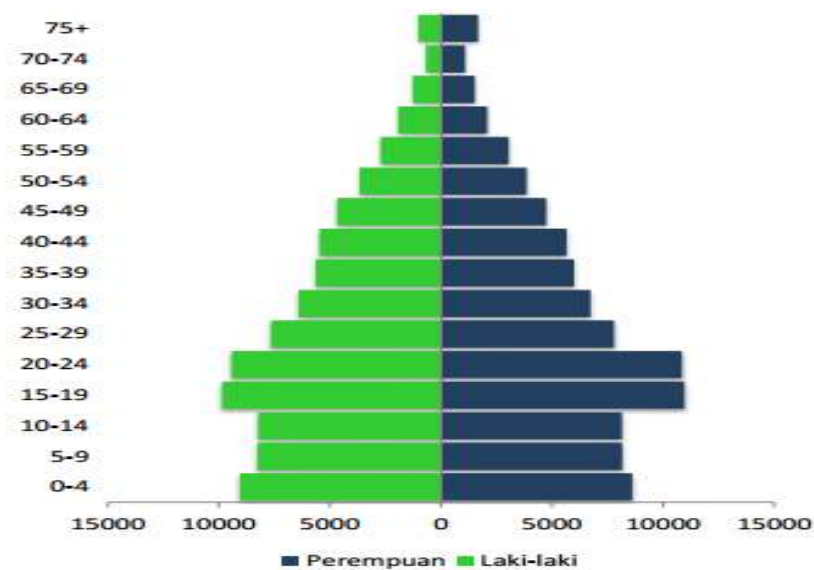
Penduduk Kota Palopo pada akhir 2019 tercatat sebanyak 184.614 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 89.917 jiwa laki-laki dan 94.697 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,27, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 93 - 94 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2,18 persen. Dengan luas wilayah 247,52 Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 746 jiwa per Kilometer persegi.

Tabel. 2.4
Penduduk Kota Palopo Tahun 2015- 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah	Jiwa	168,894	172,916	176.907	180.678	184.614
2	Laki-Laki	Jiwa	82,301	84,192	85.967	87.812	89.917
3	Perempuan	Jiwa	86,593	88,724	90.94	92.866	94.697
4	Pertumbuhan	%	2.42	2.62	2,97	2,13	2,18
5	Densitas	Jiwa/Km2	682	698	715	730	746
6	Sex Ratio	%	95.04	94.89	94,53	94,56	94,27

Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2019

Grafik. 2.1
Piramida Penduduk Kota Palopo Tahun 2019



Sumber Data : Kota Palopo Dalam Angka 2020

Dari piramida penduduk di atas dapat terlihat bahwa dari 184.614 jiwa penduduk tercatat sekitar 28,33 persen berada pada usia muda (0-14 tahun) dan 4,19 persen pada kelompok usia tua (65 tahun keatas), selebihnya sekitar 67,48 persen yang berada pada kelompok usia produktif (usia 15 – 64 tahun) atau dengan kata lain beban tanggungan (*Dependency Ratio*) Kota Palopo Tahun 2019 sebesar 48,19 persen, yang berarti dari 100 penduduk usia produktif Kota Palopo akan menanggung secara ekonomi sebesar 48,19 persen penduduk usia tidak produktif.

2.1.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam konteks ini kondisi eksisting suatu

wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut.

Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konteks ini daya tampung lingkungan dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat dari suatu kegiatan, oleh karena itu dibutuhkan baku mutu lingkungan hidup untuk menilai status pencemaran lingkungan tersebut.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah karena dengan diketahuinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka diketahui cadangan sumber daya wilayah serta kemampuan fisik wilayah dalam mendukung kebijakan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan di dalamnya. Ketika daya dukung dan daya tampung wilayah sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Daya Dukung Lahan

Meskipun Kota Palopo dari aspek kegiatan merupakan kawasan perkotaan, namun pola penggunaan lahan saat ini (existing condition, 2017) masih didominasi oleh kegiatan non budidaya perkotaan. Data yang ada hasil overlay antara peta Rupa Bumi Indonesia yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial dengan peta hasil survey lapangan oleh Tim Revisi RTRW Kota Palopo, menunjukkan bahwa jenis tutupan lahan yang dominan adalah hutan yakni seluas 15.075,63 Ha atau sebesar 58,39%, disusul masing-masing semak belukar seluas 4.660,21 Ha atau sebesar 18,05%, tegalan/ladang seluas 1.674,58 Ha atau sebesar 6,49%, sawah seluas 1.753,66 Ha atau sebesar 6,79%, tambak seluas 1.258,68 Ha atau sebesar 4,87%. Selengkapnya mengenai kondisi tutupan lahan wilayah Kota Palopo seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pola Tutupan Lahan Wilayah Kota Palopo Tahun 2018

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	15.075,63	58,39
2	Permukiman	1.238,85	4,79
3	Sawah	2.689,00	10,42
4	Tambak	1.258,68	4,88
5	Padang Rumput	2,78	0,01
6	Kebun/Tegalan	1.711,77	6,63

7	Semak Belukar	3.724,87	14,43
8	Sungai	102,88	0,39
9	Rawa	1,22	0,01
10	Tanah Kosong	12,32	0,05
Jumlah		25.817,00	100

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

Berdasarkan data komposisi dan distribusi penggunaan lahan di Kota Palopo dimana luas kawasan hutan masih yang mendominasi wilayah Kota Palopo yaitu seluas 15.075,63Ha atau sebesar 58,39% yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 8.666Ha (33,57%), kawasan konservasi seluas 891 Ha (3,45%), kawasan hutan produksi terbatas seluas 608 Ha (2,35%), serta areal penggunaan lainnya seluas 4.910,63 Ha atau sebesar 19,02%.

Untuk penggunaan untuk permukiman luasannya relatif masih kecil yakni baru seluas 1.238,85 Ha atau sebesar 4,79%, untuk kegiatan pertanian berupa sawah seluas 1.753,66 Ha (6,80%), dan yang cukup luas jenis tutupan lahannya adalah semak belukar seluas 4.660,21 Ha atau sebesar 18,05%.

Dari komposisi tutupan lahan saat ini (existing condition, 2017) pada wilayah Kota Palopo, terlihat bahwa potensi ketersediaan lahan untuk memadai permukiman penduduk, maupun sarana dan prasarana kota masih sangat memadai. Potensi ketersediaan lahan yang cukup luas yang saat ini cenderung menjadi kawasan alternatif pengembangan fisik Kota Palopo mencakup wilayah Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Telluwanua. Sementara untuk lahan-lahan pada wilayah Kecamatan Wara saat ini harganya relatif tinggi di banding dengan di wilayah lainnya, sehingga lebih sesuai jika diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti untuk bangunan fasilitas jasa komersial, perdagangan, dan perkantoran swasta. Sedangkan lahan-lahan di wilayah pesisir Teluk Bone yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, Wara Utara, dan Wara Selatan memerlukan teknologi atau perlakuan khusus seperti penimbunan untuk mematangkan lahan-lahan tersebut, sehingga akhirnya menjadi relatif mahal.

Secara umum, potensi sumber daya lahan wilayah Kota Palopo masih sangat besar untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan. Lahan-lahan yang dapat dialihfungsikan menjadi peruntukan untuk budidaya perkotaan terdiri dari: padang rumput, kebun/tegalan, semak belukar, rawa, sawah tadah hujan, dan tambak kurang produktif. Dengan demikian, masih ada seluas **8.512,88 Ha atau sebesar 32,97% potensial sebagai alternatif pengembangan fisik Kota Palopo.**

Sementara itu, data BPDAS Jeneberang-Saddang pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas lahan di Kota Palopo yang dalam kondisi agak kritis seluas 15.901,28 Ha, areal khusus seluas 44,50 Ha, lahan kritis seluas 2.748,02 Ha, yang berpotensi menjadi lahan kritis seluas 3.161,78 Ha, lahan yang sangat kritis seluas 706,75 Ha, serta lahan yang tidak kritis seluas 2.851,32 Ha. Lahan kritis adalah lahan yang sangat tandus dan gundul dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan ini masih dapat dikelola walaupun produktivitasnya rendah.

Tabel 2.6
Luas Lahan Kritis Kota Palopo 2017 (Ha)

No	Agak Kritis	Areal Khusus	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	Total
1	15.901,28	44,5	2.748,02	3161,78	706,75	2.851,32	25.413,65

Sumber: BPDAS Jeneberang-Saddang (2017)

Terkait dengan lahan hutan, luas hutan di Kota Palopo pada tahun 2016 adalah 9.931,91 Ha. Keadaan seperti itu menurut jenisnya adalah 8.309,28 Ha sebagai hutan lindung, 970,44 Ha sebagai hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hutan Produksi Terbatas seluas 634,19 Ha dan hutan Kota seluas 18 Ha. Produksi kayu hutan pada tahun 2015 berdasarkan jenis produksi di Kota Palopo sebanyak 376,74 m3 yang terdiri dari kayu bulat sebanyak 109 m3 dan kayu gergajian sebanyak 267,74 m3. Produksi kayu hutan pada tahun 2014 berdasarkan jenis produksi sebanyak 315,22 m3 yang terdiri dari kayu bulat sebanyak 157,60 m3 dan kayu gergajian sebanyak 157,62 m3. Produksi kayu hutan pada tahun 2013 berdasarkan jenis produksi sebanyak 755,03 m3 kayu bulat.

Beberapa penyebab kerusakan hutan diakibatkan oleh kebakaran hutan, perambahan hutan, ladang berpindah dan penebangan liar. Kerusakan hutan di Kota Palopo akibat perambahan hutan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa penyebab kerusakan hutan yang terjadi di Kota Palopo disebabkan oleh perambahan hutan. Diperkirakan luas kerusakan hutan akibat perambahan sebesar 1.130 Ha.

Tabel 2.7
Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya, 2016

No	Penyebab Kerusakan	Luas (Ha)
1	Kebakaran hutan	-
2	Ladang berpindah	-
3	Penebangan liar	-
4	Perambahan hutan	1.130
5	Lainnya	-
Total		1.130

Sumber: Dinas Kehutanan & Perkebunan Kota Palopo, 2016

Daya Dukung Permukiman

Semakin berkembangnya Kota Palopo menjadi wilayah perkotaan yang memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap di bidang pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja menjadikan Kota ini sebagai tujuan daerah sekitarnya untuk bekerja maupun menuntut ilmu. Hal ini menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan meningkatnya permintaan bangunan tempat tinggal.

Kondisi permukiman di Kota Palopo digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- Permukiman Kepadatan Tinggi seluas lebih kurang 1.024 hektar berada pada Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur
- Permukiman Kepadatan Sedang seluas lebih kurang 680 hektar berada pada Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara
- Permukiman Kepadatan Rendah seluas lebih kurang 1.794 hektar berada pada Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Telluwanua.

Tabel 2.8
Angka Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo 2018

Nomor	Kecamatan	Kekurangan Rumah (backlog)
1	Wara Selatan	205
2	Sendana	537
3	Wara	1.012
4	Wara Timur	889
5	Mungkajang	167
6	Wara Utara	554
7	Bara	961
8	Telluwanua	1.103
9	Wara Barat	205
Total		5.633

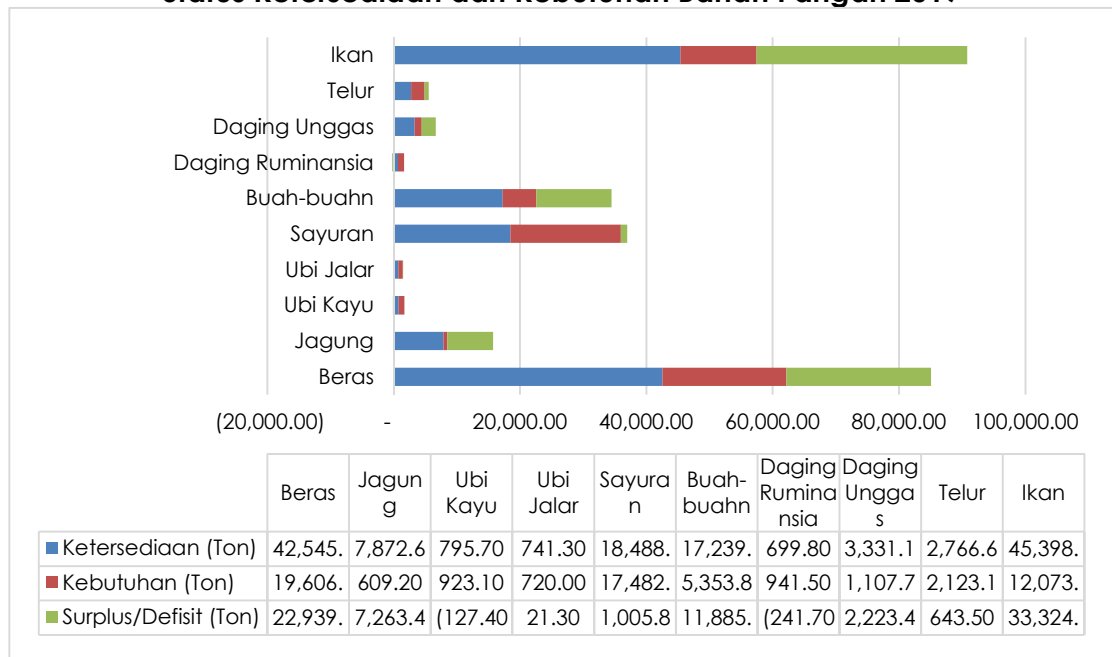
Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan rumah sebanyak 5.633 unit di Kota Palopo. Kecamatan dengan kebutuhan rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Telluwanua (1.103 unit) dan Kecamatan Wara (1.012 unit). Sedangkan kecamatan dengan kebutuhan rumah terendah ada di Wara Barat dan Wara Selatan masing-masing 205 unit. Dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal, yang berstatus milik sendiri persentasenya sebesar 74,02 persen, sedangkan yang berstatus kontrak/sewa dan lainnya sebesar 25,98 persen.

Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan

Indikator umum yang digunakan dalam melihat kondisi pangan dalam suatu wilayah biasanya merujuk pada ketentuan FAO yang mensyaratkan ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kapita/hari dan protein 54 gram/kapita/hari. Jika merujuk pada standar ini, maka Palopo masih berada di bawah ketentuan FAO dalam hal ketersediaan energi, yakni masih berada pada angka 2.130,1 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan proteinnya, Palopo sudah melampaui karena sudah berada pada posisi 68,9 gram/kapita/hari (2016).

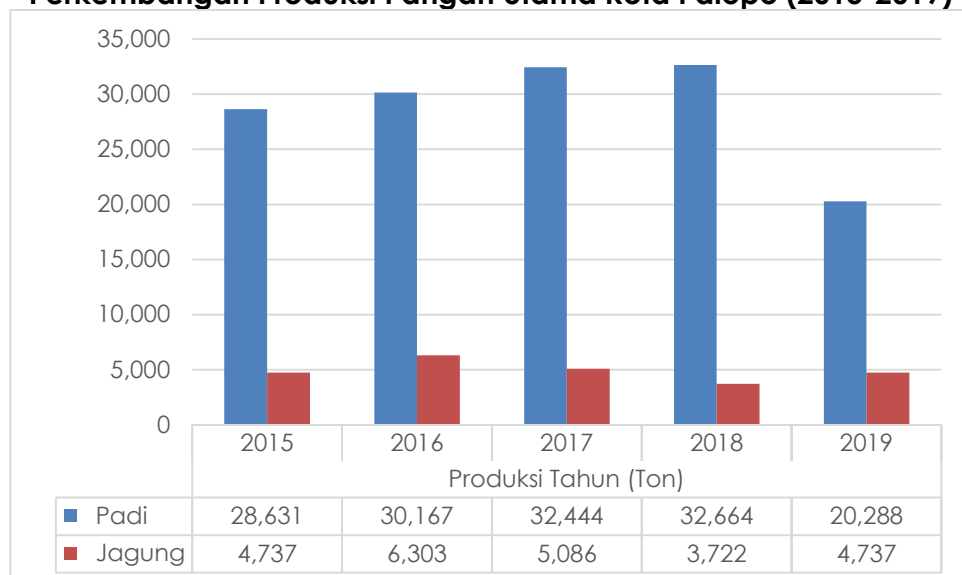
Grafik 2.2
Status Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan 2019



Sumber : Palopo Dalam Angka 2020

Perkembangan produksi pangan nabati dan pangan hewani di Kota Palopo menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tahun 2015, produksi padi Kota Palopo pada angka 28.631 Ton, 2016 30,167 ton, tahun 2017 32,444 ton, tahun 2018 32,664 ton dan tahun 2019 menurun dan berada pada angka 20,288 ton.

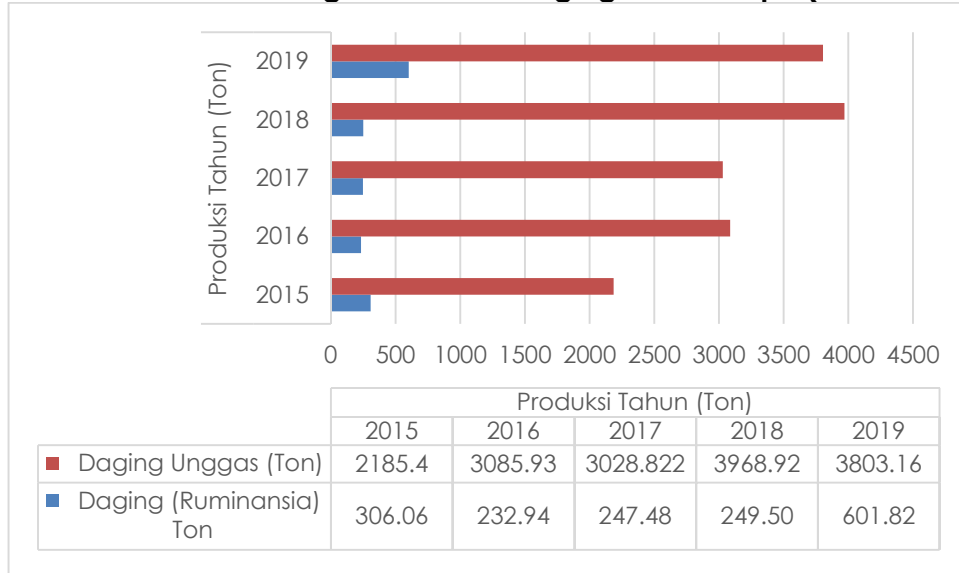
Grafik 2.3
Perkembangan Produksi Pangan Utama Kota Palopo (2015-2019)



Sumber : Palopo Dalam Angka

Sementara itu, perkembangan produksi pangan hewani (daging) 2015-2019 disajikan dalam gambar berikut :

Grafik 2.4
Perkembangan Produksi Daging Kota Palopo (2015-2019)



Sumber : Palopo Dalam Angka

Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Air Bersih

Sampai tahun 2019, jumlah pelanggan air minum PDAM di Kota Palopo sebanyak 35.622 sambungan, jumlah ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2015 yang berada pada angka 28.627 sambungan.

Diprediksi hingga tahun 2032, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk beserta aktifitasnya (± 313.766 jiwa), maka akan membutuhkan air minum minimum sebanyak 28.238 m³/hari atau dengan kapasitas produksi sebesar 327 lt/dtk untuk kebutuhan domestik (rumah tangga).

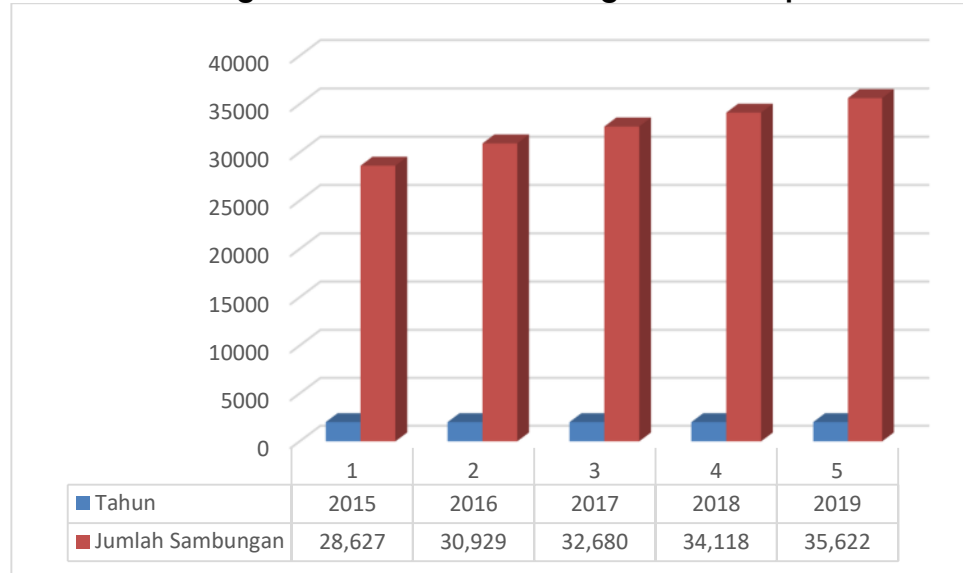
Tabel 2.9
Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo Tahun 2032

No	Jenis Penggunaan	Jumlah Kebutuhan	
		M ³ /Hari	Lt/Dt
1	Rumah Tangga	28.238	326,83
2	Perdagangan dan	304	3,52
3	Jasa	2.824	32,68
4	Pendidikan	288	3,33
5	Kesehatan	565	6,54
6	Peribadatan	2.824	32,68
7	Perkantoran	2.824	32,68
	Kepentingan Umum		
Jumlah		37.867	438,26

Sumber: Revisi RTRW Palopo, 2017

Layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo relatif semakin baik. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo (dahulu bernama PDAM Kota Palopo).

Grafik 2.5
Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo 2015-2019



Sumber : Palopo Dalam Angka 2020

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga diuraikan sebagai berikut :

2.1.2.1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019 (6.75), sedikit melambat dibandingkan tahun 2018 (7.52) dan belum memenuhi target 2019 (7.14). Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019, masih berada diatas nasional (5.02), Kota Pare-Pare (6.65), Kabupaten Luwu (6.26), namun belum lebih baik daripada Luwu Utara (7.11), Makassar (8.79), Sulsel (6.92).

Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2015– 2019

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	4.1402,36	6,45
2016	4.4284,97	6,98
2017	4.745,90	7,17
2018(*)	5.102,99	7,52
2019 (**)	5.447,36	6,75

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 7,94 triliun rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.11
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,014,56	1,050,70	1.155,96	1.232,24	1.301,47
2	Pertambangan & Penggalan	10,05	10,94	11,56	12,16	12,39
3	Industri Pengolahan	158,17	171,81	184,74	197,01	216,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,02	4,50	5,35	5,81	6,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,67	10,22	11,25	12,50	13,55
6	Konstruksi	826,60	933,70	1.050,45	1.194,98	1.330,13
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1172,71	1331,98	1.510,15	1.723,39	1.938,86
8	Transportasi dan Pergudangan	334,01	365,47	389,04	432,45	475,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63,28	71,80	78,80	85,98	93,72
10	Informasi dan Komunikasi	198,87	227,53	261,93	301,91	335,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	434,40	509,96	535,11	566,53	579,66
12	Real Estat	273,08	297,14	329,89	358,34	384,06
13	Jasa Perusahaan	4,94	5,34	5,92	6,72	7,52
14	Administrasi Pemerintahan,	431,10	443,01	479,89	580,05	616,97

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
15	Jasa Pendidikan	230,54	245,50	270,34	309,44	342,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,64	135,14	153,71	171,40	184,63
17	Jasa Lainnya	65,63	71,78	80,86	94,22	103,82
	PDRB ADHB	5351,28	5886,52	6.514,94	7.285,14	7.942,48

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (adhk) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.12
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	755,64	759,03	803,17	830,61	871,74
2	Pertambangan & Penggalian	5,94	6,27	6,54	6,71	6,82
3	Industri Pengolahan	115,28	121,15	125,48	129,18	139,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	5,00	5,37	5,67	5,89
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,34	12,80	13,65	14,75	15,42
6	Konstruksi	609,16	654,71	696,64	734,33	779,14
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	968,89	1073,95	1.183,42	1.291,73	1.421,61
8	Transportasi dan Pergudangan	225,17	242,11	259,99	286,15	312,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,88	51,93	55,75	59,80	64,55
10	Informasi dan Komunikasi	217,52	239,82	267,54	303,02	335,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	326,92	375,79	376,91	383,21	382,09
12	Real Estat	193,93	207,07	222,55	233,02	246,38
13	Jasa Perusahaan	3,73	3,91	4,22	4,61	5,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	301,30	299,24	315,27	368,09	380,14
15	Jasa Pendidikan	197,01	207,14	224,20	247,46	262,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,72	113,66	124,96	137,06	145,79
17	Jasa Lainnya	51,87	54,92	60,24	67,61	73,88
	PDRB ADHK	4140,87	4428,50	4.745,90	5.102,99	5.447,36

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah memberikan kontribusi sebesar 1,57 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi Kota Palopo terhadap provinsi, hanya berkisar antara 1,56 – 1,58 % sepanjang waktu 2015-2019.

Tabel 2.13
Kontribusi PDRB Kota Palopo Terhadap PDRB Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen)

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan (Miliar Rp)	PDRB Kota Palopo (Miliar Rp)	% Kota Palopo thd Sulawesi Selatan
2015	340.390,12	5.351,28	1,57
2016	377.108,91	5.886,52	1,56
2017	415.588,20	6.514,94	1,57
2018(*)	461.719,49	7.285,14	1,58
2019(**)	504.746,87	7.942,48	1,57

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Pada tahun 2019 struktur perekonomian Palopo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2)Kontruksi; dan 3)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palopo.

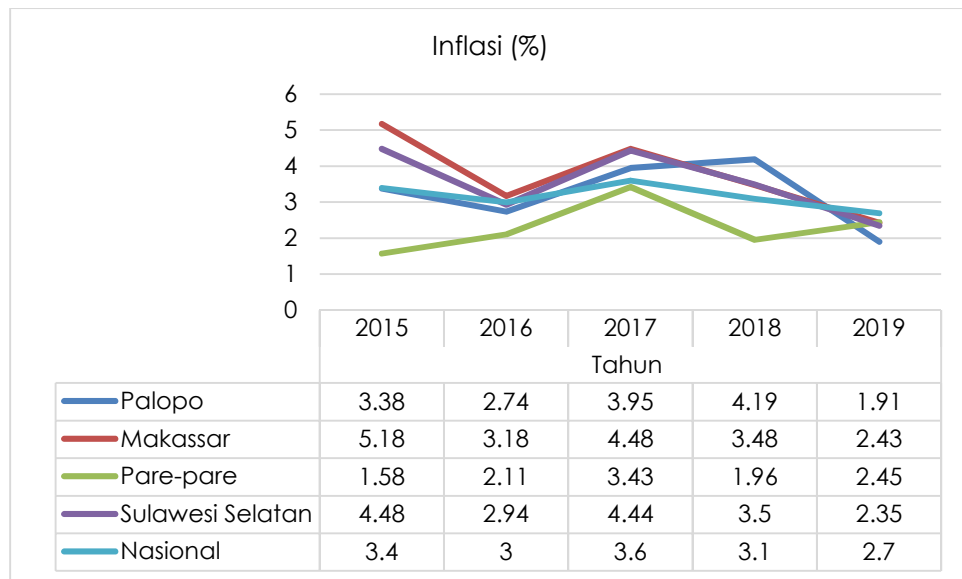
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palopo pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 24,41 persen (angka ini meningkat dari 23,66 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,75 persen, kemudian disusul oleh Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,39 persen.

2.1.2.1.2. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu.



Grafik 2.6 Inflasi Kota Palopo 2015-2019



Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Inflasi di Kota Palopo selama tahun 2019 sebesar 1,91 persen menurun sebesar 2,28 persen dibanding inflasi tahun 2018 yang berada pada angka 4,19. Kota Palopo meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat Kabupaten/Kota untuk Wilayah Sulawesi tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Inflasi Tahun 2015 Kota Palopo pada angka 3,38%, 2016 pada angka 2,47 %.

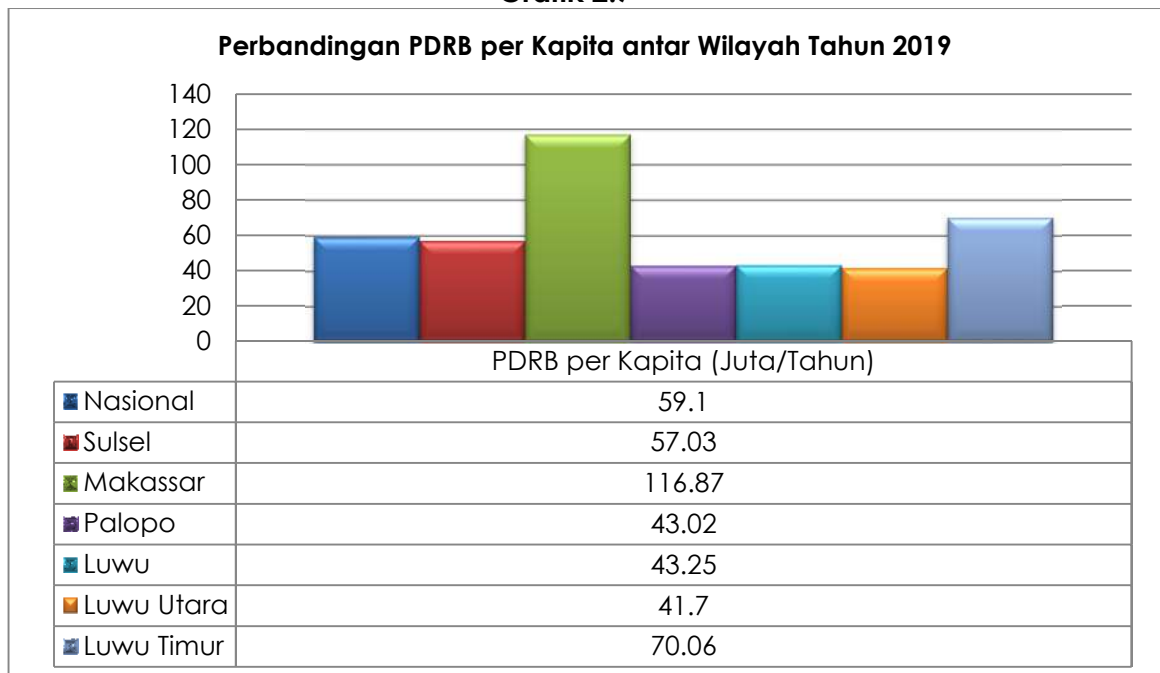
2.1.2.1.3. PDRB Perkapita

Angka PDRB per Kapita Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun. Ini lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.32 Juta/Tahun. Bahkan juga melampaui target daerah 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023, yang berada pada angka 37.8 Juta/Tahun. Angka PDRB per Kapita Kota Palopo 2019 lebih tinggi/meningkat sebanyak 2.7 Juta/Tahun, dibandingkan tahun 2018.

Jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, PDRB per Kapita Kota Palopo 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun). Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun).

Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.

Grafik 2.7



Meningkatnya produksi dan produktifitas di Kota Palopo juga ditandai dengan meningkatnya angka PDRB (baik Konstan maupun harga berlaku). Perbandingan PDRB (Milyar) Kota Palopo :

Tabel 2.14
Perbandingan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku
Tahun 2015 – 2019

Tahun	PDRB	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	5351,28	4140,87
2016	5886,52	4428,50
2017	6.514,94	4.745,90
2018(*)	7.285,14	5.102,99
2019(**)	7.942,48	5.447,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota palopo 2020

Hingga tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 7,94 triliun rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi yang diberikan Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,57

persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terlihat pada tabel 2.13.

PDRB per Kapita dipengaruhi dua faktor kunci yakni, **Jumlah atau Nilai PDRB** (Harga Berlaku maupun Konstan) dan **Jumlah Penduduk**. Kedua factor ini menjadi focus perhatian pemerintah Kota Palopo dalam mengakselerasi peningkatan PDRB per Kapita.

2.1.2.1.4. Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kondisi gini rasio (GR) Kota Palopo 2019 0.338 (kategori sedang) dan belum memenuhi target daerah 2019 yang berada pada angka 0.320. Meski demikian capaian 2019 ini masih lebih baik dari GR rata-rata Sulsel 2019 0.389 point, Kota Makassar (0.390) dan Kota Pare-Pare (0.350) dan nasional 2019 (0.382 per Maret).

Gini rasio Kota Palopo tahun 2015 (0.43) masih berada di atas gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional 0,41. Tahun 2016, gini rasio Palopo (0.37) berada dibawah gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional pada angka 0,4. Kemudian pada tahun 2017, juga berada dibawah gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,42 dan nasional pada angka 0,39.

Nilai Indeks Gini di Kota Palopo menunjukkan tren yang relatif menurun dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Palopo berada pada nilai 0,341, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 0,338 dan di tahun 2019 Indeks Gini Kota Palopo stagnan berada di nilai 0,338. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo selama tahun 2017-2019 mengalami tren menurun, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat di Kota Palopo.

Tabel 2.15
Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah
di Sulsel 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Luwu	0.361	0.359	0.395	0.362	0.352
Tana Toraja	0.366	0.314	0.318	0.369	0.362
Luwu Utara	0.369	0.410	0.358	0.361	0.364
Luwu Timur	0.467	0.434	0.411	0.398	0.387
Toraja Utara	0.380	0.374	0.411	0.411	0.384
Makassar	0.395	0.397	0.396	0.383	0.390
Parepare	0.423	0.386	0.384	0.382	0.350
Palopo	0.434	0.374	0.341	0.338	0.338
Sulawesi Selatan	0.424	0.426	0.407	0.397	0.389
Nasional (Maret)	0.410	0.394	0.393	0.389	0.382

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

2.1.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 7.82 %. Kondisi ini lebih baik dari kondisi tahun 2018 dimana persentase penduduk miskin masih mencapai angka 7.94%. Artinya pemerintah kota Palopo mampu menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0.12%.

Capaian ini juga **melebihi atau berada diatas** target persentase penduduk miskin 2019 Kota Palopo, yang berada pada angka 8.1%. Bila dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD, sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo baru mampu mewujudkan 77.75% target RPJMD, untuk indicator persentase penduduk miskin.

Jika dibandingkan sejak tahun 2013, persentase penduduk miskin Kota Palopo telah jauh menurun. Tahun 2013, persentase penduduk miskin sebesar 9.57% menjadi 7.82% di tahun 2019. Meski dalam prosesnya, angka penurunan ini fluktuatif. Tahun 2014 pada angka 8.8%, 2015 pada angka 8.58%, 2016 pada angka 8.74%, 2017 pada angka 8.78%, 2018 pada angka 7.94%.

Dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, Persentase Penduduk Miskin 2019 Kota Palopo **masih lebih baik** daripada Kabupaten Luwu Utara (13.6%) dan Kabupaten Luwu (12.78%). Bahkan lebih

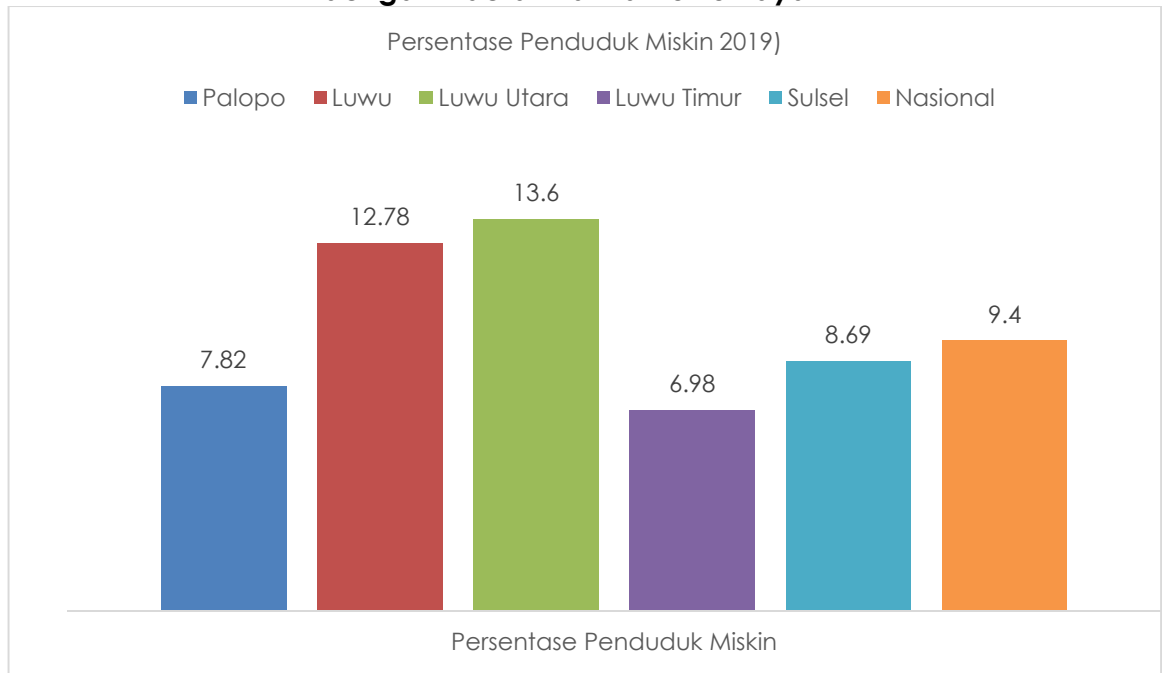


baik dari rata-rata persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan 2019 (8.69%) dan nasional (9.4%).

Meski demikian, capaian Pemerintah Kota Palopo ini masih dibawah capaian persentase penduduk miskin Kota Pare-Pare 2019 (5.26%), Kota Makassar (4.28%), bahkan kabupaten luwu timur yang 2019 hanya memiliki 6.98% penduduk miskin.

Namun dari sisi **jumlah**, Kota Palopo adalah wilayah di Luwu Raya dengan Jumlah Penduduk Miskin **paling sedikit**. Tahun Kota Palopo hanya memiliki penduduk miskin sebanyak 14.370 jiwa. Sementara Kabupaten Luwu (46.180 Jiwa), Luwu Utara (42.480 Jiwa), Luwu Timur (20.830 Jiwa). Bahkan dengan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk miskin jauh diatas Kota Palopo, yakni sebanyak 65.120 Jiwa. Di Sulawesi Selatan, hanya Kota Pare-Pare yang memiliki penduduk miskin paling kecil (7620 Jiwa) disusul Kota Palopo (14.370 Jiwa).

Grafik 2.8
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo 2019 Dibandingkan dengan Daerah Lain di Luwu Raya



Tabel 2.16
Kondisi dan Perbandingan Kemiskinan Kota Palopo 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Kota Palopo					Capaian Kinerja Sulsel					Capaian Kinerja Nasional				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.58	8.74	8.78	7.94	7.82	10.12	9.24	9.48	8.87	8.69	11.13	10.7	10.12	9.66	9.41
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14510	15020	15,440	14,270	14,370	864,510	796,810	825,970	779,640	767,800	28.51 Juta	27.76 Juta	27.77 Juta	25.95 Juta	24.79 Juta
3	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	246,727	261,056	274,319	292,602	324,233	264,332	277,049	295,306	316,988	341,555	344,706	361,267	385,953	408,962	440.538
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.76	1.17	1.75	1.14	1.15	1.53	1.53	1.92	1.68	1.63	1.84	1.74	1.79	1.63	1.5
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.52	0.28	0.6	0.26	0.29	-	0.38	0.5	0.51	0.43	0.51	0.44	0.46	0.41	0.36

Sumber : dari berbagai sumber resmi BPS

2.1.2.1.6 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah data PAD Kota Palopo :

Tabel 2.17
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palopo
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Pagu	Realisasi 2019	Tingkat Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	1,005,856,119,898.00	984,501,217,290.51	97.88%
Pendapatan Asli Daerah	169,497,862,831.00	165,664,354,780.08	97.74%
Hasil Pajak Daerah	34,725,000,000.00	34,860,944,165.02	100.39%
Hasil Retribusi Daerah	17,990,922,024.00	9,074,168,785.55	50.44%
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	7,496,923,396.00	7,496,932,396.00	100.00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109,285,017,411.00	114,232,309,433.51	104.53%
Dana Perimbangan	741,592,073,052.00	726,842,067,622.00	98.01%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,754,808,000.00	13,109,805,665.00	69.90%
Dana Alokasi Umum	537,722,702,000.00	537,722,702,000.00	100.00%
Dana Alokasi Khusus	185,114,563,052.00	176,009,559,957.00	95.08%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	94,766,184,015.00	91,994,794,888.43	97.08%
Pendapatan Hibah	19,177,800,000.00	20,450,520,150.00	106.64%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54,438,856,815.00	50,159,951,545.43	92.14%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13,007,644,000.00	13,007,644,000.00	100.00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8,141,883,200.00	8,141,883,200.00	100.00%
Pendapatan Lain-lain	-	234,795,993.00	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Palopo Tahun 2019, Audited

2.1.2.1.7. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemerintah Kota Palopo selama 3 tahun berturut-turut sejak Tahun 2015 hingga 2019 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

2.1.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo 2019 (77.98), selain melampaui target 2019 (77.86), capaiannya juga lebih baik dari tahun 2018 (77.30). Dari 23 Kabupaten Kota di Sulsel, IPM Kota Palopo menempati peringkat kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar (82.25). Pertumbuhan IPM 2019 Kota Palopo (0.88), juga lebih baik dari tahun 2018 (0.77).

Tabel 2.18
Perkembangan dan Perbandingan IPM Kota Palopo
dengan Wilayah Lain Tahun 2015-2019

Indikator IPM	Capaian Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Palopo	76.27	76.45	76.71	77.30	77.98
Pare-Pare	76.31	76.48	76.68	77.19	77.62
Makassar	79.94	80.53	81.13	81.73	82.25
Sulsel	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66
Nasional	69.6	70.2	70.8	71.4	71.9

Sumber : Badan Pusat Statistik

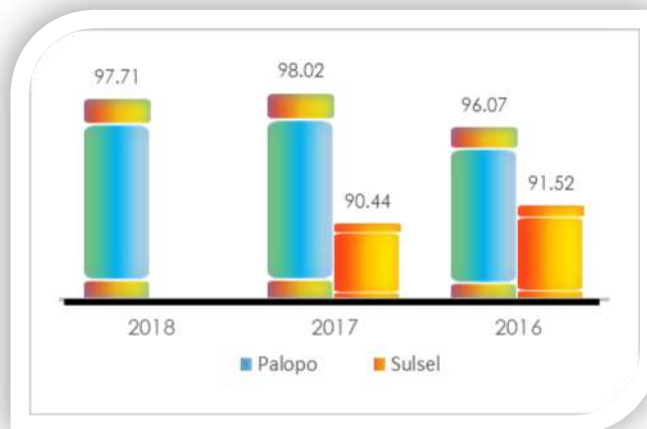
Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo tahun 2019 berada pada angka 77.98 point, atau **melebihi target daerah 2019** yang berada pada angka 77.56 point. Jika dibandingkan dengan tingkat sulsel dan nasional, IPM Kota Palopo **lebih baik dan berada diatas** IPM Provinsi yang berada pada angka 71,66 dan Nasional yang berada pada angka 71.9.

Meski demikian dari aspek persentase tingkat pertumbuhan, IPM Kota Palopo yang tumbuh sebesar 0.77%, ini **masih berada di bawah** angka persentase pertumbuhan IPM secara nasional pada tahun 2018 yang menyentuh angka 0.82% dan angka persentase pertumbuhan IPM Sulsel 2017 yang berada pada angka 0.82%.

Nilai IPM Kota Palopo sejak pada tahun 2017 dan 2018 serta 2019 ini berhasil menggeser Kota Pare-Pare sebagai daerah ber IPM tertinggi kedua di Sulawesi Selatan dan menempatkan Palopo sebagai kota dengan IPM tertinggi setelah Kota Makassar. Pada tahun sebelumnya Palopo selalu berada di bawah nilai capaian IPM Kota Pare-Pare. Nilai IPM Kota Palopo Tahun 2015 dan 2016 masing-masing berada pada angka 76.27 dan 76.45

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Grafik 2.9
Perbandingan Capaian AMH Kota Palopo dengan Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 - 2018



Tabel 2.19
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palopo
2015-2019

Indikator IPM	Capaian Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Palopo	98.22	96.07	98.02	97.71	98.4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Melek Huruf Kota Palopo pada tahun 2019 di Kota Palopo berada pada angka 98.40 % yang menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk Kota Palopo yang berumur 15 tahun keatas, terdapat 98 orang yang sudah mampu membaca dan menulis. Capaian ini lebih baik dari tahun lalu yang berada pada angka 97.71%

Angka melek huruf Kota Palopo tahun 2018 ini **lebih baik**, dimana pada tahun 2017, angka melek huruf sulsel berada pada angka 90.44%. Di tahun yang sama, angka melek huruf Kota Palopo 2017 juga **lebih baik** dari rata-rata angka melek huruf Sulsel.

2.1.2.2.3 Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah (RLS) 2019 Kota Palopo pada posisi 10.75 Tahun, berada di atas atau melebihi target 2019 Kota Palopo (10.36 Thn). Capaian ini juga lebih baik dibandingkan tahun 2018 (10.51 Tahun). Jauh melebihi RLS Sulsel 8.26 Tahun dan Nasional 8.34 Tahun.

Tabel 2.20
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah 2015-2019

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Capaian Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Palopo	10.25	10.26	10.33	10.51	10.75
Pare-Pare	10.01	10.02	10.09	10.29	10.30
Makassar	10.77	11.07	11.08	11.09	11.20
Sulsel	7.64	7.75	7.95	8.02	8.26
Nasional	7.84	7.95	8.10	8.17	8.34

Sumber : Palopo Dalam Angka 2020

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Palopo tahun 2019 berada pada posisi 10.75 Tahun, lebih baik daripada angka tahun 2018 yang berada pada angka 10.51 Tahun. Meski demikian, capaian angka rata-rata lama sekolah Kota Palopo ini jauh diatas angka RLS Nasional pada tahun 2019 yang berada pada angka 8.34 Tahun dan RLS Sulawesi Selatan 2019 yang berada pada angka 8.26 Tahun.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka **Harapan Lama Sekolah (HLS)** didefinisikan sebagai lamanya **sekolah** (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut adalah Harapan Lama sekolah Kota Palopo Tahun 2015-2019 :

Tabel 2.21
Perbandingan Harapan Lama Sekolah 2015-2019

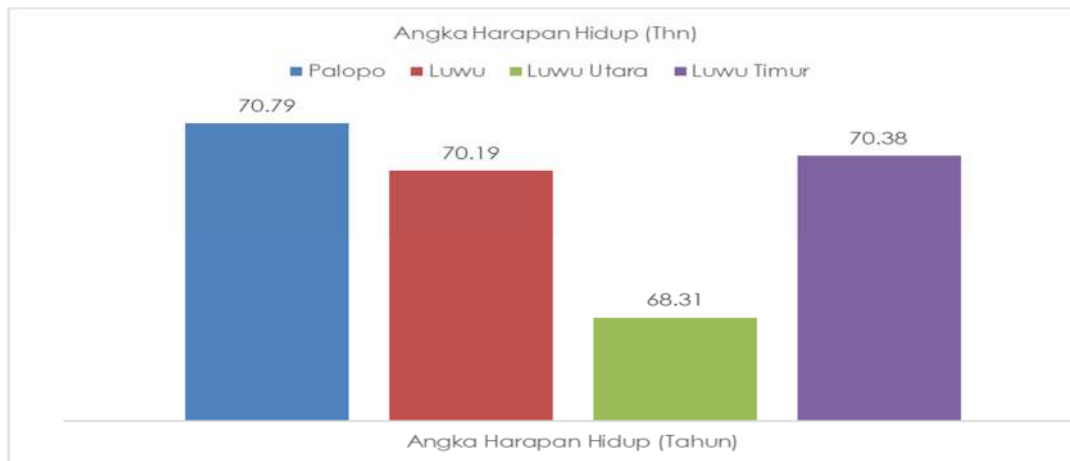
Indikator Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Capaian Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Palopo	15.02	15.03	15.05	15.06	15.07
Pare-Pare	14.44	14.45	14.46	14.47	14.49
Makassar	14.76	14.80	15.18	15.55	15.56
Sulsel	12.99	13.16	13.28	13.34	13.36
Nasional	12.55	12.72	12.85	12.91	12.95

Sumber : Palopo Dalam Angka 2020

Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Palopo Tahun 2019 masih berada dibawah target HLS Kota Palopo yang berada pada angka 15.11 Tahun. Capaian HLS Tahun 2019 Kota Palopo masih berada dibawah HLS Kota Makassar (15.56 Tahun), tapi lebih baik dari HLS Sulsel (13.36 Tahun) dan Nasional (12.95 Tahun).

2.1.2.2.4 Angka Harapan Hidup

Grafik 2.10
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Palopo dengan Wilayah Lain Tahun 2019



Angka atau umur harapan hidup (AHH) di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 70.79 Tahun. Ini lebih baik dari angka harapan hidup tahun 2018 yang berada pada angka 70.32 Tahun atau menguat 0.30 Point. Capaian ini juga **melebihi target 2019** Kota Palopo yang berada pada angka 70.32 Tahun. Bahkan telah melampaui target akhir AHH di RPJMD Kota Palopo pada tahun 2023.

AHH Kota Palopo Tahun 2013 hanya berada pada angka 70.10, kemudian naik menjadi 70.12 (2014), 70.20 di 2015, setahun kemudian menjadi 70.25 (2016), 70.30 pada tahun (2017). Akselerasi atau lompatan tertinggi AHH Kota Palopo terjadi pada tahun 2018 dimana mampu mencapai 70.49 atau meningkat 0.19 point dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, trend peningkatan AHH Kota Palopo hanya meningkat antara 0.02 - 0.08 point.

Jika dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, AHH 2019 Kota Palopo menempati posisi ke enam, dibawah Kabupaten Toraja Utara (73.35), Tana Toraja (73.15), Kota Makassar (72), Kota Pare-Pare (71.18), Kabupaten Enrekang (70.83). AHH Kota Palopo 2019, juga masih berada diatas rata-rata AHH Sulsel 2019 (70.43 Tahun), dan rata-rata AHH nasional 2019 (71.34 Tahun).

Angka Harapan Hidup Kota Palopo 2019, masih menjadi yang paling tinggi di luwu raya, dimana Angka Harapan Hidup beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo, memiliki AHH yang masih di bawah capaian Kota Palopo. Kabupaten Luwu berada pada angka 70.19 Tahun, Luwu Timur 70.38 Tahun, Luwu Utara 68.31 Tahun.

2.1.2.2.5 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-

anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Tabel 2.22
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jml Balita Gizi Buruk	Jiwa	11	3	4	2	0
b.	Jumlah Balita	Jiwa	17304	16,177	16,963	17,826	18,002
C	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.06	0,02	0,02	0.01	0
D	Balita Gizi Buruk per 10.000 balita	Rasio	6	2	2	1	0

Sumber Data : Palopo Dalam Angka

2.1.2.2.6 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Angkatan kerja 15 tahun ke atas	Orang	65346	67,504	75,563	75,829	80564
	Laki – Laki	Orang	40014	40.975	47.057	45,831	47611
	Perempuan	Orang	25332	26.529	28.506	29,998	32953
b.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	120,400	123.168	134.147	129,460	133,176
	Laki – Laki	Orang	57633	58.952	63.6	61,900	63611
	Perempuan	Orang	62767	64.216	70.547	67,560	69565
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	54.27	54,81	56,33	58.57	60.49
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	69.43	69,51	73,99	74.04	74.85

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	40.36	41,31	40,41	44.4	47.37

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019 , Diolah dari Palopo Dalam Angka 2019,

Data di atas menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang tahun 2015 – 2019 meningkat. Pada tahun 2015, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, mampu menyediakan 55 orang angkatan kerja berusia 15 tahun keatas yang aktif secara ekonomi bekerja, pada tahun 2019 angkanya meningkat menjadi 60 orang per 100 penduduk.

Dari aspek gender, tabel di atas juga menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2015– 2019 di Kota Palopo masih terus berada dibawah angka partisipasi angkatan kerja laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo diharapkan agar ke depan angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat.

2.1.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi angkatan kerja Kota Palopo Tahun 2019 berada pada angka 64.58 atau lebih baik dari capaian 2018 58.31%.

Tabel 2.24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	65346	67.504	75.563	75,829	80564
	- Laki – Laki	Orang	40014	40.975	47.057	45,831	47611
	- Perempuan	Orang	25332	26.529	28.506	29,998	32953
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Orang	113180	116,200	126.879	121,883	124755
	- Laki – Laki	Orang	54654	56.109	60.63	58,794	60142
	- Perempuan	Orang	58526	60.091	66.249	63,089	64613
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	57.74	58,09	59,56	58.31	64.58
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	%	73.21	73,03	77,61	77.95	79.16
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	43.28	44,15	43,03	47.55	51.00

Sumber Data : Diolah dari Kota Palopo Angka 2020

Angka pada tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang 2015 – 2019. Jika pada tahun 2015, dari

100 orang penduduk usia 15 -64 tahun, ada 58 orang (pembulatan 57.74 yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa di Kota Palopo, pada tahun 2019 menjadi 64-65 orang yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa.

Artinya sepanjang 2015 – 2019, jumlah tenaga kerja di Kota Palopo yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan ketenagakerjaan.

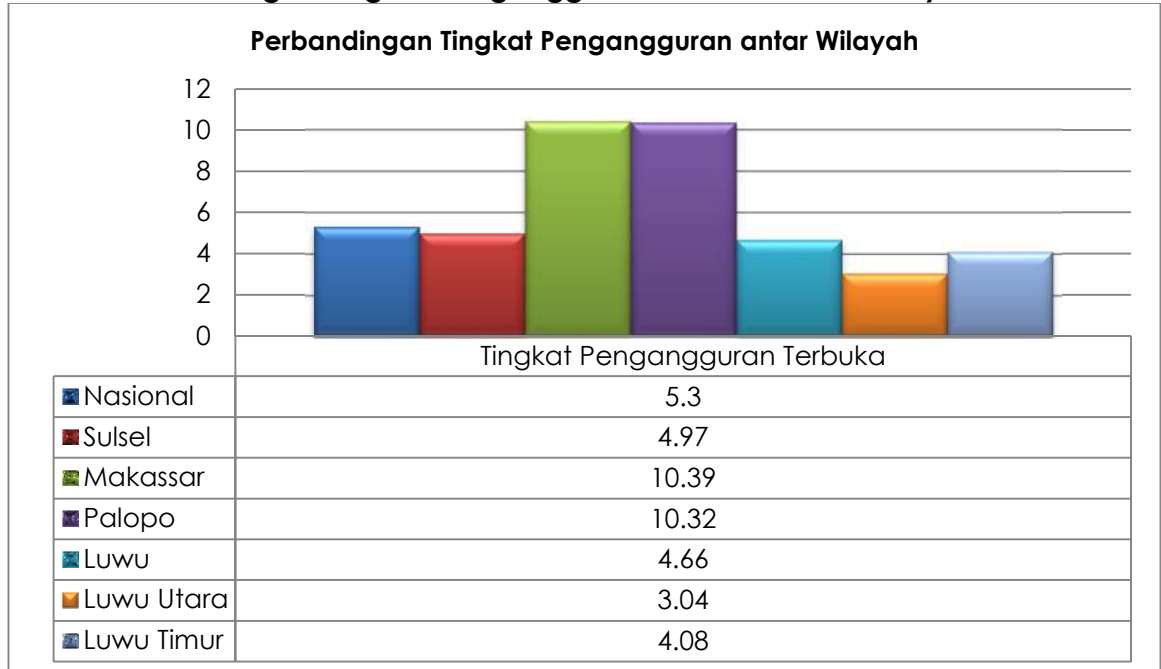
Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2015 – 2019 di Kota Palopo masih jauh tertinggal dibawah TPAK laki. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.1.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2019, pengangguran terbuka (10.32%) lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2018 (11.6%) yang menempatkan Palopo masih lebih baik daripada tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar (10.39%).

Meski demikian, Angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 pun **belum memenuhi target Kota Palopo 2019 (9.81 %)**. Bahkan jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.66%), Kabupaten Luwu Utara (3.04%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.08%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2019 (5.3%) Rata-Rata Sulsel (4.97%), Kota Pare-Pare (6.42%). Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.

Grafik 2.11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Wilayah 2019



Angka Tingkat Pengangguran Terbuka 10,32 persen itu setara dengan 8.314 orang menganggur, dari jumlah angkatan kerja di Palopo sebesar 80.564 jiwa. Jumlah pengangguran terbanyak disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari 25.803 orang angkatan kerja, 2.538 orang menganggur, atau hanya 23.265 orang bekerja.

Pengangguran terbanyak kedua disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK). Dari 8.977 orang angkatan kerja, 7.064 orang sudah bekerja, dan 1.913 orang tidak bekerja, atau tercatat sebagai pengangguran terbuka.

Kemudian menyusul lulusan universitas. Dari 19.706 jiwa angkatan kerja, hanya 17.884 orang bekerja. Sebanyak 1.822 orang tercatat masih menganggur. Sementara penyumbang terbanyak keempat adalah orang yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum/tamat sekolah dasar (SD) sebesar 1.257 orang tidak memiliki pekerjaan. Sementara 13.045 orang tercatat sudah bekerja, dari total angkatan kerja 14.302 orang.

Kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 8.613 orang angkatan kerja, 7.915 orang tercatat sudah bekerja, dan sisanya 698 orang, masih menganggur. Sedangkan lulusan diploma I/II/III/Akademi, hanya 86 orang yang menganggur, dari total 3.163 orang angkatan kerja, atau 3.077 orang telah bekerja.

Sementara itu, dari jumlah 72.250 orang yang bekerja, sektor jasa tercatat menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak tahun 2019, yakni sebanyak 52.561 orang, yang terdiri dari 26.995 orang, dan perempuan 25.566 jiwa. Kemudian

menyusul sektor manufaktur, yang menyerap tenaga kerja 13.728 orang, yang terdiri dari 10.473 orang laki-laki, dan 3.255 orang perempuan.

Sedangkan sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 5.961 orang, yang terdiri dari laki-laki 4.647 dan perempuan 1.314 orang. Selanjutnya, untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama didominasi menjadi buruh, karyawan, atau pegawai, sebanyak 45.570 orang. Kemudian orang berusaha sendiri sebanyak 14.122 jiwa, dan pekerja bebas sebanyak 342 orang. Sedangkan orang yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 4.342 orang, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 3.882 orang, dan pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 3.992 orang.

2.1.2.2.9 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

Tabel 2.25

Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.28	30.34	28.9	26.82	26.09%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kota Palopo Tahun 2019 sebanyak 2.889 KK, jumlah ini lebih sedikit (lebih baik) daripada tahun 2018, dimana jumlah keluarga prasejahtera berada pada angka 2924 KK. Atau menurun sebanyak 35 KK

Pada tahun 2016, di Kota Palopo terdapat 30.34% kategori keluarga sejahtera I dan keluarga prasejahtera. Namun 2018, jumlah kemudian menurun menjadi 26.81%. Ini menunjukkan adanya pengurangan dari aspek persentase jumlah keluarga untuk kedua kategori ini.

2.1.2.2.10 Survey Kepuasan Layanan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2019 berada pada angka 83.08 poin. Ini menunjukkan kinerja unit layanan berpredikat baik dengan

mutu layanan yang baik pula. Tahun 2021, kondisi ini diharapkan mampu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan.

Tabel 2.26
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI INDEKS	IKM	KINERJA UNIT LAYANAN	MUTU PELAYANAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,44	85,91	Baik	B
2	RSUD Sawerigading	3,31	82,83	Baik	B
3	Puskesmas Wara	3,29	82,27	Baik	B
4	Dinas Sosial (Rastra APBN & APBD)	3,30	82,51	Baik	B
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,33	81,18	Baik	B
6	Kecamatan Wara	3,35	83,77	Baik	B
Rata-rata			83,08	Baik	B

Sumber : LAKIP Kota Palopo Tahun 2019

2.1.2.3 SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.1.2.3.1 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga

Tabel 2.27
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Group Kesenian	12	14	16	18	18
Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
Jumlah Klub Olahraga	4	4	8	8	8
Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1

Sumber Data: Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020, Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah group di Kota Palopo meningkat dari tahun 2015 sebanyak 12 group menjadi 18 group kesenian pada tahun 2019, sementara jumlah gedung kesenian, jumlah club olahraga dan gedung olahraga jumlahnya tetap sepanjang 2015-2019.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

Lebih lanjut dijelaskan tentang urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB

Layanan urusan wajib dasar diarahkan pada pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak dibagi jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Tabel 2.28
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Orang	4681	4338	4110	4698	4034
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Orang	7411	6875	6511	6714	6554
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		%	59,60	61,75	63,16	63,10	62,48

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa, meski pun meningkat, tingkat partisipasi anak berusia 4-6 tahun mengakses pendidikan anak usia dini realtif masih rendah dan belum mencapai angka 75%. Ini menunjukkan bahwa perlunya ada akselrasi program dan kegiatan sehingga lebih banyak anak usia 4-6 tahun yang mengakses lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo, totalnya sebanyak 130 lembaga, termasuk yang berada dibawah Kementerian Agama. Jumlah ini terdiri dari Raudatul Afhal (RA) sebanyak 5, TPA sebanyak 3, Satuan Paud Sejenis (SPS) sebanyak 2, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 30, TK sebanyak 90.

Beberapa aspek yang mesti menjadi perhatian dalam meningkatkan angka patrisipasi ini adalah memastikan edukasi dan sosialisasi urgensi pendidikan anak usia dini terhadap orang tua dan memastikan bahwa biaya pendidikan pada level ini bisa dijangkau oleh semua kalangan.

Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angkanya menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau **lebih dari 100** persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	APK SD/MI/Paket A	101,81	111,66	106,00	112.89	105.99
2	APK SMP/MTs/Paket B	88,23	86,17	84,91	84.17	86.02
3	APK SMA/MA/SMK/Paket C	91,56	95,35	85,39	110.31	110.74

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka & Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi kasar tingkat SD sederajat di Kota Palopo tahun 2015-2019 selalu melebihi 100%. Kondisi ini menggambarkan setiap tahunnya selalu ada penduduk yang sudah bersekolah di tingkat SD, meski umurnya belum mencukupi 7 tahun, atau melebihi umur yang seharusnya. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa di Kota Palopo, untuk tingkat sekolah dasarnya, tetap mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya yakni penduduk berumur 7-12 tahun.

Pada tingkat pendidikan SMP/sederajat, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan ini fluktuatif. Jika pada tahun 2015 dari 100 orang penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 88 orang, pada tahun 2019 menjadi 86 orang per 100 penduduk umur 13-15 tahun.

Sementara pada jenjang SMA/sederajat partisipasi kasar pada jenjang pendidikan ini justru meningkat. Jika pada tahun 2015 dari 100 orang penduduk berumur 16-18, tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 91-92 orang, pada tahun 2019 meningkat menjadi 110 orang, per 100 penduduk umur 16-85 tahun.

Beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan partisipasi kasar adalah aspek ketersediaan sekolah, guru dan keterjangkauan biaya pendidikan. Olehnya ke depan melalui pelaksanaan pendidikan paripurna, Kota Palopo berharap mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat. Untuk menyikapi hal ini Pemerintah Kota Palopo melaksanakan program pendidikan gratis. Sehingga diharapkan

dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi pada anak usia sekolah.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan besaran atau persentase komposisi penduduk usia menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki masing-masing tingkat pendidikan. Mulai dari SD, SMP dan SMA/ sederajat. Ini untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya atau sebagai bahan analisis pasar kerja.

Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah data penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Palopo 2016-2017, sesuai tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan :

Tabel 2.30
Penduduk Usia 10 Tahun ke atas di Kota Palopo yang Ditamatkan
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)					
1	Tidak/Belum Bersekolah (%)		7.85	7.02	6.31	
2	Tamat SD/sederajat (%)		30.47	14.18	12.69	17.05
3	Tamat SMP/sederajat (%)		11.82	23.63	24.71	29.84
4	Tamat SMA (%)		31.75	36.68	37.88	
5	Tamat SMK (%)		4.06	2.81	2.39	
6	Tamat Perguruan Tinggi (%)		14.08	15.67	16.00	
7	Diploma I/II (%)		0.29	0.37	0.38	
8	Diploma III (%)		1.82	1.39	1.12	
9	Diploma IV/S1-S3 (%)		11.97	13.91	14.51	

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni

Adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Tabel di bawah ini menunjukkan, pada tahun 2015, terdapat 94,11% anak usia 7-12 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SD/MI sederajat. Dan pada tahun 2019 menjadi 99,44%. jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin

tinggi, yang menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini cukup baik, misalnya dengan jumlah ketersediaan sekolah yang tersedia.

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	94,11	95,37	99,32	99,78	99,44
Laki-Laki	77,48	100,00	99,33	99,60	-
Perempuan	90,04	90,52	99,31	100,00	-

Sumber Data : BPS

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Tabel di bawah ini menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2015, hanya 75,43 % anak usia 13-15 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat, pada tahun 2019 sudah mencapai angka 78,11%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik. Meski pun angkanya jika dibandingkan dengan APM tingkat SD sederajat, APM pada tingkat SMP/MTs sederajat masih berada di bawah.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
SMP/MTs	75,43	76,61	77,89	78,39	78,11
Laki-Laki	68,49	77,50	75,35	79,35	
Perempuan	81,02	75,52	80,28	77,55	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C

Tabel di bawah ini menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2015, hanya 68,29 % anak usia 16-18 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMA/SMK sederajat, pada tahun 2019 sudah mencapai angka 67,4%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin					
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
SMA/MA/SMK	68,29	65,72	66,42	67,99	67.4
Laki-Laki	70,11	66,80	69,65	75,27	
Perempuan	66,63	64,73	63,24	62,00	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Angka Partisipasi Sekolah

Adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

PEOPLE AGES
CONCEPT



Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Tabel 2.34
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
7 - 12	98,98	100	99,32	99,78	99.70
Laki-Laki	98,14	100	99,33	99,60	
Perempuan	100	100	99,31	100	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Tabel 2.35
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
13 - 15	98,52	96,57	98,13	100	99,17
Laki-Laki	98,01	95,14	96,15	100	
Perempuan	98,92	98,35	100	100	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C

Tabel 2.36
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
16 - 18	98,98	100	99,32	99,78	84,43
Laki-Laki	78,74	85,33	84,71	88,56	
Perempuan	84,76	91,24	91,92	81,62	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo, Tahun 2020

Angka Putus Sekolah

Adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APTS 7-12 = 10,11% berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Tabel 2.37
Angka Putus Sekolah
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0.40	0	0.68	0,79	0,004
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	1.45	3.43	1.87	1,26	0,006
3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	15.87	9,10	10.28	7,35	

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo*

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Tabel 2.38
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SD/MI Kota Palopo	Orang	74	0	153	179	74
2.	Jumlah Seluruh APS SD/MI Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	18,470	21,952	22,500	22.617	
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.40	0	0.68	0,79	

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo*

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2013-2017 pada tingkat SD cenderung meningkat. Angka putus sekolah Jika pada tahun 2013 sebesar 0% pada tahun 2017 sebesar 0,68%. Artinya pada tahun 2017, dari 100 siswa sekolah SD ada 1 orang siswa yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SD/ sederajat. Ini mesti disikapi oleh Pemerintah sehingga angkanya tidak semakin meningkat.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Tabel 2.39
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMP/MTs	Orang	153	385	214	146	69

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Kota Palopo						
2.	Jumlah Seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	10,567	11,213	11,465	11.595	
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1.45	3.43	1.87	1,26	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2015-2019 pada tingkat SMP menurun. Dari 153 kasus pada tahun 2015 menurun menjadi 69 kasus pada tahun 2019.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Tabel 2.40
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMA/SMK/ sederajat se Kota	Orang	1,869	962	1,147	854	
2	Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/ sederajat se- Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	11,776	10,573	11,162	11.620	
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	15.87	9,10	10.28	7,35	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tingkat ini di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2015 terdapat 15-16 orang orang siswa putus sekolah dari 100 siswa, pada tahun 2018 hanya terdapat 7 orang (7,35%) siswa yang putus sekolah per 100 orang siswa.

Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan besar jumlah siswa yang tidak tinggal kelas atau berhasil menamatkan pendidikannya pada level yang sedang ia tempuh. Indikator ini menunjukkan keberhasilan para siswa dalam mengikuti ujian sekolahnya.

Tabel 2.41
Angka Kelulusan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kelulusan SD	97,48	98,87	100	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP	99,05	99,62	99,30	99,38	100
3.	Angka Kelulusan SMA/SMK	102,82	102,44	99,75	100	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Tabel 2.42
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	2.936	2.830	3.038	3.072	3193
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	3.012	2.862	3.038	3.047	3193
3.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	97,48	98,87	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat SD terus membaik. Jika pada tahun 2015 persentase angka kelulusan mencapai 97.48%, pada tahun 2019, semua siswa pada jenjang pendidikan SD/ sederajat lulus atau mencapai 100%.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Demikian halnya dengan kelulusan tingkat SMP sederajat. Data pada tabel dibawah menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat ini terus membaik. Jika pada tahun 2015 persentase angka kelulusan masih pada posisi 99.05%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 100%.

Tabel 2.43
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	2.759	2.822	2.865	2.900	3178
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	2.785	2.833	2.885	2.918	3178
3.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,05	99,62	99,30	99,38	100,00

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Tabel 2.44
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	102,82	102,44	99,75		

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan SMA sederajat pada empat tahun awal 2015-2016 angkanya melebihi 100%. Ini disebabkan karena mereka yang sebelumnya tinggal kelas atau tidak lulus, baru berhasil 2015 dan 2016. Kemudian pada tahun 2017 masih terdapat 0,25% siswa yang tidak berhasil menamatkan pendidikan SMA sederajatnya tepat waktu karena tidak berhasil lulus.

Angka Melanjutkan (AM)

Indikator ini menggambarkan persentase pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini diperoleh dengan membagi Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Tabel 2.45
Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	4420	4531	-	4.681	

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3213	3228	3361	3.388	3.178
3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	131.25	141.24	137.56	140.36	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP/Sederajat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/Sederajat meningkat setiap tahunnya. Jika pada tahun 2015 hanya pada angka 131.25%, pada tahun 2018 menjadi 140.36 %. Angka melanjutkan yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa semua lulusan SMP/MTs yang ada di Kota Palopo, melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/SMK/ sederajat.

Angka melanjutkan melebihi 100% ini, menurut data Dinas Pendidikan Kota Palopo, karena cukup banyak lulusan SMP/ sederajat yang berada di luar wilayah Kota Palopo, memilih untuk bersekolah di SMA/ sederajat yang berada di wilayah Kota Palopo. Terutama lulusan SMP/ sederajat yang menetap di perbatasan Kabupaten Luwu.

Beberapa alasannya adalah, sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah sekolah di Kota Palopo lebih kompetitif dibandingkan dengan sekolah SMA/ Sederajat yang berada di wilayah mereka tinggal. Faktor lainnya adalah karena orang tua mereka bekerja di wilayah Kota Palopo.

Kondisi ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap sistem zonasi pendidikan belum berjalan cukup baik. Sebab masih banyak lulusan sekolah yang memilih bersekolah diluar dari zona wilayahnya. Namun ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kualitas sekolah maupun pendidikan sehingga para lulusan memilih bersekolah di wilayah Kota Palopo dengan alasan sarana dan prasarana sekolah serta kualitas pembelajaran yang lebih kompetitif. Meski demikian kondisi ini juga menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018, daya serap pendidikan menengah baik SMA, SMK atau MA di Kota Palopo cukup baik, sehingga mampu menampung lulusan yang berasal dari luar Kota Palopo.

Fasilitas Pendidikan

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Indikator ini menggambarkan kondisi umum bangunan sekolah SD atau yang setingkat yang layak dipakai proses belajar mengajar. Semakin tinggi nilai persentasenya, menunjukkan bahwa tersedia ruang kelas yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar.

Tabel 2.46
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sekolah SD/MI berkondisi Baik	77	77	77	77	80
a	Jumlah SD Negeri Berkondisi Baik	62	62	63	63	65
b	Jumlah SD Swasta Berkondisi Baik	11	11	11	11	12
c	Jumlah MI Negeri Berkondisi Baik	4	4	4	4	3
d	Jumlah MI Swasta Berkondisi Baik	-	-	-	-	-
2	Jumlah seluruh SD/MI di Kota Palopo (Negeri & Swasta)	79	79	80	80	80
e	Jumlah SD Negeri	64	64	65	65	65
f	Jumlah SD Swasta	11	11	11	11	12
g	Jumlah MI Negeri	4	4	4	4	-
h	Jumlah MI Swasta	-	-	-	-	3
3	Persentase Sekolah SD/MI Kondisi baik(%)	97.47	97.47	96.25	96.25	100

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Palopo Dalam Angka
Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Data menunjukkan bahwa seluruh sekolah dasar (SD) di Kota Palopo kondisinya sudah baik dalam menunjang proses belajar mengajar.

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Tabel 2.47
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jml SMP/MTs Kondisi Baik	28	29	30	31	33
a.	Jumlah SMP Negeri Berkondisi Baik	13	13	14	15	14
B	Jumlah SMP Swasta Berkondisi Baik	8	8	8	8	11
C	Jumlah MTs Negeri Berkondisi Baik	7	8	8	8	8
D	Jumlah MTs Swasta Berkondisi Baik	-	-	-	-	-
2.	Jml Seluruh SMP/MTs	28	29	30	31	33
E	Jumlah SMP Negeri	13	13	14	15	14
F	Jumlah SMP Swasta	8	8	8	8	11
G	Jumlah MTs Negeri	7	8	8	8	1
H	Jumlah MTs Swasta	-	-	-	-	7
3.	Persentase Sekolah SMP/MTs Kondisi baik (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel 2.48
Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jml SMA/SMK/MA Kondisi Baik	34	31	31	31	
a.	Jumlah SMA Negeri Berkondisi Baik	6	6	6	6	
b.	Jumlah SMA Swasta Berkondisi Baik	6	6	6	6	
c.	Jumlah SMK Negeri Berkondisi Baik	7	7	7	7	
d.	Jumlah SMK Swasta Berkondisi Baik	14	11	11	11	
e.	Jumlah MA Berkondisi Baik	1	1	1	1	
2	Jml Seluruh SMA/SMK/MA	34	31	31	31	
e.	Jumlah SMA Negeri	6	6	6	6	
f.	Jumlah SMA Swasta	6	6	6	6	
g.	Jumlah SMK Negeri	7	7	7	7	
h.	Jumlah SMK Swasta	14	11	11	11	
i.	Jumlah MA Negeri	1	1	1	1	
j.	Jumlah MA Swasta	0	0	0	0	
3	Persentase Sekolah SMA/SMK/MA Kondisi baik (%)	100	100	100	100	

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah gambaran ketersediaan atau daya tampung sekolah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pendidikan dasar adalah tingkat SD/Mi dan SMP/MTs. Sehingga jumlah sekolah yang berada dalam tabel di bawah ini adalah jumlah SD dan Jumlah Sekolah madrasah Ibtidaiyah (MI) yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama dan Pihak Swasta lainnya, namun berlokasi di Kota Palopo.

Tabel 2.49
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	79	79	80	80	80
	SD Negeri	64	64	65	65	65
	SD Swasta	11	11	11	11	12
	MI Negeri	4	4	4	4	-
	MI Swasta	-	-	-	-	3
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	18,586	21,952	22,500	22.617	20.292
1.3.	Rasio SD/MI (per 10.000)	43	36	36	36	39
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	28	29	30	31	33
	SMP Negeri	13	13	14	14	14
	SMP Swasta	8	8	8	8	11
	MTs Negeri	7	8	8	8	1
	MTs Swasta	0	0	0	0	7
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10,572	11,226	11,469	11.583	10.864
2.3.	Rasio SMP/MTs (per 10.000)	26	26	26	26	30

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3						
3.1	Total Jumlah gedung sekolah (SD + SMP sederajat)	107	108	110	112	
3.2	Total jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun + jumlah penduduk usia 13-15 tahun	29,158	33,178	33,969	34.200	31.156
3.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per 10.000	37	33	32	32	36

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau yang sederajat di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 cenderung menurun. Jika pada tahun 2015 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar (7-12 tahun) tersedia sekolah sebanyak 43 unit, tahun 2019 juga tersedia sebanyak 39 unit. Sementara untuk SMP, tahun 2015 tersedia 26 sekolah, tahun 2019 tersedia sebanyak 30 sekolah untuk sebanyak 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.

Untuk tingkat pendidikan dasar SD dan SMP, rasio ketersediaan sekolah 2015-2019 cenderung menurun. Jika 2015 terdapat sebanyak 37 sekolah untuk penduduk sebanyak 10.000 jiwa, pada tahun 2019 hanya 36 sekolah untuk menampung 10.000 penduduk.

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK.

Tabel 2.50
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah Sekolah	34	31	31	31	
	SMA Negeri	6	6	6	6	
	SMA Swasta	6	6	6	6	
	SMK Negeri	7	7	7	7	
	SMK Swasta	14	11	11	11	
	Madrasah Aliyah	1	1	1	1	
2	Jumlah Penduduk Usia 16-18 th	12.411	10.962	11.457	11.790	
3	Rasio Ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk)	27	28	27	28	

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan menengah di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2018 meningkat. Jika pada tahun 2015 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan 16-18 tahun tersedia sekolah sebanyak 27 unit, tahun 2018 hanya tersedia sebanyak 28 unit.

Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Indikator ini untuk menggambarkan ketersediaan guru pada level pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada level pendidikan tersebut.

Indikator ini akan menunjukkan perkembangan beban kerja guru. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin tinggi beban kerja guru yang bersangkutan, yang berdampak pada berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan dasar, rasio guru dan murid sepanjang tahun 2015-2019, untuk tingkat pendidikan dasar menurun. Artinya beban kerja yang dirasakan oleh guru pendidikan dasar pada tingkat SD dan SMP semakin tinggi, meskipun jika dilihat dari angka rasio masih dalam kondisi normal.

Jika pada tahun 2015, untuk 10.000 siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) dilayani 890 orang guru, pada tahun 2019 hanya dilayani oleh 649 orang guru. Pada jenjang SD/Mi/ sederajat, tahun 2015 sampai tahun 2019, pada tingkat SD/MI, rasio guru dan murid 937 guru per 10.000 murid pada tahun 2015, menjadi 601 guru per 10.000 murid pada tahun 2019.

Jenjang SMP/MTs/ Sederajat, pada tahun 2015, rasio guru murid berada pada angka 800 guru per 10.000 murid pada tahun 2015 menjadi 737 guru per 10.000 murid pada tahun 2019.

Tabel 2.51
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	1.833	1.208	1.136	1.128	1878
	<i>SD Negeri</i>	1613	986	933	924	898
	<i>SD Swasta</i>	158	160	142	142	170
	<i>MI Negeri</i>	62	62	61	61	0
	<i>MI Swasta</i>	0	0	0	0	45
1.2.	Jumlah Murid	19.565	19.091	18.719	18.969	18505
	<i>SD Negeri</i>	16.471	15.867	15.393	15.451	14.342
	<i>SD Swasta</i>	2.384	2.514	2.659	2.742	2.959
	<i>MI Negeri</i>	710	710	667	642	0
	<i>MI Swasta</i>	0	0	0	0	1204
	Rasio Guru/Murid SD/MI (per 10.000)	937	633	607	595	601
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	827	764	697	682	765
	<i>SMP Negeri</i>	514	497	478	479	489
	<i>SMP Swasta</i>	153	101	86	73	107
	<i>MTs Negeri</i>	160	166	133	147	74
	<i>MTs Swasta</i>	0	0	0	0	95
2.2.	Jumlah Murid	10.338	10.167	10.137	10.173	10370

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	<i>SMP Negeri</i>	7.823	7.615	7.562	7.610	7276
	<i>SMP Swasta</i>	1.105	1.135	1.289	1.308	1589
	<i>MTs Negeri</i>	1.410	1.417	1.286	1.311	903
	<i>MTs Swasta</i>	0	0	0	0	602
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs (per 10.000)	800	751	688	670	737
3	Pendidikan Dasar (SD + SMP, Sederajat)					
3.1.	Jumlah Guru (SD dan SMP)	2.660	1.972	1.833	1.811	1664
3.2.	Jumlah Murid (SD dan SMP)	29.903	29.258	28.856	29.142	28875
3.3	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (per 10.000)	890	674	635	621	649

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2019

Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Tabel 2.52
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah Guru	2.771	990	980	1.085	
	SMA Negeri	1820	331	331	333	
	SMA Swasta	114	87	87	74	
	SMK Negeri	481	361	351	421	
	SMK Swasta	301	169	169	215	
	MA	55	42	42	42	
2	Jumlah Murid	12.017	11.121	11.131	11.671	
	SMA Negeri	5.059	5.005	5.005	5.172	
	SMA Swasta	832	892	902	1.082	
	SMK Negeri	4.455	3.496	3.496	3.473	
	SMK Swasta	1.671	1.728	1.728	1.944	
3	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah per 1000	231	89	88	93	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2018
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2015, untuk mendidik 1000 siswa SMA/SMK/MA sederajat di Kota Palopo tersedia guru sebanyak 231 orang. Sementara pada tahun 2019, hanya tersedia 93 orang guru untuk melayani 1000 orang siswa.

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar

Adalah rata-rata **jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas** dibagi jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru per kelas diperoleh dengan membagi jumlah ruang kelas tersedia dengan jumlah guru yang tersedia.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.53
Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar
Kota Palopo 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs, Swasta dan Negeri)					
1	Jumlah Guru Pendidikan Dasar (Orang)	2,660	1,972	1,833	1.811	1.878
2	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (Buah)	1,095	1,145	1,120	1.137	
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (Guru/Kelas)	2.43	1.72	1.64	1,59	1,01
4	Jumlah Murid Pendidikan Dasar (Orang)	29,903	29,258	28,856	29.142	28.875
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Dasar (Siswa/Kelas)	27.31	25.55	25.76	25,81	
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar per 10.000 (Guru/Siswa/Kelas)	0.81	0.59	0.57	0,55	

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2018 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) di tahun 2015, tersedia 1 orang (pembulatan 0.81) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, kondisinya tidak jauh berbeda yakni terdapat 1 orang guru (pembulatan 0.55) untuk setiap ruang kelas pendidikan dasar.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan dasar sebanyak 27 orang per kelas (pembulatan 25.50), di tahun 2018 kondisinya juga tidak jauh berbeda yakni 25-26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 25.81).

Sementara untuk rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar yang dihitung per 10.000 jumlah siswa pendidikan dasar, diperoleh dengan membagi nilai rasio jumlah Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (rasionya) dengan jumlah siswa pendidikan dasar yang ada.

Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah

Tabel 2.54
Persentase Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan
Menengah Kota Palopo 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Swasta & Negeri					
1	Jumlah Guru Pendidikan Menengah (Orang)	2.771	990	980	931	
2	Jumlah Kelas Pendidikan Menengah (Buah)	466	477	462	465	
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Menengah (Orang/ Kelas)	5.95	2.08	2.12	2,00	

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Jumlah Murid Pendidikan Menengah (Orang)	12,472	11,732	11,785	12.123	
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Menengah (Siswa/ Kelas)	26.8	24.6	25.5	26,06	
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah per 10000 (Orang/Kelas)	4.77	1.77	1.80	1,61	

Sumber : Diolah dari Data BPS Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2018 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/Setara) di tahun 2015, tersedia 4-5 orang (pembulatan 4.77) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2018, tersedia 2 orang guru (pembulatan 1.61) untuk setiap ruang kelas pendidikan menengah.

Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan menengah sebanyak 26-27 orang per kelas (pembulatan 26.8), di tahun 2018 kondisinya menjadi 26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 26.0).

Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan berapa besar penduduk usia 12 tahun pada tahun tertentu, yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasarnya yang dinyatakan dalam persentase. Ini menunjukkan berapa banyak penduduk Kota Palopo yang berhasil menamatkan pendidikan dasar tingkat SD/MI nya.

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki-Laki

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun sampai 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Contoh: AMH Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 92,93 persen, artinya sekitar 93 persen penduduk di Kota Palopo yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Tabel 2.55
Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun
Perempuan dan Laki – Laki Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang belum melek huruf	Orang	18	11	2	3	
	<i>Laki</i>	<i>Orang</i>	8	6	0	2	
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	10	7	2	1	
b	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn	Orang	39.414	40.279	41.073	50.903	
	<i>Laki</i>	<i>Orang</i>	18,457	18,896	19,273	20,336	
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	20,957	21,383	21,800	30,567	
c	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	%	99.954	99.973	99.995	100,00	
	<i>Laki</i>	<i>%</i>	99.96	99.97	100.00	100,00	
	<i>Perempuan</i>	<i>%</i>	99.95	99.97	99.99	100,00	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2019, *Potensi Wilayah Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Palopo Dalam Angka
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa AMH penduduk usia 15-24 tahun Kota Palopo pada tahun 2015 sebesar 99.954%, artinya sebanyak 99 dari 100 orang penduduk usia tersebut di Kota Palopo sudah mampu membaca dan menulis.

Kondisi ini lebih membaik di tahun 2018 dimana AMH penduduk usia 15-24 tahun telah mencapai 100% yang menunjukkan bahwa 100 orang dari 100 penduduk Kota Palopo yang berumur 15-24 tahun pada tahun 2018 sudah mampu membaca dan menulis.

Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tabel 2.56
Persentase Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf
(Tidak Buta Aksara)

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se Kota Palopo	Orang	117,728	118,993	123,206	126.709	
b	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun	Orang	119,862	123,168	126,430	129.955	
c	Penduduk Berusia ≥15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	98.22	96,61	97.45	97,71	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Buku Potensi Wilayah Kota Palopo tahun 2019
Dinas Pendidikan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 masih terdapat 98.22% penduduk Kota Palopo yang berusia diatas 15 yang tidak buta aksara. Namun pada tahun 2019, angka ini menurun dimana hanya terdapat 97.71% penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Palopo.

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Adalah indikator yang menggambarkan kualitas dari tenaga guru yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kualitas tenaga guru yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.57
Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jml guru bejazah S1-D4	3.343	3.657	3.861	4.049	
2	Jml guru SD/Sederajat+SMP Sederajat +SMA Sederajat	5,431	2,962	2,813	2.742	1708 (sd & smp)
3	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi s1/d4	61.55	123.46	137.26	147,26	

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo Tahun 2020

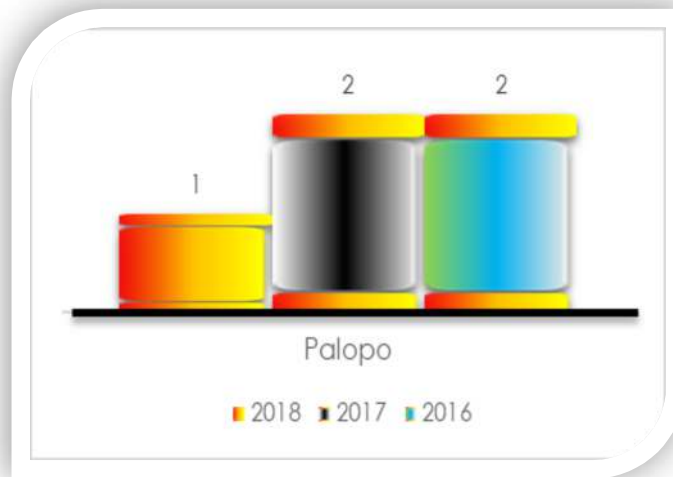
Data di atas menunjukkan persentase guru yang berijazah S1-D4 di Kota Palopo meningkat tajam. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 61.55%, tahun 2018 berada pada angka 147.26%. Ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2018 semua guru yang berstatus ASN di Kota Palopo telah menyangsang strata satu atau sarjana/diploma 4.

Kondisi pada tahun 2016, 2017 dan 2018 melebihi angka 100% sebab, terdapat guru yang menempuh strata satu kembali untuk menyesuaikan gelar pendidikan kesarjanaanya sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan para tenaga guru di Kota Palopo sudah sangat kompetitif.

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Grafik 2.12
Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2016 - 2018



Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2.58
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

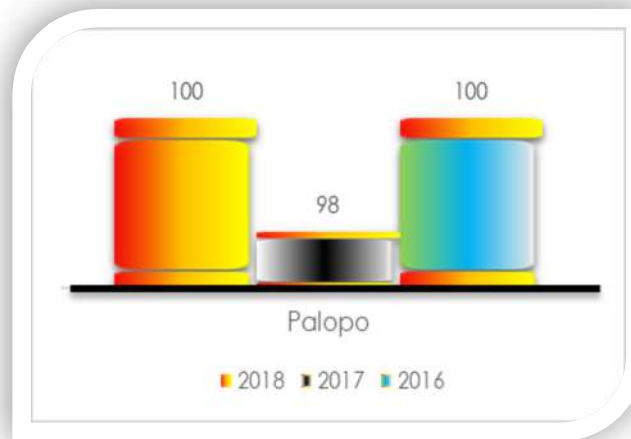
No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	1	6	6	3	2
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282
3	Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	0,36	2,18	2,03	0,99	0,61

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 1000 kelahiran hidup, ada 1 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, kemudian 2016-2017 naik menjadi 6 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, 2019 mengalami penurunan dalam 1000 kelahiran hidup.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Grafik 2.13
Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2016 - 2018



Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (100-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.59
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

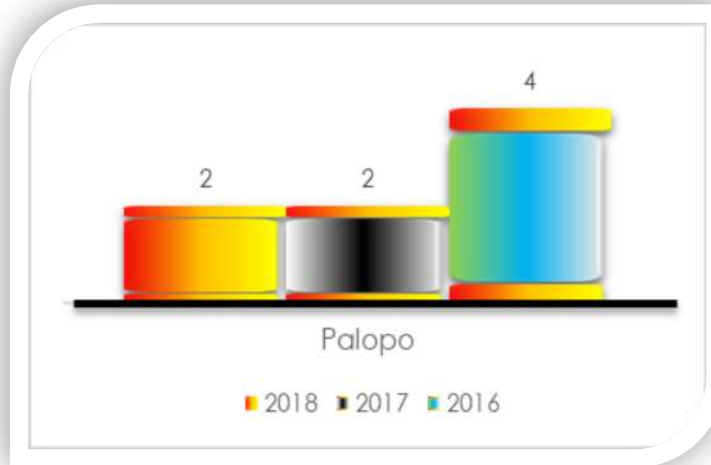
No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100
2.	AKB per 1000	0,36	2,18	2,03	0,99	0,61
3	AKHB	100	97,82	97,97	99,01	99,39

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 semua bayi hidup per 100 kelahiran hidup sampai tepat usia 1 tahun, kemudian 2016-2019 menjadi 1-2 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Grafik 2.14
Angka Kematian Bayi di Kota Palopo Tahun 2016 - 2018



Adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 balita (umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari) pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Tabel 2.60
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

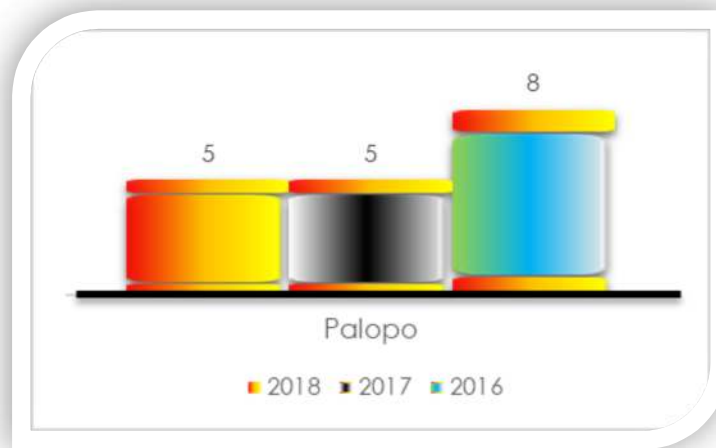
No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	19	21	16	19	19
2.	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	6,92	7,62	5,41	6,27	5,79

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2015, dari 1000 balita yang lahir, ada 6 balita yang meninggal dan tidak mencapai umur tepat lima tahun. Dan tahun 2019 terdapat 5 kematian balita per 1000 kelahiran. Sesuai data dalam tabel di atas, perlunya meningkatkan program kesehatan terutama ibu, bayi dan balita mengingat adanya trend kenaikan jumlah balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Grafik 2.15
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
di Kota Palopo Tahun 2016 - 2018



Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribukelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh factor factor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 2.61
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	17	21	16	11	14
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tertentu	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6	7	5	3	4

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2015 dari 1000 kelahiran hidup, terdapat 6 kasus kematian neonatal pada bayi, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 4 kasus kematian neonatal pada bayi per 1000 kelahiran bayi hidup.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Atau Maternal Mortality Ratio (MMR) adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2.62
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	4	4	2	3	1
2.	Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.747	2.755	2.959	3.029	3.282
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	146	145	68	99	30

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan, dari 100.000 ibu melahirkan, terdapat 146 kasus kematian ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Kota Palopo pada tahun 2015. Dan pada tahun 2019, terjadi penurunan menjadi 30 kasus kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kematian ibu karena melahirkan terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Dari rasio ini dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan.

Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah.

Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.63
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Posyandu	147	147	149	149	149
2.	Jumlah Balita	15.275	16.178	16.963	17.355	17.724
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (1.000)	10	9	9	9	8

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 1000 balita, tersedia sebanyak 10 posyandu. Namun pada tahun 2019, hanya tersedia 8 posyandu untuk melayani 1000 orang balita. Ini menggambarkan adanya peningkatan beban kerja posyandu di Kota Palopo.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu dan poliklinik yang bisa disediakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin banyak faskes yang disiapkan pemerintah untuk melayani masyarakatnya.

Tabel 2.64
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	34	48	48	48	48
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184614
c	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (10.000)	Rasio	2	3	3	3	3

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 10.000 orang penduduk tersedia sebanyak 2 faskes (puskesmas, poliklinik dan pustu). Namun pada tahun 2019, sudah tersedia 3 fasilitas kesehatan. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja faskes di Kota Palopo.

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator ini memberikan gambaran perkembangan beban kerja dan daya tampung rumah sakit yang ada di Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.65
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Sakit	5	6	7	8	8
2.	Jumlah Penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (100.000)	3	4	4	4	4

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani penduduk sebanyak 100.000 orang hanya tersedia sebanyak 3 rumah sakit. Namun pada tahun 2017-2019 menjadi 4 rumah sakit per 100.000 penduduk. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja yang ada di rumah sakit Kota Palopo.

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun rencana dalam penyediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, hingga pendidikan, latihan dan penyebaran tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari rasio ini dapat diketahui jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan tertentu, karena itu rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan tenaga kesehatan untuk suatu jenis pelayanan kesehatan.

Tabel 2.66
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah dokter	Orang	82	83	89	112	117
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	Per 10.000	5	5	5	6	6

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak 2000 penduduk. Namun pada tahun 2019, meningkat menjadi tersedia 6 orang dokter untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2019 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo.

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang siap melayani per 1000 penduduk di Kota Palopo. Ini menggambarkan

kondisi beban kerja yang dialami tenaga medis. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini maka semakin ringan beban kerja para tenaga medis tersebut.

Tabel 2.67
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Tenaga Medis	Orang	81	82	89	93	117
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	Rasio tenaga Medis Persatuan Penduduk (10.000)	Rasio	5	5	5	5	6

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 5 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2019, tersedia 6 orang tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo.

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi, Komplikasi dalam kehamilan, dsb. Semakin tinggi angka indikator ini, menggambarkan tingkat penanganan kesehatan ibu hamil dan bayi yang semakin baik.

Tabel 2.68
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	446	472	457	465	545
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jml	601	617	647	639	632
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	74,21	76,49	70,63	72,77	86,23

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015, dari 100 kasus komplikasi kebidanan sebanyak 74 kasus berhasil ditangani. Dan pada tahun 2019 sebanyak 86 kasus berhasil ditangani per 100 kasus komplikasi kebidanan. Ini mengindikasikan membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil terutama cakupan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Adalah Perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.. Semakin banyak persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 2.69
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.764	2.767	2.956	3035	3279
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jml	2.870	2.944	3.086	3035	3225
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	96,31	93,99	95,79	100	101.67

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2015 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2764 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2019, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 101.67 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 3279 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Semakin tinggi persentase indikator ini semakin baik kinerja UCI.

Tabel 2.70
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah desa/kelurahan UCI	Jml	46	47	46	46	45
2.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	Jml	48	48	48	48	48
3	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95,83	97,92	95,83	95,83	93,75

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 cakupan 95,83 persen kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memenuhi UCI dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bayi, ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah pada tingkat dasar, dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 93,75.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.71
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kota Palopo Tahun 2015 –2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	11	3	4	4	0
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	11	3	4	4	0
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari)

Indikator ini memberikan gambaran proporsi dan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara cukup dan bergizi. Umumnya masyarakat miskin belum mampu memenuhi konsumsi pangan minimum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas gizi. Indikator ini erat kaitannya dengan aspek kemiskinan. Semakin tinggi angka indikator ini, artinya semakin banyak penduduk yang kekurangan pangan karena kesulitan mengakses kebutuhan dasar akibat aspek ekonomi.

Tabel 2.72
Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah
dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari (Jumlah Penduduk Miskin)						
		Orang	14,510	15,020	15,440	15.428	14370
2	Jumlah Balita (Jumlah Penduduk Berumur di Bawah Lima Tahun)						
		Orang	15.275	16.178	16.963	17.355	17.724
3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)						
		%	95.0	92.8	91.0	87,73	81.08

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 balita per 100 balita penduduk miskin, 95 balita memiliki asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum. Namun 2019, kondisinya lebih baik, dimana hanya ada 81 orang balita dari 100 balita keluarga miskin yang tingkat konsumsi kalornya berada di bawah minimum.

Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Tabel 2.73
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak yang usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	3.020	3.081	3.166	3.237	3.892
2.	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	Orang	2.747	2.755	2.959	3.029	3.952
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	109,94	111,83	107	106,87	98,48

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan terjadinya penurunan persentase bayi berumur di bawah satu tahun yang memperoleh imunisasi campak di Kota Palopo sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 dari 100 balita rata-rata hanya 98 orang yang mendapatkan imuniasi campak. Ini menunjukkan bahwa kinerja imunisasi perlu ditingkatkan. Misalnya melalui media sosialisasi yang menegaskan keamanan, kehalalan dan arti pentingnya imuniasi bagi para balita.

Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

AFP (Acute Flaccid bahwa kasus AFP bukanlah kasus polio, melainkan Paralysis) merupakan gejala kelumpuhan pada anak yang berumur < 15 tahun

yang bersifat layuh/flaccid dan terjadi secara mendadak (akut) bukan karena rudapaksa/trauma/kecelakaan. Untuk membuktikan bahwa virus polio liar sudah tidak ada lagi di Kota Palopo, maka harus ditemukan gejala-gejala yang menyerupai penyakit polio.

Dalam penilaian kinerja surveilans AFP, terdapat indikator NonPolio AFP rate > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15 tahun per tahun dan spesimen adekuat > 80 %. Non Polio AFP rate merupakan target penemuan kasus per tahun. Jadi apabila suatu wilayah memiliki jumlah penduduk < 15 tahun sebanyak 500.000, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFP dalam satu tahun. Jika target penemuan belum dapat dipenuhi, dapat dikatakan bahwa kinerja surveilans AFP belum baik, karena masih dimungkinkan adanya kasus yang belum terjaring.

Tabel 2.74
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Kasus	1	1	0	1	0
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	Orang	49.748	48.835	48.835	51.780	54.522
3	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rasio	2	2	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo survey AFP hanya menemukan 2 kasus non polio AFP Rate, bahkan 2019 sama sekali tak ada. Ini menunjukkan kinerja surveillance Non Polio AFP Rate di Kota Palopo cukup baik.

Ini jika merujuk pada indikator keberhasilan surveillance AFP yang menyebutkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk < 15 tahun sebanyak 500.000 orang, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFP dalam satu tahun. Dengan kondisi Kota Palopo yang hanya memiliki jumlah penduduk dibawah 15 tahun berkisar 54 ribu orang pada tahun 2019, target penemuan AFP sebanyak 0 kasus dan itu tercapai. Kondisi ini juga memberikan gambaran, bahwa kemungkinan penyebaran polio atau gejala lainnya yang mirip polio di Kota Palopo sangat kecil.

Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini sering kali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Kondisi paru-paru basah ini dapat dialami oleh siapa pun. Namun pneumonia pada anak bisa sangat berbahaya dan

menyebabkan kematian. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16% kematian balita di dunia pada tahun 2015. Sementara, di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN, penyakit pneumonia pada anak menyebabkan 2-3 balita yang meninggal setiap jamnya.

Tabel 2.75
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun	Orang	132	51	105	171	163
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1.528	1.618	1.696	1.736	1.772
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	8,64	3,15	6,19	9,85	9,20

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Meskipun persentasenya meningkat dari tahun ke tahun, tabel di atas menunjukkan cakupan penanganan balita yang diperkirakan menderita penyakit berbahaya seperti pneumonia di Kota Palopo masih sangat rendah. Pada tahun 2015, kinerjanya hanya berada pada angka 8,64% meskipun meningkat pada tahun 2018 yang mencapai 9,85%. Artinya pada tahun 2018, dari 100 kasus pneumonia, rata-rata hanya ditangani hanya 9-10 kasus. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait bersama stake holder terkait perlu meningkatkan kinerja untuk menangani kasus pneumonia ini.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Seperti halnya penyakit flu biasa, dalam penyebarannya TBC juga melalui udara. Penyakit tuberkulosis sangat mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan. Di Indonesia, penanganan sejak dini sudah dilakukan dengan memberikan paket imunisasi BCG pada balita. Namun demikian, belum sepenuhnya Indonesia 100% terbebas dari penyakit ini.

Tabel 2.76
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Orang	202	241	243	250	415
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	242	222	176	301	349

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	84,16	108,56	138,07	83,06	119

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun jumlah penderita TBC BTA naik hampir setiap tahunnya, cakupan pelayanan dan pengobatan terhadap terhadap para penderita juga terus meningkat. Ini menunjukkan kinerja pelayanan untuk menangani kasus atau penderita TBC BTA sudah cukup baik. Angkanya melebihi 100% sebab juga terdapat pengidap TBC BTA dari luar Kota Palopo namun mendapat penanganan medis di Kota Palopo, sebagai salah satu daerah yang memiliki pusat layanan rujukan.

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan tingkat penyebaran penyakit atau pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan jumlah pengidap penyakit TBC di Kota Palopo.

Tabel 2.77
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	374	354	430	250	450
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	221	205	243	138	225

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo, terdapat 221 orang yang terjangkit atau menjadi pengidap penyakit TBC, jumlah ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 225 orang per 100.000 penduduk. Olehnya program program baik yang sifatnya pencegahan maupun pengobatan, mestinya menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait pada tahun tahun mendatang.

Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan kasus kematian pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Semakin tinggi angka kasus ini semakin tinggi tingkat kematian karena penyakit TBC.

Tabel 2.78
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	Presentase tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Meski secara jumlah, pengidap TBC di Kota Palopo meningkat setiap tahunnya, namun kematian yang disebabkan oleh karena penyakit ini sepanjang 2013-2018 sama sekali tidak ada. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengobatan yang dilaksanakan cukup efektif dalam mengobati para pasien. Kondisi ini juga menunjukkan pengobatan bagi para pasiennya dilakukan dengan standar operasional yang baik, sehingga kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di Kota Palopo nihil.

Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Sakit. Khusus bagi pelayanan pasien tuberkulosis di Rumah Sakit dilakukan dengan strategi DOTS.

Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik, karena dibutuhkan kedisiplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan, disamping itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring serta penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar, dan dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.79
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam
Program DOTS Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	91	354	430	250	415
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu	Orang	242	222	176	301	454

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	37,60	159,46	244,32	83,06	91,41

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja penanganan pasien TB dalam program DOTS sejak 2015 sampai dengan 2019 cenderung terus membaik. Tahun 2015, hanya 37.60% pasien TB BTA dalam program DOTS mendapatkan pengobatan dan 2019 angka menjadi 91.41% pasien TB BTA yang memperoleh pengobatan melalui program DOTS.

Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.80
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	121	159	154	114	66
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	202	241	243	250	166
3	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	59,90	65,98	63,37	45,60	39,76

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja program DOTS di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan cukup banyaknya pasien TB yang tidak menjalankan prosedur pengobatan TB dalam program DOTS secara baik. Ini bisa dipengaruhi banyak faktor, terutama faktor internal pasien atau pengidap TB. Olehnya diperlukan advokasi dan sosialisasi serta edukasi yang lebih intensi dalam meningkatkan motivasi untuk sembuh serta mengikuti program pengobatan secara teratur bagi pasien atau pengidap TB.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2015 yaitu 280 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 280 kasus. Pada tahun 2019, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 105 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari

tahun 2015 sampai tahun 2019 mencapai 100 persen, hal ini dipengaruhi oleh keaktifan petugas kesehatan di masing – masing wilayah kerja.

Tabel 2.81
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	280	366	74	121	105
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	280	366	74	121	105
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Penderita Diare yang Ditangani

Tabel 2.82
Penderita Diare yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun (*)						
	Orang	3.441	3.384	3.287	3.736	3.736
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (**)						
	Orang	344	338	328	373	373
Jumlah Penduduk						
	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
Penderita diare yang ditangani						
	%	0.000061	0.000058	0.000057	0.000058	0.000054
	Per 100.000	6	6	6	6	5

Sumber Data : ()Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020, (**) Rumus Permendagri 86 Tahun 2017, (***) BPS Kota Palopo tahun 2019*

Tabel di atas menggambarkan tingkat penanganan diare di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo ditangani sebanyak 6 kasus diare, pada 2019, diare yang tertangani 5 kasus diare. Ke depan angka yang menjadi target persentase indikator ini harus ditekan.

Angka Kejadian Malaria

Tabel 2.83
Angka Kejadian Malaria
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Orang	191	287	226	182	114
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3.	Penderita malaria yang ditangani per 100.000	Per 100.000	113	166	128	101	62

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015, dari 100.000 penduduk Kota Palopo terdapat sebanyak 113 kejadian malaria, jumlah menurun sampai tahun 2014. Pada tahun 2016, jumlahnya meningkat cukup besar menjadi 166 kasus per 100.000 penduduk. Namun ditahun 2019 jumlahnya hanya menjadi 62 kasus per 100.000 penduduk. Ini menunjukkan kinerja penanggulangan angka malaria di Kota Palopo mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel 2.84
Tingkat Kematian Akibat Malaria
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kematian tersangka malaria	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	Orang	191	287	226	182	114
3.	Tingkat kematian akibat malaria (1.000)	Per 1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kematian akibat kasus malaria di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 per 1000 penduduk nihil. Ini menggambarkan bahwa penanganan pasien kasus malaria di Kota Palopo berhasil.

Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Tabel 2.85
Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	Orang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Jumlah balita	Orang	15.275	16.178	16.963	17.355	17.724

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Tabel 2.86
Proporsi Anak Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	Orang	5	24	34	10	30
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	Orang	5	24	34	10	30
3	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Prevalensi adalah seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang, dalam hal ini adalah HIV AIDS. Atau dengan kata lain merupakan gambaran tentang frekwensi penderita lama dan baru yang ditemukan selama jangka waktu tertentu terhadap sekelompok populasi dalam waktu tertentu.

Tabel 2.87
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	6	58	117	128	80
2.	Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,000036	0,000335	0,000661	0,000708	0,000433
4	Rasio per 100.000	per 100.000	4	34	66	71	43

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa periode 2015-2019 jumlah pengidap HIV AIDS di Kota Palopo meningkat. Jika 2015 hanya sebanyak 6 orang, tahun 2019 jumlahnya mencapai 80 orang. Dalam rasio per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 terdapat rata-rata 4 kasus HIV AIDS, dan meningkat menjadi rata-rata 43 kasus

per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah sehingga jumlahnya setiap tahun seharusnya bisa ditekan.

Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator ini menggambarkan cakupan edukasi, sosialisasi tentang bahaya HIV/ AIDS di kalangan 15-24 tahun.

Tabel 2.88
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Orang	0	548	0	0	0
2.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama (*)	Orang	39.414	40.279	40.279	41.073	41.727
3	Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020, () Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*

Ini juga menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi publik terutama bagi usia 15-24 tahun oleh Pemerintah Kota Palopo belum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini kadang dilaksanakan dan kadang pula tidak dilaksanakan. Pada tahun 2016, dari 10.000 penduduk usia 15-24 tahun hanya 136 orang yang mendapatkan sosialisasi HIV AIDS. Sementara disisi lain jumlah usia 15-24 tahun yang menjadi fokus sasaran edukasi, jumlahnya terus meningkat. Ini menjadi potensi meningkatnya ancaman bagi prevalensi HIV AIDS di Kota Palopo.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo, menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 100 persen pada tahun 2013 tetap menjadi 100 persen di tahun 2018. Hal ini diakibatkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I meningkat dari 51.080 pada tahun 2013 menjadi 130.531 pada tahun 2018.

Informasi dari Dinas Kesehatan Kota Palopo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2018, tidak ada pasien miskin yang ditolak oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo. Pasien miskin yang berobat di fasilitas kesehatan di Kota Palopo telah ditanggung oleh Pemerintah Kota Palopo. Sebab sejak tahun tersebut

Pemerintah Kota Palopo membayar premi asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kota Palopo.

Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada terutama bagi bayi yang baru lahir. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan bayi yang ada.

Tabel 2.89
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah kunjungan	2.596	2.638	2.982	3.029	3274
2.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	2.747	2.755	2.959	3.029	3282
3	Cakupan kunjungan bayi	%	94,50	95,75	100,78	100,00	99,76

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan rentang waktu 2015-2019, tingkat kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan standar kesehatan, semakin membaik. Ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memantau perkembangan kesehatan bayinya di sejumlah pusat kesehatan yang ada. Jumlah kunjungan bayi setiap tahunnya terus meningkat jika 2015 hanya sebanyak 2.596 tahun 2019 mencapai 3.274 kunjungan atau 99,76 % dari jumlah bayi yang lahir.

Cakupan Puskesmas

Tabel 2.90
Cakupan Puskesmas
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah puskesmas	12	12	12	12	12
2.	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9
3	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Palopo memiliki minimal satu pusat kesehatan masyarakat. Bahkan sejak 2013-2018 ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Kondisi ini tentu diharapkan bisa meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo.

Cakupan Pembantu Puskesmas

Tabel 2.91
Cakupan Pembantu Puskesmas
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pembantu puskesmas	22	22	29	30	30
2.	Jumlah seluruh kelurahan	48	48	48	48	48
3	Cakupan pembantu puskesmas (%)	45,83	45,83	60,42	62,50	62,50

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015 hanya 45,83 % di Kota Palopo yang memiliki puskesmas pembantu. kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017-2019, 62,50 % kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memiliki puskesmas pembantu. Ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah puskesmas pembantu yang diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap sarana kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan dirinya dan calon bayinya pada sarana kesehatan yang ada.

Tabel 2.92
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante-natal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.774	2.796	3.001	3.004	3.159
2.	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	3.007	3.083	3.234	3.193	3.159
3	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	92,25	90,69	92,80	94,08	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan dirinya dan kesehatan bayinya semakin baik dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2015 sebesar 92,25 % pada tahun 2019 meningkat menjadi 100 %.

Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa nifas merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat

kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 – 8 minggu atau dalam agama islam disebut 40 hari. Tujuan dari masa nifas yaitu untuk mengetahui kesejahtraan ibu dan bayi, baik dari kesehatan, kebersihan , nutrisi, pemberian ASI, tanda bahaya masa nifas, perdarahan, cara mencegah hipotermi pada bayi. Semakin tinggi nilai indikatornya semakin baik kesadaran ibu yang sudah melahirkan terhadap status kesehatan dirinya dan bayinya usai melahirkan.

Tabel 2.93
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.635	2.743	2.816	3.177	3.210
2.	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	2.870	2.944	3.087	3.158	3.225
3	Cakupan pelayanan nifas	%	91,81	93,17	91,22	100,60	99,53

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menggambarkan tingkat kesadaran ibu usai melahirkan sepanjang 2015-2019 sudah cukup baik. Meski demikian data ini juga mengungkapkan masih adanya ibu yang usai melahirkan namun tidak lagi memanfaatkan pelayanan kesehatan nifas. Olehnya masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi sehingga kesadaran ibu yang telah melahirkan untuk memantau perkembangan kesehatannya semakin baik di tahun mendatang

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Menurut World health Organization (WHO) Neonatus adalah bayi baru lahir hingga berumur 28 hari. Sementara menurut kemenkes 2015, adalah bayi yang baru lahir berusia 0-28 hari sejak dilahirkan. Umur ini sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan. Olehnya penanganan untuk mengatasi atau mencegah munculnya berbagai macam ancaman gangguan kesehatan sangat penting dilaksanakan.

Tabel 2.94
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	319	310	301	288	376
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	412	413	444	454	492

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	77,43	75,06	67,79	63,44	76,42

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2015-2019 jumlah bayi yang lahir di Kota Palopo dengan kondisi neonatus beragam semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2015 hanya 319, tahun 2019 sebanyak 376. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang serius terutama pada aspek pencegahan, dimana mengedukasi ibu hamil menjadi point penting dalam upaya tersebut. Melihat persentase penanganan, kinerja indikator ini cukup baik ditandai dengan meningkatnya angka kinerja penanganan bayi dengan komplikasi neonatus.

Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.95
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	5.390	7.248	8.431	8.486	10.418
2.	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	12.543	12.861	13.487	17.355	14.093
3	Cakupan pelayanan anak balita	%	42,97	56,36	62,51	48,90	73,92

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2015-2019 cakupan pelayanan anak balita menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Per tahun terjadi peningkatan pelayanan terhadap anak balita. Ini menggambarkan semakin baiknya kesadaran para orang tua dalam memeriksakan kesehatan anak balitanya.

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin

Indikator ini hanya mengukur pada rumah tangga miskin. Kemiskinan umumnya menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab anak usia 6-12 tahun di keluarga miskin tidak pernah mendapatkan makanan pendamping ASI, sehingga terjadi kerawanan gizi. Olehnya pemerintah melaksanakan program pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskin.

Tabel 2.96
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan
Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP ASI	Orang	99	564	507	339	290
2.	Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Orang	99	564	507	339	290
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2015-2019, semua anak berumur 6-12 tahun yang lahir dari keluarga miskin di Kota Palopo menerima makanan pendamping ASI. Ini membuktikan bahwa komitmen Pemkot Palopo untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat miskin cukup baik.

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Indikator ini menunjukkan langkah dan cakupan kemampuan pemerintah daerah dalam memeriksa status kesehatan seluruh siswa sekolah dasar pada tahun tertentu. Semakin tinggi angka indikator ini semakin baik cakupan pemeriksaan siswa sekolah yang ada setingkat sekolah dasar.

Tabel 2.97
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.188	2.660	2.790	2.619	2.981
2.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.368	2.692	2.861	2.690	3.044
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	94,66	98,81	97,52	97,36	97,93

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa 2015-2019, sebagian besar siswa sekolah dasar di Kota Palopo setiap tahunnya diperiksa status kesehatannya. Cakupan pemeriksaan mencakup 97,93 % siswa sekolah dasar yang ada. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palopo menciptakan generasi yang sehat sejak pendidikan dasar.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Pelayanan bagi masyarakat miskin di Kota Palopo 2015-2019 telah mencakup semua pasien dari golongan tidak mampu. Besarnya persentase yang melebihi angka 100% disebabkan sangat banyaknya pasien masyarakat miskin dari kabupaten di sekitar Kota Palopo yang memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang ada di Kota Palopo yakni RSUD Sawerigading Rampoang.

Jumlah masyarakat miskin ini merupakan 40% masyarakat miskin yang berada pada desil paling bawah. Sejak BPJS berlaku, Dinas kesehatan tak bisa memisahkan data pasien miskin yang mengakses sarkes strata 1

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2.98
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	6	6	7	8	9
2.	Jumlah RS	6	6	7	8	9
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Indikator ini menggambarkan kecepatan pemerintah kota palopo merespon terjadinya sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Kota Palopo. Kecepatan merespon sebuah KLB adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatasi KLB di sebuah daerah.

Kejadian Luar Biasa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyakit tertentu. Biasa nya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi. Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berhubungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi.

Tabel 2.99
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KLB di desa/kelurahan ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	Kasus	2	4	0	3	0

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
2.	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Kasus	2	4	0	3	0
3	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	0,00	100	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo memberikan respon yang sangat baik terhadap adanya KLB di wilayah administrasi Kota Palopo. Namun yang mesti diwaspadai adalah terjadinya KLB hampir setiap tahun di Kota Palopo.

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Tabel 2.100
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Berkondisi Baik 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	279.1	279.1	296.68	342.09	350.03
b.	Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	502	502	503.16	503.16	503.16
c	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	55.60	55.6	58.96	67.99	69.57

Sumber data : Palopo Dalam Angka, 2019

Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indikator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan

jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada.

Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan fisik yang mungkin ditemui.

Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan.

Tabel 2.101
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Propinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	502	502	503.16	503.16	503.16
b.	Jumlah penduduk	168894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)	30	29	28	28	27

Sumber Data : BPS Palopo Dalam Angka 2019

Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sementara pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No 1 Tahun 2011).

Indikator ini menggambarkan kondisi jalan untuk mengakses pemukiman masyarakat yang memperlihatkan konektifitas dan aksesibilitas sebuah kawasan pemukiman penduduk. Semakin besar nilai indikator ini semakin sulit pula aksesibilitas wilayah maupun transportasi penduduk yang bermukim di daerah tersebut.

Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Data panjang jalan dalam indicator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan kecepatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.102
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	279.1	220.49	264.14	309.54	317.48
b.	Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	443.39	443.39	443.39	443.39	443.39
c	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)	62.95	49.73	59.57	69.81	71.60

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2019

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Tabel 2.103
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	0	0,875	5,663	8,06	10,76
b.	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	443,39	443,39	443,39	443,39	503,16
c	Persentase	0	0,20	1,28	1,79	2,14

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data yang ditampilkan pada tabel di atas hanya data panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, sesuai indikator yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebab masih terdapat ruas jalan lain di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase namun ukurannya lebih kecil daripada 1,5 meter.

Data pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2019, hanya 2,14% jalan di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase selebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 0,20%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ruas jalan di Kota

Palopo yang memiliki saluran pembuangan air/drainase yang memadai dengan lebar minimal 1,5 meter.

Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Tabel 2.104
Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	-	-	-	-	
b.	Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	835.18	886.78	886.78	886.78	
c	Persentase	-	-	-	-	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Tabel 2.105
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	26.651	37.457	39.183	42.622	42.772
2	Jumlah Rumah Tinggal	40.716	42.262	43.167	44.209	44.081
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	65,46	88,63	90,77	96,41	97,03

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan terdapat sebanyak 97.03 % rumah tinggal di Kota Palopo telah bersanitasi pada tahun 2019. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang berada pada angka 65,46 %. Ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hunian masyarakat Kota Palopo dalam kurun waktu 2015-2019.

Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2.106

**Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	7.673,93	8.090,78	8.735,01	9.041,97	9.492,93
b.	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97
c.	Persentase (%)	40,50	42,70	46,10	47,72	50,10

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sempadan sungai di Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin banyak yang diakses oleh bangunan liar/tak berijin. Jika tahun 2015 hanya 40,50 % sempadan sungai yang diakses bangunan liar atau sepanjang 7.673 Km, tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 52,05 %. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan kinerja penataan ruang agar sempadan sungai yang dipakai oleh bangunan liar semakin menurun.

Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tabel 2.107

**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air
Tidak Tersumbat Kota Palopo Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	73,39	64,23	55,47	47,24	46,90
b.	Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	498,73	507,90	516,65	524,89	529,04
	Persentase	14,71	12,64	10,73	8,99	8,86

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan kualitas dan fungsi drainase di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2015 terdapat 14,71 % drainase Kota Palopo yang kondisinya baik dalam artian tidak tersumbat, pada tahun 2019 hanya ada 8,86 % drainase Kota Palopo yang kondisinya baik atau tidak tersumbat. Ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan atau mengakselerasi program dan kegiatan penanganan drainase pada tahun mendatang.

Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Tabel 2.108

**Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luasan daerah yang tergenang (Ha)	0,437	0,306	0,214	0,078	

b.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	3,028	2,120	1,484	0,545	
c	Persentase (a/b x 100%)	14,43	14,43	14,42	14,31	

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan luas daerah yang tidak terjadi genangan di Kota Palopo stagnan atau berjalan di tempat. Sampai tahun 2018, hanya 14,31% daerah di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan hanya sebagian kecil daerah rawan genangan di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan 2 kali dalam setahun.

Kemudian luas daerah yang tergenang lebih dari dua kali dalam setahun di Kota Palopo jauh berkurang pada tahun 2018 yang berada pada angka 0,078 Ha. Meski pada tahun 2013, luas daerah yang tergenang mencapai 0,892 Ha. Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota Palopo juga berkurang dari 6,18 Ha pada tahun 2013 menurun menjadi 0,47 Ha pada tahun 2018. Pemerintah Kota Palopo menginginkan tidak ada lagi daerah yang tergenang di Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang.

Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Tabel 2.109
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	927,47	1.071,94	1.074,93	1.164,07	1.242,70
b.	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94
	Persentase (a/b x 100%)	2,94	3,39	3,40	3,69	5,05

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan pada tahun 2015 Pemerintah Kota Palopo baru mampu menangani 2,94 % wilayah aliran sungai rawan longsor/jalan penghubung rawan longsor, dengan membangun turap. Namun pada tahun 2019, persentase luas wilayah yang mampu ditangani meningkat menjadi 5,05 %, namun masih menyisakan 94,95% wilayah rawan longsor baik aliran sungai maupun jalan penghubung yang belum tertangani atau memiliki turap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terjadinya musibah longsor pada daerah rawan termasuk pada lokasi jalan penghubung dan daerah aliran sungai di Kota Palopo potensinya masih sangat besar.

Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.110
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	383,09	522,39	678,05	743,29	667,77
b.	Luas irigasi kabupaten (Ha)	800	800	950,45	980,54	907,90
	Persentase (a/b x 100%)	47,89	65,30	71,34	75,80	73,55

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa luas irigasi di Kota Palopo yang berkondisi baik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika pada tahun 2015 pada angka 47,89 % pada tahun 2019 pada angka 73,55 %. Meski demikian data ini juga menunjukkan bahwa masih ada irigasi Kota Palopo yang kondisinya tidak baik dimana pada tahun 2019, luasnya masih mencapai 240,13 Ha. Angka inilah yang mestinya menjadi target kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang ke depannya dalam melaksanakan program dan kegiatan keririgasan.

Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.111
Persentase Rasio Jaringan Irigasi
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang Saluran Irigasi (Km)	27,473	41,760	50,627	55,714	
b.	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	2687	2689	2685	2.686	
c	Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)	10,22	15,53	18,86	20,74	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018, Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2018, panjang irigasi untuk mengairi sawah seluas 1000 Ha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013 untuk 1000 Ha sawah hanya dilayani irigasi sepanjang 9,41 Km, pada tahun 2018 untuk luasan yang sama telah mampu dilayani jaringan irigasi sepanjang 20,74 Km. Meningkatnya cakupan irigasi terhadap lahan persawahan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas lahan pertanian dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat alih fungsi lahan pertanian terutama persawahan di Kota Palopo.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 2.112
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	144,100	148,725	165,284	171.359	176.521
b.	Jumlah Penduduk (jiwa)	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
	Persentase (a/b x 100%)	85.32	86.01	93,00	94,84	95,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap air minum sebanyak 95,61 %. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya berada pada angka 85,32 %. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 4 % penduduk Kota Palopo yang belum memiliki akses air minum.

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air yang tidak terlindung.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2015, jumlah penduduk Kota Palopo yang memiliki Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak sebanyak 144.100 jiwa atau sebesar 85.32 % dari jumlah penduduk atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 26.341 Rumah Tangga atau 71,44 % dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Kondisi ini kemudian jauh lebih membaik pada tahun 2018, dimana jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak 171.359 jiwa atau 94,84% dari jumlah penduduk yang ada atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 39.444 Rumah Tangga atau 94.49% dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Tabel 2.113
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Sumber Air Bersih	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
A	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
1	Leding (Perpipaan)	RT	21,958	30,929	32680	36.224	38.162
2	Keran Umum	RT	0	0	-	0	0
3	Hydrant Umum	RT	0	0	-	0	67
4	Terminal Air	RT	0	0	-	0	0
5	Air Hujan	RT	0	0	-	0	0
6	Mata air terlindungi	RT	3,427	1,080	1,158	744	
7	Sumur Terlindungi	RT	956	455	410	321	
8	Sumur (Bor/Pompa)	RT	0	0	-	0	0
B	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		RT	26.341	32.464	34.248	37.269	39.207
C	Jumlah Rumah Tangga						
		RT	36.871	37.749	38.641	39.444	40.303
D	Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		RT	71,44	86,00	88,63	94,49	97,28
E	Jumlah Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		Jiwa	144.100	148.725	165.284	171.359	176.521
F	Jumlah Penduduk Kota Palopo						
		Jiwa	168,894	172,916	176,907	180.678	184.614
G	Persentase Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		Persen	85.32	86.01	93,43	94,84	95,61

Sumber Data : Olahan dari Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, BPS 2019

Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut UU No 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Tabel 2.114
Persentase Areal Kawasan Kumuh
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urutan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Luas kawasan Kumuh (Ha)	85.23	42.58	32.08	20.85	3,85
b	Luas wilayah Kota Palopo (Ha)	2.529.90	2.529.90	2.529.90	2.529,90	2.529,90
c	Persentase luas areal kawasan kumuh	3.30	1.60	1.20	0.82	0,15

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, total luas kawasan kumuh yang telah ditangani sebanyak 85.48 Ha. Dari luas awal kawasan kumuh sebanyak 89.33 Ha pada tahun 2013, menjadi 3,85 Ha pada tahun 2019. Sehingga sampai pada tahun 2019 persentase luas areal kawasan kumuh Kota Palopo terhadap luas wilayah Kota Palopo, hanya tersisa 0,15 %.

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tabel 2.115
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urutan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (ton)	981	1189	3.614	1.376	1.387
b	Total volume sampah (Ton)	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
c	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (%)	2,5	3,3	3,5	4.02	4,11

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan pada tahun 2015, volume sampah yang berhasil dikurangi sebelum sampai ke tempat Pembuangan Akhir Sampah hanya sebanyak 981 ton atau sekitar 2,50% dari produksi sampah yang ada. Tahun 2019, volume sampah yang berhasil dikurangi meningkat menjadi 1.387 Ton atau sebanyak 4,11%.

Ini menunjukkan adanya progress pengurangan sampah di Kota Palopo yang semakin tahun semakin membaik. Artinya proses reduce, recycle dan reuse

sampah di Kota Palopo berjalan sesuai yang diharapkan. Dampaknya sampah yang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah bisa dikurangi sehingga masa pakai/operasinya juga diharapkan semakin bertambah.

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung tempat pemakaman umum yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.116
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Total Luas Tempat Pemakaman Umum (ha)	30	28	28	28	28
b	Jumlah Lokasi Tempat Pemakaman Umum	17	15	15	15	15
c	Jumlah Penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	Rasio per 10.000 penduduk	1.78	1.62	1.58	1.55	1.52

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 untuk 10.000 penduduk Kota Palopo rata-rata hanya tersedia 1.52 Ha lahan pemakaman. Rasio ini menurun jika dibandingkan tahun 2015 dimana untuk 10.000 penduduk terdapat 1.78 Ha lahan pemakaman.

Pada tahun 2015 terdapat 17 titik lokasi pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2015 terdapat 17 makam, namun tahun 2016, dua lokasi pemakaman ditutup karena dinyatakan sudah penuh. Sehingga sejak tahun 2016-2019 hanya terdapat 15 lokasi pemakaman umum di Kota Palopo yang bisa diakses masyarakat umum. Kapasitas makam per Ha, diperkirakan mampu menyediakan sebanyak 4000-5000 kuburan.

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung rumah ibadah yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo.

Tabel 2.117
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Tempat Ibadah	312	312	316	322	336
	Mesjid	187	187	191	193	202
	Mushola	47	47	47	52	52

	Gereja Protestan	70	70	70	69	74
	Gereja Katolik	5	5	5	5	5
	Vihara	2	2	2	2	2
	Kuil	1	1	1	1	1
b.	Jumlah Penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
c	Rasio per 1000 penduduk	1,84	1,79	1,78	1,78	1.82

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Sesuai angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk 1000 penduduk Kota Palopo tersedia sebanyak 2 (pembulatan 1,84) tempat ibadah di Kota Palopo. Kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun 2019, dimana hanya terdapat 2 tempat ibadah per 1000 penduduk Kota Palopo.

2.1.3.1.3.2. Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Hak Guna Bangunan atau HGB adalah hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu. Sementara Hak Pengelolaan atau HPL menurut Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memanfaatkan tanah yang berada dalam penguasaannya menjadi ruang terbuka hijau. Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau semakin baik.

Tabel 2.118
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas ruang terbuka hijau (Ha)	1.168,21	1.169,23	1.170,72	1.171,81	1.174,21
b.	Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)					
c	Rasio Ruang Terbuka Hijau					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2015. Jika pada tahun 2015 tersedianya ruang terbuka hijau sebanyak 1.168 Ha, pada tahun 2019 menjadi 1.174 Ha, atau bertambah sebanyak 6 Ha dalam lima tahun terakhir.

Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari : Taman kota, Taman wisata alam, Taman rekreasi, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman hutan raya, Hutan kota, dan hutan lindung.

Sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palopo, Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo akan dilaksanakan sebagai berikut :

- RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 5.269,55 hektar atau sebesar 20,41%.
- RTH Private seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Tabel 2.119
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luasan RTH publik yang tersedia (ha)	1.168.21	1.169.23	1.170.72	1.171,81	1.174,21
b.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	1.525.89	1.525.89	1.525.89	1.525,89	1.525,89
c	Persentase Luasan RTH dari Luas Wilayah Kota (%)	76.56	76.63	76.72	76,79	76,95

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020, Dok Rencana Tata Ruang Kota Palopo

Angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 76,95% target luasan RTH di Kota Palopo telah dicapai sampai dengan tahun 2019. Sisanya sebanyak 23,05% belum tercapai. Artinya pemerintah Kota Palopo masih harus membangun 351.68 Ha ruang terbuka hijau bagi publik untuk memenuhi target luasan RTH yang ada di dalam dokumen RT RW Kota Palopo.

Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Tabel 2.120
Rasio Bangunan Ber – IMB Per Satuan Bangunan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah bangunan ber IMB (Buah)	910	1.465	1.595	1.202	1.255
b.	Jumlah bangunan (Buah)	-	-	-	-	-
c	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	-	-	-	-	-

d	Per 100 (%)	-	-	-		

Sumber Data : SIPD Kota Palopo, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.121
Rasio Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah rumah layak huni	25.277	28.258	29.777	32.097	34.268
b	Jumlah penduduk	168.894	172.916	176.907	180.678	182.107
c	Rasio Rumah Layak Huni	0,149	0,163	0,168	0,178	0,188
d	Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulsel (*)	0,21	0,22	0,19	0,19	

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2020, (*) RKPD Sulsel 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya terdapat sebanyak 25.277 unit rumah layak huni, pada tahun 2019 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 34.268 unit.

Rasio rumah layak huni pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 149 unit rumah layak huni, kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2019 terdapat 188 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

Jika satu rumah layak huni diasumsikan dihuni oleh lima orang penduduk, artinya pada tahun 2015 dari 1000 penduduk, hanya terdapat 745 orang penduduk yang tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 255 orang tinggal di rumah belum layak huni. Sementara di tahun 2019, untuk rasio 1000 penduduk, sebanyak 940 penduduk sudah tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 60 orang masih tinggal di rumah belum layak huni.

Meski demikian capaian rasio rumah layak huni ini masih berada di bawah angka rasio rumah layak huni Provinsi Sulawesi Selatan. Rasio rumah layak huni Sulsel yang pada tahun 2018 berada pada angka 0,19, tahun 2016 pada angka 0,22, tahun 2015 pada angka 0,21 dan 2014 sebesar 0,20. (Dok. RKPD Sulsel 2019). Salah

satu upaya pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan indikator kinerja ini adalah melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Rasio Pemukiman Layak Huni

Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2.122
Rasio Permukiman Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	4.219	4.356	4.414	5.078	5.130
b	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.590	4.622	4.682	5.561	5.561
c	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	91,93	94,24	94,28	91,32	92,26
d	Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%)	89	89	97	97	

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2020 dan Dok. RKPD Sulsel 2019

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2015 pada angka 91.93% menjadi 92.26%. Angka pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 Ha areal permukiman, terdapat 91.93 Ha areal permukiman layak huni. Jumlah ini meningkat menjadi 92.26 Ha per 100 Ha areal permukiman pada tahun 2019.

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel 2.123
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	25.277	28.258	29.777	33.856	34.378
b.	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	36.548	36.978	37.504	37.076	37.598
	Persentase	%	69,16	76,42	79,39	91,32	91,44

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 rumah yang ada, sebanyak 69 rumah merupakan rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik

dimana pada tahun 2019 angkanya menjadi 91 rumah layak huni per 100 rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2015-2019.

Keberadaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan bagi MBR dan Permendagri 55 Tahun 2017 tentang kemudahan memperoleh perizinan bagi pembangunan perumahan MBR juga berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Tabel 2.124
Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	3.131	3.412	3.928	4.390	4.912
b.	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	3.693	4.012	4.265	4.727	5.249
	Persentase	%	84,78	85,04	92,10	92,87	93,58

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 84 rumah tangga MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2019 angkanya menjadi 93 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2015-2019. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni.

Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.125
Persentase Pemukiman yang Tertata
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas area permukiman tertata	Ha	4.501	4.535	4.647	4.703	4702.47

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
b.	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	4.59	4.622	4682	4.738	4738
	Persentase	%	98,06	98,12	99,25	99,26	99.25

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Palopo meningkat dari 98,06 % menjadi 99,25% pada tahun 2019. Selain persentase, luas area pemukiman yang tertata pun meningkat dari 4501 Ha pada tahun 2015 menjadi 4.702 Ha pada tahun 2019.

Angka dalam tabel juga menunjukkan dari 100 Ha area pemukiman yang ada, pada tahun 2015 terdapat 98 Ha sudah tertata. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2019 angkanya menjadi 99 Ha area pemukiman yang tertata dari 100 Ha area pemukiman yang ada. Ini menunjukkan luas area pemukiman yang tertata semakin meningkat, di Kota Palopo sepanjang 2015-2019.

Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman yang mengalami kekumuhan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yang tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2.126
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	85.23	42.58	32.08	20,85	3,85
b.	Luas wilayah Kota Palopo	Ha	2.529.9	2.529.90	2.529.90	2.529,90	2.529,90
	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	3.36	1.68	1.26	0,82	0,15

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020, Keterangan : 1 Km2 = 100 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2019 persentase luas lingkungan pemukiman kumuh terhadap total luas wilayah Kota Palopo sebanyak 0.15%, menurun dibandingkan kondisi tahun 2013 yang berada pada angka 3.36%.

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Tabel 2.127
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2015– 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	4.10	46.75	57.25	68,48	85,48
b.	Luas pemukiman kumuh	Ha	85.23	42.58	32.08	20,85	3,85
c	Persentase luasan pemukiman kumuh	%	95.46	45.15	35.91	23,34	4,31

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Pada tahun 2015 luas pemukiman kumuh Kota Palopo adalah 89.33 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo. Pada tahun 2015 sebanyak 4.10 Ha ditangani, sehingga Desember 2015 hanya tersisa 85.23 Ha pemukiman kumuh di Kota Palopo.

Pada tahun 2016, akumulasi pemukiman kumuh yang tertangani 46.75, sehingga luas pemukiman kumuh pada tahun 2016 berkurang menjadi 42.58 Ha. Di tahun 2018 kembali ditangani sebanyak 67.88 Ha, sehingga sampai Desember 2018, luas pemukiman kumuh di Kota Palopo hanya tersisa 21,45 Ha.

Angka dalam tabel di atas juga menunjukkan total luas pemukiman kumuh yang sudah ditangani Pemerintah Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 sebanyak 85.48 Ha dari kondisi awal 89.33 Ha dan tersisa 3.85 Ha pada tahun 2019.

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Tabel 2.128
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	KK	3.084	2.931	2.864	776	189
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.778	39.773
	Persentase	%	8,36	7,76	7,41	1,95	0,48

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, terdapat sebanyak 8 rumah tangga kumuh perkotaan, kondisi ini semakin membaik di tahun 2019, dimana hanya terdapat 1 rumah tangga kumuh dari 100 rumah yang ada.

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Indikator ini menggambarkan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat.

Tabel 2.129
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan
PSU Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	24	27	30	32	41
b.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	129	135	143	150	159
	Persentase	%	18,60	20,00	20,98	21,33	25,79

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Jika pada tahun 2015 terdapat 18,60% lingkungan yang didukung PSU, pada tahun 2019 jumlah menurun menjadi 25,79%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2019, hanya 26 (pembulatan 25,79) lingkungan perumahan yang memiliki PSU.

2.1.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 2.130
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	96	96	96	96	0
b.	1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48
	Persentase	%	200	200	200	200	0

Sumber Data : Badan Kesbang Pol Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah petugas Linmas sebanyak 2 orang dalam 1 kelurahan. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja indikator ini sesuai data Kesbang Pol Kota Palopo Tahun 2018, adalah anggota Linmas yang tidak terdaftar, dimana personilnya selalu berganti atau tidak permanen, belum adanya insentif bulanan bagi linmas dan kurangnya event pembinaan bagi mereka. Beberapa hal yang menjadi solusi atas kondisi ini adalah

memperbaiki tata kelola Linmas dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang anggota Linmas sehingga lebih mengikat dan permanen, kemudian memberikan mereka insentif yang telah memiliki SK dan memberikan pelatihan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketertarikan, Keindahan)

Tabel 2.131
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keterlibatan, Ketertarikan, Keindahan)
Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	225	215	186	169	153
b.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	232	233	208	184	160
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keterlibatan, ketertarikan, keindahan) (%)	98,80	96,60	92,20	91,80	95,62

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 – 2019, seluruh laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo semuanya diselesaikan. Namun sesuai data Pol PP Kota Palopo, jumlah pelanggaran K3 yang mereka selesaikan jauh lebih banyak dari yang dilaporkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meski pelanggaran K3 tersebut tidak dilaporkan, jika ditemukan oleh Satuan Pol PP juga diselesaikan.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015, hanya 6,06%, tahun 2019 menjadi 10,08%. Artinya sampai dengan tahun 2019, dari 252,99 Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 10 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

Tabel 2.132
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km ²	15	22,5	22,5	22,5	22,5
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km ²	247,50	247,50	247,50	252,99	252,99
	Persentase	%	6,06	9,09	9,09	10,08	10,08

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2020

Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau respons time rate adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesigapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2.133
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	67	40	37	36	61
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	76	60	39	38	93
	Persentase	%	88,16	67,67	94,87	94,74	65,59

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2015, dari 76 kasus kebakaran, hanya 67 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit, sementara di 2019, dari 93 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal 15 menit sebanyak 61 kasus. Ke depan angka yang menjadi target indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Persentase Penegakan PERDA

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran Perda di Kota Palopo semakin membaik. Jika tahun 2014 berada pada angka 96,60%, tahun 2018 menurun menjadi 91,80%. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ketetapan Peraturan Daerah.

Tabel 2.134
Persentase Penegakan PERDA
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	225	215	186	169	153
b.	Jumlah pelanggaran PERDA	230	220	190	184	160
	Persentase penegakan PERDA (%)	97,80	97,70	97,90	91,80	95,62

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.135
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	6.813	6.857	8.777	9.586	11.068
b	Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	Jiwa	18.573	18.556	18.388	18.586	20.134
c	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	36.68	36.95	47.73	51.58	54,97

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Pada tahun 2015 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 36,68% dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2016 jumlah tersebut menurun menjadi 36,95%, tetapi tahun berikutnya terus meningkat hingga tahun 2019 persentase pada angka 54,97%. Ini menunjukkan semakin tahun cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palopo semakin meningkat. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase PMKS yang Tertangani

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.136
Persentase PMKS yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6.858	6.822	6.875	9.598	11.139
b	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	18.608	18.597	18.588	18.662	20.221
c	Persentase PMKS yang Tertangani	%	36.85	36.68	36.98	51,43	55,09

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang tertangani di Kota Palopo sejak 2015 – 2019 meningkat. Jika 2015 sebanyak 36.85 % artinya dari 100 orang PMKS, yang berhasil ditangani sebanyak 36 orang, namun 2019 berhasil ditangani 55 orang dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar.

Tabel 2.137
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	6.827	7.011	8.748	9.318	10.245
b	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	15.831	16.015	15.184	15.778	16.990
c	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	43.12	43.77	57,61	59,06	60,30

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo sejak 2015 – 2019 meningkat. Jika 2015 sebanyak 43,12% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 43 orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2019 sebanyak 60 orang bisa diberikan bantuan sosial, dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2.138
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan Sosial di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	11
b	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	11
c	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial						
		Unit	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Target SPM untuk indikator ini sebesar 100%. Sejak tahun 2015 – 2019, target indikator ini telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa semua panti sosial yang ada di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial bagi para penghuninya.

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.139
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan
Sosial Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos						
		Unit	48	48	48	48	48
b	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala						
		Unit	48	48	48	48	48
c	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa semua WKSBM di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Palopo sejak tahun 2015 – 2019, setiap tahunnya memberikan bantuan kepada kelompok WKSBM. Setiap tahunnya sebanyak 4 kelompok.

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel 2.140
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	39	223	139	347	22
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	39	223	139	347	78
c	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Target SPM untuk indikator ini adalah 80% artinya dari 100 orang korban bencana 80 orang harus mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Di Kota Palopo capaian indikator kinerja ini telah terpenuhi.

Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2.141
Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun						
		Jiwa	0	42	0	0	0
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala						
		Jiwa	0	42	0	0	0
c	Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap						
		%	0	100	0	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2.142
Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia
Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun						
		Orang	0	39	138	248	672
b	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun						
		Orang	985	992	1.162	1.260	1.622
c	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial						
		%	0	3,93	11,88	19,68	41,43

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan pada tahun 2019, dari 100 penyandang cacat di Kota Palopo 41 orang penyandang yang menerima jaminan sosial. Capaian indikator ini di Kota palopo sepanjang 2015 – 2019 masih sangat perlu diakselerasi.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Tabel 2.143
Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun
di Kota Palopo 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	8	10	14	16	18
2	Jumlah Perusahaan	1.459	1.678	1.685	1.741	1887
3	Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	961	829	774	719	707
4	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)	5,5	6,0	8,3	9,19	9.5
5	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)	0.83	1.21	1.81	2,23	2.55

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja

Data di atas menunjukkan sepanjang 2015-2019, kasus sengketa pekerja dan pengusaha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015, dari 1000 perusahaan yang ada, rata-rata jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan sebanyak 5-6 kasus, tahun 2019 menjadi 9-10 kasus.

Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Indikator ini menggambarkan besaran sengketa antara pengusaha dan pekerja yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian bersama. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak sengketa/perselisihan antara buruh/pekerja dan pengusaha yang diselesaikan melalui kesempatan dan musyawarah.

Tabel 2.144
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	7	8	10	11	2
2	Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	8	10	14	15	18
3	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	88	80	71	73	11

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menurun, jika 2015 sebanyak 88% tahun 2019 hanya pada angka 11%.

Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Tabel 2.145
Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Org	66	78	121	718	1.072
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	4.179	2.491	2.664	2.74	2.018
Pencari Kerja yang ditempatkan (a/b)		%	1,58	3,13	4,54	26,20	53,12

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa, dari 100 orang pencari kerja yang mendaftar, pada tahun 2015 hanya 1-2 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Kondisinya jauh berbeda terjadi pada tahun 2019, dimana 53 orang tenaga kerja yang ditempatkan.

Keselamatan dan Perlindungan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin

tinggi angka indikator ini semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya.

Tabel 2.146
Persentase Keselamatan dan Perlindungan
Kota Palopo Tahun 2013 -2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Buah	345	364	375	406	420	431
2	Jumlah Perusahaan	Buah	1.407	1.438	1.459	1.678	1.689	1.700
3	Persentase Keselamatan & Perlindungan (x 100)	%	25	25	26	24	25	25

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan pada tahun 2013, dari 100 perusahaan yang ada, hanya 25% perusahaan yang menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Kondisi ini berlangsung cukup stagnan sampai tahun 2018. Dimana rata-rata kinerja indikator ini hanya 24-26%. Jika dilihat dari jumlah, angka cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Indikator ini menggambarkan cakupan pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak jumlah pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya.

Tabel 2. 147
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	Orang	7.853	10.383	10.478	11.438	13.765
2	Jumlah Buruh/Pekerja	Orang	21.735	28.337	28.377	29.337	25.105
3	Besaran Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek	Persen	36	37	37	39	54.82

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Data di atas menunjukkan persentase buruh pekerja untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Palopo dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Ini menggambarkan adanya kesadaran pekerja untuk menjadi bagian dalam program jaminan kesejahteraan sosial ketenagakerjaan ini.

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator ini menggambarkan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Indikator yang menunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam menerapkan prinsip prinsip sesuai UU ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh.

Tabel 2.148
Persentase Pemeriksaan Perusahaan
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Buah	8	8	6	8	8
2	Jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*)	Buah	770	961	829	825	707
3	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	1,01	0,87	0,67	0,97	1.13

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun

Data diatas menunjukkan bahwa besaran pemeriksaan perusahaan di Kota Palopo sepanjang 2015-2019 masih sangat rendah. Tahun 2015, rasio menunjukkan dari 100 perusahaan hanya 1 perusahaan yang diperiksa, kondisi yang tak jauh berbeda dengan tahun 2019. Ini menunjukkan belum optimalnya pengawasan pada sejumlah perusahaan di Kota Palopo.

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan kerja bagi para karyawannya.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini memberikan gambaran proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yang memiliki keterampilan kompetensi kerja setelah medapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa.

Tabel 2.149
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	16	88	102	236
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	210	280	305	319	508
c	Persentase	%	7.62	5.71	28.85	31,97	46,45

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Data di atas menunjukkan besaran tenaga kerja yang dilatih dengan berbasis kompetensi meningkat sepanjang tahun 2015-2019. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 9.82% pada tahun 2019 sudah mencapai angka 46.45%.

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas tenaga kerja yang siap kerja di sebuah daerah.

Tabel 2.150
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	16	32	35	0
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	288	270	286	289	0
	Persentase	%	5.56	5.92	11.2	12,10	0

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tabel 2.151
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	64	20	18	0
b.	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	40	175	343	341	0
	Persentase	%	40,00	36.60	5.83	5,28	0

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan oleh dinas tenaga kerja semakin menurun. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 40%, pada tahun 2019 menjadi 0%.

2.1.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.152
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	3.293	2.933	2.902	2.811	2.795
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	22.726	25.711	26.563	26.532	30135
c	Persentase	%	14,49	11,40	10,92	10,59	9,27

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2015-2019 menurun. Pada tahun 2015 pada angka 14,49% sementara di 2019 hanya pada angka 9,27%.

Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Tabel 2.153
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kursi DPR yang diduduki perempuan	Orang	5	5	5	5	7
b.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	25
c	Persentase	%	20	20	20	20	28

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif Kota Palopo sejak periode 2009-2013 dan periode 2014-2019. Dalam 2 periode pemilihan legislatif, jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Palopo hanya 7 orang dengan persentase 28% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palopo.

Kondisi ini masih berada di atas capaian nasional dimana hanya 17,32% perempuan yang duduk di lembaga legislatif, termasuk provinsi yang hanya pada angka 17,6%. Jika dibandingkan dengan target pencapaian SDGs yang pada tahun 2030 menargetkan 30% perempuan duduk menjadi anggota lembaga legislatif, Kota Palopo ke depan, paling tidak harus memiliki 8 orang anggota legislatif dari kalangan perempuan.

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.154
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	609	671	752	801	840	886
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	20.100	21.825	22.726	25.711	26.563	26.609
C	Persentase	%	3.03	3.07	3.31	3.12	3.16	3,33

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2019

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak tahun 2013-2018 meningkat. Pada tahun 2013 pada angka 3,03% sementara di 2018 pada angka 3,33%. Kondisi ini selaras dengan data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, yang sejak tahun 2013-2018 menurun.

Artinya pekerja perempuan lebih banyak mengakses lapangan kerja di sektor swasta dari pada lembaga pemerintahan di Kota Palopo. Beberapa lapangan usaha swasta yang banyak diakses oleh pekerja perempuan adalah lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Rasio KDRT

Tabel 2.155
Rasio KDRT
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah KDRT	Kasus	20	22	10	8	8
b.	Jumlah rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.444	40.303
c	Rasio KDRT	Per 10.000	5	6	3	2	1

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo menurun. Jika pada tahun 2015, dari 10.000 rumah tangga terdapat sebanyak 5 kasus KDRT, sementara di 2019 jumlahnya menurun menjadi 1 kasus.

Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.156
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	22726	19122	26226	26694	30135
b.	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	25332		28506	29998	32953
c.	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	89.71%		92.00%	88.99%	91.45%

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Data Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2015-2019 di Kota Palopo terus meningkat, dari 89.71% di 2015 menjadi 91.45% di 2019.

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.157
Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu
Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	12	0	56	18	32	36
b.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	12	0	56	254	145	149
	Persentase	%	100	100	100	7.09	22.07	24,16

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak korban kekerasan di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2013, seluruh laporan ditindaklanjuti, tahun 2018 hanya 24,16% yang direspon. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini jauh menurun.

Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.158
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah perkara diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	78	68	48	74	87	96
b.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	78	68	48	74	87	96
	Persentase	%	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2019

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 2.159
Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	-	49	31	36	1
b.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	-	254	145	150	11
	Persentase	%	-	19.29	21.38	24,00	9,09

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2020

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD

Tabel 2.160
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	96.54	97.53	94.11	95.37	99.32	99.78
Laki-laki	-	-	97.48	100.00	99.33	99.60
Perempuan	-	-	90.04	90.52	99.31	100.00

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP

Tabel 2.161

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMP/MTs	73.57	78.15	75.43	76.61	77.89	78.39
Laki-laki	-	-	68.49	77.50	75.35	79.35
Perempuan	-	-	81.02	75.52	80.28	77.55

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA

Tabel 2.162

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN						
URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMA/MA/SMK	49.25	60.49	68.29	65.72	66.42	67.99
Laki-laki	-	-	70.11	66.80	69.65	75.27
Perempuan	-	-	66.63	64.73	63.24	62.00
PT	40.48	40.99	-	-	-	-

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi

Tabel 2.163

Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	APM perempuan yang masuk perguruan tinggi	Persen	40,48	40,99	41.25	41.76	42.27	42,63
b.	APM laki-laki yang masuk Perguruan Tinggi							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2019

2.1.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2.164
Persentase Ketersediaan Pangan Utama
di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun						
		Kg	15,760.64	16,783.60	17,774.44	19,466.00	34,568.75
b.	Jumlah penduduk						
		Orang	164,903	168,894	172,916	176,907	176,907
c	Jumlah Konsumsi Rill						
		Kg	16,677.93	17,356.36	17,130.12	16,721.00	18,332.55
d	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Penduduk						
		%	9.56	9.94	10.28	11.00	19.54
e	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Konsumsi Rill						
		%	94.50	96.70	103.76	116.42	188.56

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa angka ketersediaan bahan pangan utama di Kota Palopo meningkat sepanjang tahun 2014 – 2018. Pada tahun 2014, untuk 100 jiwa penduduk Kota Palopo, rata-rata tersedia 9,56 Kg pangan utama, sementara di 2018 tersedia sebanyak 19,54 Kg bahan pangan utama per 100 jiwa penduduk Kota Palopo. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi riil, angka ketersediaan pangan utama juga meningkat. Jika pada tahun 2014 pada angka 94,50 %, pada tahun 2018 berada pada angka 188,56 %.

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Tabel 2.165
Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
di Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD	Kkal/kapita/hari	20,497	22,034	21,301	20,128	38.650
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
1	Ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	2.049,7	2.203,4	2.130,1	2.012,8	3.865
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD	Kkal/kapita/hari	816	692	689	691	1.019,6
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	81.60	69.23	68.9	69.1	101,96
3	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	(kkal/ka pita/hari)	2.131	2.273	2.199	2.082	3.966

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2019, RAD Pangan dan Gizi Kota Palopo 2016-2020

Food and Agriculture Organization atau FAO mensyaratkan untuk ketersediaan energi minimal adalah sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 54 gram/kapita/hari. Sementara standar Indonesia 2000-2100 kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi dan protein Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2018 sudah berada diatas standar minimal FAO.

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.166
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	9	9	13	32
b.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	12	11	18	37
	Persentase		-	75	82	72	86

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.

Tabel 2.167
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah luas lahan bersertifikat	Km2	3,98	3,23	3,77	5,43	70,43
b.	Jumlah luas wilayah	Km2	247,52	247,52	247,52	249,18	247,52
	Persentase	%	1,61	1,31	1,52	2,17	28,46

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar lahan di wilayah Kota Palopo belum bersertifikat. Sampai tahun 2019 hanya 28,46 % wilayah Kota Palopo yang memiliki bukti kepemilikan. Meskipun jika dibandingkan tahun 2015, luas wilayah yang bersertifikat pada tahun 2019 luasnya meningkat.

Data dalam tabel juga menunjukkan bahwa dari 100 Km2 wilayah Kota Palopo, hanya 28,46 Km2 yang bersertifikat sampai pada tahun 2019. Olehnya Pemerintah Kota Palopo harus lebih memberikan akses dan melaksanakan advokasi masyarakat tentang pentingnya bukti legalisasi kepemilikan tanah.

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.168
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	0	0	0	1	4
b.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	4	4	4	14
	Persentase	%	0,00	0,00	0,00	25	28,57

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa tanah negara di Kota Palopo sebanyak empat kasus. Yakni kasus tanah negara dengan tipologi konflik satu konflik tanah ex HGU dan tiga kasus tentang ijin pemanfaatan tanah dan sampai tahun 2019, masih dalam tahap penyelesaian konflik.

Kasus konflik tanah ex HGU sampai tahun 2019 masih dalam tahap penyelesaian, sementara untuk tiga kasus ijin pemanfaatan tanah, satu kasus dalam proses pengadilan, satu kasus belum dilakukan pelaksanaan ganti rugi dan kasus lainnya dalam proses perampungan perda RT RW. Kasus terakhir ini terkait dengan pemanfaatan tanah HPL lokasi Jalan Lingkar di Kota Palopo.

Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2.169
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ijin lokasi	Buah	1	1	0	0	2
b.	Permohonan ijin lokasi	Buah	1	1	1	1	2
c.	Persentase	%	100	100	0	0	100

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian izin lokasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 masih fluktuatif. Pada tahun 2015 menjadi 100% dan tahun 2017-2018 0% atau belum ada satupun permohonan izin lokasi yang diterbitkan izin lokasinya. Tahun 2019 kembali menjadi 100%.

2.1.3.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Tabel 2.170
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tersusunnya RPPLH kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Tabel 2.171
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/Kota	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 2.172
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	Ada (KLHS Revisi RTRW	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan untuk menjamin Kebijakan rencana Program (K/R/P) mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. Sepanjang 2013-2018, Pemerintah Kota Palopo hanya 3 kali menyelenggarakan KLHS yang menghasilkan 3 dokumen yakni KLHS RTRW pada tahun 2013, KLHS Kawasan Pesisir dan KLHS revisi RT RW Kota Palopo 2012-2032.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2.173
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil pengukuran indeks kualitas air	Cemaran ringan	Cemaran ringan	Cemaran ringan	Cemaran ringan	Cemaran ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas air secara umum di wilayah Kota Palopo masih dalam batas kewajaran. Sepanjang 2015 – 2019, hasil pengukuran indeks kualitas air di Kota Palopo berada dalam kategori cemar ringan. Data ini diperoleh dengan mengambil sampel air di beberapa sungai dan saluran air/drainase.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.174
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Sangat baik	Sangat baik	Unggul	Sangat baik	Sangat baik

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Palopo pada tahun 2017, kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2015 – 2016. Sesuai hasil uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, kualitas udara pada tahun 2015 – 2016 berkategori sangat baik, tahun 2017 berada pada kategori unggul. Namun tahun 2018 – 2019 kembali berada pada kategori sangat baik.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2.175
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Data pada tabel di bawah menunjukkan sepanjang tahun 2015 – 2019, masih lebih banyak pelaku usaha di Kota Palopo yang belum taat terhadap kepemilikan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Sampai tahun 2019, masih terdapat 72,73% yang belum taat atas izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Data ini juga menunjukkan jumlah pelaku usaha yang taat, masih berfluktuatif, meski cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.176
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani	Izin	885	1109	1161	1578	1759
b.	Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	Pihak	288	432	432	653	645
	Persentase	%	32,54	38,95	37,20	24,16	27,27

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.177
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Pemerintah Kota Palopo sampai tahun 2019 belum pernah memberikan apresiasi apapun kepada lembaga atau pihak manapun, terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo

Tabel 2.178
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditangani
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Buah	15	7	11	13	10
b.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Buah	15	7	11	13	10
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan di Kota Palopo sepanjang tahun 2015 – 2019,

sangat baik. Semua pengaduan yang disampaikan atau dilaporkan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palopo. Ini mengindikasikan Pemerintah Kota Palopo sangat merespon isu-isu di masyarakat yang terkait dengan persoalan lingkungan.

Timbunan Sampah yang Ditangani

Tabel 2.179
Persentase Timbunan Sampah yang Ditangani
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Volume timbunan sampah yang ditangani	(Ton)	33.033	31.047	33.040	30.409	30.419
b.	Jumlah total timbunan sampah	(Ton)	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
	Persentase	%	86,12	87,02	88,28	88,90	90,26

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbunan sampah yang ditangani dari tahun 2015 – 2019 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2015 hanya mampu menangani 86,12% timbunan sampah. Tahun 2019, berada pada angka 90,26%.

Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Tabel 2.180
Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a	Jumlah Timbunan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
b	Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	981	1.189	1.334	1.376	1.387
c	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (b/a)	%	2,55	3,33	3,56	4,02	4,11

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah sampah yang tertangani di TPS 3R adalah sampah yang terkurangi melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sampah seperti ini meningkat sejak 2015 ke 2019. Ini menunjukkan bahwa peran TPS 3R di Kota Palopo berjalan cukup baik. Jika pada tahun 2015 TPS 3R hanya mampu menangani sebanyak 981 Ton, tahun 2019 mampu menangani 1.387 Ton sampah. Ini menunjukkan bahwa beberapa strategi 3R dalam pengurangan sampah yang masuk TPA, seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, cukup baik.

Dampaknya jumlah sampah yang terangkut ke TPA dari tahun ke tahun di Kota Palopo semakin berkurang, sehingga masa pakai TPA bisa lebih panjang/lama. Sebab akan semakin menurunkan beban tampung yang akan diterima oleh TPAS Kota Palopo yang ada di Kelurahan Mancani.



Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel 2.181
Persentase Cakupan Area Pelayanan
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km ² /ha	147,88	151,72	159,01	166,27	167,89
b.	Luas area Kota Palopo	km ² /ha	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
	Persentase	%	59	61	64	67	67,83

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa luas area pelayanan sampah dari tahun ke tahun meningkat. Jika tahun 2015 hanya 59% wilayah Kota Palopo yang terlayani, tahun 2019 wilayah Kota Palopo sudah dijangkau pelayanan sampah sebanyak 67,83%.

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Tabel 2.182
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah sampah yang tertangani	Meter Kubik (ton)	26.928	26.381	29.405	30.601	29.325
b.	Total jumlah timbunan sampah di Kota Palopo	Meter Kubik (ton)	38.355	35.674	37.427	34.171	33.699
	Persentase	%	70,20	73,95	78,56	89,55	87,02

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2019

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbunan sampah yang ditangani dari tahun 2015 – 2019 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2015 hanya mampu menangani 70,20% timbunan sampah. Tahun 2019, berada pada angka 87,02%.

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo

Tabel 2.183
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	72,41	75,65	77,81	79,46	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa nilai predikat Tempat Pembuangan Sampah Kota Palopo semakin menunjukkan peningkatan ke arah lebih baik. Jika pada tahun 2015 hanya pada angka 72,41, pada tahun 2018 menjadi 79,46. Untuk tahun 2019 belum diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Tabel 2.184
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	96.727	108.634	114.080	122.053	117.965
b.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	148.783	138.174	145.476	130.842	125.420
c	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Orang	0,65	0,79	0,78	0,65	0,67

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
d	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100	Orang	65	79	78	65	67

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 100 penduduk Kota Palopo, sebanyak 65 orang telah penduduk wajib KTP. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 67 orang.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Tabel 2.185
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Bayi Berakte Kelahiran	Orang	2.750	2.609	1.397	1.323	2.183
b.	Jumlah bayi	Orang	3.199	2.977	2310	1.569	2.305
c	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0.86	0.88	0.605	0,84	0,94
d	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100	Per 100	85.96	87.64	60.48	84,32	94

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 100 balita yang lahir, sebanyak 86 bayi telah memiliki akte kelahiran. Pada tahun 2017 dari 100 bayi lahir, hanya 60 yang memiliki akte kelahiran.

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Tabel 2.186
Rasio Pasangan Berakte Nikah
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	15.967	14.867	16.116	17.274	14.867
b.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	42.281	40.003	42.856	38.930	38.882
c.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,38	0,37	0,38	0,44	0,38
d	Rasio Pasangan Berakte Nikah per 100	Per 100	38	37	38	44	38

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 100 penduduk yang menikah, hanya 38 pasangan yang memiliki akte nikah. Kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 2018 dimana dari 100 pasangan nikah 44 pasangan yang resmi memiliki akte nikah, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2019.

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel 2.187
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Aada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.188
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 2.189
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Lembar	98.514	109.003	114.080	122.053	117.695
b.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	148.783	138.174	138.174	130.843	125.420
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	66,21	78,89	82,56	93,28	93,84

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan tahun 2019 sebanyak 93,84 % penduduk Kota Palopo yang wajib memiliki KTP sudah ber KTP, sehingga tersisa 6,16 % penduduk wajib ber KTP namun belum memiliki KTP. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 dimana hanya 66,21 % penduduk wajib KTP yang memiliki KTP.

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.190
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (#)	Orang	2.747	2.755	2.959	3.006	1.811
b.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (@)	Orang	2.747	2.755	2.959	3.006	1.811
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan 2020 (@) dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2020(#)

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 - 2019, cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Palopo sudah mencapai 100% ini menunjukkan bahwa semua bayi yang lahir pada tahun tersebut, pada tahun itu juga langsung memiliki akte kelahiran.

2.1.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Tabel 2.191
Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan
yang Baik di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	Kantor	47	47	47	48	48
b.	Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan	Kelurahan	48	48	48	48	48
Persentase		Persen	97,92	97,92	97,92	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2019 tidak ada lagi kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo yang kondisinya kurang baik.

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel 2.192
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
b.	Jumlah LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
Rata-rata		Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami penambahan selama 5 tahun.

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Data di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

Tabel 2.193
Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	-	-	145	145	145
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Rata - rata					2,5	2,5	2,5

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Persentase LSM Aktif

Tabel 2.194
Persentase LSM Aktif
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah LSM aktif	Buah	0	2	1	0	1
b.	Jumlah LSM	Buah	36	36	36	36	36
Persentase		%	0	5,55	2,77	0	2,77

Sumber Data : Badan kesbang Linmas Kota Palopo Tahun 2020

Sesuai data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo, sebagian besar LSM di Kota Palopo sampai dengan tahun 2019, tidak aktif. Jumlah LSM yang aktif tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo.

Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.195
Persentase LPM Berprestasi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah LPM berprestasi	Buah	-	-	2	2	2
b.	Jumlah LPM	Buah	-	-	48	48	48

Persentase	%			4,17	4,17	4,17

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2020

Sesuai data dari Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2019 hanya 4,17% atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada di Kota Palopo.

Persentase PKK Aktif

Tabel 2.196
Persentase PKK Aktif
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah PKK aktif	Unit	58	58	58	58	58
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2019

Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan

Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2.197
Persentase Posyandu Aktif
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah posyandu aktif	Buah	147	147	149	149	149
b.	Total posyandu	Buah	147	147	149	149	149
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda dan Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan 2 unit Posyandu dari 147 unit di tahun 2016 menjadi 149 di tahun 2017.

2.1.3.2.8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk tahun dasar.

Tabel 2.198
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,42	2,38	2,31	2,13	2,18

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Adalah indikator yang menunjukkan adanya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan adanya garnd desain pada level pemerintah daerah dalam mengendalikan laju peetumbuhan penduduk dan scenario penanganannya.

Tabel 2.199
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.200
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam
Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif di kampung KB	-	16	16	16	18
Jumlah semua perangkat daerah	40	40	49	49	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	40,00	32,65	32,65	36,73

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Program Kampung KB baru terbentuk pada tahun 2016. Jumlah kampung KB yang berada di Kota Palopo pada tahun 2016 sebanyak 1 kampung KB, pada tahun 2018 sebanyak 10 kampung KB.

Perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB Kota Palopo sejak tahun 2016 - 2019 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, 9 Kantor Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tabel 2.201
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anak (Orang)	65.233	66.155	62.376	62.433	61.121
Jumlah keluarga	34.734	34.660	34.786	34.843	34.925
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana di Kota Palopo berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Data menunjukkan sepanjang tahun 2015-2019, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palopo hanya 2 orang. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian penduduk terutama dalam ber KB berhasil.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Tabel 2.202
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah peserta KB aktif	15.255	16.873	17.774	18.226	16.973
Jumlah pasangan usia subur	21.980	23.181	23.802	24.254	22.411
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	69,40	72,79	74,67	75,15	75,73

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi peningkatan angka pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2019, dari 100 PUS sekitar 75 PUS telah menggunakan alat kontrasepsi. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun – tahun sebelumnya.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Tabel 2.203
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	471	222	239	223	66
Jumlah pasangan usia subur	21.980	23.181	23.802	24.254	22.411
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	2.14	0.96	1.00	0,92	0,29
Per 1000 PUS	21	10	10	9	3

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 dari 1.000 Pasangan Usia Subur, terdapat 21 Pasangan Usia Subur yang memiliki istri berumur di bawah 20 tahun. Namun pada tahun 2019, hanya terdapat 3 pasangan PUS yang memiliki istri berumur dibawah 20 tahun. Ini menunjukkan semakin berkurangnya pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun sekaligus memberikan gambaran semakin membaiknya kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk tidak menikah dalam usia dini.

Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Tabel 2.204
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need)
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.654	5.468	5.350	5.802	2.768
Jumlah pasangan usia subur	21.980	23.181	23.802	24.254	22.411
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	30.27	23.59	22.48	23,92	12,35

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan ber KB bagi PUS di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 semakin membaik. Tahun 2015 masih terdapat 30,27 % Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber KB, tapi tidak terpenuhi, artinya pada tahun ini hanya ada 69,73 % PUS yang ingin ber KB dan sudah terpenuhi.

Sementara di tahun 2019, persentase PUS yang ingin ber-KB dan sudah terpenuhi telah berada pada angka 87,65 %, karena hanya ada 12,35 % PUS yang ingin ber KB dan belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber-KB dan telah mendapatkan pelayanan KB setiap

tahunnya. Olehnya angka target indikator ini ke depannya harus lebih ditekan dari tahun 2019.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel 2.205
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.190	3.635	3.877	4.648	3.721
Jumlah akseptor KB	15.255	16.873	17.774	18.545	16.973
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,91	21,54	21,81	25,06	21,92

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Palopo semakin meningkat. Baik dalam skala jumlah, maupun dalam skala persentase. Jika pada tahun 2015 terdapat 3.190 akseptor KB menggunakan MKJP (20,91%), tahun 2019 akseptor KB menggunakan MKJP meningkat menjadi 3.721 atau 21,92%.

Data tersebut juga memberikan informasi, bahwa dari 100 akseptor KB, pada tahun 2015, sebanyak 20-21 akseptor menggunakan MKJP, 78-79 akseptor lainnya menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dan pada tahun 2018, jumlahnya menjadi 25 akseptor pengguna MKJP, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2019.

Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tabel 2.206
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	9.196	8.071	8.023	8.794	5.438
Jumlah akseptor KB	15.255	16.873	17.774	18.545	16.973
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	60,28	47,83	45,14	47,42	32,03

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 akseptor KB yang ada, ada 60 pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan 40 pasangan masih menggunakan alat kontrasepsi.

Kemudian pada tahun 2019, ada 32 pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan ada 58 pasangan masih yang menggunakan alat kontrasepsinya. Artinya sejak 2015-2019, jumlah PUS akseptor KB

yang masih menggunakan alat kontrasepsi meningkat, dari 60 pasangan tahun 2015 menjadi 32 pasangan pada tahun 2019.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih diturunkan.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Tabel 2.207
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	1.035	1.045	3.345	3.981	3.940
Jumlah anggota kelompok BKB	1.535	1.660	4.451	5.087	5.316
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	67,43	62,95	75,15	78,26	74,11

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok BKB, terdapat 67 anggota kelompok BKB yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 33 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2019, ada 74 anggota kelompok BKB, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 26 belum ber KB.

Artinya sejak 2015-2019, semakin banyak anggota Bina Keluarga Balita yang mengikuti program KB. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Tabel 2.208
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	169	536	2.007	2.632	2.601
Jumlah anggota kelompok BKR	331	1.011	3.427	4.052	4.306
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	51,06	53,02	58,56	64,96	60,61

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), terdapat 51 anggota kelompok BKR yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 49 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2019, ada 60) anggota kelompok BKR, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 40 belum ber KB. Artinya sejak 2015-2019, semakin banyak anggota Bina Keluarga Remaja yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKR yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Tabel 2.209
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	122	342	1.458	2.001	1.855
Jumlah anggota kelompok BKL	355	809	3.089	3.632	3.411
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	34,37	42,27	47,20	55,09	54,38

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), terdapat 34 anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 66 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2019, ada 54 anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 46 belum ber KB. Artinya sejak 2015-2019, semakin banyak anggota Bina Keluarga Lansia yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKL yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Tabel 2.210
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PPKS	1	1	1	1	1
Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Palopo hanya memiliki satu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itupun harus melayani 9 kecamatan yang ada.

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2.211

Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PIK R/M (Buah)	22	66	81	93	184
Jumlah Kecamatan (Buah)	9	9	9	9	9
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (a/b)	2,44	7,33	9,00	10,33	20,44

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, Kota Palopo memiliki 22 Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Artinya pada tahun ini, untuk setiap kecamatan di Kota Palopo terdapat 2 wadah PIK Remaja dan Mahasiswa yang terbentuk. Pada tahun 2019, kondisinya jauh semakin baik. Sebab satu kecamatan, rata-rata memiliki 20 PIK R/M. Meningkatnya jumlah pusat informasi dan konseling di Kota Palopo diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada remaja dan mahasiswa di Kota Palopo.



Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Tabel 2.212

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	49	68	68	68	66
Jumlah PKB/PLKB	49	68	68	68	66
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2.213
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	117	123	640	774	671
Jumlah anggota kelompok UPPKS	454	693	3102	3.791	2.804
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	25,77	17,75	20,63	20,42	23,93

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 anggota kelompok UPPKS, hanya ada 25 anggota yang sudah ber KB Mandiri, sisanya sebanyak 75 anggota belum ber KB secara mandiri.

Kemudian pada tahun 2019, hanya ada 23 anggota kelompok UPPKS yang sudah ber KB mandiri, sisanya sebanyak 77 anggota belum ber KB secara mandiri. Artinya sejak 2015-2019, kemandirian anggota kelompok UPPKS untuk ber KB menurun. Sebab dari 100 anggota UPPKS, jumlah anggota yang ber KB secara mandiri justru semakin menurun, dari 25 anggota pada tahun 2015 menjadi 23 anggota pada tahun 2019.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini pada tahun 2019, lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2015. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Tabel 2.214
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, satu kelurahan di Kota Palopo telah dilayani satu orang petugas pembantu pembina KB Desa.

Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan KB dan keberhasilan program KB di setiap kelurahan di Kota Palopo.

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Tabel 2.215
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
di Gudang Kabupaten/Kota di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	1.121	5.330	9.688	11.830	13.849
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota	260	551	1.331	1.599	1.049
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	4,31	9,67	7,28	7,39	13,20

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes

Tabel 2.216
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
di Faskes Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	59.491	11.673	4.512	1.414	4.512
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes	119,16	211,91	67,91	32,58	67,91
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	499.30	55.1	66.4	43,40	66,40

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Tabel 2.217
Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	16	19	20	20	23
Jumlah Faskes dan jejaring	16	19	20	20	23
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2019, semua fasilitas kesehatan dan jaringannya seluruhnya telah bekerjasama dengan BPJS. Ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan KBKR di Kota Palopo semakin terbuka.

Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Tabel 2.218
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	48	145	427	465	732
Jumlah kelompok kegiatan	68	139	221	259	732
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	0,71	1,04	1,93	1,80	1,00

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Tabel 2.219
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	991	1.025	3.686	4.284	4.306
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	4.158	5.220	6.715	6.570	4.306
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	23,83	19,63	54,89	65,21	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.220
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	1.541.862.500	3.332.894.600	2.969.721.000	2.784.312.000	2.441.839.000
Jumlah APBD dan APBDes	4.098.597.000	5.112.260.200	3.542.370.000	3.356.961.000	5.909.076.000
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	37,62	65,19	83,83	82,94	41,32

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

Arus Penumpang Angkutan Umum

Tabel 2.221
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	769	122	445	314	352
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.689.617	1.680.146	1.345.436	1.327.055	1.323.604

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 – 2019, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2015, ada sebanyak 1,689 juta orang, tahun 2019 hanya ada 1,323 juta penumpang angkutan umum. Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebab penurunan ini, adalah cukup banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara.

Rasio Ijin Trayek

Tabel 2.222
Rasio Ijin Trayek
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	3	3	4	4
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	202.483	202.204
c	Rasio	Per 100.000	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dalam mengakses wilayah di Kota Palopo, hanya tersedia 3 trayek angkutan umum bagi 100.000 penduduk Kota Palopo. Jumlah ini relatif stagnan sampai dengan tahun 2019. Dari perspektif layanan angkutan umum, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses beberapa spot wilayah di Kota Palopo jika ingin menggunakan angkutan umum massal. Sebab jumlah penduduk akan cenderung terus bertambah. Meski demikian saat ini, Kota Palopo memiliki alternatif transportasi umum lainnya misalnya taksi dan layanan transportasi daring/internet sepeda motor.

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tabel 2.223
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.345	1.301	1.152	1.411	1.381

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tabel 2.224
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan transportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencakup kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.225
Persentase Layanan Angkutan Darat
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.524	1.441	1.332	1.452	1.415
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252
Persentase		%	0,090	0,085	0,099	0,109	0,106
Per 10.000 Penumpang			9,02	8,5	9,9	10,9	10,6

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, untuk melayani 10.000 penumpang angkutan darat di Kota Palopo hanya tersedia 9 unit angkutan darat. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi pada tahun 2019, dimana untuk 10.000 penumpang angkutan darat hanya tersedia 10-11 unit angkutan darat.

Artinya pada tahun 2015, 1 unit angkutan darat dalam setahun kurang lebih melayani 1.111 orang penumpang. Sementara di 2019, 1 angkutan darat hanya melayani kurang lebih 909-1000 orang penumpang per tahunnya.

Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.226
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	170	140	180	41	12
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.524	1.441	1.332	1.452	1.393
Persentase		%	10,89	11,15	9,71	13,51	0,86

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari 100 angkutan umum yang beroperasi di Kota Palopo hanya 10-11 kendaraan yang tidak memiliki KIR, artinya ada sebanyak 89-90 kendaraan yang sudah memiliki KIR. Pada tahun 2019, kondisi ini jauh lebih baik, sebab hanya ada 1 kendaraan yang tidak memiliki KIR per 100 kendaraan. Meningkatnya kepemilikan KIR angkutan umum ini mengindikasikan membaiknya tingkat kelayakan dan keamanan angkutan umum.

Pemasangan Rambu – Rambu

Tabel 2.227
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	142	144	158	179	254
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	205	220	250	254	450
Persentase		%	65,27	65,45	63,20	70,47	46,40

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas hanya 65,27%, kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2018 yang berada pada angka 70,47% tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 yang berada pada angka 46,40%. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan di Kota Palopo semakin menurun.

2.1.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Tabel 2.228
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah KIM	Kelompok	0	0	30	30	32
b.	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9
Persentase		%	0	0	3,33	3,33	3,55

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Palopo sampai dengan tahun 2019 KIM terbentuk sebanyak 32 lembaga. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi di Kota Palopo oleh masyarakat mulai melembaga dan dianggap penting.

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel 2.229
Cakupan Layanan Telekomunikasi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Luas wilayah yang tercoverage	Km ²	205,44	212,87	212,87	222,47	222,47

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
b.	Luas wilayah keseluruhan	Km ²	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
Jumlah (a/b)			0,80	0,83	0,86	0,90	0,90

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan wilayah Kota Palopo yang mampu diakses jaringan atau layanan telekomunikasi dari 75% menjadi 90%. Peningkatan luas coverage ini menunjukkan semakin besar wilayah Kota Palopo termasuk penduduk Kota Palopo yang diakses oleh layanan telekomunikasi. Ini menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup baik bagi keterbukaan informasi di sebuah daerah.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Tabel 2.230
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tanggayang memiliki akses internet	KK	2.727	2.837	3.314	7.029	9.045
b.	Jumlah rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.444	39.444
Jumlah (a/b)			0,07	0,07	0,08	0,18	0,23

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan tahun 2019, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, rata-rata sebanyak 23 Rumah tangga telah mengakses internet. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya pada angka 7 Rumah Tangga saja. Ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet pada rumah tangga di Kota Palopo terus mengalami peningkatan, dan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan berbagai sumber informasi.

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Tabel 2.231
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	KK	12.167	13.967	15.456	16.383	19.700
b.	Jumlah rumah tangga	KK	36.871	37.749	38.641	39.444	39.444
Jumlah (a/b)			0,33	0,37	0,40	0,42	0,50

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan jumlah pengguna komputer pribadi per rumah tangga di Kota Palopo terus meningkat. Dari 100 rumah tangga yang ada pada tahun 2018 sebanyak 42 rumah tangga menggunakan komputer pribadi. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2014 yang hanya pada angka 32 dari 100 rumah tangga yang ada. Ini menunjukkan penggunaan komputer di masyarakat dan di Kota Palopo semakin memasyarakat.

2.1.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2015, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 283 unit dan setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 292 unit pada tahun 2019. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami penurunan. Permasalahan dari menurunnya persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 2.232
Persentase Koperasi Aktif
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	201	204	204	206	74
b.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	283	286	287	290	292
	Jumlah Koperasi Aktif	%	71,02	71,32	71,08	71,03	25,34

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2020

Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Tabel 2.233
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	1.512	1.982	2.037	2.158	2.209
b.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	1.512	1.982	2.307	2.160	2.211
	Persentase	%	100	100	100	99,91	99,91

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2020

Persentase BPR/LKM Aktif

Yang dimaksud LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro, sementara BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan

simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM umumnya diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan atau wilayah yang selama ini sulit dijangkau atau menjangkau bank komersial. LKM biasanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Tabel 2.234
Presentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	4.878	6.314	6.561	6.664	6.764
b.	Jumlah seluruh UKM	Unit	6.390	8.296	8.598	8.824	8.975
	Persentase	%	76,34	76,11	76,31	75,52	75,37

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak 2015, usaha mikro dan kecil mendominasi kondisi UMKM yang ada di Kota Palopo. Oleh karenanya program dan kegiatan UMKM akan lebih banyak dirasakan manfaatnya jika difokuskan pada Usaha Mikro dan Usaha kecil yang ada di Kota Palopo.

2.1.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2015-2019. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2.235
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	95	122	147	129	78

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019

Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.236
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	95	122	147	129	85

Jumlah nilai investasi verskala nasional (PMA/PMDN) (Juta)	96.603,15	268.331,63	382.322,26	220,859	130,740

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.237
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
di Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (*)	Orang	19,560	20,490	21,735	28,337	28,377	30.140
b.	Jumlah seluruh PMDN (**)	Juta	164,222.85	141,276.30	96,603.15	268,331.63	382,322.26	220,859
c	Rasio per 100 Juta	Angka	11.91	14.50	22.50	10.56	7.42	13.65

Sumber Data : (**) Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2019, (*) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 untuk 100 juta nilai PMDN, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 11-12 orang. Sementara pada tahun 2018 untuk nilai PMDN yang sama yakni 100 juta hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13-14 orang.

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.238
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	(44.673.143.956)	1.717.284.282.177	113.990.629.638	220,859,000,000	130,740,222,514
b.	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	141.276.296.168	96.603.152.212	268.331.634.389	382,322.260.000	220,859.000.000
	Persentase	%	(32)	178	42,48	57.77	

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018 dan Data Potensi Kota Palopo Tahun 2014 & 2015

2.1.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Tabel 2.239
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	148	151	151	151	153
b.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	218	218	218	218	218
	Persentase	%	67,9	69,3	69,3	69,3	70,2

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif mengalami stagnan.

Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2.240
Persentase Wirausaha Muda
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah wirausaha muda	Kelompok	120	134	134	134	136
b.	Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	Persentase	%	1,56	1,75	1,75	1,75	1,77

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 1.000 kelompok wirausaha, terdapat 177 wirausaha muda.

Cakupan Pembinaan Olahraga

Tabel 2.241
Persentase Pembinaan Olahraga di Kota Palopo Tahun 2015 – 2109

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	0	10	10	12	16
b.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	26	26	26	27
	Persentase	%	0	38,46	38,46	46,15	59,26

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Tabel 2.242
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	27	27	27	27	27
b.	Jumlah seluruh pelatih	Orang	83	83	83	83	83
	Persentase	%	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.243
Persentase Pembinaan Atlet Muda
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	0	30	30	36	48
b.	Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	170	170	170	170	170
	Persentase	%	0	17,6	17,6	21,2	28,2

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.244
Persentase Atlet Berprestasi
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah atlet yang memenangkan kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	10	36	7	7	4

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.245
Persentase Prestasi Olahraga
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	10	36	7	7	4

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.2.14. Bidang Urusan Statistik

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tabel 2.246
Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Dalam Proses

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

Buku “Palopo Dalam Angka”

Tabel 2.247
Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka”
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Buku Palopo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Dalam Proses

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

Buku “PDRB”

Tabel 2.248
Ketersediaan Buku “PDRB”
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Buku “PDRB”	Ada	Ada`	Ada	Ada	Dalam Proses

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.2.15. Bidang Urusan Persandian

Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik.

Tabel 2.249
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	22	30	35	38	39

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
b.	Jumlah total perangkat daerah	OPD	40	40	49	49	49
	Persentase	%	55	75	71,42	77,55	79,59

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.250
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	12	15	18	14

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, memberdayakan dan pengakuan suatu identitas budaya. Festival seni dan budaya juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai – nilai seni budaya dan nilai tradisional.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tabel 2.251
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	21	148	148	148	148
b.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	21	149	149	149	149
	Persentase	%	100	99,32	99,32	99,32	99,32

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

Dari 149 buah total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah, yang merupakan aset daerah sebanyak 148 buah. 1 buah merupakan rumah pribadi yang berada dalam kawasan cagar budaya sehingga tidak dilakukan pelestarian oleh pemerintah Kota Palopo.

Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Tabel 2.252
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	0	0	0

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Tabel 2.253
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	37	51	51	51	52

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.254
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	10.833	13.274	13.650	14.456	14.958
b.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	141.282	144.650	147.955	147.300	147.300
	Persentase	%	7,67	9,18	9,23	9,81	10,15

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2015, hanya 7,67 % masyarakat yang wajib baca yang pernah memanfaatkan jasa layanan perpustakaan daerah Kota Palopo. Namun persentasenya terus meningkat sampai pada tahun 2019 persentasenya berada pada angka 10,15 % atau tumbuh kurang lebih dua persen periode 2015 – 2019

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Tabel 2.255
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	624	308	1.232	1.191	7.656
b.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	1.776	895	2.632	2.360	19.891
	Persentase	%	35,14	34,41	46,81	50,46	38,49

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Tabel 2.256
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perpustakaan	Jiwa	205	205	208	208	208
Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Per 1000	1.21	1.19	1.18	1,16	1,13

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa sejak 2015 – 2019, rasio jumlah perpustakaan yang di Kota Palopo terhadap jumlah penduduk relatif stagnan. Jika tahun 2015, untuk 1000 penduduk tersedia 1 unit perpustakaan, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2019.

Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.257
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	902	1.106	1.137	1.204	1.246

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Tabel 2.258
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	624	308	1.232	1.191	404

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Tabel 2.259
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki
Sertifikat di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	0	1	1	1	2
b.	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	3	3
	Persentase	%	0	33	33	33	67

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.2.18. Bidang Urusan Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Tabel 2.260
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip
Secara Baku di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	1	1	1	8	12
b.	Jumlah perangkat daerah	OPD	40	40	49	49	49
	Persentase	%	2,5	2,5	2,04	16,33	24,48

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2020

Sampai dengan tahun 2019, sudah 12 Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini disebabkan oleh tenaga fungsional di Perangkat Daerah belum ada dan kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang berada di Perangkat Daerah.

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Tabel 2.261
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	7	6	7	6	7

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan

Tabel 2.262
Persentase Produksi Perikanan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah produksi ikan	Ton	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.387,50	133.481,18
b.	Target daerah	Ton	13.822,00	15.205,00	16.347,76	18.397,00	143.016,07
C	Persentase	%	99,60	97,74	103,70	99,95	93,33

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Tahun 2015-2019 mampu memenuhi target produksi perikanan daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah tersebut sangat baik. Produksi perikanan Kota Palopo cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan tahun.

Konsumsi Ikan

Tabel 2.263
Persentase Konsumsi Ikan
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah konsumsi ikan	Kg	57	49,83	53,54	58,34	53,81
b.	Target daerah	Kg	46,7	50	53,47	56,01	54,61
c	Persentase	%	122,06	99,66	100,13	104,16	97,62

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tabel 2.264
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	35	7	4	15	11
b.	Jumlah kelompok nelayan	Klpk	162	123	127	134	142
	Persentase	%	21,60	5,69	3,15	11,19	7,75

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan bina kelompok nelayan oleh Pemerintah Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan. Jika tahun 2015 pada angka 21.60%, pada tahun 2019 pada angka 7.75%.

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Tabel 2.265
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
di Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	9.514,20	11.146,20	12.713,92	13.338,29	14.677,68
b.	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	13.767,20	14.861,76	16.951,90	18.397,50	133.481,18
	Persentase		69,11%	75,00%	75,00%	72,54%	10,99

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi perikanan kelompok nelayan di Kota Palopo sejak 2019 jauh merosot dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan perikanan yang fokus pada peningkatan kontribusi perikanan kelompok nelayan terhadap produksi ikan daerah.

Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator ini untuk mengetahui luas kawasan lindung perairan terhadap seluas seluruh wilayah perairan yang menjadi wilayah sebuah daerah. Semakin tinggi rasio luas kawasan lindung perairan sebuah daerah, semakin tingginya aspek kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan tersebut. Sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan wilayah kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Nilai Tukar Nelayan

Adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan > 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami surplus. b. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan $= 100$: berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami impas/break even. c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan < 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada periode sebelumnya.

2.1.3.3.2. Bidang Urusan Pariwisata

Kunjungan Wisata

Tabel 2.266
Persentase Kunjungan Wisata
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kota Palopo	Orang	110.078	95.918	99.481	106.211	127.410
b.	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kota Palopo	Orang	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000
	Persentase	%	122,31	100,97	99,48	101,15	115,83

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2020

Lama Kunjungan Wisata

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa rata-rata lama kunjungan per orang wisatawan di Kota Palopo adalah selama dua hari.

Tabel 2.267
Lama Kunjungan Wisata di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rata – rata kunjungan wisata dalam satu tahun	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2020

PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2.268
Persentase PAD Sektor Pariwisata
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PAD sektor pariwisata	3,832,058,249	4,622,441,398	5,879,898,891	7.027.772.114	8.561.179.405
Total PAD	92.277.283.805,00	134.110.076.220,35	167.310.913.609,15	139.278.661.859,07	167.052.191.690
Persentase	4.15	3.45	3.51	5,05	5,12

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan kontribusi PAD sektor Pariwisata Kota Palopo cenderung meningkat. Jika pada tahun 2015 sebesar 4,15%, pada tahun 2019 hanya sebesar 5.12%.

2.1.3.3. Bidang Urusan Pertanian

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Tabel 2.269
Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar di Kota Palopo Tahun 2013 – 2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)						
	Padi	28,367	18,895	28,630	30167	32,444	33.259
	Jagung	5,575	5,857	4,737	6,303	5086	4.988
	Ubi Kayu	224	281	177	70.4	70	39.20
	Ubi jalar	112.88	101	13	18.94	4.55	1,12
	Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59	1,67
b.	Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)						
	Padi	5,034	3,481	5,098	5,128	5172	5.200
	Jagung	1,100	1,161	713	928	753	684
	Ubi Kayu	10	14	8	7	1	1
	Ubi Jalar	9	8	1	1	0	0
	Sagu	244.31	154.81	110.5	112.83	289.75	298,84
c	Produktifitas (Ton/Ha)						
	Padi	5.64	5.43	5.62	5.88	6.27	6,40
	Jagung	5.07	5.04	6.64	6.79	6.75	7,09
	Ubi Kayu	22.40	20.07	22.13	10.06	70	79,52
	Ubi jalar	12.54	12.63	13.00	18.94	4.55	2,95
	Sagu	0.35	0.46	0.46	0.29	0.05	0,01

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa produktiiftas tanaman padi dan jagung sebagai komoditas utama di Kota Palopo menunjukkan produktifitas yang meningkat. Pada tahun 2013, hanya dihasilkan 5,64 Ton padi per ha, tahun 2018, produktifitas padi menjadi 6.40 Ton/Ha, jagung 7,09 Ton/Ha, ubi kayu 79,52 Ton/Ha, Ubi Jalar 2.95 Ton/Ha dan Sagu sebanyak 0.01 Ton/Ha.

Cakupan Bina Kelompok Petani

Tabel 2.270
Persentase Pembinaan Kelompok Tani
di Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	176	384	364	319	222
b.	Jumlah kelompok tani	Klpk	407	407	407	407	438
	Persentase	%	43,24	94,35	89,43	78,38	50,68

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan cakupan bina kelompok tani periode 2013-2018, terbesar pada tahun 2014. Namun setelah itu cenderung menurun dan mengalami titik terendah pada tahun 2013 dan 2017. Ini seriing dengan semakin banyak jumlah kelompok tani yang ada, sementara kemampuan anggaran pemerintah Kota Palopo yang makin terbatas.

2.1.3.3.4. Bidang Urusan Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.271
Nilai Ekspor Bersih
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Nilai ekspor	Juta	1.549.986	1.746.139	2.112.272	2,357,785.97	2.539.220,00
b.	Nilai impor	Juta	2.342.937	2.580.805	2.914.631	3,033,366.30	3.543.980,00
C	Nilai ekspor bersih (a-b)	Juta	(792.951)	(834.666)	(802.359)	(945,580)	(1.004.760,00)

Sumber Data : Dinas Perdagangan Kota Palopo Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa ekspor kota Palopo lebih kecil dibandingkan dengan impor yang masuk ke Kota Palopo. Ini menunjukkan bahwa Kota Palopo menjadi market yang cukup potensial bagi sejumlah komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palopo. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dan potensi bagi para pelaku usaha di Kota Palopo untuk memenuhi aneka

kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang selama ini masih diimpor dari luar Kota Palopo.

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok pedagang/usaha informal di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas usahanya. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan pedagang/usaha informal yang ada.

Pedagang besar adalah pedagang yang kegiatannya membeli barang dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali dengan jumlah yang besar. Pedagang Menengah adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada para pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. Pedagang Kecil adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Termasuk didalamnya pedagang mikro (BPS).

Data menunjukkan bahwa jumlah pedagang sepanjang tahun 2015-2017 di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015 sebanyak 6.853 pada tahun 2017 sebanyak 7.756 pedagang. Jumlah ini merupakan akumulasi pedagang besar kecil maupun menengah.

Sesuai klasifikasi usahanya, jumlah pedagang kecil juga meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya terdapat 5.930 pedagang kecil pada tahun 2017 menjadi sebanyak 6.886 pedagang. Jumlah pedagang menengah berkurang dari 680 usaha pada tahun 2015 menjadi 538 pedagang pada tahun 2017.

2.1.3.3.5. Bidang Urusan Perindustrian

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2.272
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	
a.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok	71	11	0	0	5	
b.	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	81	83	117	130	204	

c	Persentase	%	87,65	13,25	0,00	0,00	2,45	

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2018

Angka dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa cakupan binaan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 menurun. Jika 2015 ada sebanyak 87,65% kelompok yang menerima bantuan, tahun 2016 hanya sebanyak 13,25% dan tahun 2017 dan 2018 tak ada bantuan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo dan 2019 2.45%. Bantuan bagi kelompok binaan pada tahun 2015 dan 2016 diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

2.1.3.3.6. Bidang Urusan Transmigrasi

Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk melaksanakan transmigrasi.

Suatu penyelenggaraan transmigrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain, tiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah yang ditinggalkan. Jika di daerah yang ditinggalkan itu tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan itu memperoleh tingkat hidup yang lebih baik. Jika antara pendatang baru (transmigran) dan penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi perpaduan kebudayaan, sehingga terhindar dan perasaan kesukuan di antara mereka.

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1. Sekretariat DPRD

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRD Kota

Tabel 2.273
Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2020

Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Tabel 2.274
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD
dan RKPD Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja dprd untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (3)	Ada (3)	Ada (3)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2020

Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.275
Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam
Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1. Bidang Urusan Perencanaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Tabel 2.276
Ketersediaan Dokumen RPJPD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD belaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD yang telah perdakan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.277
Ketersediaan Dokumen RPJMD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2018
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RKPD belaku satu tahun. Daerah yang memiliki dokumen RKPD yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.278
Ketersediaan Dokumen RKPD
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Ada/Tidak	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Perwal No. 12 Tahun 2014	Perwal No. 22 Tahun 2015	Perwal No. 12 Tahun 2016	Perwal No. 35 Tahun 2017	Perwal No. 40 Tahun 2018

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Adalah indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilyahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 2.279
Ketersediaan Dokumen RTRW
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012 – 2032

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

Tabel 2.280
Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	214	222	192	213	245
b.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	237	235	243	231	250
	Persentase	Persen	90,29	94,46	79,01	92,20	98

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah. Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.281
Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Buah	188	182	182	158	245
b.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	214	222	192	213	245
	Persentase	%	87,85	81,98	94,79	74,17	100

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2020

Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana penggunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penetaan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada. Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RT RW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

2.1.3.5.2. Bidang Urusan Keuangan

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Adalah indikator yang mengindikasikan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi yang ada. Clean and clear adalah predikat pengelolaan keuangan daerah tertinggi, disusul Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian dan terendah adalah Disclaimer.

Tabel 2.282
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Hasil opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Tabel 2.283
Persentase SILPA
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Total SILPA	111.155.583.598,18	59.142.126.892,80	22.836.223.879,74	1,151,996,965.34	34.049.876.279,26
Total APBD	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956.451.857.030,35
Persentase	14,59	5,15	2,25	0.12	3.56

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020, audited

Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau banyak program APBD yang tidak dilaksanakan, menunjukkan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

Tabel 2.284
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Prog	1	1	2	2	1
b.	Total program dalam APBD	Prog	349	346	359	321	381
	Persentase		0,3	0,3	0,6	0,62	0,3
a.	Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	Keg	13	10	15	15	12
b.	Total kegiatan dalam APBD	Keg	1429	1361	1414	1.437	1.615
	Persentase		3,7	0,7	1,06	1,04	0,74

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor pendidikan.

Tabel 2.285
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah belanja bidang	238.758.938.087,48	255.348.088.498	181.192.586.801	179,786,127,789.00	192.962.137.080,00

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
pendidikan (Rp)					
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982.957.077.365.89	956.451.857.030,35
Persentase	31,33	22.22	17.84	18.29	20.17

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang Pendidikan di Kota Palopo cenderung menurun. Jika pada tahun 2015 berada pada angka 31,33%, tahun 2019 hanya pada angka 20,17%.

Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin mendekati angka 10% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor kesehatan.

Tabel 2.286
Persentase Belanja Kesehatan (10%)
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah belanja bidang kesehatan (Rp)	156.464.512.542,82	214.226.652.392	248.704.751.533	258.102.101.672.28	283.035.096.618,97
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982.957.077.365.89	956.451.857.030,35
Persentase	20,53	18.64	24.48	26.26%	29.60%

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan di Kota Palopo pada tahun 2019 telah melebihi angka 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo sangat komitmen terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kota Palopo.

Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah saja.

Tabel 2.287
Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung
dengan Belanja Tidak Langsung
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah belanja langsung (Rp)	376.548.104.626,29	719.186.393.030	651.615.212.524	565.990.971.307,28	542.280.383.025,45
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982.957.077.365,89	956.451.857.030,35
Persentase	49,42	62.59	64.15	57.6%	56.70%
Jumlah belanja tidak langsung (Rp)	385.425.976.091,02	429.944.381.674	364.178.985.490	416.966,106,058.61	414.171.474.004,90
Total APBD (Rp)	761.974.080.717,31	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982.957.077.365,89	956.451.857.030,35
Persentase	50,60	37.41	35.85	42.42%	43.30%

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan Pemerintah Kota Palopo setiap tahunnya mampu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk belanja program dan kegiatan perangkat daerah.

Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Tabel 2.288
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota/Desa		23.386.791.194	18.220.349.272	56.476,634,835.00	62,767,391,329.43
Total APBD		1.149.130.774.704	1.015.794.194.014	982,957,077,365.89	956,778,838,394.35
Persentase		2,04	1,79	5.75%	6.56%

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

Data dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase dana bagi hasil yang diterima pemerintah Kota Palopo sepanjang 2016-2019 meningkat. Jika tahun 2016 sebesar 2.04% tahun 2019 hanya pada angka 6.56%.

Penetapan APBD

Tabel 2.289
Ketepatan Waktu Penetapan APBD
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2020

2.1.3.5.3. Bidang Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.290
Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/Jam Pelajaran	97 Hari/ 867 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP	103 Hari/ 893 JP

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur sipili negara di daerah.

Tabel 2.291
Persentase ASN Kota Palopo yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	31	34	42	36	30
2.	Jumlah total ASN	Orang	5.660	4.794	4.672	4.553	4.503
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,5	0,7	0,9	0,79	0,67

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam upaya meningkatkan kapasitas aparaturnya melalui pendidikan dan pelatihan sejak 2015-2019 mengalami fluktuatif. Jika pada tahun 2015 ada sebanyak 0,5% aparatur yang didiklat, pada tahun 2019 sekitar 0,67%.

Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.292
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Struktural Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	291	281	286	297	377
2.	Jumlah total jabatan	Orang	961	927	977	979	993
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	30,3	30,3	29,30	30,34	37,97

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan sampai tahun 2019, masih ada 62,03% pejabat struktural Kota Palopo yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dengan lembaga penyelenggara.

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menunjukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sekaligus mengukur komitmen daerah dalam menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo yang berlaku pada masanya.

Tabel 2.293
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Orang	36	34	33	35	33

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.294
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	938	900	949	951	960

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada pemerintah Kota Palopo sejak 2015-2019 bertambah sebanyak 22 jabatan dari 938 jabatan pada tahun 2015 menjadi 960 jabatan administrasi pada tahun 2019.

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.295
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Orang	3.021	2.261	2.217	2.210	2.213

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sejak 2015-2019 terus berkurang. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh perpindahan kewenangan tenaga fungsional guru terutama pada tingkat pendidikan menengah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah dikelola oleh Pemerintah provinsi. Sehingga tenaga guru pada pendidikan menengah juga beralih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1.3.5.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel 2.296
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	20	11	11	11	6
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	22	11	11	11	6
	Persentase	%	90,9	100	100	100	100

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.297
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		15	17	4	4	3
2.	Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah		20	20	11	11	5
	Persentase	%	75	85	36,36	36,36	50

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2020

Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam menerapkan inovasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin besarnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel 2.298
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah
Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	Buah	8	6	12	14	18
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan	Buah	23	23	23	23	49
	Persentase	%	34,78	26,08	52,10	60,87	36,3

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo

2.1.3.5.5. Bidang Urusan Pengawasan

Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tabel 2.299
Persentase Tindak Lanjut Temuan
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Kasus	326	166	260	202	158
2.	Jumlah total temuan	Kasus	461	399	456	434	211
3	Persentase	%	70,72	41,60	57,02	46,54	75

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin membaik. Jika pada tahun 2015, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada angka 70.72% pada tahun 2019, temuan yang ditindaklanjuti meningkat menjadi 75%.

Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.300
Persentase Pelanggaran Pegawai
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	5	3	2	0	41
2.	Jumlah total ASN	Orang	5.639	4.794	4.672	4.544	4.503
3	Persentase	%	0,09	0,06	0,04	0,00	0,91

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan dilihat dari jumlah kasus dan persentase, tingkat pelanggaran pegawai di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 meningkat. Jika pada tahun 2015 sebanyak 9 dari 1000 pegawai Kota Palopo pernah mendapatkan sanksi, jumlah ini meningkat, dari 1000 pegawai kota Palopo 91 orang pernah dikenakan sanksi.

Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.301
Jumlah Temuan BPK
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Temuan BPK	15	9	19	16	12

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2015, jumlah temuan kasus di Kota Palopo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menurun sampai tahun 2016, namun tahun 2017 mengalami peningkatan dan tahun 2019 kembali menurun. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asetnya.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Sementara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah total biaya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang ada.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.302
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Kota Palopo
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Milyar /Thn)	3,100.01	3,388.89	3,721.83	4,116.12	4,453.72
2	Jumlah Rumah Tangga (RT)	36871	37,749	38,641	39,444	40,303
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Juta/Tahun)	84,077	89,774	96,318	104,354	110,506

Sumber Data : Data BPS Kota Palopo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga di Kota Palopo sejak 2015-2019 meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya berada pada angka 84,077 juta per tahun per rumah tangga, tahun 2019 meningkat menjadi 110,51 juta per tahun per rumah tangga.

Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.303
Pengeluaran Per Kapita 2015-2019
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Wilayah	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Palopo	12,005	12,156	12,319	12,662	12,986
Pare-Pare	12,817	12,966	13,078	13,303	13,648
Makassar	15,669	16,013	16,367	16,597	16,989
Sulawesi Selatan	9,992	10,281	10,489	10,814	11,118
Nasional	10,150	10,420	10,664	11,059	11,299

Sumber : BPS

Pengeluaran per kapitas masyarakat Kota Palopo tahun 2019 melebihi target pengeluaran per kapita Kota Palopo tahun 2019 yang berada pada angka 12.812 (ribu/orang/tahun).

Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar belanja dan konsumsi non pangan, semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.304
Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Pengeluaran Makanan	Rp	447,306	428,060	529.701	623,068	536662
b.	Pengeluaran Non Makanan	Rp	547,171	448,870	570.813	662,290	651984
c	Total Pengeluaran Konsumsi	Rp	994,477	876,930	1,101	1,285,358	1,188,646
d	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	%	55.02%	51.19%	51.87%	51.53%	54.85%

Sumber Data : BPS Palopo, Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan Palopo Dalam Angka 2019

Data di atas menunjukkan bahwa konsumsi non pangan per kapita masyarakat Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2019 selalu berada di atas angka konsumsi pangannya. Artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di Kota Palopo sepanjang kurun waktu tersebut di atas dipakai lebih banyak untuk belanja non pangan. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palopo sudah relatif cukup baik.

Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor lapangan usaha dengan jumlah angkatan kerja yang ada dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tabel 2.305
Produktivitas Total Daerah
Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah Nilai Tambah Sektor (= Jumlah PDRB (Hb/Juta)	5,351,284.90	5.906.480.42	6,550,688.67	7,285,142,35	7,942,480
B	Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	65,346	67,504	75,563	75,829	80854
C	Produktivitas Total Daerah (Juta/Thn)	81.89	87.5	86.69	96.67	98.23

Sumber Data : Diolah dari Buku PDRB Kota Palopo 2019, diolah

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, seorang tenaga kerja yang bekerja hanya menghasilkan nilai tambah produk sebesar 81.89 juta/tahun dan pada tahun 2019 menjadi 98.23 juta/tahun/tenaga kerja

Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Tabel 2.306
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019(**)
1	Jumlah Ekspor (Juta)	1,549.99	1,723.68	1,859.52	2,239.90	2,539.22
2	Jumlah Impor (Juta)	2,342.94	2,578.30	2,695.62	3,188.62	3,543.98
3	Jumlah Ekspor + Impor (Juta)	3,892.93	4,301.98	4,555.14	5,428.52	6,083.20
4	Jumlah PDRB (Juta)	5,351.28	5,886.52	6,514.94	7,285.14	7,942.48
5	Rasio Ekspor + Impor (%)	72.75%	73.08%	69.92%	74.51%	76.59%

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2019, * Sementara, (**) Sangat Sementara

Angka dalam tabel juga menunjukkan bahwa setiap tahun ekonomi di Kota Palopo semakin terbuka yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Palopo.

Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Tabel 2.307
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pinjaman di bank umum	Juta	14.113.075	26.236.425	24.882.444	26.934.511	-
b.	Dana pihak ketiga di bank umum	Juta	14.851.967	16.220.629	22.276.855	20.014.741	-
C	Rasio	Juta	0.95	1.62	1.12	1.35	-

Sumber Data : Buku Indikator Ekonomi Kota Palopo 2017

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pinjaman umum di bank (dari bank swasta maupun BUMN) di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2013 sampai dengan 2016. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 14,11 Trilyun Rupiah, tahun 2017 meningkat menjadi 26,93 Trilyun Rupiah atau meningkat sebanyak 12, 82 Trilyun. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan jumlah uang yang akan beredar di Kota Palopo sejak empat tahun terakhir.

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Tabel 2.308
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Panjang jalan	Km	502	502	503.16	503,16	503,16
b.	Jumlah kendaraan	Unit	25.743	26.846	27.998	29.150	30,607
Rasio		Angka	0.020	0.019	0.018	0,017	0,016
Rasio		Per 1000	20	19	18	17	16

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, tingkat kepadatan jalan per Km terdapat 20 kendaraan, sementara di 2019, terdapat 16 kendaraan. Artinya kondisi jalan di Kota Palopo pada tahun 2019, lebih padat dibandingkan tahun 2015.

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.309
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (m3)	601.337	605.649	600.911	603.524	607.024

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Tabel 2.310
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah barang melalui dermaga per tahun (m³)	601.337	605.649	600.911	603.524	615.594
Jumlah orang melalui dermaga per tahun (orang)	769	122	445	314	352
Jumlah barang melalui terminal per tahun (kg)	3.733	3.360	2.689	3.176	3.620
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741	1.323.252

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2020

Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Makin tinggi nilai indikator ini menunjukkan makin taatnya pembangunan terhadap rencana RT RW yang ada.

Jenis dan Jumlah Bank

Aktifitas Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dan Palopo pada khususnya. Aktifitas sektor keuangan, atau yang lebih umum dikenal sebagai jasa keuangan, meliputi beberapa sub sektor diantaranya Perbankan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya serta Jasa Penunjang Keuangan. Untuk Palopo, peningkatan kinerja sektor keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif

perbankan. Sektor perbankan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi

Tabel 2.311
Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo Tahun 2017 - 2019

Jenis Bank	2017	2018	2019
Bank umum (Konvensional & Syariah)	12	12	20

Sumber: Potensi Ekonomi Kota Palopo (BPS, 2017)

Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi

Di lihat dari unit usaha dan tenaga kerja, data BPS menunjukkan bahwa terdapat 0,98 persen total usaha yang bergerak di sektor Keuangan dan mampu menyerap 10,59 persen total tenaga kerja usaha. Fenomena inilah yang menjadikan sektor keuangan termasuk sektor unggulan. Jika dibanding kabupaten sekitar, walaupun jumlah usaha/perusahaan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi bukan yang tertinggi, tetapi dalam penyerapan tenaga kerjanya memiliki nilai yang tertinggi dibanding daerah sekitar.

Tabel 2.312
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016

Wilayah	Jumlah Usaha/ Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Kab. Luwu	198	1127
Kab. Tana Toraja	102	751
Kab. Luwu Utara	106	820
Kab. Luwu Timur	131	1167
Kab. Toraja Utara	70	806
Kota Palopo	154	4621

Sumber : BPS, 2017

Jenis Kelas dan Jumlah Restoran

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi Palopo. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meliputi usaha perhotelan, restoran dan rumah makan. Berdasarkan analisis economic based approach kategori ini terpilih sebagai sektor unggulan di Palopo. Kontribusi kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Palopo pada Tahun 2016 masih terbilang kecil yaitu sebesar 1,21 persen dan mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 8,45 persen.

Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel

Berdasarkan data BPS, jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur dan jumlah tamu hotel menunjukkan tren meningkat. Jumlah hotel/penginapan/wisma dan sejenisnya di Kota Palopo sampai dengan tahun 2015 sebanyak 38 unit. Dua unit diantaranya merupakan bintang dua dan sisanya 36 unit adalah non bintang. Penyebaran penginapan tersebut hanya berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Wara sebanyak 16 unit, Wara Timur sebanyak 12 unit dan Mungkajang 2 unit serta Wara Utara 4 unit.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Tabel 2.313
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Sumber Air Bersih	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Leding (Perpipaan)	14.958	17.958	21.958	23.467	25.594
2	Sumur Lindung	856	906	956	1.006	1.044
3	Sumur Tidak Terlindung	6.117	6.167	6.217	6.222	6.248
4	Mata Air Terlindung	3.327	3.377	3.427	3.477	3.515
5	Air Kemasan	2.649	2.699	2.749	2.799	2.837
6	Lainnya	617	667	717	767	805
Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih		28.524	31.774	36.423	37.738	38.422
Jumlah Rumah Tangga		35.025	35.914	36.871	37.749	39.444
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih		81,44%	88,47%	98,87%	99,97%	97,41

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2019

Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Adalah indikator yang menggambarkan kondisi energi listrik yang telah dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palopo, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan listrik yang ada.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator ini menunjukkan seberapa besar masyarakat Kota Palopo yang mampu menikmati akses listrik. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyak masyarakat Kota Palopo yang mengakses listrik, sehingga lebih mudah dalam mengakses pelayanan lain dan menikmati berbagai hasil pembangunan lainnya.

Tabel 2.314
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	58,618	62,613	67,228	-	70,172
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	Rumah Tangga	35.914	36.871	37.749	38.641	39,444
	Persentase						

Sumber Data : Statistik Daerah Kota Palopo, Dinas Pertambangan & ESDM Kota Palopo 2018

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Indikator ini menggambarkan seberapa besar penetrasi alat komunikasi berupa ponsel diakses dan digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses informasi dan komunikasi melalui telephone yang menunjukkan semakin mudah dan terbukanya informasi yang ada.

Tabel 2.315
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
di Kota Palopo Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jiwa	112.703	122.321	140.181	153.493	159.200
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	168.894	172.916	176.907	180.678	184.614
	Persentase	%	66,73	70,74	79,24	84,95	86,00

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan peningkatan yang cukup besar atas akses penduduk terhadap telepon atau handphone di Kota Palopo. Tahun 2015 hanya 66,73% masyarakat yang menggunakan atau bisa mengakses layanan ini. Namun pada 2019 jumlahnya meningkat menjadi 86,00% sudah mengaksesnya. Ini menunjukkan semakin mudahnya komunikasi informasi di tingkat masyarakat.

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tabel 2.316
Angka Kriminalitas yang Tertangani
di Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
a.	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun	13	20	-	102	230
b.	Jumlah penduduk	168.894	172.916	176.907	180,678	184614
Angka kriminalitas yang tertangani (per 10000)		7	8	12	6	12

Sumber data : BPS Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa dari 10.000 penduduk rata-rata terjadi kasus kejahatan sebanyak 7 kasus yang tertangani pada tahun 2015, sementara pada tahun 2019 angka menjadi 12 kasus tertangani per 10.000 penduduk.

Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu Desa/Kelurahan Swadaya, Desa/Kelurahan Swakarsa dan Desa/Kelurahan Swasembada. Desa/Kelurahan Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal.

Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Tabel 2.317
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan
Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
A	Persentase kelurahan berswasembada	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa semua kelurahan yang ada di Kota Palopo sejak 2015 sampai dengan 2019, Kota Palopo dengan 48 kelurahan yang ada dinilai telah berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupannya masyarakatnya mirip dengan kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat yang maju.

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.318
Rasio Ketergantungan
Kota Palopo Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio ketergantungan	49.23	48.81	48.46	48.11	47.98

Sumber Data : Diolah dari Palopo Dalam Angka 2019

Data di atas menunjukkan bahwa untuk 100 orang penduduk usia produktif di Kota Palopo pada tahun 2015 mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang usia non produktif. Beban ini tak jauh berbeda dengan tahun 2019 dimana untuk 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 47-48 orang usia non produktif.

Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.319
Rasio Lulusan S1/S2/S3
di Kota Palopo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	14.220	15.833	15.599	16.490	12.452
b.	Jumlah penduduk	Orang	164.903	168.894	172.916	176.374	180.678

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
C	Rasio	Per 100	8.62	9.4	9.0	9.3	14.51

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2014 dari 100 orang penduduk Kota Palopo terdapat 8-9 orang yang merupakan lulusan perguruan tinggi baik yang berpredikat sarjana, master/magister ataupun doktor. Kondisi tahun 2018 meningkat menjadi 14 orang berpendidikan strata 1 ke atas dari 100 penduduk Kota Palopo.

2.1.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.5.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.320
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palopo 2015-2019

Kota Palopo 2015-2017						
No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	6.45	6.98	7.19	7.52	6.75
2	Laju inflasi (%/Tahun)	3.38	2.47	3.94	4.19	1.91
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	31.68	34.18	37	40.32	43.02
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12,005	12,156	12,319	12,465	12,986
5	Indeks Gini (Angka)	0.430	0.370	0.340	0.338	0.338
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	91.42	91.26	91.22	92.06	92.18
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.58	8.74	8.78	7.94	7.82
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	246,727	261,056	274,319	292,602	324,233
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,510	15,020	15,440	14,265	14,370
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	8.58	8.74	8.78	7.94	7.82

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.76	1.17	1.75	1.14	1.15
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.52	0.28	0.6	0.26	0.29
	Indeks Kesehatan	77.23	77.31	77.38	77.44	78.14
	Indeks Pendidikan	75.87	75.95	76.24	76.81	77.69
	Indeks Pengeluaran	75.72	76.1	76.51	76.88	78.12
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	76.27	76.69	76.71	77.3	77.98
12	Angka melek huruf (%)	98.22	96.07	98.02	97.71	98.4
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.25	10.26	10.33	10.51	10.75
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.02	15.03	15.05	15.06	15.07
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.20	70.25	70.30	70.49	70.79
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0.07	0.02	0.02	0.02	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	1.45	2.14	2.37	1.91	
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	51.42	54.81	56.33	55.48	60.49
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	66.29	69.51	73.99	72.93	74.85
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37.97	41.31	40.41	39.81	47.37
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	54.27	58.09	59.56	58.31	64.58
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	69.43	73.03	77.61	76.40	79.16
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	40.36	44.15	43.03	42.32	51
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	12.07	14.43	10.96	11.60	10.32
	Jumlah penganggur (Orang)	7890	n/a	8265	8795	8314
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	87.93	85.57	89.04	88.4	89.68%
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	72.07	76.66	70.56	72.24	75.40%
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	45.21	46.9	50.15	49.16	54.25%
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	-	-	25.51	25.76	25.07%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	Laki – Laki		-	18.05	21.03	
	Perempuan		-	7.46	9.48	
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.28	30.34	28.9	26.82	26.09%
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	79.9	80.34	83.08
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	10.8	13.35	17.91	19.78	16.83%
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88.7	90	91.6	92.5	92.6
30	Penguatan cadangan pangan (%)	61.2	66.3	72	76.14	
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	18.96	17.73	17.6	17.39	
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	-	-	-	
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	33,609	36,592	37,620	36,527	25,025
	Padi	28,631	30,167	32,444	32,664	20,288
	Jagung	4,737	6,303	5,086	3,722	4,737
	Ubi Kayu	177	70.4	70	141	n/a
	Ubi Jalar	13	18.94	4.55	n/a	n/a
	Sagu	51.33	33.04	15.59		
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	2491.46	3318.87	3276.3	3365.50	4404.99
	Daging (Ruminansia) Ton	306.06	232.94	247.48	249.50	601.82
	Daging Sapi (Ton)	284	232.24	247.16	222.80	596.87
	Daging Kerbau (Ton)	22.06	0.7	0.32	0.10	1.03
	Daging Kambing (Ton)	-	-	-	-	3.92
	Daging Unggas (Ton)	2185.4	3085.93	3028.822	3968.92	3803.16
	Daging Ayam Kampung (Ton)	133.81	143.72	145.012	148.40	123.77
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	2,043.39	2,934.04	2,875.36		3,666.04
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8.2	8.17	8.45	8.70	13.36
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	666.85	2063.9	1778.18	2065.87	1422.3
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	563.08	1999.48	1590.19	n/a	1222.384
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	14.54	-	45	n/a	86.872

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	89.23	64.42	142.99	n/a	113.08
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	1798.51	1818.27	578.45	1101.64	2018.66
	Kelapa Dalam	55.82	49.67	31.92	25.80	17.70
	Kopi	67.46	66.12	66.27	64.50	50.96
	Kopi Robusta	66.85	66.07	66.26	64.80	n/a
	Kopi Arabika	0.61	0.05	0.01		n/a
	Cengkeh'	81.77	110.36	127.99	125.70	n/a
	Kakao	1,526.00	1,526	286	820.84	1,950
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.01	0.05	n/a	n/a	
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.19	0.19	0.18		
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.18	1.21	-		
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	21.91	22.9	23.62	24.10	24.41%
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.96	2.91	2.82	2.77	2.72%
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
45	Pertumbuhan Industri (%)	43.99	1.84	22.13		
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	84,077	89,774	96,318	102,051	110.51
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	55.02	51.19	51.87	51.53	54.85
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	81.89	87.5	86.69	96.67	98.23

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100	100	100
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	72.75	73.08	69.92	74.51	76.59%
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	1.12	1.35	0	1.19	n/a
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	8	12	12	13	12
10	Rasio ketergantungan	49.23	48.81	48.46	48.11	47.98
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR					
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	63,16	63,10	63,12	70	
2	Angka Partisipasi Kasar					
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	101,81	111,66	106,00	112.89	105.99
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	88,23	86,17	84,91	84.17	86.02
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	91,56	95,35	85,39	110.31	110.74
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)					
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	17.03	7.85	7.02	6.31	
	Tamat SD/ sederajat (%)	19.23	30.47	14.18	12.69	
	Tamat SMP/ sederajat (%)	18.02	11.82	23.63	24.71	
	Tamat SMA (%)	26.12	31.75	36.68	37.88	
	Tamat SMK (%)	3.89	4.06	2.81	2.39	
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	15.72	14.08	15.67	16.00	
	Diploma I/II (%)	0.33	0.29	0.37	0.38	
	Diploma III (%)	2.61	1.82	1.39	1.12	
	Diploma IV/S1-S3 (%)	12.78	11.97	13.91	14.51	
4	Angka Partisipasi Murni					
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	94,11	95,37	99,32	99.78	99.44

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	75,43	76,61	77,89	78,39	78,11
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	68,29	65,72	66,42	67,99	67,4
5	Angka partisipasi sekolah (%)					
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	989,8	1000	992,3	997,8	997
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	985,2	965,7	981,3	100	991,7
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	818,9	884,1	883,4	847,5	844,3
6	Angka Putus Sekolah:					
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,4	0	0,68	0,03	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,45	3,43	1,87	0,02	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	15,87	9,10	10,28	-	
7	Angka Kelulusan:					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	97,48	98,87	100	99,14	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,05	99,62	99,3	99,46	
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	102,82	102,44	99,75	-	
8	Angka Melanjutkan (AM):					
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)				100	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)				100	
9	Fasilitas Pendidikan:					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	97,47	97,47	96,25	100	
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	37	33	32	33	
	SD/MI (per 10,000)	43	36	36	37	77
	SMP/ MTS (per 10,000)	26	26	26	26	
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)	27	28	27	27	
	SMA/MA/SMK	27	28	27	27	
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	890	674	635	620	
	SD/MI (per 10,000)	937	633	607	654	
	SMP/ MTS (per 10,000)	800	751	688	671	
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)	231	89	88	80	
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.81	0.59	0.57	0.55	
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pendidikan menengah (per 10.000)	4.77	1.77	1.8	1.61	
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	99.954	99.973	99.995	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	98.22	96,61	97.45	97.71	98.42
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	61.55	123.46	137.26	99.53	
2.	Kesehatan					
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0	2	2	1	0.61
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	100	100	98	100	99.39
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6.92	7.62	5.41	6.27	5.79
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6.19	7.62	5.41	3.63	4.27

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	145.61	145.19	67.59	99.04	30.47
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	9.62	9.09	8.78	8.59	8.41
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	2	3	3	3	3
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	3	4	4	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0.49	0.48	0.50	0.62	0.63
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5	5	5	6	6
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	74.21%	76.50%	70.63%	72.77%	86.23%
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	96.31%	93.99%	95.79%	100.00%	101.67%
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	95.83%	97.92%	95.83%	95.83%	93.75%
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	Tidak ada Kasus
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	83.85	85.9	87.4	85.63	-
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	109.94%	111.83%	107.00%	106.87%	98.48%
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	2	2	0	0	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	8.64%	3.15%	6.19%	9.85%	9.20%
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	83.47%	108.56%	138.07%	83.06%	118.91%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	221.44	204.72	243.07	138.37	224.79
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	37.60%	159.46%	244.32%	83.06%	91.41%
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	59.90%	65.98%	63.37%	45.60%	39.76%
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6	6	6	6	5
26	Angka kejadian Malaria (per 1000)	1.13	1.66	1.28	1.01	0.62
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100	100	100
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0.00%	0.03%	0.07%	0.07%	0.04%
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	0,00	1,36	0,00	n/a	n/a
33	Cakupan pelayanan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	n/a	n/a	n/a	100	
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	94.50%	95.75%	100.78%	100.00%	99.76%
35	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	45.83%	45.83%	60.42%	62.50%	62.50%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92.25%	90.69%	92.80%	94.08%	100.00%
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	91.81%	93.17%	91.22%	100.60%	99.53%
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	77.43%	75.06%	67.79%	63.44%	76.42%
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	42.97%	56.36%	62.51%	48.90%	73.92%
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100
42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	94,66	98,81	97,52	97.27	97.93
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	-	-	-	100	
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	0	100	Tidak ada Kasus
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum:					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	55.6	55.6	58.96	67.99	69.57%
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	30	29	28	28	27
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	47.75	49.73	58.33	69.81	71.60%
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	0	0.2	1.28	1.82%	2.14%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	65.46	88.63	90.77	96.41	97.03
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	40,50	42,70	46,10	47.72	50.1
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	14.71	12.64	10.73	8.99	8.87%
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	14.43	14.43	14.42	14.31	
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	2.94	3.39	3.4	3.69	3.93%
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	47.89	65.3	71.34	75.8	73.55%
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	10.22	15.53	18.86	20.74	
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	85.32	86.01	93	94.84	95.61
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	71.44	86	88.63	94.49	97.28
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	1.95	1.89	0.76	0.49	0.15
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	3.64	4.5	4.53	4.03%	4.1%
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.78	1.62	1.58	1.55	1.52
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.84	1.8	1.78	1.78	1.82
3	Penataan Ruang:					
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	2,759	2,761	3,978	4,222	
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas	52.36	52.4	75.49	76.8	76.95%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	wilayah kota/kawasan perkotaan (%)					
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	-	-	-	-	
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Rasio rumah layak huni	0.14	0.16	0.16	0.17	0.19
2	Rasio permukiman layak huni (%)	91.93	94.24	94.28	95.86	92.26%
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	69.16	70.25	79.39	84.19	91.44%
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	84.78	85.04	92.1	94.31	93.58
5	Persentase permukiman yang tertata (%)	98.06	98.12	99.25	99.53	99.25
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0.36	0.35	0.13		0.15
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	95.46	93.18	37.5	25.00	4.31
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	8.36	7.76	7.41	6.91	0.47
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	18.6	20	20.98	22.68	25.79
5.	Ketentraman, Kerteliban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	200	200	2.00	0
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	98,80	96,60	92,20	91,80	95,62
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	6.06	9.09	9.09	9.09	9.09%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	88.16	67.67	94.87	94.74%	65.59%
5	Persentase Penegakan PERDA	97,80	97,70	97,90	91,80	95,62
6.	Sosial					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	36.81	37,70	48,72	51.58	54,97
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	36.82	37.73	48.4	51.43	55.09
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	43.12	43.77	57.61	59.06	60.3
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	0	0	0	
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	100	0	100	0
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah	0	3.09	11.88	19.68	41.43

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	menerima jaminan sosial (%)					
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja					
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	5.5	6	8.3	9.19	9.50
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	8.3	12.1	18.1	20.96	
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	88	80	71	73.00	11.00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	1.58	3.13	4.54	26.2	53.12
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	26	24	25	25	
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	36	37	37	39	54.82
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0.87	0.67	0.97	0.97	1.13
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0.53	0.48	-	0.25	
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	7.62	5.71	28.85	31.97	46.45
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	5.56	5.92	11.2	12.1	0
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	40	36.6	5.83	5.28	0
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	9.4	9	9.3	11.16	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	14,49	11,40	10,92	10.59	9.27%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20	20	20	28.00%
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.31	3.12	3.16	3.19	
4	Rasio KDRT (per 10.000)	5	6	3	2	1
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	40.36	44.15	43.03	42.32	91.45%
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	7.09	22.07	24.16	
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	-	19.29	21.38	24	9.09
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD					
	APM Perempuan pada Tingkat SD	90.04	90.52	99.12	100	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	97.48	100	99.33	100	
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP					
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	81,02	75,52	80,28	86.34	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	68,49	77,50	75,35	90.42	
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA					
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	66,63	64,73	63,24	75.89	
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	70,11	66,80	69,65	83.58	
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	41.25	41.76	42.27	42.63	
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	43.48%
3	Pangan					
1	Ketersediaan pangan utama (%)	9.94	10.28	11	11.40	
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2,273	2,199	2,082	3,966	

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2203.4	2,130.10	2012.8	1821.36	
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	-	68.9	69.1	71.46	
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	-	75	82	72.00	86.00
4	Pertanahan					
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.61	1.31	1.52	2.17%	27.84%
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	0	25	28.57%
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	0	100	100%
5	Lingkungan Hidup					
	Kabupaten/Kota					
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	-	-	Ada	Ada	
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Unggul	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a	n/a	n/a	n/a	Belum tersedia
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	32.54	38.95	37.2	24.16%	27.27
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota					

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	0	0	0	0	0
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	0	0	0	0	0
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100	100%
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	86.12	87.02	88.28	89.0%	90.27%
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	2.6	3.17	3.5	4.03%	4.12%
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	59	61	64	67.2%	67.83%
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70.2	73.95	78.56	89.55%	87.02%
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	72.41	75.65	77.81	79.46	-

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	0	0	0	
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.65	0.79	0.78	0.65	0.67
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.86	0.88	0.6	0.84	0.94
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.38	0.37	0.38	0.44	0.38
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	66.21	78.89	82.56	93.28	93.84
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97.92	97.92	97.92	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	-	2.5	2.5	2.5
4	Persentase LSM aktif (%)	10.81	5.4	0	0.00%	2.78%
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	-	-	4.17	4.17	4.17
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.42	2.38	2.31	2.23	2.18
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	-	-	-	-	
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	0.00%	40	32.65	32.65%	36.73%
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	-	-
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	-	-	-
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal	-	-	-	-	-

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	yang melakukan pendidikan kependudukan					
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	69.4	72.79	74.67	75.15%	75.74%
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	21	10	10	9	3
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	30.27	23.59	22.48	23.92%	12.35%
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	20.91	21.54	21.81	25.06%	21.92%
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	60.28	47.83	45.14	47.42%	32.04%
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	67.43	62.95	75.15	78.26%	74.12%
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	51.06	53.02	58.56	64.96%	60.61%
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	34.37	42.27	47.2	55.09%	54.38%
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	2.44	7.33	9.00	10.333	20.44
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	100	100	100	100	100

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	di bidang pengendalian penduduk (%)					
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	25.77	17.75	20.63	20.42%	23.93%
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	4.31	9.67	7.28	8.74	13.20
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	49.93	55.1	66.4	43.40%	66.44%
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	70.59%	104%	193%	180%	100%
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	23.83	19.63	54.89	64.01	100%
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	-	-	-	-

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	37.62	65.19	83.83	82.94%	41.32%
9	Perhubungan					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,689,617	1,680,146	1,345,436	1,327,055	1,323,604
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	1354	1301	1152	1411	1381
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	9.02	8.5	9.9	10.9	10.6
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	88.8%	90.28%	86.49%	97.18%	99.1%
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	69.27%	65.45%	63.20%	70.47%	56.4%
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	20	19	18	17	16
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,688,848	1,680,024	1,344,991	1,326,741	1,323,252
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	602,106	605,771	601,356	603,524	607,024
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	2,294,687	2,289,155	1,949,036	1,933,755	1,942,818
10	Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	0	0	3.33	3.33	3.35
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.83	0.86	0.86	0.9	0.9
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	66.73	70.74	79.24	84.95	86
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.07	0.08	0.09	0.10	0.23
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.33	0.37	0.4	0.42	0.5

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah					
1	Persentase koperasi aktif (%)	71.02	71.32	71.08	71.03	25.34
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	100	99.91	99.91
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	-	-	-	100	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	76.34	76.11	76.31	75.52	75.37
12	Penanaman Modal					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	95	122	147	129	78
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	95	122	147	129	85
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	96,603	268,332	382,322	220,859	130,740
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	22.5	10.56	7.42	9.50	13.65
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	-32	178	42.48	57.77	
13	Kepemudaan dan Olah Raga					
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	67.90	69.30	69.30	69.27%	70.20%
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.56	1.75	1.75	1.75%	1.77
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	-	38.46	38.46	46.15%	59.26
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	63.64	68.18	68.18	32.53%	32.53
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	63.64	68.18	68.18	21.18%	28.2
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	10	36	7	7	4
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	10	36	7	7	4
14	Statistik					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi	55	75	71.42	86	79.59%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)					
16	Kebudayaan					
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	12	15	18	14
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	99.32	99.32	99.32	99.33%
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	1	1	0	1	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	37	51	51	56	52
17	Perpustakaan					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	7.67	9.18	9.23	9.55	10.15
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	35.14	34.41	46.81	50.46	38.49
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.21	1.19	1.16	1.16	1.13
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	902	1,106	1,137	1,204	1,246
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	624	308	1,232	1,191	404
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	0	33	33	33	67
18	Kearsipan					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2.5	2.5	2.04	16.33	24.49%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	6	7	8	7
Layanan Urusan Pilihan						
1.	Pariwisata					
1	Kunjungan wisata (%)	122.31	100.97	99.48	101.15%	115.83%
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2	2	2	2
3	PAD sektor pariwisata (%)	4.15	3.45	3.51	5.05%	5.12%
2.	Pertanian					
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	18,96	17,73	17,60	17.39	

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)					
	Padi	28631	30167	32,444	32,664	20,288
	Jagung	4737	6303	5,086	3,722	4,737
	Ubi Kayu	177	70.4	70.0	141	n/a
	Ubi Jalar	13	18.94	4.6		n/a
	Sagu	51.33	33.04	15.59		n/a
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)					
	Padi	5.62	5.88	6.27	6.40	6.41
	Jagung	6.64	6.79	6.75	7.09	7.10
	Ubi Kayu	22.13	10.06	70.00	29.52	n/a
	Ubi jalar	13	18.94	4.55		n.a
	Sagu	0.46	0.29	0.05		
7	Cakupan bina kelompok petani	89.43	78.38	50.68	52.17	
3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	n/a	n/a	n/a	100	
2	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a	n/a	n/a	100	
4	Perdagangan					
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-792.951	-834.666	-802.359	-945580	-1,004,760
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Perindustrian					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	87,65	13,25	0	0.00%	2.45%
6	Transmigrasi					
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	
7	Perikanan					
1	Produksi perikanan (%)	99.6	97.74	103.7	99.95%	93.33%
2	Konsumsi ikan (%)	122.06	99.6	100.13	104.16%	98.54%
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	21.6	5.69	3.15	11.19%	7.75%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	69.11	75	75	72.50%	11.00%
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penunjang Urusan						
1.	Perencanaan Pembangunan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	90.29	94.46	79.01	92.2	98
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD (%)	87.85	81.98	94.79	74.17	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Keuangan					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	0	0	0		
3	Persentase SILPA terhadap APBD	12.52	5.15	2.25	0.12%	3.56%
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)					
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0,3	0,3	0,6	0.62%	0.3%

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	3,7	0,7	1,06	1.04%	0.74%
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	27.56	22.22	17.84	18.29%	20.17%
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	17.69	18.64	24.48	26.26%	29.59%
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)					
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	54.86	62.59	64.15	57.6	56.7
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	45.14	37.41	35.85	42.42	43.3
8	Bagi kabupaten/kota dan desa (%)	1.51	2.04	1.79	5.75	6.56
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	97/867	103/893	103/893	103/893	103/894
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0,5	0,7	0,9	0.79%	0.67%
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	30,3	30,3	29,3	30.4	37.97%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	34	33	33.3	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	938	900	949	951	960
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	3021	2261	2217	2210	2213
4.	Penelitian dan pengembangan					
1	Persentase implementasi rencana keliitbangan.(%)	90,9	100	100	100	100

No	Bidang/Urusan/Indikator	Capaian Kinerja Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	75	85	36,36	23.63	50
	Penerapan SiDa:					
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	34.78	26.08	52.1	60.87	36.3
5.	Pengawasan					
1	Persentase tindak lanjut temuan	70,72	41,60	57,02	46.54	75
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,09	0,06	0,04	0	0.91
3	Jumlah temuan BPK	15	9	19	16	12
6.	Sekretariat Dewan					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada.A	Ada.A
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada.A	Ada.A
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada.A	Ada.A

2.1.5.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berikut adalah Capaian Standar Pelayanan Minimal Pada Enam Urusan Pemerintah Kota Palopo sampai dengan Tahun 2019 :

Tabel. 2.321
Capaian SPM Pendidikan Kota Palopo Tahun 2019

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2019
	Aspek Pelayanan Dasar		
I	SPM Bidang Pendidikan		100
	Pendidikan Dasar		
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100
	Pendidikan Kesetaraan		
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	%	100
	Pendidikan Anak Usia Dini		
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100
II	SPM Bidang Kesehatan		84.06
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.27
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.79
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.86
	Pelayanan kesehatan balita		
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68.33
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	50.66
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.82
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	41.88
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus		
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87.03

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2019
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis		
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)		
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95.17
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum		
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari		89.51
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81.70
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik		
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97.31
IV	SPM Bidang Perumahan		100
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana		
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah		
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
V	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		79.80
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	90.37
	Pelayanan informasi rawan bencana		
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	88.88
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	84.17
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	70.00
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2019
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	65.59
VI	SPM Bidang Sosial		
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti		100
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota		
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100

2.15.3 Capaian Kinerja SDG's/TPB

Tabel. 2.322
Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo
Tahun 2019

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Tujuan I Tanpa Kemiskinan		
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	8.1
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	47

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3000
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76.54
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	90

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	91
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	1
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	4
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 *juta
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	61.15
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend. 20 Kes. 25 Perl. Sos. 5

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		
Tujuan II Tanpa Kelaparan		
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	8.2
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1.79
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 14 Berat 30
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	7.98
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	20
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	20
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	60
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	91.6
Tujuan III Kehidupan Sehat dan Sejahtera		
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	65
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	4

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Persentase kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.04
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	230
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1,700
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	1
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Persentase kelurahan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	11
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	25
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	2

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.		
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	72
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76.54
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	12
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	3
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	11
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100
Tujuan IV Pendidikan Berkualitas		
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	85

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	10.36
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD/MI (100) SMP/MTs (100)
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100 & 100
Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang,	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	SD (55) SMP (60)

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.		SMA (65) SMK (55)
Tujuan V Kesetaraan Gender		
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	3
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	60
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	9
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	30

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	20%
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	71%
Tujuan VI Air Bersih dan Sanitasi Layak		
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	90
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	505 m3/detik
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	91
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	9

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah Kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	183 Skala Lingkungan
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	60
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi Standar
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Tujuan VIII Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7.14
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	37.1
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	72.66
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	25.6
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	20
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	9.81
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.22
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	1,100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	113,900
Tujuan IX Industri, Inovasi, Infrastruktur		
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	3.00%
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	5%
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2,400
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25%
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.1
Tujuan X Berkurangnya Kesenjangan		
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	0.339
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,	8.1

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	39
Tujuan XI Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan		
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	15
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	44
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	25

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 *juta
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	100
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Jumlah kelurahan yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.	Ada
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0
Tujuan XII Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab		
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	430
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	1
Tujuan XIII Penanganan Perubahan Iklim		
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Tabel 2.323
Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Sampai dengan Triwulan IV 2019

No	KOTA PALOPO	RATA- RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2019		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3		4		5
1	Dinas Pendidikan	95.96	70.95	Sangat Tinggi	Sedang	
2	Dinas Kesehatan	91.47	91.35	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
3	Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah	96.50	95.73	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
4	Dinas Pekerjaan Umum (PU)	75.33	90.34	Sedang	Sangat Tinggi	
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	94.56	83.16	Sangat Tinggi	Tinggi	
6	Dinas Pemadam Kebakaran	94.75	92.81	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	80.28	89.21	Tinggi	Tinggi	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	87.92	96.27	Tinggi	Sangat Tinggi	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.00	92.50	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
10	Dinas Sosial	80.97	98.85	Tinggi	Sangat Tinggi	
11	Dinas Perhubungan	100.00	97.99	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK)	86.58	86.33	Tinggi	Tinggi	
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	98.46	94.33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	97.16	94.78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
15	Dinas Pengendalian Penduduk & KB	75.93	77.52	Tinggi	Tinggi	
16	Dinas Ketenaga Kerjaan	86.25	66.59	Tinggi	Sedang	
17	Dinas Koperasi dan UMKM	90.63	97.52	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
18	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	97.09	96.62	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
19	Dinas Kebudayaan	99.99	94.78	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	KOTA PALOPO	RATA - RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2019		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.00	97.46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
21	Dinas Kearsipan	91.64	93.36	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
22	Dinas Perpustakaan	100.00	98.07	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.97	97.85	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
24	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh	100.00	97.24	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	100.00	97.90	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	99.93	94.02	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
27	Badan Pendapatan Daerah	99.95	93.70	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
28	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	81.41	83.57	Tinggi	Tinggi	
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	99.99	99.32	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
30	Sekretariat Daerah (SEKDA)	94.85	92.40	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
31	Sekretariat DPRD	86.08	84.23	Tinggi	Tinggi	
32	Inspektorat	100.00	84.77	Sangat Tinggi	Tinggi	
33	Dinas Persandian dan Statistik	99.68	93.86	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
34	Dinas Pertanian, dan Peternakan, Perkebunan	93.33	76.27	Sangat Tinggi	Tinggi	
35	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif	96.84	98.00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
36	Dinas Perikanan	100.00	98.28	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
37	Dinas Perdagangan	89.04	97.92	Tinggi	Sangat Tinggi	
38	Dinas Perindustrian	100.00	95.47	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
39	Dinas Pertanahan	89.18	32.43	Tinggi	Sangat Rendah	
40	Dinas Transmigrasi	100.00	97.75	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
41	Kecamatan Sendana	92.78	92.44	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	KOTA PALOPO	RATA - RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2019		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD TRIWULAN IV TA. 2019		KET
		KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	
42	Kecamatan Bara	98.48	62.91	Sangat Tinggi	Rendah	
43	Kecamatan Mungkajang	94.69	76.98	Sangat Tinggi	Tinggi	
44	Kecamatan Telluwanua	93.03	94.72	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
45	Kecamatan Wara Barat	90.21	60.32	Sangat Tinggi	Rendah	
46	Kecamatan Wara Selatan	95.35	75.86	Sangat Tinggi	Tinggi	
47	Kecamatan Wara Timur	92.28	78.17	Sangat Tinggi	Tinggi	
48	Kecamatan Wara Utara	100.00	87.75	Sangat Tinggi	Tinggi	
49	Kecamatan Wara	88.55	57.38	Tinggi	Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Perangkat Daerah		93.82	87.71	Sangat Tinggi	Tinggi	

Sintesa atas hasil evaluasi atas hasil penyelenggaraan pemerintahan dan hasil pembangunan Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2019, pertumbuhan PDRB Kota Palopo lebih rendah dibandingkan tahun 2018, belum memenuhi target 2019 (7.14). Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019, masih berada diatas nasional (5.02), Kota Pare-Pare (6.65), Kabupaten Luwu (6.26), namun belum lebih baik daripada Luwu Utara (7.11), Makassar (8.79), Sulsel (6.92).
2. PDRB per Kapita (ADHB) Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun. Ini lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.32 Juta/Tahun. Bahkan juga melampaui target daerah 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023, yang berada pada angka 37.8 Juta/Tahun. Angka PDRB per Kapita (ADHB) Kota Palopo 2019 lebih tinggi/meningkat sebanyak 2.7 Juta/Tahun, dibandingkan tahun 2018.

PDRB per Kapita Kota Palopo 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun).

Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun)

3. Nilai indeks gini atau gini rasio Kota Palopo tahun 2019 pada angka 0.338 dan ini belum memenuhi target daerah 2018 yang berada pada angka 0.330. Namun capaian gini rasio Kota Palopo tahun 2019 adalah yang terbaik sejak tahun 2014, yang semuanya masih menyentuh angka 0.4 point.
4. Proporsi Penduduk Miskin Kota Palopo sampai dengan Tahun 2019 berada pada posisi 7.82% dan 2018 sebesar 7.94%. Meski capaiannya lebih baik dari target daerah, kondisi ini masih menempatkan Kota Palopo pada posisi yang belum lebih baik dibandingkan dengan Kota Makassar yang pada tahun 2018, persentase penduduk miskinnya hanya berada pada angka 4.41%. Jumlah Penduduk Miskin Kota Palopo 2018 pada angka 14,270 Jiwa, jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penduduk Miskin Kota Pare-Pare yang berada pada angka 8,010 Jiwa. Rentan 2016 s.d 2019, proporsi penduduk miskin Kota Palopo hanya berkurang sebanyak 650 jiwa, dimana penduduk miskin pada tahun 2016 pada angka 15.020 jiwa menjadi 14.370 jiwa tahun 2018.
5. Penurunan proporsi penduduk miskin di Kota Palopo kurun waktu 2016-2019 berjalan lamban bahkan fluktuatif. Data menunjukan tahun 2016 ke 2017, jumlah penduduk miskin malah meningkat dari 15.020 Jiwa menjadi 15,440 jiwa di tahun 2017. Dan 2017-2018, menurun 1,170 jiwa (dari 15440 jiwa menjadi 14,270 Jiwa). Namun 2018-2019, jumlah meningkat lagi dari 14,270 jiwa (2018) menjadi 14,370 Jiwa (2019).

-
6. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang berada diatas rata-rata nasional maupun provinsi Sulsel, tapi belum signifikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Palopo.
 7. Sampai dengan tahun 2018, masih ada beberapa kelurahan yang terendam oleh Banjir, yang mencakup daerah budidaya pertanian dan kawasan pemukiman dan perumahan masyarakat. Bahkan di sejumlah ruas jalan protokol, jika diguyur hujan deras mengalami banjir/genangan skala banjir.
 8. Pemenuhan layanan dasar air bersih dan limbah, di beberapa pemukiman masyarakat belum optimal. Termasuk di dalamnya penuntasan kawasan kumuh.
 9. Masih adanya ancaman bencana berupa longsor pada kawasan pemukiman masyarakat, ancaman banjir serta abrasi serta semakin tingginya kerentanan ancaman kebakaran akibat semakin padatnya rumah penduduk. Keteraturan bangunan serta penegakan aturan sebelum memulai pembangunan menjadi hal yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian.
 10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta layanan public yang berstandar dan berbasis inovasi masih sangat perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palopo termasuk pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik.

Review Capaian Kinerja RPJMD

Pengukuran capaian kinerja RPJMD didasarkan pada pengukuran atas misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah melalui pengukuran serangkaian indikator kinerja utama daerah 2018-2023. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palopo berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari persentase capaian hasil kinerja sasaran, yaitu dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar **99,01%** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur serta teruji kelayakannya.

Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Palopo tentang Indikator Kinerja Utama, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja utama :
Capaian kinerja seluruh indikator kinerja adalah sangat tinggi atau melampaui target yang ditetapkan
- Misi II terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator kinerja :
Capaian kinerja seluruh indikator kinerja adalah sangat tinggi
- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja :

Capaian kinerjanya, sebanyak 2 indikator kinerja kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator sasaran kategori tinggi dan 1 indikator kategori sedang

- Misi IV terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja :
Capaian kinerja semua indikator kinerjanya adalah kategori sangat tinggi
- Misi V terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja :
Capaian kinerjanya, sebanyak 1 indikator kategori Sangat Tinggi (melampaui target), 1 indikator kategori sedang dan 1 indikator kategori sangat rendah.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 11 (sebelas) sasaran yang mencakup 19 (sembilan belas) indikator sasaran, diketahui bahwa :

- ❖ 15 indikator sasaran atau 78,94% Pencapaian Kinerjanya Sangat Tinggi,
- ❖ 1 indikator sasaran atau 5,2% Pencapaian Kinerjanya Tinggi,
- ❖ 2 indikator sasaran atau 10,52% Pencapaian Kinerjanya Sedang,
- ❖ 0 indikator sasaran atau 0,00% Pencapaian Kinerjanya Rendah.
- ❖ 1 indikator sasaran atau 5,2% pencapaiannya sangat rendah.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja utama terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 11 sasaran yang mencakup 19 indikator kinerja, diketahui bahwa 15 indikator kinerja atau 78,94% mencapai kategori **Sangat Tinggi**, 1 indikator sasaran atau 5,2% kategori **Tinggi**, 2 indikator sasaran atau 10,52% memperoleh kategori **Sedang**, 0 indikator sasaran atau 0,00% **Rendah** , dan 1 indikator sasaran atau 5,2% kinerjanya **Sangat Rendah**. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **99,01%** atau bermakna Sangat Tinggi. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2019“ **SANGAT TINGGI**”.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan dianalisa dari hasil capaian pembangunan, dan dinamika social yang berkembang di masyarakat yang memerlukan perhatian untuk segera ditangani. Berikut adalah Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021 Terhadap Hasil Evaluasi Pembangunan Kota Palopo s.d tahun 2019

Tabel 2.324
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Hasil Evaluasi
Pembangunan Kota Palopo

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
1. Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Angka Tingkat Pertumbuhan IPM Kota Palopo 2019 (0.88) adalah yang terkecil di Luwu Raya. Berada di bawah pertumbuhan IPM Kabupaten Luwu (1.14), Luwu Utara (0.97) dan Luwu Timur (0.89), bahkan juga berada dibawah rata-rata pertumbuhan IPM Sulsel (1.07). Olehnya aspek kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan kesehatan masih sangat perlu diakslerasi sebagai dua faktor yang berkontribusi pada pembentukan IPM.

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
2. Taraf Hidup dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Tahun 2019, pertumbuhan PDRB Kota Palopo lebih rendah dibandingkan tahun 2018, belum memenuhi target 2019 (7.14). Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019, masih berada diatas nasional (5.02), Kota Pare-Pare (6.65), Kabupaten Luwu (6.26), namun belum lebih baik daripada Luwu Utara (7.11), Makassar (8.79), Sulsel (6.92).
	2. PDRB per Kapita (ADHB) Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun. Ini lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.32 Juta/Tahun. Bahkan juga melampaui target daerah 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023, yang berada pada angka 37.8 Juta/Tahun. Angka PDRB per Kapita (ADHB) Kota Palopo 2019 lebih tinggi/meningkat sebanyak 2.7 Juta/Tahun, dibandingkan tahun 2018.
	PDRB per Kapita Kota Palopo 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun).
	Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun)
	3. Nilai indeks gini atau gini rasio Kota Palopo tahun 2019 pada angka 0.338 dan ini belum memenuhi target daerah 2018 yang berada pada angka 0.330. Namun capaian gini rasio Kota Palopo tahun 2019 adalah yang terbaik sejak tahun 2014, yang semuanya masih menyentuh angka 0.4 point.

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
	4. Proporsi Penduduk Miskin Kota Palopo sampai dengan Tahun 2019 berada pada posisi 7.82% dan 2018 sebesar 7.94%. Meski capaiannya lebih baik dari target daerah, kondisi ini masih menempatkan Kota Palopo pada posisi yang belum lebih baik dibandingkan dengan Kota Makassar yang pada tahun 2018, persentase penduduk miskinnya hanya berada pada angka 4.41%. Jumlah Penduduk Miskin Kota Palopo 2018 pada angka 14,270 Jiwa, jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penduduk Miskin Kota Pare-Pare yang berada pada angka 8,010 Jiwa. Rentan 2016 s.d 2019, proporsi penduduk miskin Kota Palopo hanya berkurang sebanyak 650 jiwa, dimana penduduk miskin pada tahun 2016 pada angka 15.020 jiwa menjadi 14.370 jiwa tahun 2018.
	5. Penurunan proporsi penduduk miskin di Kota Palopo kurun waktu 2016-2019 berjalan lamban bahkan fluktuatif. Data menunjukan tahun 2016 ke 2017, jumlah penduduk miskin malah meningkat dari 15.020 Jiwa menjadi 15,440 jiwa di tahun 2017. Dan 2017-2018, menurun 1,170 jiwa (dari 15440 jiwa menjadi 14,270 Jiwa). Namun 2018-2019, jumlah meningkat lagi dari 14,270 jiwa (2018) menjadi 14,370 Jiwa (2019).
3. Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Infrastruktur Daerah	8. Pemenuhan layanan dasar air bersih dan limbah, di beberapa pemukiman masyarakat belum optimal. Termasuk di dalamnya penuntasan kawasan kumuh.
4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	7. Sampai dengan tahun 2018, masih ada beberapa kelurahan yang terendam oleh Banjir, yang mencakup daerah budidaya pertanian dan kawasan pemukiman dan perumahan masyarakat. Bahkan di sejumlah ruas jalan protokol, jika diguyur hujan deras mengalami banjir/genangan skala banjir.
	9. Masih adanya ancaman bencana berupa longsor pada kawasan pemukiman masyarakat, ancaman banjir serta abrasi serta semakin tingginya kerentanan ancaman kebakaran akibat semakin padatnya rumah penduduk. Keteraturan bangunan serta penegakan aturan sebelum memulai pembangunan menjadi hal yang perlu mendapatkan penekanan dan perhatian.

Permasalahan Pembangunan	Hasil Evaluasi Pembangunan
5. Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif	10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta layanan public yang berstandar dan berbasis inovasi masih sangat perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palopo termasuk pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektronik.
6. Penanganan Pengangguran dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6. Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo yang berada diatas rata-rata nasional maupun provinsi Sulsel, tapi belum signifikan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin Kota Palopo.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berikut adalah rumusan permasalahan pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2021 yang berhubungan dengan Sasaran Pembangunan Daerah :



Tabel 2.325
Keterkaitan Sasaran, Permasalahan Pembangunan dan
Prioritas RKPD 2021

Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2021
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	1. Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan terutama pada penanganan penyakit menular (system dan penyediaan sarana prasarana serta PHBS masyarakat)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	2. Taraf Hidup dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terutama pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan perlindungan social pasca pandemic covid 19
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	3. Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Infrastruktur Daerah
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	

Sasaran Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2021
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	5. Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	6. Penanganan Pengangguran dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Daerah
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	

Tabel 2.326
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021

Priroitas Palopo	Permasalahan Pembangunan
Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat (P1)	1. Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
	2. Taraf Hidup dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan (P2)	3. Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Infrastruktur Daerah
Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar (P3)	
Peningkatan Ekonomi dan Produktifitas Daerah (P6)	6. Penanganan Pengangguran dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Daerah
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana (P4)	4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik (P5)	5. Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif

Selanjutnya diuraikan keterkaitan permasalahan pembangunan terhadap kondisi capaian pembangunan Kota Palopo :

Tabel 2.327
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Terhadap Capaian Pembangunan Kota Palopo

Kondisi Capaian Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2020
Angka Tingkat Pertumbuhan IPM Kota Palopo 2019 (0.88) masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan IPM Sulsel (1.07)	1. Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Indeks Kesehatan Kota Palopo 2019 (78.14) masih jauh dibawah Indeks Kesehatan Kota Makassar (80.00) dan Kota Pare-Pare (78.74) bahkan dibawah Kabupaten Toraja Utara (82.08)(82. AHH 2019 Kota Palopo (70.79 Thn) masih dibawah AHH Kota Makassar (72 Thn), Pare-Pare (71.18 Thn)	
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Kota Palopo 2019 (12,986) masih berada dibawah Kota Pare-Pare (13,648), dan Kota Makassar (16,989). Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo 2019 (7.82%) masih lebih banyak dibandingkan Kota Pare-Pare 2019 (5.26%), Kota Makassar (4.28%), bahkan kabupaten luwu timur (6.98%)	2. Taraf Hidup dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat terutama pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat dan perlindungan social pasca pandemic covid 19
Persentase Jalan Mantap 2019 masih pada angka 67.99%, dengan panjang jalan berkondisi baik 342.09 Km dari total panjang jalan 503.16 Km. Persentase masyarakat yang mengakses air minum layak sebesar 98.37%, belum sesuai target SPM. Persentase sanitasi layak sebesar 91.96%, Persentase Luas RTH publik Terhadap Luas Wilayah pada angka 76.95%, Persentase areal pemukiman tidak kumuh 99.85 dengan Indeks daya saing infrastruktur tahun 2019 sebesar 87.02	3. Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Infrastruktur Daerah
Indeks kerapatan jalan di Kota Palopo 2019 (1.95 Km/Km2), masih berada dibawah indeks kerapatan jalan di Kota Pare-Pare 2019 (2.73 Km/Km2) dan Kota Makassar 4.41 Km/Km2. Artinya konektifitas dan aksesibilitas transportasi maupun logistic di kedua wilayah tersebut diatas masih lebih baik dibandingkan dengan Kota Palopo.	
Luas wilayah terdampak banjir di Kota Palopo pada tahun 2019 sebesar 12.38 Ha. Kondisi ini belum memenuhi target RPJMD 2023 yang menempatkan angka 2 Ha sebagai target maksimal luas wilayah yang terdampak banjir. Masih ada lima kelurahan yang terdampak banjir	4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Palopo 2019 (CC) masih jauh tertinggal	
	5. Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

Kondisi Capaian Pembangunan	Permasalahan Pembangunan 2020
dibandingkan Kota Makassar bahkan dengan kabupaten Luwu Utara. Capaian SPM pada 6 Urusan, tak seluruhnya memenuhi target yang direncanakan. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Palopo tahun 2019 adalah 52,70 atau kategori CC. Capaian ini belum memenuhi target daerah tahun 2019 yaitu 64 dan masih di bawah target akhir RPJMD yaitu 72.	Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif
Inovasi dan komitmen melaksanakan layanan publik pada tingkat perangkat daerah belum optimal. Baru satu perangkat daerah yang layanan publik mendapat apresiasi dari Komisi Ombudsman RI yakni layanan pada DPMPTSP	
Angka Pengangguran Terbuka tahun 2019 (10.32%) belum memenuhi target Kota Palopo 2019 (9.81 %). Belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu (4.66%), Kabupaten Luwu Utara (3.04%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.08%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2019 (5.3%) Rata-Rata Sulsel (4.97%), Kota Pare-Pare (6.42%).	6. Penanganan Pengangguran dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Ekonomi Daerah
PDRB per Kapita Kota Palopo 2019 (43,02 Juta/Kapita/Tahn) belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun). Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun). Kontribusi Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,57 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.	
Kontribusi sektor Pariwisata dan Ekraf Terhadap PAD Kota Palopo masih sangat kecil. Sektor pariwisata 2019 hanya menyumbang Rp. 82.100.000 atau sebesar 0.05% dari Total PAD Kota Palopo tahun 2019. Sementara nilai atau angka retribusi dari sector ekonomi kreatif Kota Palopo sebesar Rp. 6.201.259.135,- atau sebesar 3,76% dari total PAD Kota Palopo.	

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.3.2.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Pendidikan

1. Pemerataan atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Belum Maksimal, antara dalam kota dan beberapa wilayah yang berada kecamatan terluar.
2. Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah.
3. Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum berkembang dengan baik dan berstandarisasi.
4. Masih adanya beberapa sarana sekolah yang aktifitas belajar mengajarnya terganggu akibat ancaman banjir, longsor dan keamanan lingkungan sekolah.
5. Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan
6. Penguatan dan pemberian peran yang lebih besar kepada Dewan Pendidikan belum konsisten.



(2) Urusan Kesehatan

1. Pemantapan system kesehatan daerah terutama system, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan dalam penanganan penyakit menular seperti covid 19
2. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakupi seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
3. Tuntutan pada layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan tanpa antrian dengan kejelasan waktu pelayanan, semakin mengemuka.
4. Partisipasi masyarakat miskin terhadap Jaminan Kesehatan Nasional masih belum memadai, akibat keterbatasan ekonomi.



5. Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan pelayanan masih terbatas.
6. Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum memadai.
7. Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukkan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
8. Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
9. Koordinasi dengan perangkat daerah lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.
10. Upaya mengembangkan obat asli dengan memanfaatkan potensi lokal belum memadai.
11. Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal.
12. Standar dan pelayanan RSUD Sawerigading menjadi RS Rujukan di Luwu Raya masih perlu diakselerasi.
13. Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum memadai.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
3. Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum merata.
5. Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
6. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.



-
8. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim.
 9. Eksistensi lahan budidaya secara khusus lahan pertanian di Kota Palopo terus tertekan oleh pengembangan sektor lain seperti perumahan dari waktu ke waktu.
 10. Jaringan irigasi kabupaten sebagian mengalami kerusakan sehingga kurang efektif dalam layanan air.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman



1. Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan perumahan, termasuk masih adanya rumah layak huni.
2. Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai dalam penataan pemukiman termasuk penataan lingkungan pemukiman kumuh.
3. Pengelolaan areal pemakaman belum optimal
4. Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat dan aman.

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
2. Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatangannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
4. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk lingkungan perumahan belum memadai.
5. Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
6. Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, [SEP] penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta [SEP] penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
7. Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.



pada

(6) Urusan Sosial



1. Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
2. Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi

- PMKS masih terbatas.
3. Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.
 4. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, ^[11]_[SEP] tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.
 5. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.

2.3.2.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

(1) Urusan Tenaga Kerja



1. Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia secara termutakhirkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan belum memadai.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikologis menunjukan trend yang terus meningkat.



3. Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
5. Kapasitas dalam layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum memadai.
6. Akses dan kemampuan perempuan dalam partisipasi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta pendidikan kesetaraan melek huruf masih tertinggal.

(3) Urusan Pangan

1. Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
2. Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
3. Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.
4. Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal



(4) Urusan Pertanian

1. Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
2. Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi secara bersinergi dengan perangkat daerah lain belum optimal termasuk dalam menyelesaikan izin lokasi.



(5) Urusan Lingkungan Hidup

1. Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
2. Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
3. Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan dilengkapi data mutakhir.
4. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
5. Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
6. Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recycle (3R) masih terbatas.



7. Dampak pemanasan global semakin meningkat dalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.

(6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan Penerbitan KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
2. Komitmen pelaporan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran oleh masyarakat belum maksimal.
3. Kordinasi antar stakeholder dalam penerbitan akte nikah belum optimal.
4. Pelaporan dan pencatatan penduduk datang, pergi dan meninggal belum optimal.



(7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran desa yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
3. Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
4. Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.
5. Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memelihara keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal
6. Kapasitas SDM pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum mencukupi.



(8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1. Ketersediaan dan Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
2. Pelayanan kontrasepsi belum

menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.

3. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
4. Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendamping yang memadai.
5. Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.

(9) Urusan Perhubungan

1. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal dalam merespons pertumbuhan kebutuhan angkutan umum, pelayanan terminal dan penataan izin trayek.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
3. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
4. Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai
5. Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
6. Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
7. Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan.



(10) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
2. Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
3. Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
4. SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi.

(11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



-
1. Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif dan memadai.
 2. Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai
 3. Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.
 4. Kompetensi dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bagi keaktifan koperasi rendah.
 5. Kapasitas SDM, teknologi dan permodalan dalam pengelolaan UKM, lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR terbatas.
 6. Daya saing produk usaha mikro dan kecil masih rendah.

(12) Urusan Penanaman Modal

1. Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
2. Ketersediaan data potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor nasional dan asing belum lengkap.
3. Upaya promosi dan kerjasama investasipada level domestik dan luar negeri masih minim.
4. Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
5. Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga



1. Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
2. Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
3. Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
4. Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai

(14) Urusan Statistik

1. Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
2. Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam "Kabupaten dalam Angka", dan "PDRB" sehingga kurang mutakhir dijadikan

-
- dasar dalam perencanaan tahunan.
3. Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoordinasi dan masih sektoral, dimana data statistik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
 4. Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statistik daerah belum signifikan.

(15) Urusan Persandian

1. Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massal dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah.

(16) Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya belum berlangsung secara berkala
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum dikelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
3. Ketersediaan data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprehensif.

(17) Urusan Perpustakaan



1. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai dan belum merata.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
3. Kualitas SDM (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai) dalam pengelolaan perpustakaan daerah masih rendah.
4. Cakupan materi dan jumlah unit pada koleksi buku perpustakaan daerah masih terbatas.

(18) Urusan Kearsipan

1. Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum menyeluruh.
2. Jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan belum cukup untuk mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan

-
- pemeliharaan sarana prasana kearsipan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.

2.3.2.3. Urusan Pilihan

(1) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kapasitas peralatan dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
3. Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
4. Kesejahteraan nelayan lapisan bawah masih rendah dan memiliki kesenjangan yang tinggi dengan nelayan lapis atas.



(2) Urusan Pariwisata

1. Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
2. Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
4. Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
5. Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan belum tersedianya lokasi yang memadai.
6. Pendayagunaan keindahan alam dan lingkungan hidup sebagai salah satu potensi wisata belum optimal.

(3) Urusan Pertanian



1. Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
2. Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
3. Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
4. Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
6. Kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usahatani masih rendah.

(4) Urusan Perdagangan

1. Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
2. Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
3. Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
4. Perlindungan atas konsumen belum optimal
5. Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
6. Data tentang pedagang/usaha informal belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam pembinaan.

(5) Urusan Perindustrian



1. Data potensi dan karakteristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
2. Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.

2.3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(1) Sekretariat Daerah

1. Perumusan kebijakan dan kordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
2. Penyelenggaraan kegiatan antara secretariat daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

(2) Sekretariat Dewan

1. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat Kelengkapan DPRD belum akurat.
2. Program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran belum sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMD dan RKPd.

2.3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

(1) Perencanaan

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.
4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPd belum substantif berbasis fakta.
5. Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPd dan RKPd kedalam APBD belum akurat.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.

(2) Keuangan

1. SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
2. Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.
3. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi

anggaran masih ada.

4. Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.

(3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
2. Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.



(4) Penelitian dan Pengembangan

1. SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
2. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.
3. Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.

(5) Pengawasan

1. Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih ada.
2. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.

2.3.2.6. Unsur Kewilayahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan belum sepenuhnya efektif.
2. Fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda belum sepenuhnya efektif.
3. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan belum sepenuhnya efektif.
4. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum belum sepenuhnya efektif di kelurahan.

2.3.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar,

dan mendesak, dalam menentukan tujuan jangka menengah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perumusan isu strategis Kota Palopo bersumber dari permasalahan pembangunan yang dihadapi dan hasil dan evaluasi capaian pembangunan tahun 2019, dengan mempertimbangkan arah kebijakan RPJMD Kota Palopo pada tahun 2021 dan RKP 2021 sehingga memiliki keselarasan dan bersinergi.

Dengan melakukan sintesa pada permasalahan pembangunan, capaian dan hasil evaluasi pembangunan, arah kebijakan rpjmd dan rkp 2021, maka isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Palopo yang perlu mendapat perhatian ke depan serta faktor penentu keberhasilan pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :



1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya Peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2021 diarahkan pada pemulihan kondisi social ekonomi masyarakat sebagai dampak pandemic covid 19, dan ekonomi serta produktifitas daerah lainnya, pengembangan sumber daya manusia, melalui pemantapan layanan pendidikan penguatan sector kesehatan dan system layanannya, peningkatan kesejahteraan social masyarakat yang diarahkan pada penanganan penanganan tingkat pengangguran, penduduk miskin, dan pembangunan/pemberdayaan gender. Sehingga diharapkan dapat menekan angka pengangguran, namun disisi lainnya mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan pemerataan dalam hal kesejahteraan.



2. Pemantapan Infrastruktur Daerah dan Penataan Ruang

Pemantapan infrastruktur daerah juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh sangat kuat terhadap upaya mewujudkan visi Kota Palopo. Namun semuanya dilakukan dalam kerangka arahan penataan ruang yang tepat. Beberapa pilar yang akan ditangani dalam isu ini adalah penuntasan kawasan kumuh, pengurangan angka backlog perumahan, dan penanganan banjir dan genangan skala banjir. Beberapa hal lain yang juga akan ditangani dalam isu ini adalah penyediaan penyediaan ruang-ruang public yang berkualitas, ketahanan bencana dan pembangunan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, menjadi pilar-pilar selanjutnya dalam isu strategis yang kedua ini. Pemantapan infrastruktur ini arahkan pada pemerataan pengembangan infrastruktur daerah.



3. Pemantapan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Wilayah



Peningkatan daya saing daerah pada tahun 2021, ditempuh dengan memantapkan aksesibilitas dan konektifitas wilayah yang memberi jaminan bagi

mobilisasi perekonomian masyarakat, terutama transportasi dan logistic daerah, sehingga mampu mengurangi kesenjangan antara wilayah serta mampu mendukung peningkatan produksi dan produktifitas daerah dan masyarakat. Pemantapan daya saing diakselerasi dengan tetap memperhatikan potensi local spesifik kewilayahan.

4. Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan



Faktor penentu dalam isu strategis ini adalah upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, pemberian dan penyelenggaraan pelayanan public yang berstandar, lebih mudah, cepat murah dan ber SOP bagi masyarakat, berbasis

inovasi dan dengan mengakselerasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektornik. Mencakup di dalamnya pengelolaan keuangan daerah yang menjamin akselerasi pendapatan daerah. Prioritas ini diharapkan dapat terus mengembangkan kapasitas baik dalam kualitas maupun jangkauan layanan pemerintahan yang lebih merata.

Berikut adalah keterkaitan isu strategis Kota Palopo, Sulsel, Nasional dan Internasional Tahun 2021.

Tabel 2.328
Isu Strategis 2021

Isu Strategis 2021			
Sulsel	Palopo	Nasional	Internasional
Sustainable Development Goals (SDGs)	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemulihan dan Reformasi Ekonomi dan Sosial Pasca Pandemi Covid 19	Pelambatan Perekonomian Global Akibat Perang Dagang
Dampak Pandemi Covid 19			Mitigasi dan Penanganan Pandemi Covid 19
Dukungan Pemerintah Pusat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan	2. Pemantapan Infrastruktur Daerah dan Penataan Ruang		Potensi dan Ancaman Resesi Ekonomi Global
	3. Pemantapan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Wilayah	Penguatan Daya Tahan dan Daya Saing Ekonomi,	Analisis Resiko dan Mitigasi Isu VUCA Volatile (bergejolak), Uncertain (tidak pasti),

Isu Strategis 2021			
Sulsel	Palopo	Nasional	Internasional
		dan Pemerataan Wilayah	Complex (kompleks), dan Ambigue (tidak jelas).
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	4. Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Reformasi Sistem Ketahanan Bencana	

BAB. III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Eksisting Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai PDRB

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeleminasi faktor kenaikan harga. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional menggunakan harga konstan tahun 2010 sebagai tahun dasar.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2015 – 2019

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	4.1402.36	6.45
2016	4.4284.97	6.98
2017	4.745,90	7,17
2018 (*)	5.102,99	7,52
2019 (**)	5.447,36	6,75

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Palopo pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,44 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,10 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar

6,75 persen, namun pertumbuhan ekonomi tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yaitu 7,52 persen.

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019 (6.75), sedikit melambat dibandingkan tahun 2018 (7.52) dan belum memenuhi target 2019 (7.14). Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo 2019, masih berada diatas nasional (5.02), Kota Pare-Pare (6.65), Kabupaten Luwu (6.26), namun belum lebih baik daripada Luwu Utara (7.11), Makassar (8.79), Sulsel (6.92). Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah memberikan kontribusi sebesar 1,57 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 3.2
Kontribusi PDRB Kota Palopo Terhadap PDRB Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015– 2019 (Persen)

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan (Miliar Rp)	PDRB Kota Palopo (Miliar Rp)	% Kota Palopo thd Sulawesi Selatan
2015	340.390,12	5.351,28	1,57
2016	377.108,91	5.886,52	1,56
2017	415.588,20	6.514,94	1,57
2018 (*)	461.719,49	7.285,14	1,58
2019 (**)	504.746,87	7.942,48	1,57

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (adhb) sebesar 7,94 triliun rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,014,56	1,050,70	1.155,96	1.232,24	1.301,47
2	Pertambangan & Penggalian	10,05	10,94	11,56	12,16	12,39
3	Industri Pengolahan	158,17	171,81	184,74	197,01	216,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,02	4,50	5,35	5,81	6,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,67	10,22	11,25	12,50	13,55
6	Konstruksi	826,60	933,70	1.050,45	1.194,98	1.330,13
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1172,71	1331,98	1.510,15	1.723,39	1.938,86
8	Transportasi dan Pergudangan	334,01	365,47	389,04	432,45	475,89

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63,28	71,80	78,80	85,98	93,72
10	Informasi dan Komunikasi	198,87	227,53	261,93	301,91	335,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	434,40	509,96	535,11	566,53	579,66
12	Real Estat	273,08	297,14	329,89	358,34	384,06
13	Jasa Perusahaan	4,94	5,34	5,92	6,72	7,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,10	443,01	479,89	580,05	616,97
15	Jasa Pendidikan	230,54	245,50	270,34	309,44	342,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,64	135,14	153,71	171,40	184,63
17	Jasa Lainnya	65,63	71,78	80,86	94,22	103,82
	PDRB ADHB	5351,28	5886,52	6.514,94	7.285,14	7.942,48

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Nilai PDRB

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (adhk) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	755,64	759,03	803,17	830,61	871,74
2	Pertambangan & Penggalian	5,94	6,27	6,54	6,71	6,82
3	Industri Pengolahan	115,28	121,15	125,48	129,18	139,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	5,00	5,37	5,67	5,89
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,34	12,80	13,65	14,75	15,42
6	Konstruksi	609,16	654,71	696,64	734,33	779,14
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	968,89	1073,95	1.183,42	1.291,73	1.421,61
8	Transportasi dan Pergudangan	225,17	242,11	259,99	286,15	312,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,88	51,93	55,75	59,80	64,55
10	Informasi dan Komunikasi	217,52	239,82	267,54	303,02	335,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	326,92	375,79	376,91	383,21	382,09
12	Real Estat	193,93	207,07	222,55	233,02	246,38
13	Jasa Perusahaan	3,73	3,91	4,22	4,61	5,07

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	301,30	299,24	315,27	368,09	380,14
15	Jasa Pendidikan	197,01	207,14	224,20	247,46	262,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,72	113,66	124,96	137,06	145,79
17	Jasa Lainnya	51,87	54,92	60,24	67,61	73,88
	PDRB ADHK	4140,87	4428,50	4.745,90	5.102,99	5.447,36

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Struktur Ekonomi

Pada tahun 2019 struktur perekonomian Palopo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2)Kontruksi; dan 3)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palopo. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palopo pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 24,41 persen (angka ini meningkat dari 23,66 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,75 persen, kemudian disusul oleh Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,39 persen.

Tabel 3.5
Distribusi Persentase PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2015– 2019

No	Lapangan usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019 (**)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.96	17.85	17,74	16,91	16,39
2	Pertambangan & Penggalian	0.19	0.19	0,18	0,17	0,16
3	Industri Pengolahan	2.96	2.92	2,84	2,70	2,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.18	0.17	0,17	0,17	0,17
6	Konstruksi	15.45	15.86	16,12	16,40	16,75
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.91	22.63	23,18	23,66	24,41
8	Transportasi dan Pergudangan	6.24	6.21	5,97	5,94	5,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.18	1.22	1,21	1,18	1,18
10	Informasi dan Komunikasi	3.72	3.87	4,02	4,14	4,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.12	8.66	8,21	7,78	7,30

No	Lapangan usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018 (*)	2019 (**)
12	Real Estat	5.1	5.05	5,06	4,92	4,84
13	Jasa Perusahaan	0.09	0.09	0,09	0,09	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.06	7.53	7,37	7,96	7,77
15	Jasa Pendidikan	4.31	4.17	4,15	4,25	4,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.24	2.3	2,36	2,35	2,32
17	Jasa Lainnya	1.23	1.22	1,24	1,29	1,31
	PDRB ADHB	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Kontributor Terbesar Ekonomi Palopo

Pada tahun 2019 struktur perekonomian Palopo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1)Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 2)Kontruksi; dan 3)Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palopo.

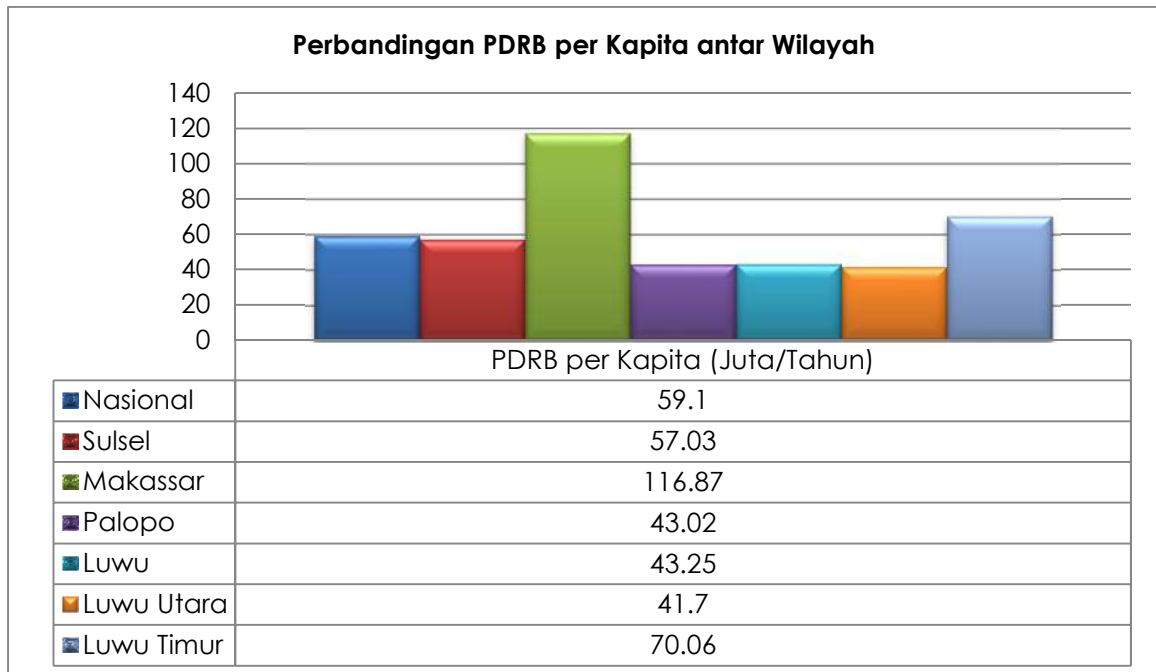
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palopo pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 24,41 persen (angka ini meningkat dari 23,66 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,75 persen, kemudian disusul oleh Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,39 persen.

3.1.1.2. PDRB per kapita

Angka PDRB per Kapita Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun. Ini lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.32 Juta/Tahun. Bahkan juga melampaui target daerah 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun. Bahkan juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023, yang berada pada angka 37.8 Juta/Tahun. Angka PDRB per Kapita Kota Palopo 2019 lebih tinggi/meningkat sebanyak 2.7 Juta/Tahun, dibandingkan tahun 2018.

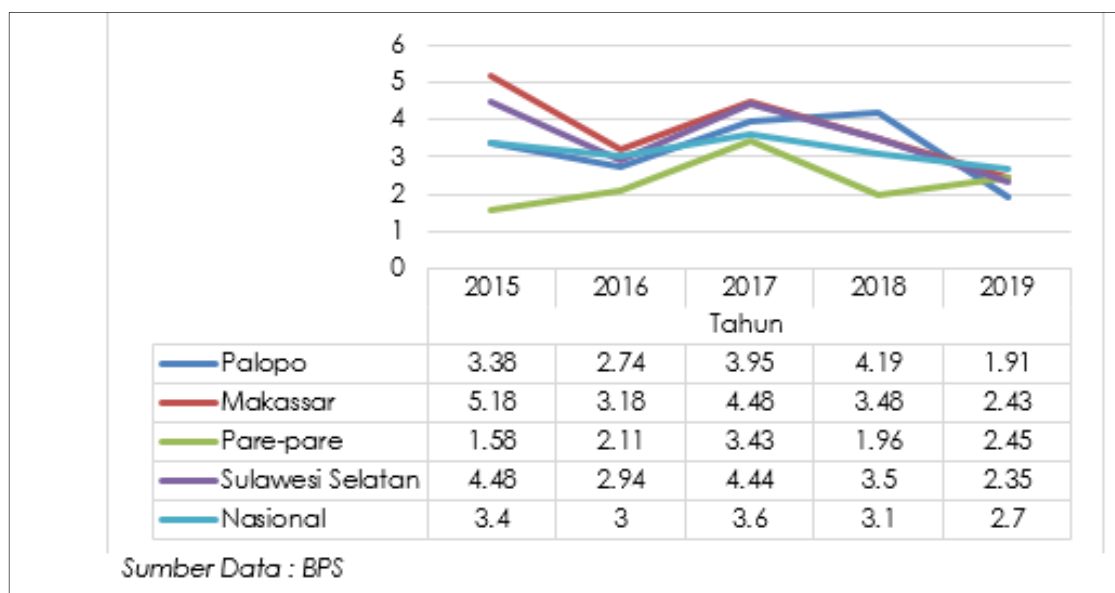
Jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, PDRB per Kapita Kota Palopo 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun). Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Sulsel 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun).

Grafik perbandingan PDRB per Kapita Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



3.1.1.3. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu.



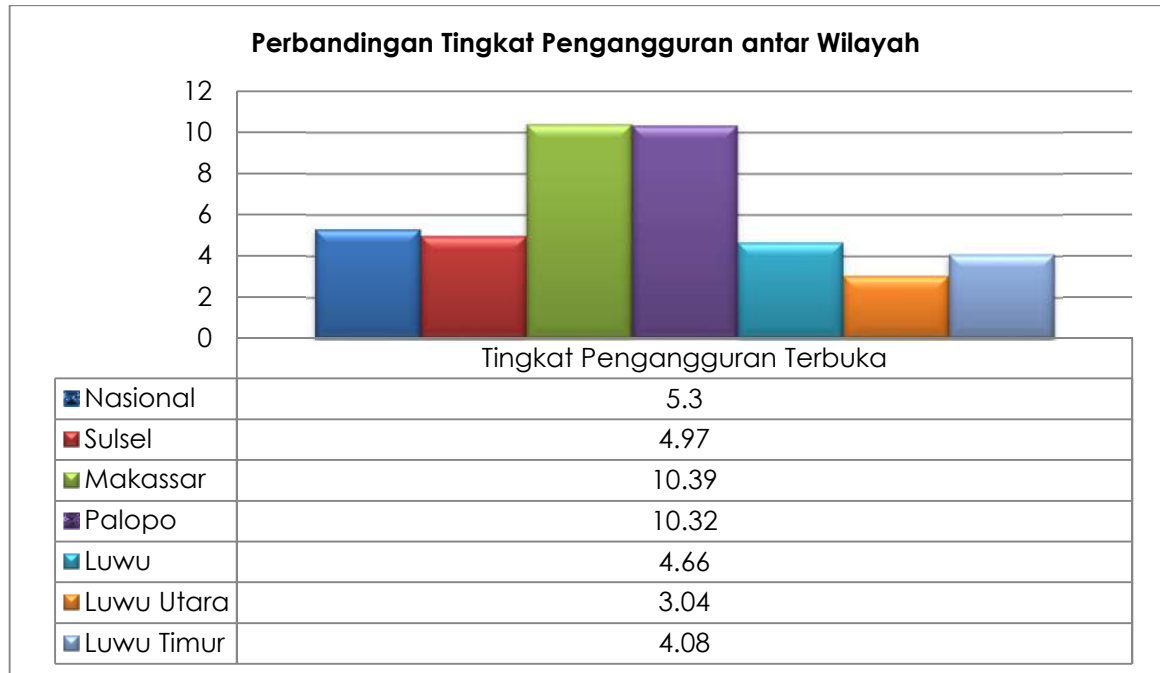
Inflasi di Kota Palopo selama tahun 2019 sebesar 1,91 persen menurun sebesar 2,28 persen dibanding inflasi tahun 2018 yang berada pada angka 4.19. Kota Palopo meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat Kabupaten/Kota untuk Wilayah Sulawesi tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2019 sebesar 0,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 136,56. Inflasi terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks lima kelompok pengeluaran yaitu inflasi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,29 persen (akibat dari menjelang lebaran Idul Fitri). Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,24 persen. Kelompok sandang sebesar 0,64 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,24 persen. Dan kelompok transportasi sebesar 0,83 persen.

3.1.1.4. Ketenagakerjaan

Angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 10.32% dan belum memenuhi target Kota Palopo 2019 (9.81 %). Bahkan jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.66%), Kabupaten Luwu Utara (3.04%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.08%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 2019 (5.3%) Rata-Rata Sulsel (4.97%), Kota Pare-Pare (6.42%).

Grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Sumber : BPS

Tabel 3.6 Perubahan TPT Kota Palopo 2015-2019

Indikator	Capaian Tahun (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat pengangguran terbuka (%)	12.07	14.43	10.96	11.60	10.32

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka 10,32 persen itu setara dengan 8.314 orang menganggur, dari jumlah angkatan kerja di Palopo sebesar 80.564 jiwa. Jumlah pengangguran terbanyak disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari 25.803 orang angkatan kerja, 2.538 orang menganggur, atau hanya 23.265 orang bekerja.

Pengangguran terbanyak kedua disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK). Dari 8.977 orang angkatan kerja, 7.064 orang sudah bekerja, dan 1.913 orang tidak bekerja, atau tercatat sebagai pengangguran terbuka.

Kemudian menyusul lulusan universitas. Dari 19.706 jiwa angkatan kerja, hanya 17.884 orang bekerja. Sebanyak 1.822 orang tercatat masih menganggur. Sementara penyumbang terbanyak keempat adalah orang yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum/tamat sekolah dasar (SD) sebesar 1.257 orang tidak memiliki pekerjaan. Sementara 13.045 orang tercatat sudah bekerja, dari total angkatan kerja 14.302 orang.

Kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 8.613 orang angkatan kerja, 7.915 orang tercatat sudah bekerja, dan sisanya 698 orang, masih menganggur. Sedangkan lulusan diploma I/II/III/Akademi, hanya 86 orang yang menganggur, dari total 3.163 orang angkatan kerja, atau 3.077 orang telah bekerja.

Sementara itu, dari jumlah 72.250 orang yang bekerja, sektor jasa tercatat menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak tahun 2019, yakni sebanyak 52.561 orang, yang terdiri dari 26.995 orang, dan perempuan 25.566 jiwa. Kemudian

menyusul sektor manufaktur, yang menyerap tenaga kerja 13.728 orang, yang terdiri dari 10.473 orang laki-laki, dan 3.255 orang perempuan.

Sedangkan sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 5.961 orang, yang terdiri dari laki-laki 4.647 dan perempuan 1.314 orang. Selanjutnya, untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama didominasi menjadi buruh, karyawan, atau pegawai, sebanyak 45.570 orang. Kemudian orang berusaha sendiri sebanyak 14.122 jiwa, dan pekerja bebas sebanyak 342 orang. Sedangkan orang yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 4.342 orang, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 3.882 orang, dan pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 3.992 orang.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Palopo pada tahun 2018 mencapai 11.6 % lebih tinggi dibandingkan setahun lalu yang berada pada angka 10.96%. Pada tahun 2016, pengangguran terbuka mencapai 14.43% dan di tahun 2015 pada angka 12.07%. Tingkat Pengangguran terbuka Kota Palopo tahun 2018, belum memenuhi target daerah 2018 (10.34%) dan masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Kota Pare-Pare (6.81%), Sulsel 5.39% dan nasional 5.13%. Namun masih lebih baik daripada Kota Makassar (12.19%),

3.1.1.5. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 7.82 %. Kondisi ini lebih baik dari kondisi tahun 2018 dimana persentase penduduk miskin masih mencapai angka 7.94%. Artinya pemerintah kota Palopo mampu menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0.12%.

Capaian ini juga **melebihi atau berada diatas** target persentase penduduk miskin 2019 Kota Palopo, yang berada pada angka 8.1%. Bila dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD, sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo baru mampu mewujudkan 77.75% target RPJMD, untuk indikator persentase penduduk miskin.

Jika dibandingkan sejak tahun 2013, persentase penduduk miskin Kota Palopo telah jauh menurun. Tahun 2013, persentase penduduk miskin sebesar 9.57% menjadi 7.82% di tahun 2019. Meski dalam prosesnya, angka penurunan ini fluktuatif. Tahun 2014 pada angka 8.8%, 2015 pada angka 8.58%, 2016 pada angka 8.74%, 2017 pada angka 8.78%, 2018 pada angka 7.94%.

Dibandingkan dengan 24 kabupaten/ kota Lain di Sulawesi Selatan, Persentase Penduduk Miskin 2019 Kota Palopo **masih lebih baik** daripada Kabupaten Luwu Utara (13.6%) dan Kabupaten Luwu (12.78%). Bahkan lebih baik dari rata-rata persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan 2019 (8.69%) dan nasional (9.4%).

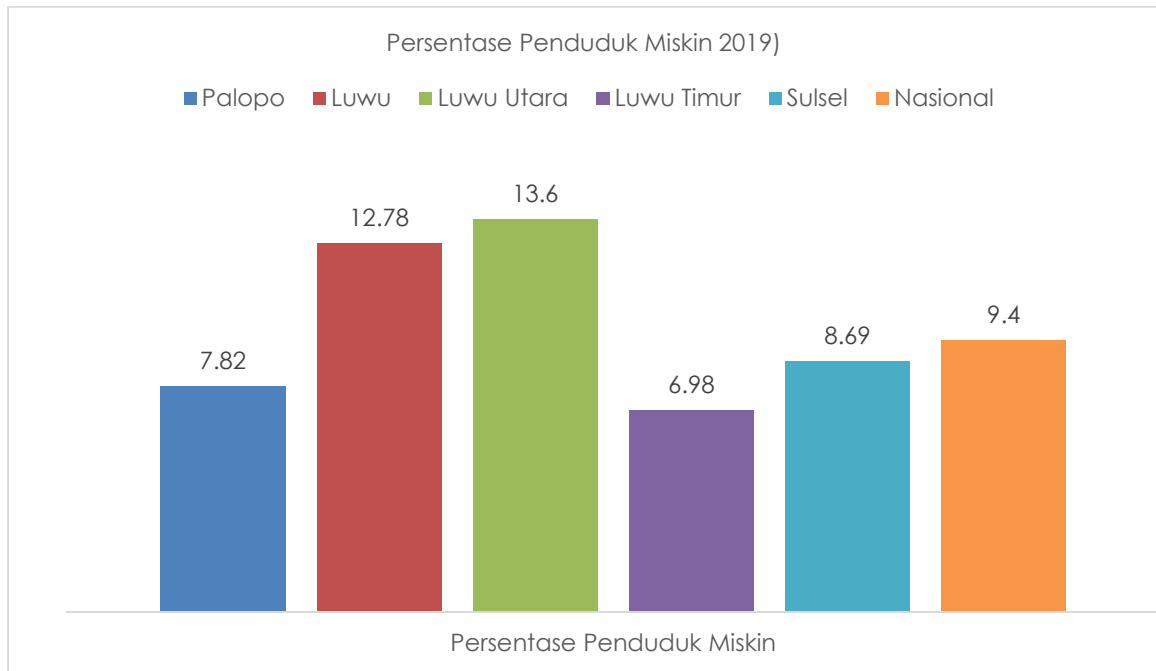
Meski demikian, capaian Pemerintah Kota Palopo ini masih dibawah capaian persentase penduduk miskin Kota Pare-Pare 2019 (5.26%), Kota Makassar (4.28%), bahkan kabupaten luwu timur yang 2019 hanya memiliki 6.98% penduduk miskin.

Namun dari sisi **jumlah**, Kota Palopo adalah wilayah di Luwu Raya dengan Jumlah Penduduk Miskin **paling sedikit**. Tahun Kota Palopo hanya memiliki

penduduk miskin sebanyak 14.370 jiwa. Sementara Kabupaten Luwu (46.180 Jiwa), Luwu Utara (42.480 Jiwa), Luwu Timur (20.830 Jiwa). Bahkan dengan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk miskin jauh diatas Kota Palopo, yakni sebanyak 65.120 Jiwa.

Di Sulawesi Selatan, hanya Kota Pare-Pare yang memiliki penduduk miskin paling kecil (7620 Jiwa) disusul Kota Palopo (14.370 Jiwa). Jumlah Keluarga Prasejahtera di Kota Palopo Tahun 2019 sebanyak 2.889 KK, jumlah ini lebih sedikit (lebih baik) daripada tahun 2018, dimana jumlah keluarga prasejahtera berada pada angka 2924 KK. Atau menurun sebanyak 35 KK.

Grafik perbandingan persentase penduduk miskin Kota Palopo 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Persentase penduduk miskin di Kota Palopo pada tahun 2018 pada angka 7.94% lebih rendah dibandingkan 2017 yang berada pada angka 8.78%, 2016 yang berada di 8.74%. Sepanjang lima tahun terakhir 2013-2018, persentase penduduk miskin Kota Palopo menunjukkan trend penurunan dari 9.57% tahun 2013 menjadi 7.94 % di tahun 2017. Kondisi proporsi penduduk miskin Kota Palopo tahun 2018, Lebih baik dan melampaui target persentase penduduk miskin Kota Palopo (8.50%), Sulsel (8.87%) dan nasional (9.66%). Namun belum lebih baik dari persentase penduduk Miskin Kota Makassar (4.41%), Kota Pare-Pare (5.58%).

Tabel 3.7 Kondisi Kemiskinan Kota Palopo 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kinerja Kota Palopo				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.58	8.74	8.78	7.94	7.82
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14510	15020	15,440	14,265	14,370

No	Indikator	Capaian Kinerja Kota Palopo				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	246,727	261,056	274,319	292,602	324,233
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.76	1.17	1.75	1.14	1.15
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.52	0.28	0.6	0.26	0.29

Sumber : Palopo Dalam Angka

3.1.1.6. Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kondisi gini rasio (GR) Kota Palopo 2019 0.338 (kategori sedang) masih lebih baik dari GR rata-rata Sulsel 2019 0.389 point, Kota Makassar (0.390) dan Kota Pare-Pare (0.350).

Nilai Indeks Gini di Kota Palopo menunjukkan tren yang relatif menurun dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Palopo berada pada nilai 0,341, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 0,338 dan di tahun 2019 Indeks Gini Kota Palopo stagnan berada di nilai 0,338. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo selama tahun 2017-2019 mengalami tren menurun, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat di Kota Palopo.

Tabel 3.8 Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah di Sulsel 2015-2019 dan Nasional

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Luwu	0.361	0.359	0.395	0.362	0.352
Tana Toraja	0.366	0.314	0.318	0.369	0.362
Luwu Utara	0.369	0.410	0.358	0.361	0.364
Luwu Timur	0.467	0.434	0.411	0.398	0.387
Toraja Utara	0.380	0.374	0.411	0.411	0.384
Makassar	0.395	0.397	0.396	0.383	0.390
Parepare	0.423	0.386	0.384	0.382	0.350
Palopo	0.434	0.374	0.341	0.338	0.338
Sulawesi Selatan	0.424	0.426	0.407	0.397	0.389
Nasional (Maret)	0.410	0.394	0.393	0.389	0.382

Sumber : Badan Pusat Statistik

3.1.2. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

3.1.2.1. Prospek Ekonomi Daerah

Prospek Ekonomi Kota Palopo Tahun 2020 dan 2021, diprediksi akan mengikuti salah satu dari tiga pola pertumbuhan, pasca pandemic covid 19, yang pada akhir tahun 2020, diprediksi akan berpengaruh negative terhadap perekonomian Kota Palopo. Masing-masing pola pertumbuhan itu sebagai kurva V, U dan L.



Meski demikian, Pemerintah Kota Palopo akan tetap optimis bahwa perkenomian tahun 2021 akan mulai membaik, meski itu juga sangat ditentukan dari efektifitas intervensi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2020. Olehnya upaya-upaya yang bersifat pemulihan atas perekonomian daerah dan recovery atas aspek kesejahteraan masyarakat tetap akan menjadi focus penanganan pemerintah Kota Palopo.

Prospek ekonomi Kota Palopo di Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Palopo optimis, target angka pertumbuhan ekonomi 2021, kembali berada pada angka 7.18%, meski sampai akhir tahun 2020, angkanya diproyeksikan menurun akibat dampak covid 19.
- Angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 diharapkan maksimal berada pada angka 9.03%, meski sampai akhir tahun 2020, angkanya diproyeksikan meningkat dibandingkan posisi tahun lalu 2019 yang berada pada angka 10.32% (8314 orang), setelah sempat pada posisi 14.32% pada tahun 2016,
- Angka kemiskinan diproyeksi maksimal 7.15% pada tahun 2021, lebih rendah daripada tahun 2019 (7.82%), yang merupakan angka terendah persentase penduduk miskin Kota Palopo sejak tahun 2013 silam.
- Beberapa indicator ekonomi seperti pendapatan per kapita, paritas daya beli masyarakat diproyeksi juga diharapkan bisa naik setelah pada tahun 2019, masing-masing berada pada angka 43.02 juta/perkapita/tahun dan 12,986 (ribu/tahun).
- Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada tahun 2021, diproyeksikan sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2019.
- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kota Palopo pada akhir tahun 2021, juga diproyeksikan lebih meningkat dibandingkan realisasi tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 16.83%, dan 19.78% pada tahun 2018.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya :

- Menjaga dan memastikan bahwa lapangan usaha di Kota Palopo kembali berjalan normal seperti sebelum pandemic covid 19, seperti perdagangan dan logistic serta investasi daerah, sehingga tetap mampu mendukung penyediaan lapangan kerja, dan usaha produktif masyarakat kembali berjalan seperti sebelumnya.
- Menjaga dan memastikan bahwa upaya-upaya recovery atau pemulihan ekonomi daerah dan status kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan, sebagai akibat pandemic covid 19

- c) Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah
- d) Memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan menjaga kestabilan dan distribusi barang, dan ketersediaannya serta menjaga inflasi daerah, .
- e) Memastikan dan menjaga agar intervensi pemerintah dalam hal Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan SDM masyarakat miskin atau rentan, tetap berjalan dengan efektif.

3.1.2.2. Tantangan Ekonomi Daerah

Beberapa kondisi faktual sebagai dampak pandemic covid 19 di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas perekonomian daerah yang melambat
2. Peningkatan jumlah pengangguran,
3. Angka kemiskinan meningkat,
4. Keterbatasan masyarakat pada Keterjangkauan harga pangan
5. Kesenjangan social ekonomi yang menguat
6. Penurunan kontribusi sejumlah lapangan usaha yang menjadi pilar utama penggerak ekonomi Kota Palopo terutama sector perdagangan
7. Meningkatnya inflasi di daerah
8. Pembangunan sejumlah paket infratsruktur daerah yang terhambat

Berangkat dari kondisi tersebut, beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekenomian Kota Palopo pasca pandemic covid 19 di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memulihkan kembali ekonomi di Kota Palopo dengan mengakselerasi aktifitas semua lapangan usaha yang tertekan akibat pandemic covid 19 di Kota Palopo dengan memastikan bahwa seluruh aktifitasnya akan dilaksanakan dengan menjalankan protocol kesehatan.
2. Memulihkan kondisi social ekonomi masyarakat, dengan memastikan efektifitas program program perlindungan social/social safety nett, dan memacu kembali program program pemberdayaan masyarakat .
3. Memacu dan mengakselerasi kembali investasi daerah yang mampu menyediakan lapangan kerja dan memperkuat lapangan berusaha masyarakat, sehingga angka pengangguran dan angka/tingkat partisipasi angkatan kerja tetap mampu dipertahankan/ditingkatkan.
4. Memastikan kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi termasuk inflasi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat masyarakat terhadap barang barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya upaya yang mampu menjaga ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.
5. Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah
6. Mengawal dan memastikan kebijakan fiscal pemerintah pusat dan daerah yang menjadi upaya recovery atau pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran.

7. Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Sehingga kesenjangan ekonomi dan social tidak semakin melebar.

3.1.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Perkenomian Daerah

3.1.3.1. Sasaran Ekonomi Makro

Sasaran Pembangunan Ekonomi Kota Palopo secara makro diuraikan sebagai berikut :

1. Memulihkan kembali pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu lebih inklusif, dengan memastikan upaya upaya untuk mengendalikan gini rasio di Kota Palopo tidak semakin meningkat
2. Menekan dan menjaga kestabilan tingkat inflasi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sehingga daya beli tetap terjaga, disamping menjaga ketersediaan dan keterjangkauan logistic daerah terutama pangan tetap berjalan normal.
3. Memantapkan upaya perlindungan, pemberdayaan, penguatan dan pendampingan masyarakat miskin dan kelompok minoritas lain melalui sinergi dan berbagai program penanganan yang lebih terfokus
4. Menekan jumlah dan persentase pengangguran terbuka dengan meningkatkan skil dan kompetensi tenaga kerja, kualitas dan daya saing investasi daerah dan peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja.

Berikut adalah target kinerja indicator makro ekonomi Kota Palopo Tahun 2021

Tabel 3.9 Indikator Makro Ekonomi Kota Palopo 2021

No	Indikator Makro Ekonomi	Target Kinerja 2021		
		Palopo	Sulsel	Nasional
1	Pertumbuhan PDRB (%)	7.18	6.1	4.5-5.5
2	Laju Inflasi Daerah (%)	3.2	3.0	2 – 4
3	PDRB per kapita ADHB (Juta/Tahun)	37.5	67.54	65.59
	PDRB per kapita ADHK (Juta/Tahun)	32.23	-	-
	Pengeluaran per Kapita (Juta/Tahun)	18.94	-	-
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Thn)	13,048	-	-
5	Indeks Gini Rasio (Poin)	0.335	0.441	0.377 – 0.385
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.15	9.1	8.7 -9.2
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14.532	-	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.03	7,,2	6.9 -7.3

3.1.3.2. Arah Kebijakan Perekenomian

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan arahan Presiden dalam rapat terbatas 9 Maret 2020, tentang pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi

makro untuk RKP 2021, maka Arah Kebijakan perkenomian Kota Palopo tahun 2021 diarahkan pada :

1. Memulihkan ekonomi daerah dan menjaga ketahanannya dari gejolak ekonomi nasional dan global, dengan tetap memastikan penerapan protocol kesehatan pada semua aktifitasnya.
2. Memastikan bahwa APBD 2021 mengcover pemulihan kesehatan, social ekonomi masyarakat (social safety net) pasca pandemic covid 19, untuk mendukung ketahanan social masyarakat di Kota Palopo. termasuk layanan kesehatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Termasuk mengarahkan proyek proyek infrastruktur daerah, lebih banyak padat karya
3. Memulihkan kembali investasi di Kota Palopo agar lebih banyak membuka lapangan kerja baru, memberikan stimulus, merangsang daya saing ekonomi daerah, penciptaan nilai tambah, dan mendorong pemerataan pembangunan, sesuai kewenangan pemerintah Kota Palopo.
4. Memastikan kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi termasuk inflasi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat masyarakat terhadap barang barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya upaya yang mampu menjaga kesinambungan produksi, ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.
5. Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah Kota Palopo tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah dan mengawal kebijakan fiscal pemerintah pusat pada pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran.
6. Memberikan Insentif sesuai kewenangan pemerintah Kota Palopo bagi tumbuhnya industry industry daerah dan meningkatkan kegiatan kegiatan padat karya, dengan pemulihan aktifitas usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang sejalan dengan upaya penguatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, memfasilitasi tenaga kerja dengan pelatihan vokasional, dan upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran di Kota Palopo.

3.1.4. Proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah

Proyeksi kerangka ekonomi daerah Kota Palopo 2020 dan 2021, dengan mempertimbangkan dampak pandemic covid 19, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Proyeksi Kerangka Ekonomi Daerah Kota Palopo 2020 dan 2021 Dampak Pandemic Covid

Indikator	Outlook 2020 (*)		2021
	Sebelum Cov 19	Cov 19 (*)	
Pertumbuhan Ekonomi	7.16	4.16	7.18
PDRB Per Kapita (ADHB)	37.3	37.3	37.5
PDRB Per Kapita (ADHK)	30.84	30.84	32.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.51	11.81	9.03
Inflasi	3.3	3.3	3.2

Indikator	Outlook 2020 (*)		2021
	Sebelum Cov 19	Cov 19 (*)	
Kemiskinan			
Tingkat Kemiskinan (%)	7.64	8.35	7.15
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,829	15,415	14,532
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	271,988	271,988	284,427
Keparahan Kemiskinan	0.45	0.45	0.38
Kedalaman Kemiskinan	1.585	1.585	1.503

(*) Proyeksi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan Kota Palopo Tahun 2021 disusun untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palopo. Selain itu pada penyusunan APBD tahun 2021 dilakukan penyesuaian Nomenklatur Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kode Rekening yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab sebelumnya, menjadi dasar dalam melakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan kedalam Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah. Analisis dan proyeksi Pendapatan dan Belanja mempertimbangkan realisasi pendapatan Tahun 2019 dan realisasi Triwulan pertama Tahun 2020 serta target pendapatan daerah Kota Palopo pada Tahun 2020. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi saat ini yang melambat diakibatkan penyebaran COVID-19 maka pemerintah kota palopo melakukan pendekatan pesimis dalam menentukan pendapatan pada tahun 2021. Oleh karena itu, dalam menentukan APBD tahun 2021, pendapatan ditargetkan sama dengan realisasi tahun 2019 karena diperkirakan pada tahun 2020 pertumbuhan perekonomian akan minus sehingga

cukup berdampak pada penerimaan tahun 2021. Sedangkan dalam menentukan belanja daerah memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Palopo serta fokus dalam penanganan Bencana yang setiap tahunnya membutuhkan banyak anggaran. Untuk lebih jelasnya, proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah akan dibahas dalam sub bab berikut ini.

3.2.1.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka terjadi perubahan nomenklatur pendapatan, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer yang meliputi: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perhitungan Pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Apabila melihat dari realisasi pendapatan Kota Palopo Tahun 2019 serta perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020, oleh sebab itu diperkirakan Penerimaan Kota Palopo untuk Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan realisasi pendapatan pada tahun 2019. Ancaman penyebaran Covid-19 serta bencana lainnya yang terus berdatangan menyulitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk terus bertumbuh maka sangat sulit untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2021. Bahkan diperkirakan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia bisa minus sampai minus tiga persen. Hal ini akan berdampak terhadap turunnya target pendapatan Negara pada tahun 2021. Pemerintah Kota Palopo yang masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat pasti akan merasakan dampak atas turunnya target penerimaan pemerintah pusat. Namun penyesuaian terhadap dana transfer akan dilakukan setelah Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan

Selain itu, khusus untuk PAD Kota Palopo juga akan terkena imbas dari pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, karena akan berdampak pada penurunan tingkat kunjungan wisata dan perdagangan di Kota Palopo sehingga akan menurunkan penerimaan dari Pajak dan Retribusi Kota Palopo.

Dengan memperhatikan uraian diatas maka dalam menentukan proyeksi pendapatan Kota Palopo Tahun 2021, Pemerintah Kota Palopo mengacu pada realisasi Tahun 2019 tanpa adanya pertumbuhan serta memperhatikan kebijakan pemerintah Kota Palopo yang telah disepakati dengan pihak ketiga. Adapun Realisasi pendapatan Tahun 2019 dan target pendapatan daerah Kota Palopo pada kurun waktu Tahun 2020 - 2022, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palopo
Tahun 2019-2022

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI (TW I) TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
1	PENDAPATAN DAERAH					
1 . 1	Pendapatan Asli Daerah	165.664.354.780	35.980.694.730	189.592.384.308	165.083.412.245	181.591.753.469
1 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	34.860.944.165	8.342.909.711	35.647.700.000	34.860.944.165	38.347.038.582
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.074.168.786	2.508.719.220	10.443.967.200	9.074.168.786	9.981.585.664
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.496.932.396	-	7.500.000.000	7.496.932.396	8.246.625.636
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.232.309.434	25.129.065.799	136.000.717.108	113.651.366.898	125.016.503.588
1 . 2	Dana Perimbangan	726.842.067.622	176.560.332.000	734.654.757.000	726.842.067.622	726.842.067.622
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.109.805.665	-	15.320.569.000	13.109.805.665	13.109.805.665
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	537.722.702.000	176.560.332.000	549.105.917.000	537.722.702.000	537.722.702.000
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	176.009.559.957	-	170.228.271.000	176.009.559.957	176.009.559.957
1 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.994.794.888	20.175.259.437	81.765.348.300	84.722.464.895	84.722.464.895
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	20.450.520.150	-	19.177.800.000	20.450.520.150	20.450.520.150
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.159.951.545	1.365.984.042	48.475.555.100	50.159.951.545	50.159.951.545
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.007.644.000	-	7.970.110.000	7.970.110.000	7.970.110.000
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.141.883.200	-	6.141.883.200	6.141.883.200	6.141.883.200
1 . 3 . 6	Pendapatan lain-Lain	234.795.993	18.809.275.395	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	984.501.217.291	232.716.286.167	1.006.012.489.608	976.647.944.762	993.156.285.987

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2019 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Kota Palopo Tahun 2019-2022
(Berdasarkan Kode Rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TW I TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
4	PENDAPATAN DAERAH					
4 . 1	Pendapatan Asli Daerah	165.664.354.780,08	35.980.694.729,91	189.592.384.308,00	165.083.412.244,79	181.591.753.469,27
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	34.860.944.165,02	8.342.909.711,00	35.647.700.000,00	34.860.944.165,02	38.347.038.581,52
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	9.074.168.785,55	2.508.719.219,78	10.443.967.200,00	9.074.168.785,55	9.981.585.664,11
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.496.932.396,00	-	7.500.000.000,00	7.496.932.396,00	8.246.625.635,60
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.232.309.433,51	25.129.065.799,13	136.000.717.108,00	113.651.366.898,22	125.016.503.588,04
4 . 2	Pendapatan Transfer	798.151.546.367,43	177.926.316.042,21	797.242.305.300,00	791.114.012.367,43	791.114.012.367,43
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat	739.849.711.622,00	176.560.332.000,00	742.624.867.000,00	734.812.177.622,00	734.812.177.622,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer antar pemerintah Daerah	58.301.834.745,43	1.365.984.042,21	54.617.438.300,00	56.301.834.745,43	56.301.834.745,43
4 . 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.685.316.143,00	18.809.275.395,00	19.177.800.000,00	20.450.520.150,00	20.450.520.150,00
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	20.450.520.150,00	-	19.177.800.000,00	20.450.520.150,00	20.450.520.150,00
4 . 3 . 2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	234.795.993,00	18.809.275.395,00	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	984.501.217.290,51	232.716.286.167,12	1.006.012.489.608,00	976.647.944.762,22	993.156.285.987

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2019 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2021

3.2.1.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dilakukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2021 diproyeksikan menurun dari APBD Pokok 2020, mengikuti proyeksi pendapatan yang juga menurun. Pada belanja tidak langsung mengalami peningkatan khususnya pada belanja Bunga, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga.

Kenaikan Belanja Bunga disebabkan kelanjutan pembayaran bunga pinjaman kepada PT. SMI sebesar Rp. 3.840.006.323,- dan Kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp. 2.175.102.608,- nilai ini akan disesuaikan, menunggu hasil rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Sedangkan peningkatan belanja Bantuan Sosial dibandingkan tahun 2020 karena alokasi anggaran tersebut mengikuti Realisasi Tahun 2019, dimana pada tahun 2019 terdapat Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari DAK.

Pada tahun 2021, Dampak dari penyebaran COVID-19 masih terasa dan untuk mengantisipasi bencana yang lainnya sehingga alokasi Bansos dan Belanja Tidak Terduga dianggarkan mengalami peningkatan dari APBD Pokok Tahun 2020.

Sedangkan pada Belanja Langsung mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap belanja langsung pada APBD Pokok Tahun Anggaran 2020. Penurunan ini disebabkan karena Belanja Pembangunan Kawasan Wisata dan Cenderamata sisa sebahagian yang dianggarkan, menunggu realisasi kemajuan fisik tahun 2020. Untuk lebih jelasnya Realisasi belanja Tahun 2019 dan alokasi belanja daerah Kota Palopo pada kurun waktu Tahun 2020 - 2022, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun 2019-2022

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI (TW I) TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
2	BELANJA DAERAH					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	414.171.474.005	77.931.740.794	442.871.703.376	446.259.204.744	470.370.925.194
2.1.1	Belanja Pegawai	398.058.052.827	76.879.340.550	424.207.003.323	424.207.003.323	445.417.353.489
2.1.2	Belanja Bunga	2.175.102.609	1.052.400.244	5.464.307.563	6.015.108.931	8.916.479.215
2.1.4	Belanja Hibah	10.269.800.000	-	10.845.800.000	10.269.800.000	10.269.800.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.912.700.000	-	500.000.000	2.912.700.000	2.912.700.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota & Pemerintahan Desa dan	755.818.569	-	854.592.490	854.592.490	854.592.490
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.2	BELANJA LANGSUNG	542.607.364.389	53.285.076.670	663.580.536.232	570.466.685.014	519.843.985.793
2.2.1	Belanja Pegawai	56.328.312.279	12.890.169.580	56.667.651.600	57.046.668.501	51.984.398.579
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	287.342.037.244	38.360.518.450	273.469.106.927	228.186.674.005	207.937.594.317
2.2.3	Belanja Modal	198.937.014.866	2.034.388.640	333.443.777.705	285.233.342.507	259.921.992.896
	JUMLAH BELANJA	956.778.838.394	131.216.817.464	1.106.452.239.608	1.016.725.889.758	990.214.910.987

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2019 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Tabel 3.14
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palopo
Tahun 2019-2022
(Berdasarkan Kode Rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TW I TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	757.841.823.527,94	129.182.428.823,65	772.008.461.903,00	729.492.547.251,22	728.292.918.090
5.1.1	Belanja Pegawai	454.386.365.106,00	89.769.510.130,00	480.874.654.923,00	481.253.671.824,35	497.401.752.068,42
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	287.342.037.244,04	38.360.518.450,13	273.469.106.927,00	228.186.674.005,41	207.937.594.317,06
5.1.3	Belanja Bunga	2.175.102.608,90	1.052.400.243,52	5.464.307.563,00	6.015.108.931,45	8.916.479.214,90
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	11.025.618.569,00	-	11.700.392.490,00	11.124.392.490,00	11.124.392.490,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.912.700.000,00	-	500.000.000,00	2.912.700.000,00	2.912.700.000,00
5.2	BELANJA MODAL	198.937.014.866,41	2.034.388.640,00	333.443.777.705,00	285.233.342.506,77	259.921.992.896,33
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	956.778.838.394,35	131.216.817.463,65	1.106.452.239.608,00	1.016.725.889.757,98	990.214.910.986,70

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2019 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

3.2.1.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sesuai Pasal 22 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka harus ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Palopo pada tahun 2021 bersumber dari Penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp.52.819.318.125,- yang terdiri dari Sisa Pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp.43.019.318.125,- dan proyeksi Pinjaman jangka pendek BLUD RSUD Sawerigading sekitar Rp.9.800.000.000,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2021 di rencanakan sebesar Rp. 40.077.944.996,- yang terdiri dari pembayaran Pokok Hutang Ke Kemenkeu kurang lebih sebesar Rp. 2.941.373.129,- dan Pembayaran Hutang Pinjaman Jangka Pendek RSUD Sawerigading sebesar Rp.9.800.000.000,-. Untuk lebih jelasnya Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan proyeksi alokasi Pembiayaan Daerah Kota Palopo pada kurun waktu Tahun 2020 - 2022, disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2019-2022

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI (TW I) TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	51.517.849.148	39.385.775	103.381.125.000	52.819.318.125	25.305.481.250
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	5.142.849.148	39.385.775	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	46.375.000.000	-	103.381.125.000	52.819.318.125	25.305.481.250
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.516.373.129	1.470.686.565	2.941.375.000	12.741.373.129	28.246.856.250
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	45.516.373.129	1.470.686.565	2.941.375.000	12.741.373.129	28.246.856.250
	PEMBIAYAAN NETTO	6.001.476.019	(1.431.300.790)	100.439.750.000	40.077.944.996	(2.941.375.000)

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2019 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2019-2022
(Berdasarkan Kode Rekening Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

No. Urut	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TW I TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021	PROYEKSI TAHUN 2022
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6 . 1	Penerimaan Pembiayaan	51.517.849.148,34	39.385.775,00	103.381.125.000,00	52.819.318.125,00	25.305.481.250,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	5.142.849.148,34	39.385.775,00	-	-	-
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	46.375.000.000,00	-	103.381.125.000,00	52.819.318.125,00	25.305.481.250,00
6 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.516.373.129,24	1.470.686.564,62	2.941.375.000,00	12.741.373.129,24	28.246.856.250,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
6 . 2 . 3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	45.516.373.129,24	1.470.686.564,62	2.941.375.000,00	12.741.373.129,24	28.246.856.250,00
	PEMBIAYAAN NETTO	6.001.476.019,10	(1.431.300.789,62)	100.439.750.000,00	40.077.944.995,76	(2.941.375.000,00)

Sumber : LKPJ Kota Palopo Tahun 2019 & Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

1. Rasionalisasi tarif Pajak Daerah yang dilakukan secara bertahap;
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil atau pemungut PAD, Aparat Penegakan Hukum dalam rangka melakukan Penindakan terhadap penunggak pajak;
3. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan;
4. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
6. Meningkatkan kapasitas SDM pemungut Pajak, serta menyediakan sarana dan prasarana pemungut pajak yang memadai.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan; dan
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya dalam pengusulan dana DAK melalui aplikasi KRISNA DAK.

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut:

A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :

1. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
2. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan lain-lain;
4. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
5. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; dan

-
6. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman kepada pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan ditempuh melalui:

1. Sosialisasi dan pengawasan terhadap pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PPh; serta
2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK;

3.2.2.2. Arah kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja Daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Prioritas Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Belanja Pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji, tunjangan, Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai;
2. Belanja Bunga diarahkan untuk pembaruan bunga atas pinjaman pada Kementerian Keuangan dan PT. SMI.
3. Belanja Hibah diarahkan untuk pemenuhan Hibah wajib kepada organisasi yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan dan hibah kepada organisasi, yayasan dan rumah ibadah dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
4. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu masyarakat yang rentan dengan resiko sosial.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota & Pemerintahan Desa dan Politik digunakan sebagai dana bantuan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Parlemen sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

-
6. Belanja Tidak Terduga diarahkan keperluan darurat dan kegiatan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal;

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis OPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Namun sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya penurunan pendapatan serta adanya kegiatan yang ber sumber dari pinjaman yang telah terlaksana. Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dianggarkan sama dengan belanja tahun 2019. Pada intinya kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mewujudkan visi dan misi Walikota Palopo yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023. Visi Walikota tersebut adalah **"Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023"**, sedangkan Misi Walikota yang merupakan penjabaran dari visi, terdiri dari 5(Lima) Misi, yaitu:

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

3.2.2.3. Arah kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus anggaran, namun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) harus bernilai Nol tau Nihil. Dalam hal APBD diperkirakan defisit maka

pemerintah daerah dapat menutupi defisit APBD dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan atau penjualan aset sedangkan jika terjadi surplus APBD maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi atau membentuk dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Palopo diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp. 40.077.944.995,76,-. Hal ini disebabkan karena adanya kelanjutan Pembangunan Pusat Kuliner dan Cenderamata dimana sumber pembiayaan pembangunan tersebut dari Pinjaman Daerah. Dalam melakukan pinjaman daerah, selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sector perdagangan dan jasa. Dengan dibangunnya Pusat Kuliner dan Cenderamata diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota Palopo serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo pada kementerian keuangan. Pembayaran pokok hutang untuk PT. SMI akan dimulai pada tahun 2022. Selain itu, Pada Tahun 2021 di perkirakan BLUD RSUD Sawerigading masih melakukan Pinjaman Jangka Pendek untuk menutupi kekurangan kas yang disebabkan keterlambatan pembayaran klaim BPJS, oleh sebab itu pada pengeluaran pembiayaan dialokasikan juga sebesar Rp.9.800.000.000,- untuk pembayaran pokok hutang jangka pendek.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja atau jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Trend Pembiayaan dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2021 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SiLPA dan rencana pinjaman daerah;

-
2. Sehubungan dengan rencana kelanjutan pembangunan pusat kuliner dan cinderamata, maka APBD diperkirakan defisit oleh karena itu pemerintah Kota Palopo memanfaatkan Pinjaman Daerah dengan nilai total pinjaman diperkirakan sebesar Rp. 103 Milyar dan di terima Pemerintah Kota Palopo secara bertahap berdasarkan realisasi fisik pembangunan tersebut.

Dari analisis diatas maka jumlah penerimaan pembiayaan Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp.52.819.318.125,-. Sedangkan untuk Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.12.741.373.129,-.

BAB. IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Sulawesi Selatan.

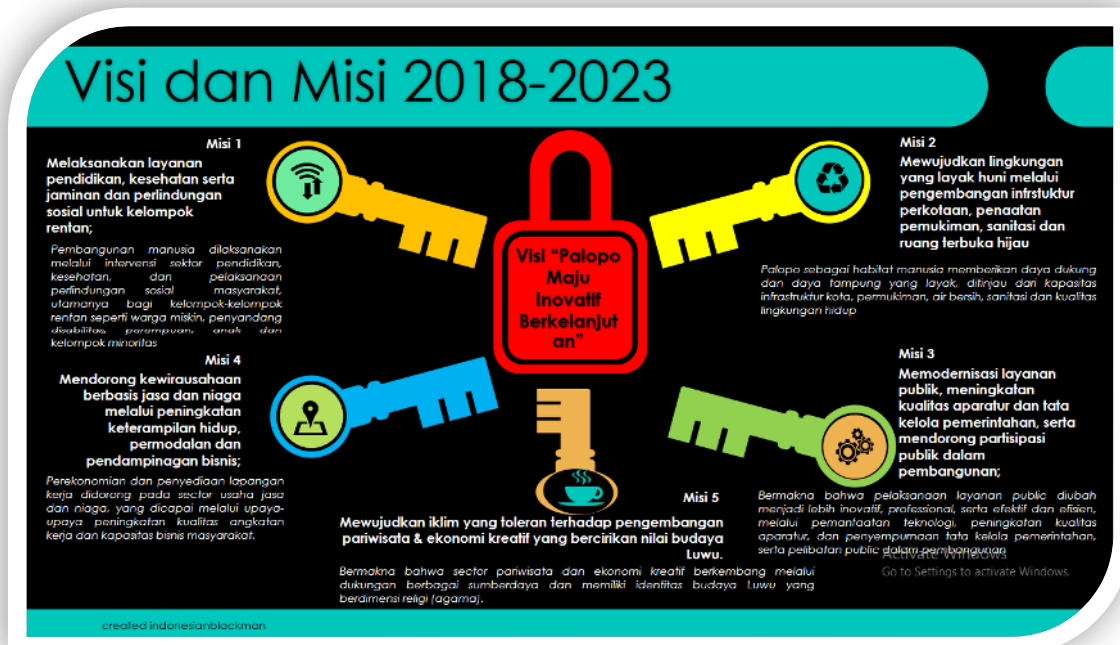


Olehnya sesuai dengan RPJMD Kota Palopo tersebut, berikut adalah visi yang akan diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo :

Visi

Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, Visi Kota Palopo adalah

“ Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023 ”.



Pada Visi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu member solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya local

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Misi

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;



2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;



“Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau”

Bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;



“Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan”

Bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, profesional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;



Penataan dan Pengembangan Lokasi Berusaha



Peningkatan Sektor Jasa & Niaga



Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah



Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja

“Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis”

Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

“Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu”



Pengembangan Fotografi



Pengembangan Film, Game & Animasi



Pengembangan Kuliner



Pengembangan Sektor Pariwisata



Pengembangan Komunitas Musik



Pengembangan Seni dan Budaya

Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).

Tabel 4.1
Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.	Maju
2	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.	Berkelanjutan dan Maju
3	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan	Modernisasi layanan public bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, profesional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.	Inovatif
4	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.	Maju
5	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan	Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif	Maju dan Berkelanjutan

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).	

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Jumlah tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) dan sasaran sebanyak 11 (sebelas)

Perumusan tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain menerjemahkan visi/misi, perumusan tujuan dan sasaran juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis daerah, dan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja pembangunan Kota Palopo 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kota Palopo Tahun 2021

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021
Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023				
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan				
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)		1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78.4
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	2	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.45
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	3	Angka Harapan Hidup	70.36
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.15
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau				

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)		5	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	82
	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	6	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	7	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	12
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	8	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	10
		9	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.98
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan				
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)		10	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	68
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	11	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	80
		12	Level SPIP Daerah (Point)	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81.28
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis				
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		14	Pertumbuhan PDRB (%)	7.18
	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.03

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021
	Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)			
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	16	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.5
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu				
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)		17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.4
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	18	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.19
		19	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.84

Konsep Holistik-Integratif-Tematik-Spasial (HITS) dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Palopo

Pendekatan holistic

Pembangunan Kota Palopo dilaksanakan dengan cara pandang bahwa “keseluruhan” sebagai satu kesatuan **lebih penting** daripada bagian-bagiannya. Artinya menekankan pentingnya “peran keseluruhan dan saling keterkaitan” dari bagian-bagiannya. Ini bermakna perencanaan pembangunan disusun menyeluruh yang merangkum segala aspek dan factor yang berkaitan

Pendekatan Temat

Suatu sistem yang menyatukan unsur-unsur yang dikaitkan / terpusat pada satu Spokok permasalahan /tema, sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain. Artinya terdapat suatu sistem yang menyatukan unsur-unsur yang dikaitkan / terpusat pada satu pokok permasalahan / tema, sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

Pendekatan integratif

Diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses.

Jika dihubungkan dengan perencanaan pembangunan, maka pendekatan integratif lebih mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu SKPD dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada SKPD lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas.

Pendekatan Spasial

Dalam tahapan perencanaan pembangunan, pendekatan spasial digunakan saat pembahasan guna menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa OPD untuk diintegrasikan yang selanjutnya akan diselaraskan dengan usulan dari kabupaten/ kota.

Berikut adalah penjelasan pendekatan HITS pada setiap prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pada enam Prioritas Pembangunan Kota Palopo, semuanya akan dilaksanakan dengan melihat **lebih dari satu aspek** untuk menjamin adanya penanganan yang "holistik/keseluruhan" sebagai satu kesatuan dalam prioritas pembangunan yang saling terkait.
2. Setiap prioritas pembangunan Kota Palopo akan dilaksanakan dengan **kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah** untuk memastikan penanganan yang "integratif" untuk menunjukkan adanya kepaduan pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah
3. Setiap prioritas pembangunan memiliki "**satu tema besar**" yang menjadi **pokok persoalan**, yang selanjutnya bisa diurai menjadi sejumlah "tema-tema" kecil yang terkait, sehingga kolaborasi dan sinergi peran perangkat daerah dalam menangani satu prioritas menjadi hal yang sangat penting.
4. Setiap prioritas pembangunan daerah **memiliki lokus lokus spasial** prioritas yang berangkat dari kondisi eksisting persoalan, yang memberikan arah dan objek lokasi prioritas pelaksanaan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang terkait. Sehingga memastikan bahwa kebutuhanlah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dilaksanakan pada sebuah lokus prioritas.

Prioritas Pertama



Prioritas Kedua



Prioritas Ketiga



Prioritas keempat



Prioritas Ke Lima



Prioritas Ke enam



Permasalahan pembangunan, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan untuk ditangani pada tahun 2021, memiliki keterkaitan satu sama lain dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berikut adalah gambaran keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Palopo :

Tabel 4.3 Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan Pembangunan 2021	Isu Strategis	Prioritas RKPD 2021	Sasaran Pembangunan
1. Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan 2. Taraf Hidup dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	SDM Berdaya Saing dan Berkarakter (1)	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2) Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)
3. Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Infrastruktur Daerah	2. Pemantapan Infrastruktur Daerah dan Penataan Ruang	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan (2) Pengembangan Infrastruktur (3)	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4) Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)
4. Pengelolaan Tata Ruang dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	3. Pemantapan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Wilayah	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana (3) Pengembangan Infrastruktur (3)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)
5. Akselerasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik (Dasar dan Non Dasar) yang Inovatif	4. Pemantapan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan & Transformasi Layanan Publik (5)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)

Permasalahan Pembangunan 2021	Isu Strategis	Prioritas RKPD 2021	Sasaran Pembangunan
		Pengembangan Pelayanan Dasar (4)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)
6. Penanganan Pengangguran dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Produktifitas Ekonomi dan Produktifitas Daerah (4)	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9) Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 sebanyak 7 prioritas yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan dan Menjami Pemerataan
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Layanan Publik



Prioritas Pembangunan Sulsel 2021 sebanyak 6 prioritas yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing
2. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Perlindungan Sosial
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik



4.2.2. Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021

Prioritas pembangunan daerah Kota Palopo 2021 adalah gambaran prioritas pembangunan yang dipilih. Proses pemilihannya mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional (RKP) dan Sulsel, permasalahan pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan tahun berjalan, isu strategis daerah, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo tahun 2021 dan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Dari hasil sintesa atas poin point tersebut diatas, ditetapkan **6 prioritas pembangunan Kota Palopo Tahun 2021** sebagai berikut :

1. Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)
2. Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan
3. Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana
5. Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik
6. Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah (P6)



Prioritas Nasional, Sulsel dan Kota Palopo Tahun 2021 memiliki saling keterkaitan sebagai upaya menjaga sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Keterkaitan tersebut digambarkan tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Keterkaitan Prioritas Nasional, Sulsel dan Kota Palopo
Tahun 2021**

Prioritas Nasional	Prioritas Sulsel	Prioritas Palopo
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing (P1)	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)
Pengembangan Wilayah untuk Pengurangan Kesenjangan dan Menjami Pemerataan (PN 2)	Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (P2)	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan (P2)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Perlindungan Sosial (P4)	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah (P6)
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan (P3)	Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar (P3)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (P5)	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana (P4)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik (P6)	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik (P5)
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Layanan Publik (PN7)		

Untuk memberikan kejelasan atas prioritas pembangunan daerah Kota Palopo Tahun 2021, berikut adalah penjelasan isi dari enam prioritas pembangunan Kota Palopo yang diuraikan sebagai berikut :

1. PENGEMBANGAN KUALITAS SDM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI REFORMASI PUBLIK SFAETY MASYARAKAT

Pada prioritas ini akan mencakup Penguatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesenjangan Sosial Kemasyarakatan dengan melaksanakan reformasi pada public safety masyarakat yang mencakup perluasan perlindungan pengamanan social, system dan layanan kesehatan daerah,

Prioritas ini juga mencakup akselerasi peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan, Pemantapan sarana prasarana kesehatan, kualitas layanan dan optimalisasi UHC serta SPM Kesehatan, Pemantapan Upaya Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan yang Berbasis Komunitas/Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender serta SPM Sosial.

2. PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGURANGAN KESENJANGAN

Mencakup Pengembangan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah, dan Pendukung Kepariwisata Daerah yang akan focus pada peningkatan dan pemantapan kualitas jalan/jembatan, penyediaan infrastruktur strategis daerah, penataan sarana dan prasarana perhubungan, serta pengembangan akses komunikasi dan informasi di daerah..

3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN DASAR

Mencakup Infrastruktur Publik/Strategis dan Infrastruktur Layanan Dasar yang diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana serta cakupan fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR, Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman.

4. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA

Mencakup Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dan Ketahanan Bencana yang diarahkan pada Pemantapan Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan, serta Kesiapsiagaan Kebencanaan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau.

5. PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK

Mencakup pada Tumbuh Kembangnya Inovasi, Akuntabilitas Kinerja, dan SPBE yang akan diarahkan pada pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur, Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

6. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI SERTA PRODUKTIFITAS DAERAH

Mencakup Penguatan Penyediaan Lapangan Usaha, Kualitas Tenaga Kerja, Peningkatan dan Ketahanan Investasi dan UMKM yang akan diarahkan pada Pelatihan Kerja (Life Skill), Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif, Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah. Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan, Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.

Penajaman Arah Kebijakan Penanganan Dampak Covid 19 Tahun 2021

Terdapat tiga arah kebijakan penanganan dampak covid 19 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Pemerintah Kota Palopo. Arah kebijakan pertama dan kedua merupakan bagian dari prioritas pembangunan pertama, sementara arah kebijakan ketiga merupakan bagian dari prioritas keenam, sebagai berikut :

1. Pemantapan Layanan Sistem Kesehatan Daerah

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini adalah :

- Mengoptimalkan Upaya untuk menghentikan dan menangani Penyebaran Covid 19
- Memantapkan Pelaksanaan serta Edukasi Masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Mulai dari Individu, Keluarga dan Lingkungan.
- Memastikan bahwa protocol kesehatan tetap dijalankan dan terus dioptimalisasi pada area layanan public, sekolah/civitas akademik, dan lembaga pemerintah dan dunia usaha lainnya.
- Memantapkan Pelaksanaan Pencegahan Dini Penyakit Menular
- Memantapkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan Terutama yang Terkait dengan Pandemi Covid 19
- Memantapkan Cakupan Layanan Iuran Kepesertaan BPJS Daerah
- Mengoptimalkan peran dan sinergi penanganan dengan Kelurahan Tanggung Bencana

2. Pemantapan Pelaksanaan Social Safety Net (Jaringan Pengamanan Sosial)

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini adalah :

- Mengoptimalkan dan Menjaga Efektifitas serta Sinergi Cakupan Layanan Program Program Jaring Pengaman Sosial ke Masyarakat baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, provinsi maupun pemangku kepentingan lainnya.
- Memastikan bahwa bantuan social yang bersumber dari APBD daerah dilaksanakan tepat sasaran dan mempertimbangkan Basis Data Terpadu, atas bantuan social yang dilaksanakan Perangkat Daerah ke Masyarakat
- Memastikan bahwa harga pangan dan ketersediaannya relative mampu diakses dan dijangkau masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan empat rumah pangan yang ada di Kota Palopo.
- Memastikan barang bersubsidi tetap tersedia dengan harga sesuai HET Pemerintah.

3. Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Produktifitas Daerah

Penekanan arah kebijakan pada aspek ini adalah :

- Menjaga dan mengoptimalkan produksi dan produktifitas daerah, dan menjaga ketahanan pangan daerah
- Mengoptimalkan bantuan-bantuan usaha kepada kelompok usaha masyarakat
- Memastikan bahwa seluruh aktifitas lapangan usaha kembali berjalan sesuai *scenario new normal* dengan protocol kesehatan
- Memperluas cakupan pelatihan tenaga kerja berbasis life skill dan fasilitasi akses pada lapangan berusaha
- Memastikan proyek proyek infrastruktur padat karya yang bersumber dari dana kelurahan mengakomodir tenaga kerja local masyarakat.
- Memastikan infrastruktur yang menunjang perekonomian mampu diakses dan dimanfaatkan masyarakat secara optimal
- Memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dijalankan perangkat daerah secara integrative dan bersinergi
- Mengoptimalkan peran dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakselerasi ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah

4.2.2.1. Pokok Pikiran DPRD Tahun 2021

DPRD Kota Palopo telah melaksanakan Reses Masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020 pada Februari 2020. Proses ini telah menghasilkan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Palopo untuk kebutuhan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palopo dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 25 orang anggota dewan, hasil Rapat Dengar Pendapat/Hearing dengan Mitra kerja OPD Pemerintah Kota Palopo dan hasil kunjungan kerja alat-alat kelengkapan DPRD, baik di dalam daerah maupun luar daerah Kota Palopo.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari:

- a. Wilayah Dapil I meliputi : Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Mungkajang
- b. Wilayah Dapil II meliputi : Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwana
- c. Wilayah Dapil III meliputi : Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Sendana

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Palopo disusun berdasarkan daftar permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD dari rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan atau risalah rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo dan hasil kunjungan kerja Dewan.

Adapun permasalahan tersebut secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

-
2. Persebaran fasilitas penunjang kesehatan masyarakat dan tenaga medis yang berkompeten belum merata.
 3. Belum meratanya kualitas sarana prasarana dan SDM kependidikan pada semua jenjang, masih banyak terpusat di kecamatan dekat wilayah perkotaan.
 4. Ketidakesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Saat ini dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai.
 5. Terbatasnya kemampuan anggaran dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
 6. Kurang berkembangnya kesadaran masyarakat atas penataan lingkungan permukiman dan perumahan
 7. Layanan persampahan masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini karena terbatasnya armada pengangkutan sampah yang dimiliki Pemerintah Kota Palopo.
 8. Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif.
 9. Daya saing daerah masih lemah.
 10. Belum optimalnya perkembangan ekonomi sekunder dan tersier terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan. Hal ini diikuti dengan stagnasi produksi, produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta perikanan.
 11. Belum optimalnya perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari masih signifikannya populasi penduduk miskin. Dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 menunjukkan garis kemiskinan di Kota Palopo berada pada angka Rp. 292.602 dengan jumlah penduduk miskin atau pra sejahtera sebanyak 14.270 jiwa dengan persentase sebesar 7,94 persen. Salah satu penyebab meningkatnya penduduk miskin adalah tingginya tingkat pengangguran dan Palopo yang menjadi tujuan urbanisasi penduduk di wilayah Luwu Raya.
 12. Kurang efektifnya pengendalian pemanfaatan tata ruang sesuai peruntukannya dalam RTRW.
 13. Luas dan kualitas lahan terbuka hijau dan ruang terbuka publik belum seimbang dengan pertumbuhan dan kondisi penduduk Kota Palopo.
 14. Keterbukaan informasi publik masih terbatas dan belum massif.
 15. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pembangunan termasuk pada tingkat OPD.

Sesuai hasil penelaahan dan sintesa dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palopo tersebut, **poin-point utama pokok pokok pikiran untuk RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :**

1. Ketersediaan Infrastruktur yang Mendukung Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Antisipasi Bencana,

3. Penataan Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Lingkungan yang Sehat, Layak dan Nyaman
4. Penyediaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Layanan Publik dan Pemantapan Layanan Pemerintahan
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Berusaha, Perlindungan Sosial dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
6. Penataan dan Pembenahan Destinasi Wisata
7. Kenyamanan dan Ketertiban Daerah.

Berikut adalah keterkaitan pokok pokok pikiran DPRD Kota Palopo Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021 :

Tabel 4.5. Keterkaitan Pokok Pikiran DPRD Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palopo 2021

No	Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan Kota Palopo 2021
1	Ketersediaan Infrastruktur yang Mendukung Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar
2	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air dan Antisipasi Bencana,	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana
3	Penataan Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Lingkungan yang Sehat, Layak dan Nyaman	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan
4	Penyediaan dan Penataan Sarana dan Prasarana Layanan Publik dan Pemantapan Layanan Pemerintahan	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Berusaha, Perlindungan Sosial dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat
6	Penataan dan Pembenahan Destinasi Wisata	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah
7	Kenyamanan dan Ketertiban Daerah	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik

Selain itu, DPRD Kota Palopo juga menekankan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kota Palopo tetap menitikberatkan pencapaian visi Kota Palopo dilaksanakan secara sistematis, terpadu, holistik dan tanggap terhadap perubahan dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional yang menekankan pada lima prioritas yakni pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan

regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Dan menekankan pentingnya sinergitas dan harmonisasi diantara semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kota Palopo.

4.2.2.2. Tema Rencana Pembangunan Tahun 2021

Tema RKP	RKPD Sulsel	RKPD Kota Palopo
Perubahan Tema RKP 2021 Menjadi :	Perubahan tema RKP Menjadi :	Perubahan Tema RKPD Menjadi :
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial yang Didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM	Akselerasi Pemulihan Kondisi Ekonomi-Sosial dan Kesehatan Masyarakat
Fokusnya : Fokus (ekonomi), pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial serta reformasi sistem ketahanan bencana		Fokusnya : Public Safety (Sosial dan Kesehatan) serta Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Daerah

4.2.2.3. Target Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo 2021

Target Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo sebagai berikut sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

4.2.2.3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

No	Indikator	Kondisi 2019	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.75	7.18
2	PDRB per Kapita (Juta/Kapita)	43.02 (ADHB) 29.50 (ADHK)	37.5 (ADHB) 32.23 (ADHK)

4.2.2.3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

No	Indikator	Kondisi 2019	Target 2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.32	9.03
2	Jumlah Penganggur (Orang)	8,314	7,274

4.2.2.3.3. Tingkat Kemiskinan (% dan Jumlah Kemiskinan, perubahan garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan)

No	Indikator	Kondisi 2019	Target 2021
1	Persentase Penduduk Miskin	7.82	7.15
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,370	14.532
3	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	324,233	284,427
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.14(*)	1.50
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.26 (*)	0.38

* = Tahun 2018

4.2.2.3.4. Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator	Kondisi 2019	Target 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	77.98	78.4
2	Angka Harapan Hidup	70.79	70.36
3	Rata-rata Lama Sekolah	10.75	10.45
4	Harapan Lama Sekolah	15.07	15.17
5	Pengeluaran Per Kapita	12,986	13,048

4.2.2.3.5. Ketimpangan (Gini Ratio, Indeks Williamson) .

No	Indikator	Kondisi 2019	Target 2021
1	Gini Rasio	0.338	0.335

4.2.2.3.6. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan ((Penetapan APBD, e-procurement, e-budgetting, IKM kesehatan, investasi, pelayanan publik lainnya)

Predikat Layanan Publik/Tingkat Kepatuhan Layanan Publik

Predikat Layanan Publik Pemerintah Kota Palopo menurut Ombudsman Republik Indonesia, berada pada zona hijau. Ini bermakna bahwa tingkat kepatuhan pemerintah Kota Palopo **kategori tinggi**. Tahun 2021, Pemerintah Kota Palopo akan berupaya memastikan bahwa pencapaian pelayanan publik tetap berada pedikat tinggi.

Survey Kepuasan Layanan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2019 berada pada angka 83.08 poin. Ini menunjukkan kinerja unit layanan berpredikat baik dengan mutu layanan yang baik pula. Tahun 2021, kondisi ini diharapkan mampu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan.

Berikut adalah beberapa hasil survey indeks kepuasan masyarakat Tahun 2019 :

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI INDEKS	IKM	KINERJA UNIT LAYANAN	MUTU PELAYANAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,44	85,91	Baik	B
2	RSUD Sawerigading	3,31	82,83	Baik	B
3	Puskesmas Wara	3,29	82,27	Baik	B

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI INDEKS	IKM	KINERJA UNIT LAYANAN	MUTU PELAYANAN
4	Dinas Sosial (Rastra APBN & APBD)	3,30	82,51	Baik	B
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,33	81,18	Baik	B
6	Kecamatan Wara	3,35	83,77	Baik	B
Rata-rata			83,08	Baik	B

Penetapan APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palopo selalu ditetapkan sesuai jadwal yang ditentukan atau tepat waktu. Kondisi ini diharapkan terus dipertahankan pada penetapan APBD Tahun 2021.

Perangkat Daerah yang Menggunakan E-Procurement

Dari sebanyak 49 perangkat daerah pada Pemerintah Kota Palopo, seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa semuanya telah dilaksanakan dan menggunakan sistem e procurement. Dimana OPD memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa. Kondisi ini pada tahun 2021 diharapkan mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Pemakaian E Budgeting

Penyusunan APBD Kota Palopo juga telah menggunakan sistem e budgeting, sehingga proses penyusunan rancangan APBD dimulai dengan berbasis elektronik. Kondisi ini diharapkan terus dipertahankan pada tahun 2021.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kesehatan di Kota Palopo berada pada angka rata-rata 82.55 atau mutu layanan berkategori B (Baik). Indeks Kepuasan ini terutama pada layanan kesehatan di RSUD Sawerigading Rampoang yang berada pada angka indeks 3.31 poin dan Puskesmas Wara yang berada pada angka indeks 3.29 point. Kondisi ini pada tahun 2021, diharapkan terus ditingkatkan.

Peningkatan Investasi Daerah

Kondisi investasi di Kota Palopo digambarkan pada tabel sebagai berikut :

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR				Capaian Tahun			Target 2021
					2016	2017	2018	
Penanaman Modal								
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)				122	147	129	152
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)				0	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)				268,332	382,322	220,859	545,897

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Tahun			Target 2021
		2016	2017	2018	
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	10.56	7.42	9.50	10

4.2.2.3.7. Transparansi (PPID, e-planning, Publikasi APBD secara On line) dan Akuntabilitas (Opini BPK, SAKIP)

Pejabat Pengelola Informasi Publik

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik.

Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis. Pemerintah Kota Palopo juga telah menyediakan layanan ini yang bisa diakses melalui <http://ppid.palopokota.go.id/>. PPID ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 45 Tahun 2017.



Tampilan aplikasi PPID Kota Palopo :

Penerapan e-Planning

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kota Palopo telah berbasis e planning. Mulai dari perencanaan di tingkat kelurahan (musrenbang kelurahan) sampai tingkat kecamatan bahkan pada level penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, seluruhnya telah berbasis e planning yang bisa diakses pada <https://eplanning.palopokota.go.id/>. Pengusulan pokok pokok pikiran DPRD pun mulai tahun ini dilaksanakan berbasis elektronik.

Tampilan Beranda e-Planning Kota Palopo :



Publikasi APBD secara Online



Sebagai bagian dari transparansi, Pemerintah Kota Palopo pun telah mempublikasikan APBD Kota Palopo secara online yang bisa diakses melalui internet pada laman : <https://palopokota.go.id/blog/page/apbd-kota-palopo>. Berikut adalah screen shot publikasi APBD Kota Palopo :

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota yang direlease untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Palopo telah dilakukan sesuai standar akuntansi pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik dan benar. Kondisi ditargetkan untuk tetap dipertahankan pada tahun 2021. Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Palopo menyediakan layanan dalam laman :

<https://palopokota.go.id/page/transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah>.



Predikat SAKIP Pemerintah Kota

Predikat kinerja akuntabilitas atau SAKIP Kota Palopo sampai dengan tahun 2019 berada pada predikat CC dengan nilai 52. 43. Kondisi ini lebih baik daripada tahun sebelumnya 2018 yang berada pada angka 50.02. Capaian 2019 ini belum memenuhi target 2019 dan belum memenuhi target RPJMD. Pemerintah Kota Palopo tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas SAKIP dimana tahun 2021 diharapkan berpredikat B.

4.2.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. **Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.**

Terdapat 12 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2021. Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021
terhadap Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo**

Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Prog Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)	Persentase Rata-Rata Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%)	Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan
				Angka Melek Huruf	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)		PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)	Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)	Dinas Kesehatan, RSUD
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
Meningkatnya derajat	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan	Dinsos, , Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis

Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Prog Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana
kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)		SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)	Keluarga Sejahtera I (%)	PPA, Dis. Perikanan, DPPP, Dis. Ketahanan Pangan, Dinas Pol Pamong Praja
				Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
				Indeks Pembangunan Gender (%)	
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	Dis Perkim, Dis PU PR, Dis Ketahann Pngn, Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis LH & Kebersihan, Dis Transmigrasi
Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Dis PU PR, Dishub, Dis Kominfo
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan		PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah	Dis PU PR, Dis Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Prog Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana
Lingkungan Hidup (S.6)	Peningkatan Ketahanan Bencana		RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	kota/kawasan perkotaan (%)	
				Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)	Predikat LPPD (Point)	Seluruh OPD
				Predikat Zona Pelayanan Publik (Ombudman)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	Rata-rata Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kota (%)	Setda, Disdik, Dinkes, Dinas PU PR, Dis Perumahan Pemukiman, Dis Sosial, BPBD, Dis Pemadam Kebakarn & Penyelamatan, Pol PP
			PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI	Rata-rata Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)	Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil

Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Prog Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana
			DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	Rasio Usulan Prioitas yang Dianggarkan dalam APBD (per 100 Usulan Prioritas)	Bappeda dan seluruh OPD
Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kualitas Tenaga Kerja (S.9)	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Pertumbuhan PDRB (%) dan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Rasio Penduduk yang Bekerja	Disnaker, Dis Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, DPMPSTP
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perikanan, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan,
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta		PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN	Lama kunjungan wisata (Rata - rata kunjungan wisata dalam 1 tahun)	Dinas Parekraf, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Dispora,

Sasaran Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Prog Pembangunan	Perangkat Daerah Pelaksana
perekonomian daerah (S.11)	Produktifitas Daerah		PRASARANA PENDUKUNG (PP12)		Kebudayaan dan Perhubungan

4.2.3. Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional

4.2.3.1. Dukungan Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Prioritas Nasional Tahun 2021

Prioritas Nasional 2021	Prioritas Sulsel 2021	Prioritas Kota Palopo 2021
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (1)	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Perlindungan Sosial (P4)	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah (P6)
Pengembangan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan (2)	Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Pemerataan (P2) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan (P3)	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan (P2)
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (3)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing (P1)	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)		Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik (7)
Infrastruktur untuk ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan (P3)	Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar (3)
Lingkungan Hidup Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (6)	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana (4)
Stabilitas Polhukam dan Transformasi Layanan Publik (7)	Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik (P6)	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik (7)

4.2.3.2. Dukungan Sasaran RKPD Terhadap Sasaran RKP Tahun 2021

Sasaran RKP 2021	Sasaran RKPD Sulsel 2021	Sasaran RKPD Kota Palopo 2021
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.6) Indeks Pendidikan : 67.02	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1) Angka rata-rata lama sekolah (Thn) 10.45 Tahun
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.8) Indeks Kesehatan : 77.31	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2) Angka Harapan Hidup : 70.36 Tahun
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah (S5) Indeks Gini : 0.366 Indeks Williamson : 0.560 Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan (S7) IPG : 93.62 IDG : 77.07	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3) Persentase Penduduk Miskin (%) : 7.15%
	Meningkatnya aksesibilitas Infrastruktur (S3) Indeks Aksesibilitas Infrastruktur : 65	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4) Persentase Areal Kawasan Kumuh (%) : 0%
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas Infrastruktur (S3) Indeks Aksesibilitas Infrastruktur : 65	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5) Persentase layanan angkutan darat (per 10.000) : 12
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (S10) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 73.40 Potensi Penurunan Emisi GRK : 1.7 Juta Ton CO2Eq	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6) Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha) : 10 Ha Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik : 76.98%

Sasaran RKP 2021	Sasaran RKPD Sulsel 2021	Sasaran RKPD Kota Palopo 2021
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan (S1) Nilai SAKIP BB	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7) Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai) : 80 Level SPIP Daerah (Point) : 3
Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (S2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik : C	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point) : 81.28
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (S4) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 4.77 % Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam (S9) Produktifitas Total Daerah : 87.88 Juta/Angkatan Kerja	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 9.03% Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10) PDRB per kapita (Juta/Tahun) : 37.5
	Meningkatnya produktifitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (S4) PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar, dan Bone) (Milyar Rp) : 37.13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11) Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) : 0.19 Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%) : 2.84

4.2.3.3. Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2021

Prioritas Nasional	Program Prioritas Pembangunan Kota Palopo
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (1)	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10) PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11) PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)
Pengembangan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan (2)	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (3)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1) PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7) PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)
Infrastruktur untuk ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4) PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)
Lingkungan Hidup Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (6)	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)
Stabilitas Polhukam dan Transformasi Layanan Publik (7)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7) PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Palopo dalam RKPD tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan cara Pemerintah Kota Palopo mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, sekaligus menjadi implementasi misi

Pemerintah Kota Palopo dalam mewujudkan Visi Palopo Maju Inovatif dan Berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

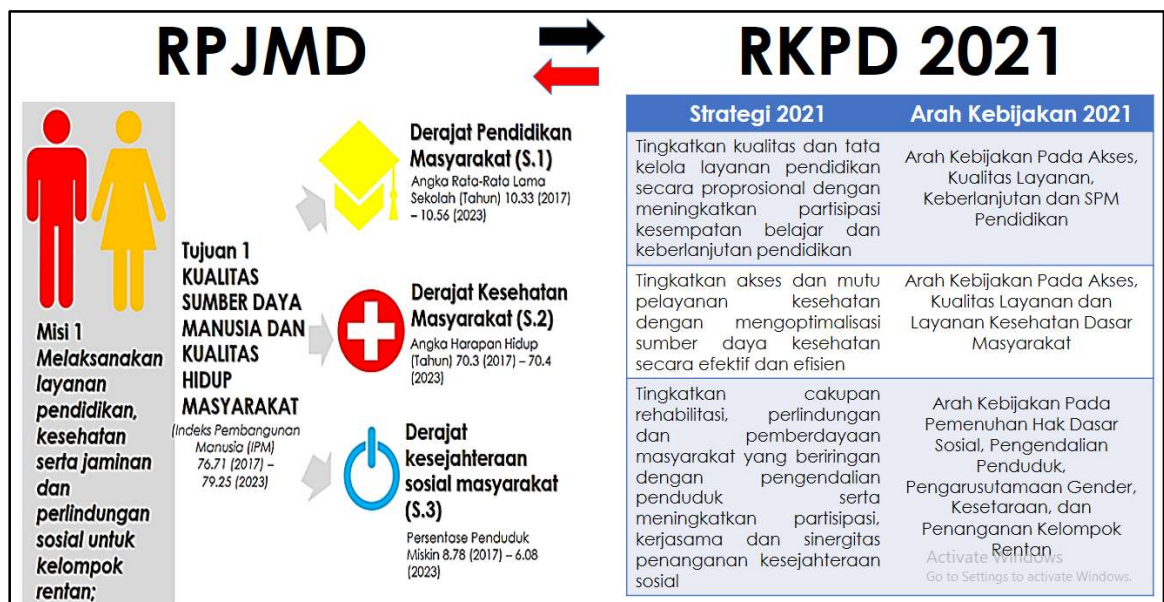
Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2021
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proporsional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan (Stra 1)	Akselerasi peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien (Stra 2)	Pemantapan sarana prasarana kesehatan, kualitas layanan dan optimalisasi UHC serta SPM Kesehatan
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial (Stra 3)	Pemantapan Upaya Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan yang Berbasis Komunitas/Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender serta SPM Sosial
Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)	Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman
Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)	Penyediaan sarana dan prasarana serta cakupan fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2021
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)	Pemantapan Upaya Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan, serta SPM Kebencanaan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada (Stra 7)	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)	Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)	Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill), Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Memperkuat Pemberdayaan	Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah.

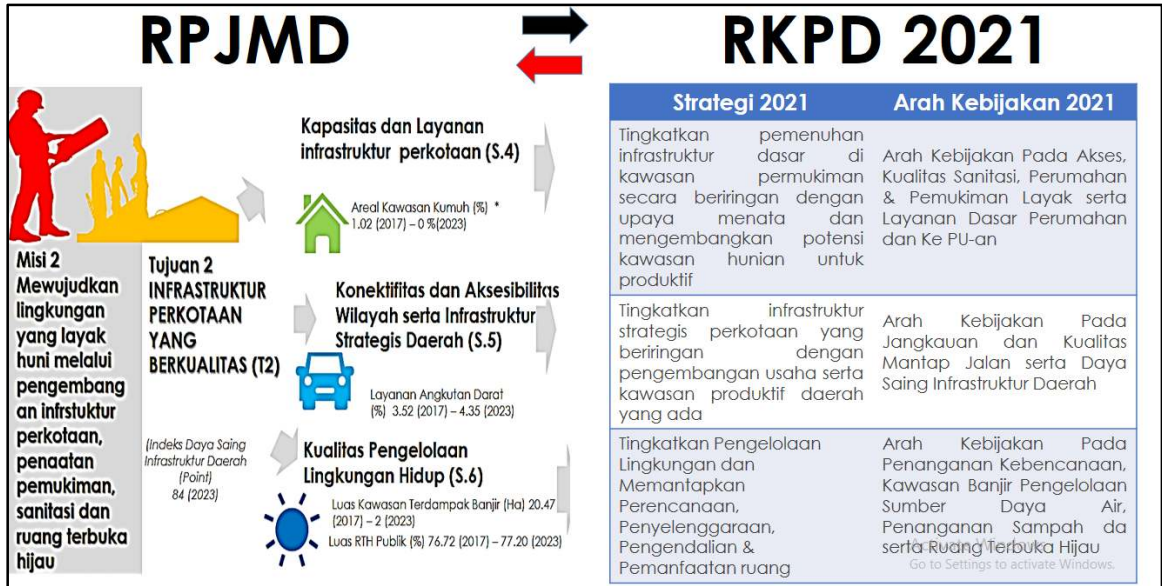
Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2021
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibilitas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10) Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)	Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.

4.3.1. Keterkaitan Misi ,Tujuan, Sasaran RPJMD Terhadap Strategi dan Kebijakan RKPD Kota Palopo Tahun 2021

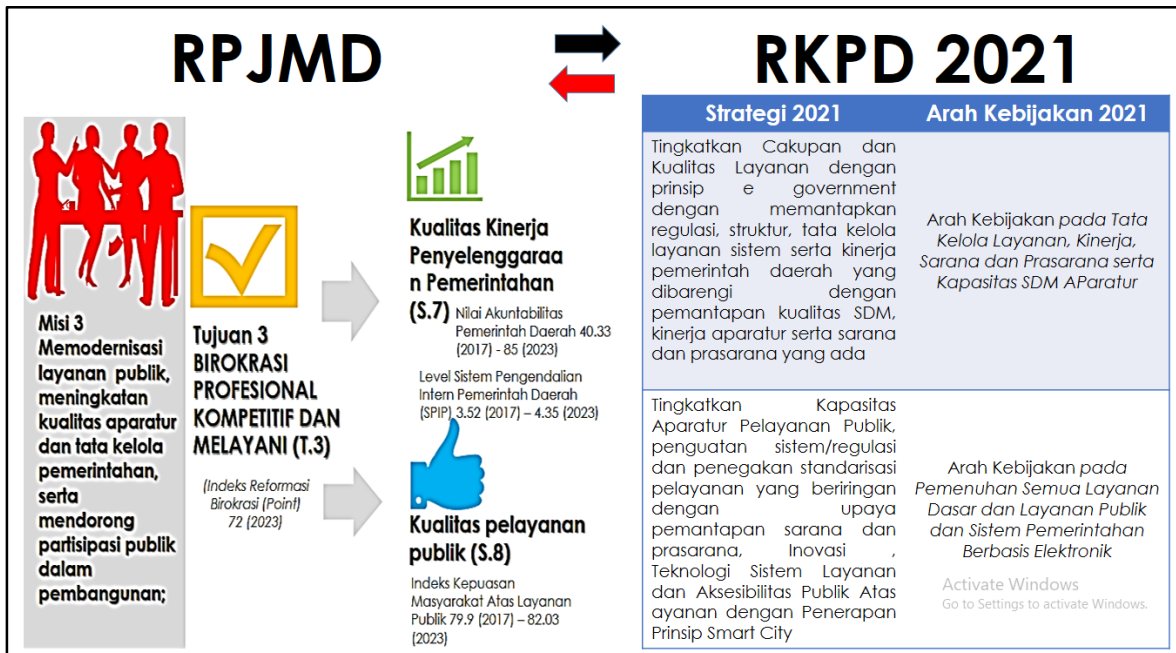
Misi 1 :



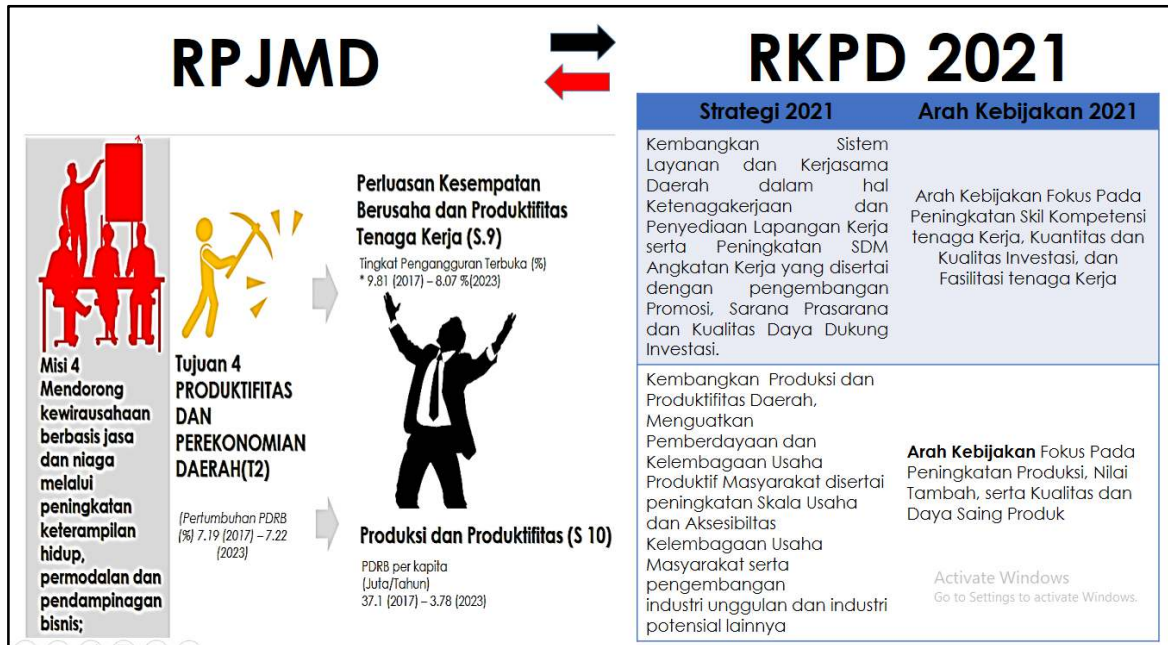
Misi 2 :



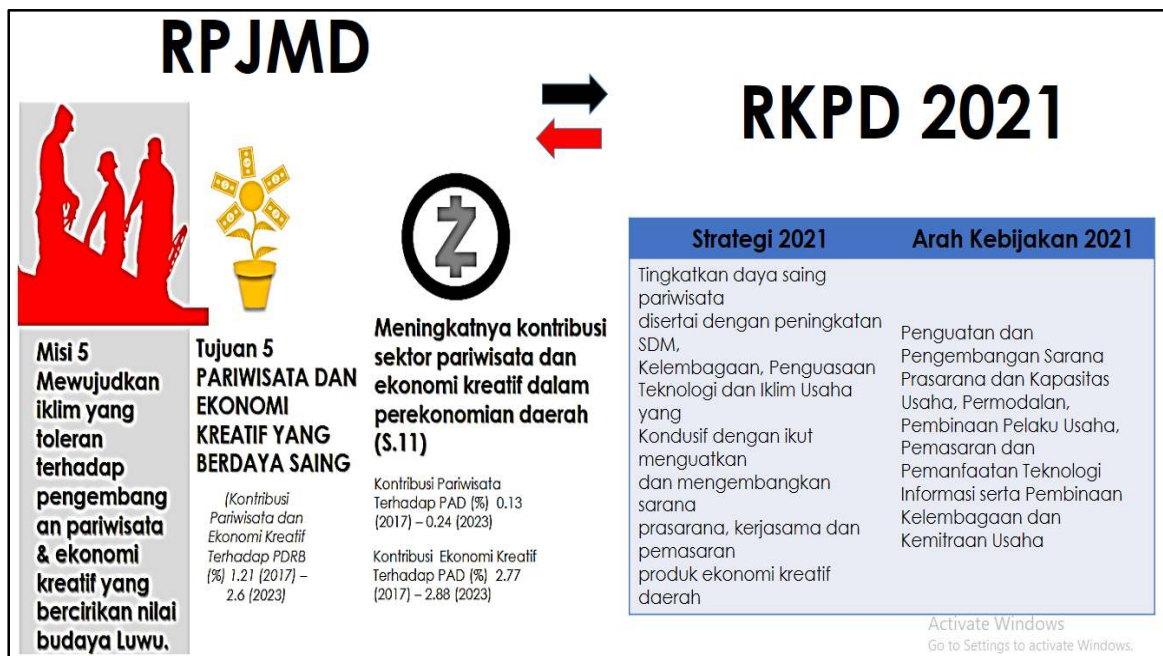
Misi 3 :



Misi 4 :



Misi 5 :



4.3.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Indikator Makro Pembangunan Kota Palopo

No	19 Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2021	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	78.04	Pengembangan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat 
2	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.45	
3	Angka Harapan Hidup	70.36	
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.15	
5	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	82	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan 
6	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0	
7	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	12	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar 
8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	81.28	
9	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	10	Pengembangan Kualitas Lingkungan Hidup & Ketahanan Bencana 
10	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.98	
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	68	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Layanan Publik 
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	80	
13	Level SPIP Daerah (Point)	3	
14	Pertumbuhan PDRB (%)	7.18	Peningkatan Ekonomi dan Produktifitas Daerah 
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.03	
16	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37.5	
17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	2.4	
18	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.19	
19	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.84	

4.4. Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan Sulsel 2021	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Program Pembangunan Daerah Kota Palopo
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing (P1)	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1) PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan (P2)	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan (P2)	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan (P3)	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar (P3)	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (P5)	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana (P4)	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)
Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik (P6)	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik (P5)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7) PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)

Prioritas Pembangunan Sulsel 2021	Prioritas Pembangunan Kota Palopo	Program Pembangunan Daerah Kota Palopo
		PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)
Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Sosial Perlindungan (P4)	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah (P6)	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)
		PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)

4.5. Integrasi dan Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Dukungan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2021 terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
		Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN (PP2)

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah
		Reformasi Publik Safety Masyarakat	
			PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
		Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN (PP 1)
		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Layanan Publik	PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	PROGRAM PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah
	menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua		
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5)
		Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
		Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA, EKRAF DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG (PP12)
		Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Layanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DAN HUNIAN LAYAK (PP4)
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH (PP5) PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Pengembangan Kualitas Lingkungan Hidup & Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)

No	Tujuan TPB	Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021	Program Pembangunan Daerah
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS DAERAH (PP11)
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	Pengembangan Kualitas Lingkungan Hidup & Ketahanan Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KUALITAS TATA RUANG, SUMBER DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Layanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi Layanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)
			PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)

4.6. Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik di Kota Palopo ditekankan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, sampai pada tingkat perangkat daerah, meningkatkan atau membaiknya transparansi,

akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Termasuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Ini juga mencakup bagaimana Pemerintah Kota Palopo mengoptimalkan ruang serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan, melalui sinergi 3 aktor utama yakni *Private Sector, Civil Society Sector dan Public Sector*. Dengan meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penekanan pada pengarusutamaan ini pada aspek :

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Melalui penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah; penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah; kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); kebijakan antikorupsi; penyelenggaraan SPIP; pengembangan sistem e-procurement, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat.

Olehnya Pemerintah Kota Palopo melaksanakan :

1. Menegakkan dan mengimplementasikan sistem disiplin PNS di lingkungan instansi pemerintah, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pelanggaran disiplin yang mendapatkan sanksi;
2. Mengembangkan dan menerapkan pakta integritas di kalangan pejabat pemerintah;
3. Mewajibkan pejabat untuk menyampaikan LHKPN;
4. Mewajibkan pelaporan gratifikasi;
5. Meningkatkan penerapan SPIP sesuai dengan pedoman;
6. Meningkatkan penerapan pelaksanaan pengadaan dengan menggunakan e-procurement;
7. Meningkatkan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK;
8. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya;
9. Meningkatkan penerapan/implementasi sistem pengaduan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

“PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)”

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dilaksanakan melalui penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik; penerapan maklumat pelayanan; penerapan pelayanan terpadu satu pintu; penerapan manajemen pengaduan; percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; serta pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik.

Pemerintah Kota Palopo melaksanakan :

1. Meningkatkan penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik;
2. Meningkatkan penerapan maklumat pelayanan pada unit pelayanan publik;
3. Memperluas penerapan pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Pemkot Palopo
4. Meningkatkan penerapan manajemen pengaduan pada unit pelayanan publik di lingkungan OPD Palopo
5. Menyusun dan melaksanakan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Menyusun dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik pada unit pelayanan di lingkungan Pemkot Palopo, yang ditandai dengan meningkatnya unit penyelenggara pelayanan publik yang dinilai baik.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

“PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)”

Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan instansi pemerintah; pemantapan kualitas manajemen SDM; pengembangan dan penerapan e-government; Pengembangan sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK; serta penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pemerintah Kota Palopo melaksanakan :

1. Meningkatkan upaya restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi pemerintah;
2. Menyusun SOP di tiap Perangkat Daerah sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana;
3. Meningkatkan kualitas manajemen SDM, yang ditandai dengan penyediaan dan pengimplementasian sistem rekrutmen pegawai yang transparan dan berbasis merit/kompetensi, sistem penilaian kinerja yang terukur, sistem promosi dan penempatan dalam jabatan struktural yang terbuka, transparan, berbasis merit/kompetensi, sistem diklat berbasis merit, dan kompetensi;
4. Telah Menyusun rencana penerapan e-government;
5. Menyediakan dan pengimplementasian sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK;
6. Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI (PP7)

4.7. Integrasi dan Dukungan Terhadap Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kota Palopo merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta

meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Palopo, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, anak-remaja-dewasa, termasuk kaum difabel dan warga minoritas lain (masyarakat miskin).

Pengarusutamaan gender ini dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
2. Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan

Olehnya Pemerintah Kota Palopo akan melaksanakan penguatan pada :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, antara lain melalui (a) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; (b) pemerataan guru yang proporsional untuk seluruh jenjang pendidikan; (c) pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi; (d) penyehatan lingkungan; dan (e) pembinaan dan pengembangan budaya politik;
2. Meningkatkan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, antara lain melalui (a) penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; (b) pembinaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja perempuan; dan (c) pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, antara lain melalui (a) penyediaan data pendidikan untuk perumusan kebijakan daerah; (b) penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender; dan (c) optimalisasi penegakan peraturan daerah Kota Palopo No 3 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender.

Program Pembangunan Daerahnya adalah :

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KESETARAAN (PP3)

4.8. Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Gambaran Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021 Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Kota Palopo
Urusan Pendidikan	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar
Urusan Kesehatan	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar
Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar
Urusan Perumahan & Pemukiman	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Kota Palopo
Urusan Sosial	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar
Urusan Trantibbumlinmas	Pengembangan Infrastruktur & Pelayanan Dasar

Standar pelayanan minimal pada tahun 2021 tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Palopo. Prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran SPM adalah "Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar", yang menjadi prioritas ke tiga dalam RKPD Tahun 2021. Target pencapaian SPM Kota Palopo Tahun 2021 diuraikan dalam Bab VI RKPD 2021.

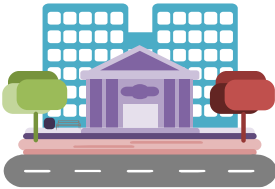
4.9. Inovasi Daerah

Untuk meningkatkan motivasi berinovasi, Pemerintah Kota Palopo juga akan melaksanakan lomba inovasi tingkat perangkat daerah dan menjadikan diklat kepemimpinan sebagai laboratorium lahirnya agen perubahan dan inovasi pelayanan melalui proyek perubahan. Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo adalah sebagai berikut :

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
1	BANUA MERAH	Singkatan dari Bantuan Anak Meraih Harapan. Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 30 SUL-SEL 2019
		
2	AIR DISUNTIK RESAH PUN TEROBATI	Layanan Air Bersih Bagi Masyarakat menggunakan Tanki jika mengalami kesulitan air dari jaringan PDAM. Dilaksanakan oleh PDAM Kota Palopo. KIPP (Sinovik) TOP 99 Indonesia 2017, dan sampai saat ini terus dikembangkan jangkauan dan kapasitas layanannya
		
3	"SI CAKEP"	Dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan ini merupakan system jemput bola, terkait pembuatan akta kelahiran atas bayi yang baru lahir. Aparatur Disduk Capil akan langsung mendatangi ibu dan bayinya di rumah sakit untuk membuatkan Kartu Identitas Penduduk, misalnya akte kelahiran. Sehingga ketika keluar dari perawatan Rumah Sakit, sang bayi langsung sudah memiliki akta kelahiran.
		

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
2	SIMPONI CERIA	Adalah singkatan dari ""Sistem Pendaftaran Online, Cepat, Ringkas dan Akurat". Pasien yang bermaksud mendapatkan pelayanan di RSUD baik pasien poliklinik, BPJS maupun regular, dimudahkan untuk mendaftar melalui aplikasi Whats Up dengan menggunakan Nama, NIK sesuai KTP. Inovasi layanan ini dilaksanakan untuk mengurangi jadwal tunggu yang ada di RSUD dan memberikan kepastian waktu pelayanan kesehatan terhadap pasien.
3	"GO RIDE"	Adalah Gerakan Optimalisasi Geriatri Terpadu dan Efektif. Layanan ini dikhususkan bagi para lanjut usia yang membutuhkan layanan kesehatan. Mengingat kemampuan fisik pasien lansia yang umumnya sudah sangat terbatas, dokterlah yang akan mendatangi pasien di poli sesuai dengan keluhan kesehatannya. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.
4	SIPAKAINGA	Sistem Paket Layanan Pasien Paru Terintegrasi. Layanan kesehatan ini khusus bagi penderita paru yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ini diluncurkan dalam rangka memberikan "keamanan" bagi pasien lain di RSUD, terhadap keberadaan pasien dengan gangguan kesehatan yang bersifat infeksius. Olehnya pasien dengan gangguan kesehatan infeksius pelayanannya akan dipisah dengan pasien lain, termasuk dalam hal pengambilan obat. Pelaksana layanan ini adalah RSUD Sawerigading.
5	"BUGAR"	Adalah singkatan dari "Budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat". Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
6	"BU KB" 	Adalah singkatan dari "Bukan Kader Biasa". Dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo 
7	JEMPUT-ANTAR (JA) 	Dilaksanakan oleh UPTD Kesehatan Adalah sebuah layanan kesehatan berbasis mobile yang pelayannya
8	"SI MUD" 	Sistem yang Memudahkan yang dipraktekan oleh Kecamatan Bara
9	"SI ANTAR" 	Diinisiasi oleh Kelurahan Amassangan. Dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan public yang menjadi kewenangan kelurahan
10	MABASSA 	Layanan Perizinan "Mudah, Akuntabel, Bersahabat, Adil, Sederhana, Simpatik dan Aman" oleh DPMPTSP.

No	Nama Inovasi	Gambaran Inovasi
11	FOUR IN ONE	Pelaksanaan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelayanan administrasi penduduk
		
12	"INI KAWAN"	Pelaksana Oleh Inspektorat Daerah Kota Palopo. Adalah sinonim dari "Klinik KOnsultasi Pengawasan"
		
13	JEMPUT-ANTAR, LAYANAN WEEKEND & TOL INFO	Oleh DPMPTSP. Fokus Layanan adalah memberikan pelayanan jemput-antar berkas pengurusan perizinan
		
14	LORONG TAMAN SURGA	Oleh Puskesmas Kelurahan Pontap dalam menjaga kesehatan masyarakat
		

BAB. V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Palopo pada tahun 2021 disusun dengan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diuraikan dalam table sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Postur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Tahun 2021 Kota Palopo**

No	Uraian	Tahun 2021
II	PENDAPATAN DAERAH	976,647,944,762.22
	Pendapatan Asli Daerah	165,083,412,244.79
	Pajak Daerah	34,860,944,165.02
	Retribusi Daerah	9,074,168,785.55
	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	7,496,932,396.00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	113,651,366,898.22
	Pendapatan Transfer	791,114,012,367.43
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	734,812,177,622.00
	Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah	56,301,834,745.43
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,450,520,150.00
	Pendapatan Hibah	20,450,520,150.00
	Dana Darurat	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-
II	BELANJA DAERAH	1,016,725,889,757.98
	BELANJA OPERASI	729,492,547,251.21
	Belanja Pegawai	481,253,671,824.35
	Belanja Barang dan Jasa	228,186,674,005.41
	Belanja Bunga	6,015,108,931.45
	belanja Subsidi	
	Belanja Hibah	11,124,392,490.00
	Belanja Bantuan Sosial	2,912,700,000.00
	BELANJA MODAL	285,233,342,506.77
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,000,000,000.00
	BELANJA TRANSFER	-
III	PEMBIAYAAN DAERAH	65,560,691,254.24
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	52,819,318,125.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	52,819,318,125.00
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12,741,373,129.24
	Penyertaan Modal Daerah	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utrang yang Jatuh Tempo	12,741,373,129.24
	PEMBIAYAAN NETTO	40,077,944,995.76

Berikut adalah table rekapitulasi jumlah program prioritas perangkat daerah, kegiatan dan pagu indikatif untuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan :

Tabel 5.2
Rekapitulasi Jumlah Program Prioritas Perangkat Daerah, Kegiatan dan Pagu Indikatif serta Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		79	298	332,927,468,623	
1	Pendidikan	8	103	64,530,919,423	DINAS PENDIDIKAN
2	Kesehatan	19	97	89,997,898,500	DINAS KESEHATAN
		2	3	35,095,000,000	RSUD
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	14	23	109,072,591,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman	7	17	5,618,380,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	5	13	2,248,452,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		4	10	6,233,678,200	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		4	6	5,227,974,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5	7	3,654,165,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	Sosial	11	19	11,248,410,000	DINAS SOSIAL
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		72	175	80,865,075,974	
1	Tenaga Kerja	6	8	1,624,610,000	DINAS TENAGA KERJA
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	4	10	1,355,184,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	Pangan	4	10	745,837,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
4	Pertanahan	4	6	10,428,600,000	DINAS PERTANAHAN
5	Lingkungan Hidup	6	22	32,071,343,774	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
6	Administasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	3	14	2,233,250,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7	Pengendalian Penduduk & KB	4	12	13,786,980,200	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8	Perhubungan	5	10	2,474,514,000	DINAS PERHUBUNGAN
9	Komunikasi & Informatika	5	6	1,171,950,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10	Koperasi, usaha kecil & menengah	4	10	1,660,170,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11	Penanaman Modal	5	7	3,417,610,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
12	Kepemudaan & Olahraga	6	24	3,304,660,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
13	Statistik & Persandian	4	9	677,900,000	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK
14	Kebudayaan	5	15	4,051,160,000	DINAS KEBUDAYAAN
15	Perpustakaan	3	7	1,374,302,000	DINAS PERPUSTAKAAN
16	Kearsipan	4	5	487,005,000	DINAS KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN		28	79	56,456,164,250	
1	Pariwisata	5	14	5,276,011,400	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2	Pertanian	6	26	13,898,300,000	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
3	Perdagangan	4	11	30,410,056,850	DINAS PERDAGANGAN
4	Perindustrian	5	13	1,237,300,000	DINAS PERINDUSTRIAN
5	Transmigrasi	3	1	714,536,000	DINAS TRANSMIGRASI
6	Perikanan	5	14	4,919,960,000	DINAS PERIKANAN
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		71	236	102,732,476,393	
1	Perencanaan Pembangunan	5	18	3,451,535,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Keuangan	4	21	9,747,464,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		4	12	6,875,028,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3	Kepegawaian serta pendidikan & Pelatihan	5	13	6,835,360,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4	Penelitian & Pengembangan	4	7	570,391,000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	Pengawasan	4	9	3,407,686,633	INSPEKTORAT
6	Sekretariat	4	15	10,555,918,000	SEKRETARIAT DPRD
		14	50	36,704,755,360	SEKRETARIAT DAERAH
7	Kecamatan	3	9	1,797,670,000	KECAMATAN WARA SELATAN
		3	12	3,669,507,000	KECAMATAN WARA TIMUR
		3	11	3,214,770,000	KECAMATAN WARA UTARA
		3	11	3,138,600,000	KECAMATAN WARA
		3	10	2,687,950,000	KECAMATAN WARA BARAT
		3	10	2,192,400,000	KECAMATAN BARA
		3	8	2,179,260,000	KECAMATAN SENDANA
		3	9	2,229,650,000	KECAMATAN MUNGKAJANG
		3	11	3,474,530,000	KECAMATAN TELLUWANUA
	JUMLAH	250	788	572,981,185,240	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												1,044,227,299,146	1,104,717,236,136			
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												221,553,569,650	227,303,471,089			
				DINAS PENDIDIKAN												221,553,569,650	227,303,471,089			
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								156,446,535,900	157,096,085,650			
1	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			4,400,000	4,620,000			
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 dokumen			2,200,000	2,310,000			
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7 dokumen			2,200,000	2,310,000			
1	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan			155,592,021,900	156,203,845,950			
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Pegawai	1365 Orang			155,397,882,900	156,000,000,000			
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika								157,586,000	165,465,300			
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan Tahunan yang disusun	15 laporan keuangan			36,553,000	38,380,650			
1	1	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dserah									Jumlah laporan pengelolaan aset			12,000,000	12,600,000			
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah aset yang ditata kelolakan	65 unit			12,000,000	12,600,000			
1	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola			33,492,000	35,166,600			
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	200 orang			33,492,000	35,166,600			
1	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			269,780,000	278,269,000			
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	48 Eksemplar			5,280,000	5,544,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah SPPD yang dilaksanakan	35 SPPD			264,500,000	272,725,000				
1	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		432,878,000	454,521,900				
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, cetak dan penggandaan	1500 Surat/jenis/b uah			118,447,000	124,369,350				
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	4 rekening			115,380,000	121,149,000				
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	27 orang			199,051,000	209,003,550				
1	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		101,964,000	107,062,200				
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	53 unit			24,700,000	25,935,000				
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						JuJumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit			28,700,000	30,135,000				
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	81 buah			16,200,000	17,010,000				
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Luas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang pemeliharaan/rehab dibiayai				32,364,000	33,982,200				
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Rata-rata Tingkat Partisipasi pada Pendidikan Usia Dini, dan Pendidikan Dasar									65,044,662,750	70,141,895,889				
1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Peningkatan partisipasi dalam pendidikan sekolah dasar		37,488,588,500	39,838,017,926				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %				Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	50 ruang			19,627,611,350	21,083,991,918				
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %				Jumlah siswa SD yang mengikuti ujian	7500 orang			2,613,690,150	2,744,374,658				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah siswa yang mengikuti lomba	345 orang		105,070,500	110,324,025		
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	450 orang		52,378,500	54,997,425		
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah laporan pendidikan gratis	77 Sekolah		89,838,000	94,329,900		
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	77 sekolah		15,000,000,000	15,750,000,000		
1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											20,911,093,450	23,326,648,123		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			jumlah sarana/prasaran, utilitas SMP yang dibangun	25 sekolah		13,038,416,700	15,060,337,535		
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah siswa yang mengikuti ujian	7500 orang		1,785,022,750	1,874,273,888		
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah laporan yang dievaluasi	25 sekolah		32,495,000	34,119,750		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			jumlah siswa yang mengikuti lomba	350 orang		164,634,000	172,865,700		
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	450 orang		62,333,500	65,450,175		
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			jumlah laporan pendidikan	25 Sekolah		98,798,500	103,738,425		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	25 Sekolah		5,790,800,000	6,080,340,000		
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			jumlah laporan pengelolaan dana BOS	102 lapora		20,910,000	21,955,500		
1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								Peningkatan partisipasi dalam pendidikan anak usia dini			3,237,245,800	3,399,108,090		
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 unit		846,845,800	889,188,090		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilayani	110 orang		3,800,000	3,990,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah PAUD yang menerima dana BOP	120 Paud		2,386,600,000	2,505,930,000	
1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									Peningkatan partisipasi pendidikan non formal/kesetaraan		3,407,735,000	3,578,121,750	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah siswa yang mengikuti Paket A, Paket B dan Paket C	500 orang		26,000,000	27,300,000	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah kelompok/lembaga kursus yang dibina	15 kelompok		13,435,000	14,106,750	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase penduduk Usia 5-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs.	100 %			Jumlah kelompok/lembagayang menerima dana BOP kesetaraan	15 kelompok		3,368,300,000	3,536,715,000	
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Persentase Sekolah yang Memenuhi Rasio Ideal Guru dan Siswa							62,371,000	65,489,550	
1	1	4	2		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											62,371,000	65,489,550	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (%)	100 %			Jumlah satuan pendidikan yang memiliki PTK sesuai kebutuhan	11 data		62,371,000	65,489,550	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											288,652,120,570	324,939,854,472	
					DINAS KESEHATAN											139,228,168,180	128,265,610,000	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah (%)							49,409,587,000	51,280,400,000	
1	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			1,450,000	10,000,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Terlaksananya penyusunan renstra dan renja	1 dokumen		725,000	5,000,000	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Palopo, Wara, Tompotika					Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen evaluasi	1 Dokumen		725,000	5,000,000	
1	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumlah laporan penatausahaan keuangan			47,310,907,000	48,200,000,000	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	600 Orang		47,118,157,000	48,000,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target		
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	350 lap prtgiwb					189,000,000	200,000,000						
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	2 Dokumen					3,750,000	0						
1	2	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				69,600,000	75,000,000						
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Aset yang ditatakelolakan	4 jenis					69,600,000	75,000,000						
1	2	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola				15,450,000	35,000,000						
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	100 Orang					15,450,000	35,000,000						
1	2	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan				220,780,000	599,800,000						
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Langganan Koran/Majalah	4 Surat					5,280,000	24,800,000						
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Perjalanan Dinas (SPPD)	150 Kali					215,500,000	575,000,000						
1	2	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan				7,000,000	9,000,000						
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	3 buah					7,000,000	9,000,000						
1	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				1,725,200,000	2,286,600,000						
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah surat keluar dan surat masuk	13000 Surat					53,400,000	263,000,000						
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening Air,Listrik,Internet yang dibayarkan	65 Rek					772,000,000	1,113,600,000						
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	4 layanan					899,800,000	910,000,000						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											59,200,000	65,000,000				
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	30 unit			2,500,000	5,000,000			
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	30 unit			56,700,000	60,000,000			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)								97,214,528,310	102,051,201,443			
1	2	2	2		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												41,558,697,050	43,679,345,826			
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah RS yang Ditangani (Buah/Thn)	1 unit			16,301,250,000	17,000,000,000			
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Puskesmas yang Ditangani (Buah/Thn)	1 unit			17,248,141,900	17,679,345,826			
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Puskesmas yang Peralatan Kesehatannya yang Diadakan (Unit/Thn)	12 unit			5,014,164,950	6,000,000,000			
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Faskes yang Menerima Obat dan Vaksin (Unit)	1 paket		19,599,654,260	2,995,140,200	3,000,000,000			
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												55,472,431,260	58,171,855,617			
1	02	02	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	12 Puskesmas			10,000,000	10,250,000			
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	12 Puskesmas			659,210,000	659,210,000			
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	12 puskesmas			6,600,000	8,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	12 puskesmas				5,900,000		7,000,000		
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar	12 puskesmas				15,900,000		17,000,000		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	12 puskesmas				5,900,000		7,000,000		
1	02	02	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar	12 puskesmas				8,000,000		8,200,000		
1	02	02	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan DM sesuai standar	12 puskesmas				11,000,000		11,275,000		
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat sesuai standar	12 puskesmas				8,000,000		8,200,000		
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah SDM TB yang ditingkatkan kapasitasnya	12 puskesmas				5,000,000		7,000,000		
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat sesuai standar	12 puskesmas				9,781,327,130		10,025,860,308		
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dilaksanakan (Kali/Thn)	12 puskesmas				6,300,000		8,000,000		
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Layanan Kesehatan Lingkungan yang dilaksanakan (Kali/Thn)	12 puskesmas				23,900,000		25,000,000		
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Posyandu yang Dibina (Buah)	12 puskesmas				2,269,022,000		2,300,000,000		
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upayan Kesehatan Khusus	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Layanan Promotif, Preventif dan Deteksi Dini (Buah)	12 puskesmas				11,690,699,000		12,000,000,000		
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kelurahan yang Menjadi Sasaran Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Kelurahan)	12 puskesmas				200,000,000		44,000,000		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah masyarakat yang premi asuransi kesehatannya ditanggung Pemerintah (Orang/Thn)	48 kelurahan				18,210,450,000		20,000,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah RS UPTD Daerah yang melaksanakan layanan kesehatan (Buah/Thn)	1 tahun				1,800,000,000		2,000,000,000		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Faskes Daerah yang melaksanakan layanan kesehatan (Buah/Thn)	12				9,781,327,130		10,025,860,308		

[illegible]

[illegible]

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Sendana, Semua Kelurahan					Jumlah masyarakat yang premi asuransi kesehatannya ditanggung Pemerintah (Orang/Thn)	1 tahun				402,865,340		420,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Sendana, Semua Kelurahan					Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	1 tahun				92,744,000		100,000,000			
					PUSKESMAS MUNGKAJANG																		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kelurahan					Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	1 tahun				504,000,000		520,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Mungkajang, Semua Kelurahan					Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	1 tahun				132,788,000		140,000,000			
					PUSKESMAS WARU UTARA KOTA																		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Waru Utara, Semua Kelurahan					Jumlah masyarakat yang premi asuransi kesehatannya ditanggung Pemerintah (Orang/Thn)	1 tahun				841,611,000		860,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Waru Utara, Semua Kelurahan					Meningkatnya Pelayanan Masyarakat di Puskesmas	12 puskesmas				123,300,000		130,000,000			
					PUSKESMAS PADANG LAMBE																		
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah masyarakat yang premi asuransi kesehatannya ditanggung Pemerintah (Orang/Thn)	1 tahun				212,000,000		230,000,000			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	1 tahun				105,092,000		120,000,000			
					UPTD JEMPUT ANTAR																		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah fasilitas layanan kesehatan	1 unit				800,000,000		820,000,000			
					UPTD LABKESDA																		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah fasilitas layanan kesehatan	1 unit				103,160,000		120,000,000			
					RSUD SAWERIGADING													149,423,952,390		196,674,244,472			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													30,522,359,000		31,000,000,000			
1	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			30,522,359,000		31,000,000,000			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	375 Orang				30,522,359,000		31,000,000,000			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													118,901,593,390		165,674,244,472			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
1	2	2	2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												28,781,593,390	53,870,244,472		
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	(2021)Pembangsan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Jumlah Alat Kesehatan yang akan diadakan Jumlah Ambulance /Mobil Jenazah/Kendaraan UTD yang diadakan	313 Buah 1 Unit			28,781,593,390	53,870,244,472		
1	2	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												90,120,000,000	111,804,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	(2021)Pembangsan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Bara, Tobulung				jumlah jenis belanja operasional Rumah Sakit	2 Jenis			90,120,000,000	111,804,000,000		
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												161,909,913,950	166,638,865,647		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								37,893,500,500	39,251,146,525		
1	3	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		15,200,000	15,960,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	4 DOKUMEN			11,400,000	11,970,000		
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 DOKUMEN			3,800,000	3,990,000		
1	3	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												6,259,380,000	6,282,070,000		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Pegawai	70 Orang			6,085,980,000	6,100,000,000		
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	4 LAPORANN			100,800,000	105,840,000		
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	66 LAPORAN			72,600,000	76,230,000		
1	3	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset		19,200,000	20,160,000		
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Jumlah aset yang ditatakelolakan	15 UNIT			19,200,000	20,160,000		
1	3	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola		87,000,000	91,350,000		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	85 STELL			37,500,000	39,375,000		
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	10 ORANG			49,500,000	51,975,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
1	3	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah												Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		329,911,000	341,906,550			
1	03	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	48 EKSEMPLAR				5,280,000	5,544,000			
1	03	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah SPPD yang dilaksanakan	90 SPPD				302,131,000	312,737,550			
1	03	01	2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	5 APLIKASI				22,500,000	23,625,000			
1	3	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												Jumlah barang milik daerah yang diadakan		30,275,000,000	31,548,750,000			
1	03	01	2.07 03	Pengadaan Alat Besar			Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah Alat Besar yang akan diadakan	1 UNIT				2,000,000	2,100,000			
1	03	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	12 UNIT				73,000,000	76,650,000			
1	03	01	2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah dan Luas Bangunan gedung kantor lainnya yang diadakan	6 UNIT				30,000,000,000	31,270,000,000			
1	03	01	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah sarana pendukung bangunan rujab	1 Unit				200,000,000	200,000,000			
1	3	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		659,100,000	692,055,000			
1	03	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	4500 SURAT				55,500,000	58,275,000			
1	03	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	6 REKENING				144,000,000	151,200,000			
1	03	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	10 LAYANAN				459,600,000	482,580,000			
1	3	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		248,709,500	258,894,975			
1	03	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	2 UNIT				26,200,000	27,510,000			
1	03	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	60 UNIT				156,009,500	163,809,975			
1	03	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	80 UNIT				16,500,000	17,325,000			
1	03	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung						Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	1 UNIT				50,000,000	50,250,000			
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Luas Wilayah Rawan Banjir dan Kawasan Produktif yang Sarana Prasarana Sumber Daya Airnya Ditangani (Ha)										2,996,000,000	3,141,300,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
1	3	2	2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														2,310,000,000	2,421,000,000			
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Jumlah Tanggul Yang Dibangun	50 Meter				1,000,000,000	1,100,000,000			
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Jumlah Tanggul Yang Dipelihara	2 Titik				805,000,000	810,000,000			
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Panjang Sungai Yang Dinormalisasi	300 Meter				505,000,000	511,000,000			
1	3	2	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														686,000,000	720,300,000			
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					jumlah pembangunan jaringan irigasi	50 Meter				200,000,000	210,000,000			
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					jumlah jalan jringanirigasi	50 Meter				200,000,000	210,000,000			
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					jumlah jaringan irigasi yang dipelihara	50 Meter				200,000,000	210,000,000			
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung										86,000,000	90,300,000			
1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Persentase Rumah Tangga yang Telah Memiliki Akses Terhadap Air Minum (%)									5,527,109,700	5,803,465,185			
1	3	3	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														5,527,109,700	5,803,465,185			
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung										5,527,109,700	5,803,465,185			
1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik									696,799,750	731,639,737			
1	3	5	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														696,799,750	731,639,737			
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung										696,799,750	731,639,737			
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)									5,005,500,000	5,130,760,000			
1	3	6	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota														5,005,500,000	5,130,760,000			
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Jumlah Penyusunan Perencanaan	1 Kegiatan				500,000	510,000			
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung										2,500,000,000	2,625,000,000			
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Jumlah Saluran Drainase yang di Pelihara	10 paket				2,502,500,000	2,502,625,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Jumlah Drainase yang di Pelihara	1 Kegiatan					2,500,000	2,625,000				
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Luas Kawasan Infrastruktur Publik &Strategis Daerah yang Ditangani (Ha)										78,002,500,000	79,302,625,000				
1	3	8	2		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														78,002,500,000	79,302,625,000				
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Jumlah Bangunan Yang Direncanakan	1 Unit					156,000,000,000	158,600,000,000				
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			Kota Palopo, Bara, Tobulung					Jumlah Bangunan yang akan di pelihara	1 Kegiatan					2,500,000	2,625,000				
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Proporsi Panjang Jalan yang Berkondisi Baik (%)										31,285,024,500	32,749,275,725				
1	3	10	2		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota														31,285,024,500	32,749,275,725				
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Panjang Jalan Yang Dibangun	625 Meter					33,015,000,000	36,015,750,000				
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					jumlah jalan yang di rekonstruksi	15 Ruas					20,080,024,500	20,534,025,725				
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					jumlah jalan yang direhab	70 Meter					200,000,000	210,000,000				
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi										95,934,000	100,730,700				
1	3	11	2		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi														95,934,000	100,730,700				
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Tersedia	1 Tahun					167,868,000	176,261,400				
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Tersedia	1 Tahun					24,000,000	25,200,000				
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Rasio Bangunan yang Ber IMB per satuan bangunan										407,545,500	427,922,775				
1	3	12	2		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota														304,345,500	319,562,775				
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Tersedianya	1 Tahun					205,435,500	215,707,275				
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Tersedianya	1 Tahun					98,910,000	103,855,500				
1	3	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														45,000,000	47,250,000				
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Bara, Tobulung					Tersedianya	1 Tahun					45,000,000	47,250,000				
1	3	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota														58,200,000	61,110,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program								Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional		
								Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Bara, Tobutung					Tersedianya	1 Tahun			58,200,000	61,110,000			
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													6,148,099,100	9,223,500,000	
					DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											6,148,099,100	9,223,500,000			
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								3,770,057,000	3,896,427,900			
1	4	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		3,800,000	4,050,000			
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah dokumen renstra, Renja, RKA dan DPA perangkat daerah	6 Dokumen			2,350,000	2,500,000			
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 laporan			1,450,000	1,550,000			
1	4	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan		3,077,059,000	3,167,100,000			
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	40 Orang			3,013,459,000	3,100,000,000			
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	20 laporan			61,600,000	65,000,000			
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Wara, Boting					jumlah laporan keuangan Bulanan, Semesteran, dan Tahunan yang dibuat	18 laporan			2,000,000	2,100,000			
1	4	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset		7,800,000	9,000,000			
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah aset yang ditatakelolakan	297 unit			7,800,000	9,000,000			
1	4	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola		19,000,000	19,000,000			
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Wara, Boting					jumlah pakaian dinas yang diadakan	76 orang			19,000,000	19,000,000			
1	4	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		298,850,000	315,552,500			
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Wara, Boting					jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	10 Buah			1,500,000	1,575,000			
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	18 unit			8,550,000	8,977,500			
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	48 Eks			4,800,000	4,800,000			
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	70 SPPD			284,000,000	300,200,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target		
1	4	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	287,998,000		302,397,900					
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara, Boting						Jumlah surat masuk,surat keluar, ATK,Cetak dan Penggandaan	1000 surat/jenis/buah				58,450,000		61,372,500					
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara, Boting						Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	48 Rek				129,248,000		135,710,400					
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara, Boting						Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	6 Layanan Kantor				100,300,000		105,315,000					
1	4	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	75,550,000		79,327,500					
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara, Boting						Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit				26,500,000		27,825,000					
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	15 unit				3,300,000		3,465,000					
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah peralatan dan mesin kantor yang pemeliharaannya dibiayai	42 unit				15,750,000		16,537,500					
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah dan luas gedung kantor yang pemeliharaannya dibiayai	1 Unit/M2				30,000,000		31,500,000					
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									Rata-rata Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi serta Fasilitas Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Masyarakat Terdampak Program Pemerintah di Kota Palopo					98,320,000		103,236,000					
1	4	2	2		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lahan potensial sebagai lokasi relokasi	61,430,000		64,501,500					
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Dokumen data rumah di lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi program	1 Dokumen				50,880,000		53,424,000					
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Dokumen data lahan-lahan potensial sebagai relokasi perumahan (dok.)	1 Dokumen				10,550,000		11,077,500					
1	4	2	2.1		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													Jumlah kawasan Rusun dan Rusus yang pengelolanya dibina (lokasi)	36,890,000		38,734,500					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah unit pengelola rumah susun (unit)	1 unit			2,750,000	2,887,500				
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Selatan, Takkalala					Jumlah RUSUN / RUSUS yang dikelola (lokasi)	3 lokasi			34,140,000	35,847,000				
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Persentase Kawasan Permukiman serta Permukiman kumuh yang tertangani (%)								2,188,997,100	5,128,574,850				
1	4	3	2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									Jumlah Dokumen kebijakan PKP (Dokumen)			115,780,000	121,569,000				
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah SK Walikota tentang penetapan kawasan kumuh di Kota Palopo (dok. SK)	1 Dokumen SK			55,180,000	57,939,000				
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalis asi Kebijakan Bidang PKP	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah dokumen kebijakan PKP (dok.)	2 Dokumen			60,600,000	63,630,000				
1	4	3	2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									Kawasan kumuh yang tertangani			2,073,217,100	5,007,005,850				
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Utara, Penggoli					Jumlah Dokumen DED dan RAB (dok.)	20 Dokumen			112,437,000	118,058,850				
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Mungkajang, Latuppa					Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani bersumber dari DAK (unit)	67 Unit			1,424,640,100	4,326,000,000				
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Utara, Penggoli					Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab (unit)	9 Unit			500,000,000	525,000,000				
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Dokumen data kawasan kumuh (dok.)	1 Dokumen			36,140,000	37,947,000				
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU								53,950,000	56,647,500				
1	4	5	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun (unit)			53,950,000	56,647,500				
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan SU Perumahan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Dokumen Data PSU Perumahan (dok.)	1 Dokumen			17,850,000	18,742,500				
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah PSU Perumahan yang tersedia (unit)	5 Unit			14,900,000	15,645,000				
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					PSU Perumahan yang terinventarisir untuk diserahkan (unit)	20 unit			21,200,000	22,260,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program									Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target							Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur
1	4	6		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Jumlah pengembang perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi								36,775,000	38,613,750			
1	4	6	2	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil									Jumlah pengembang perumahan yang terverifikasi dan terintegrasi			36,775,000	38,613,750			
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pengembang Perumahan yang tersertifikasi dan teregistrasi dan teregistrasi	20 unit			36,775,000	38,613,750			
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														15,157,572,000	15,493,570,506	
				DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												6,928,425,000	6,954,050,000			
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								4,438,425,000	4,462,950,000			
1	5	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			1,101,000	1,200,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dokumen perencanaan renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	5 Dokumen			526,000	600,000			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen			575,000	600,000			
1	5	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan			4,120,890,000	4,143,550,000			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	50 Orang			4,078,425,000	4,100,000,000			
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Pengelola Penatausahaan, pengujian /verifikasi Keuangan	5 Orang			42,000,000	43,000,000			
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			305,000	350,000			
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan			160,000	200,000			
1	5	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset			7,200,000	7,300,000			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah pegawai sebagai Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Orang			7,200,000	7,300,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja												Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional				
								Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target			Pagu Indikatif (Rp.)			
1	5	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah														Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		105,800,000	106,000,000			
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Langganan Koran/Majalah	3 Edisi					3,960,000	4,000,000				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	38 Kali					101,840,000	102,000,000				
1	5	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														Jumlah barang milik daerah yang diadakan		22,000,000	22,100,000			
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah pengadaan peralatan kantor	4 Unit					22,000,000	22,100,000				
1	5	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		82,434,000	83,100,000			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Kegiatan surat menyurat dapat terencana dengan baik	3500 Lembar					27,234,000	27,300,000				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening yang dibayarkan	2 Rekening					10,200,000	10,300,000				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Pengelola pelayanan umum kantor Kegiatan Makanan dan Minuman rapat terlaksana dengan baik	8 Orang 12 Bulan					45,000,000	45,500,000				
1	5	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		99,000,000	99,700,000			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang membutuhkan Pemeliharaan	1 Unit					26,200,000	26,500,000				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang membutuhkan Pemeliharaan	5 Unit					68,750,000	69,000,000				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Peralatan Kantor yang membutuhkan pemeliharaan	12 Unit					4,050,000	4,200,000				
1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Total Persentase Rata-rata Gangguan Trantibum dan Perda/Perkada yang dapat diselesaikan										2,490,000,000	2,491,100,000				
1	5	2	2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															2,254,800,000	2,255,800,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Personil yang melaksanakan penjagaan Asset Pemerintah	60 Orang/hari					1,093,800,000		1,094,000,000			
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Personil yang melaksanakan Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	118 Orang					1,065,600,000		1,066,000,000			
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Pelatih Beladiri	2 Orang					13,200,000		13,500,000			
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Personil yang melaksanakan Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29 Personil					82,200,000		82,300,000			
1	5	2	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota														235,200,000		235,300,000			
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kasus yang dapat diselesaikan	50 Kasus					235,200,000		235,300,000			
					DINAS PEMADAM KEBAKARAN														4,694,740,000		4,893,120,506			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah											3,310,275,000		3,416,157,256			
1	5	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			2,870,000		3,200,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah dokumen renstr, renja, RKA dan DPAPerangkat Daerah	6 dokumen					1,620,000		1,700,000			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 Laporan					1,250,000		1,500,000			
1	5	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Jumlah laporan penatausahaan keuangan			2,579,510,000		2,640,550,000			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	30 Orang					2,541,990,000		2,600,000,000			
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang											34,800,000		37,500,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
									Capaian Program				Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan					Pagu Indikatif (Rp.)				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target			Pagu Indikatif (Rp.)					
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan Keuangan			1,280,000		1,500,000								
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	14 Laporan Keunagan			1,440,000		1,550,000								
1	5	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset			9,600,000		9,750,000							
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah aset yang ditatakelolakan	13 unit			9,600,000		9,750,000								
1	5	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola			92,625,000		95,000,000							
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah pakaian dinas yang diadaan	76 Orang			92,625,000		95,000,000								
1	5	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			102,400,000		112,000,006							
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah baan bacaan yang dibiayai	12 OrangExamp lar			2,400,000		2,000,006								
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah SPD Yang dilaksanakan	50 kali			100,000,000		110,000,000								
1	5	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan			18,090,000		20,000,000							
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah SPD YJumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan	10 jenis/unit			18,090,000		20,000,000								
1	5	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			454,680,000		483,049,750							
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	15000 surat/jenis/buah			21,385,000		23,000,000								
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang dibiayai	14 rekening			114,200,000		125,000,000								
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang									319,095,000		335,049,750								
1	5	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai			50,500,000		52,607,500							
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajak nya di biayai	20 Unit			21,500,000		21,607,500								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajak di biyai	13 Unit/orang				7,500,000		8,000,000			
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	37 Unit/paketg				6,500,000		7,000,000			
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	3 Unit				15,000,000		16,000,000			
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Persentase Layanan Pengaduan dan Evakuasi yang Dilaksanakan dengan Memenuhi Respon Time 15 Menit									1,384,465,000		1,476,963,250			
1	5	4	2		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										Persentase capaian tingkat waktu tanggap <i>(response time)</i>			1,364,465,000		1,454,963,250			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	50 Kejadian				1,299,965,000		1,364,963,250			
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah penyelamatan dan evakuasi yang tertangani	25 Kejadian				42,000,000		45,000,000			
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Persentase Sumber Daya Manusia yang bersertifikat	20 Orang				22,500,000		45,000,000			
1	5	4	2.1		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia										Persentase kegiatan dan jumlah korban jiwa dan harta benda yang ditangani			20,000,000		22,000,000			
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah dan jenis laporan yang di tangani	50 Kejadian				20,000,000		22,000,000			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													3,534,407,000		3,646,400,000			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									2,686,457,000		2,786,400,000			
1	5	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			5,500,000		6,500,000			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 Dokumen				4,000,000		4,500,000			
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Dokumen				1,500,000		2,000,000			
1	5	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			2,467,407,000		2,536,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program						Pagu Indikatif (Rp.)								
									Tolok Ukur						Target		Tolok Ukur			Target		Tolok Ukur	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	26 Orang			2,435,407,000	2,500,000,000					
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante									31,200,000	35,000,000					
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	3 Laporan Keuangan			800,000	1,000,000					
1	5	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset		6,000,000	8,400,000					
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah aset yang ditatakelolakan	25 Jenis			6,000,000	8,400,000					
1	5	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		9,000,000	12,000,000					
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Eksemplae			9,000,000	12,000,000					
1	5	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		20,700,000	22,000,000					
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	4 Unit			20,700,000	22,000,000					
1	5	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		159,250,000	175,000,000					
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	850 Surat/Jenis/ Buah			3,250,000	5,000,000					
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	3 Rekening			69,000,000	75,000,000					
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	25 Jumlah layanan			87,000,000	95,000,000					
1	5	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		18,600,000	26,500,000					
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit			13,500,000	18,000,000					
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3 Unit			5,100,000	8,500,000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program								Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target		
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Total Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana											847,950,000	860,000,000				
1	5	3	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												150,000,000	160,000,000				
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai	30 Orang				150,000,000	160,000,000				
1	5	3	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana												697,950,000	700,000,000				
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Mungkajang, Murante				Jumlah Tenaga TRC	1 Tahun				697,950,000	700,000,000				
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												8,638,807,000	8,711,950,000				
					DINAS SOSIAL												8,638,807,000	8,711,950,000				
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,735,308,980	2,746,950,000				
1	6	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			2,000,000	2,400,000				
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	3 Dokumen				1,000,000	1,200,000				
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan				1,000,000	1,200,000				
1	6	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan			2,326,007,000	2,329,000,000				
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Pegawai	30 Orang				2,297,807,000	2,300,000,000				
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									26,200,000	26,500,000				
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan yang disusun	2 Laporan keuangan				2,000,000	2,500,000				
1	6	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola			30,000,000	31,000,000				
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	15 orang				30,000,000	31,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target		
1	6	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah											Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			106,327,980	111,700,000						
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	20 buah					2,186,000	2,500,000						
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	3 Eksemplar					3,960,000	4,200,000						
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	38 SPPD					100,181,980	105,000,000						
1	6	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Jumlah barang milik daerah yang diadakan			4,000,000	4,500,000						
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	2 Jenis/unit					4,000,000	4,500,000						
1	6	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			209,574,000	210,350,000						
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	800 surat					43,233,000	43,500,000						
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	9 Rekening					66,600,000	67,000,000						
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	10 Jumlah layanan					99,741,000	99,850,000						
1	6	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			57,400,000	58,000,000						
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit					20,200,000	20,500,000						
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	21 unit					27,800,000	28,000,000						
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	39 unit					8,400,000	8,500,000						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program					Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Luas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang pemeliharaan/rehab dibiayai	50 M2		1,000,000	1,000,000	
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial								178,200,000	179,500,000	
1	6	2	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											178,200,000	179,500,000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan dan kelompok usaha bersama	4 Kegiatan		140,000,000	141,000,000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah PMKS yang melakukan konseling melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12 Konseling		38,200,000	38,500,000	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase yang Menerima Layanan Sesuai Standar								241,209,270	243,000,000	
1	6	4	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											209,402,410	211,000,000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah alat bantu yang diberikan kepada PMKS	4 unit		24,000,000	25,000,000	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang diberikan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	116 orang		185,402,410	186,000,000	
1	6	4	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											31,806,860	32,000,000	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang diberikan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	44 orang		31,806,860	32,000,000	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial								5,267,200,000	5,324,000,000	
1	6	5	2		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											10,000,000	11,000,000	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapat penanganan	50 orang		10,000,000	11,000,000	
1	6	5	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											5,257,200,000	5,313,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi dalam DTKS	81.407 Jiwa				412,800,000		413,000,000			
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Fakir Miskin yang tervalidasi dalam DTKS	4000 KK				4,844,400,000		4,900,000,000			
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang Menerima Layanan Pasca Bencana, Sesuai Standar									158,888,750		160,000,000			
1	6	6	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													47,888,750		48,000,000			
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan peralatan dan logistik	100 Jiwa				47,888,750		48,000,000			
1	6	6	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													111,000,000		112,000,000			
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Taruna Siaga Bencana yang tanggap darurat bencana alam maupun bencana sosial	13 orang				111,000,000		112,000,000			
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Luas Taman Makam Pahlawan yang Dikelola (Ha)									58,000,000		58,500,000			
1	6	7	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													58,000,000		58,500,000			
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Kegiatan 1 Lokasi				58,000,000		58,500,000			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													105,408,585,800		109,016,036,001			
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													3,997,146,000		4,047,882,000			
					DINAS TENAGA KERJA													3,997,146,000		4,047,882,000			
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									2,469,346,000		2,497,542,000			
2	7	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		1,500,000		252,000			
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	7 Dokumen				100,000		105,000			
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan				1,400,000		147,000			
2	7	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Jumlah laporan penatausahaan keuangan		2,105,346,000		2,111,940,000			
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	20 Orang				1,997,146,000		2,000,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target		
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	155 laporan					104,300,000	109,000,000						
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumah Laoran Akhir Tahun Yang Disusun	1 laporan					1,300,000	140,000						
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD														2,600,000	2,800,000						
2	7	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				7,200,000	7,900,000						
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Aset Yang Ditata Kelolakan	80 unit					7,200,000	7,900,000						
2	7	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan				145,918,000	159,600,000						
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Bahan Bacaan Yang di Biayai	2 eksemplar					2,400,000	2,600,000						
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah SPPD Yang Dilaksanakan	52 kali					143,518,000	157,000,000						
2	7	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan				40,500,000	42,000,000						
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jenis dan Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan	8 unit					40,500,000	42,000,000						
2	7	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				109,900,000	114,000,000						
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak	350 surat					20,000,000	21,000,000						
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet Yang Dibiayai	5 rekening					28,800,000	30,000,000						
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Layanan Kantor Yang Dilaksanakan	5 Jumlah Layanan					61,100,000	63,000,000						
2	7	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai				58,982,000	61,850,000						
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Kendaraan Dinas yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiayai	1 unit					26,646,000	28,000,000						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program											Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Kendaraan Dinas yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiayai	28 unit			25,436,000	26,500,000			
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dibiayai	22 buah			5,900,000	6,300,000			
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting									1,000,000	1,050,000			
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Tingkat produktivitas tenaga kerja								1,188,200,000	1,195,000,000			
2	7	3	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												1,188,200,000	1,195,000,000			
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Yang Dilaksanakan	10 kegiatan			1,188,200,000	1,195,000,000			
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota								216,300,000	226,340,000			
2	7	4	2		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												10,800,000	11,340,000			
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Izin LPTKS Yang Diterbitkan	3 izin			800,000	840,000			
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah LPTKS Yang Mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian	5 Lembaga			10,000,000	10,500,000			
2	7	4	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												205,500,000	215,000,000			
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	200 orang			55,500,000	57,500,000			
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Pencari Kerja Yang Terserap	500 orang			150,000,000	157,500,000			
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)								123,300,000	129,000,000			
2	7	5	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												90,900,000	95,000,000			
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Tenaga Kerja Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perusahaan	150 orang			55,000,000	57,000,000			
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	500 Perusahaan			35,900,000	38,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
2	7	5	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota														32,400,000	34,000,000			
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	19 Kasus				32,400,000	34,000,000			
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															2,828,271,000	2,973,364,999		
				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															2,828,271,000	2,973,364,999		
2	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										2,232,007,250	2,287,661,687			
2	8	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			2,700,000	2,950,000			
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat Daerah	7 Dokumen				900,000	950,000			
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5 Laporan				1,800,000	2,000,000			
2	8	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Jumlah laporan penatausahaan keuangan			1,948,471,000	1,962,000,000			
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	25 Orang				1,890,271,000	1,900,000,000			
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													56,400,000	60,000,000			
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													900,000	1,000,000			
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Laporan				900,000	1,000,000			
2	8	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											Jumlah laporan pengelolaan aset			15,000,000	17,000,000			
2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah aset yang ditatakelolakan	111 Unit				15,000,000	17,000,000			
2	8	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah											Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			70,325,000	80,873,750			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	20 Buah					1,000,000	1,150,000			
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	36 Eksemplar					3,960,000	4,554,000			
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	50 SPPD					65,365,000	75,169,750			
2	8	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan				36,000,000	41,400,000			
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	5 Jenis/Unit					5,000,000	5,750,000			
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	7 Jenis/Unit					31,000,000	35,650,000			
2	8	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				127,500,000	146,625,000			
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	670 surat/Jenis/buah					12,525,000	14,403,750			
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang di biayai	2 Rekening					31,575,000	36,311,250			
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	2 Jumlah layanan					83,400,000	95,910,000			
2	8	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				32,011,250	36,812,937			
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	4 Unit					26,711,250	30,717,937			
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	13 Buah					3,300,000	3,795,000			
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1 Unit/M2					2,000,000	2,300,000			
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan										14,554,390	16,737,548			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target		Pagu Indikatif (Rp.)
2	8	2	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												14,554,390	16,737,548			
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah lembaga PUG dan anak dikota palopo	49 SKPD		14,554,390	16,737,548			
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Rasio Kasus KDRT (per 10.000 Rumah Tangga)								447,776,860	514,943,389			
2	8	3	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota												28,066,860	32,276,889			
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan	40 Orang		28,066,860	32,276,889			
2	8	3	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												419,710,000	482,666,500			
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah tenaga terlatih dalam pelayanan kasus dan pendampingan korban KDRT	4 Orang		19,710,000	22,666,500			
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan								400,000,000	460,000,000			
2	8	4		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin yang Mendapatkan Pembinaan Kualitas Keluarga								23,100,000	26,565,000			
2	8	4	2	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota												23,100,000	26,565,000			
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah Orang yang datang konsultasi keluarga	25 Orang		23,100,000	26,565,000			
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Jumlah Sistem Data Gender dan Anak yang Berfungsi Baik								14,020,000	16,123,000			
2	8	5	2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												14,020,000	16,123,000			
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah informasi gender dan anak	1 Paket		14,020,000	16,123,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Angka Tngkat Pemenuhan Indikator Kota Layak Anak										96,812,500	111,334,375	
2	8	6	2	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														96,812,500	111,334,375	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDW dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah skor KLA	670 Point					82,572,500	94,958,375	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDW dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah Forum anak	58 Forum Anak					14,240,000	16,376,000	
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														2,772,422,000	2,875,222,000	
				DINAS KETAHANAN PANGAN														2,772,422,000	2,875,222,000	
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										2,080,242,500	2,142,022,000	
2	9	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu				3,000,000	3,300,000	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 Dokumen					2,000,000	2,100,000	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 Dokumen					1,000,000	1,200,000	
2	9	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan				1,724,722,000	1,727,022,000	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	25 Orang					1,679,522,000	1,679,522,000	
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	900 Lpj					86,400,000	90,000,000	
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	14 Laporan Keuangan					2,000,000	2,500,000	
2	9	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				6,600,000	7,500,000	
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah aset yang ditatakelolakan	8 Jenis					6,600,000	7,500,000	
2	9	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola				16,500,000	20,000,000	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	30 Orang					9,000,000	12,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		
2	9	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	1 Orang			7,500,000	8,000,000			
2	9	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			105,590,000	136,700,000			
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	8 Jenis			1,000,000	1,200,000			
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang pemeliharannya dibiayai	5 Jenis			2,350,000	2,500,000			
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	2 Eksemplar			2,640,000	3,000,000			
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah							Jumlah SPPD yang dibiayai	42 SPPD			99,600,000	130,000,000			
2	9	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Jumlah barang milik daerah yang diadakan			16,000,000	21,000,000			
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah jenis mebel yang diadakan	2 Jenis			5,000,000	6,000,000			
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	4 Unit			11,000,000	15,000,000			
2	9	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			144,030,500	152,000,000			
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	5 jenis			41,230,500	45,000,000			
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	3 rekening			38,100,000	40,000,000			
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	8 layanan			64,700,000	67,000,000			
2	9	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai			63,800,000	74,500,000			
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharannya dibiayai	1 unit			26,300,000	28,000,000			
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya dibiayai	18 unit			21,000,000	25,000,000			
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	24 buah			6,500,000	7,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah dan Luas gedung kantor yang pemeliharannya dibiayai	1 Unit				10,000,000		14,500,000			
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Persentase Rumah Tangga/Keluarga Miskin, yang Melaksanakan Diversifikasi Pangan (%/Thn)									629,137,000		661,200,000			
2	9	3	2		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										Tingkat sarana dan pendukung Lumbung Pangan			47,450,000		55,000,000			
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dokumen				12,600,000		15,000,000			
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah penyuluhan sumber pangan lokal	16 Kelompok				17,800,000		20,000,000			
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					jumlah rekomendasi yang dihasilkan	1 dokumen				7,750,000		9,000,000			
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					jumlah data harga dan pasokan pangan	4 dokumen				9,300,000		11,000,000			
2	9	3	2		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			581,687,000		606,200,000			
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah data untuk penyusunan pola konsumsi pangan Kota Palopo	1 Dokumen				5,400,000		6,200,000			
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah							Jumlah pekarangan dan kelompok yang dimanfaatkan	12 Kelompok				576,287,000		600,000,000			
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)									23,650,000		27,000,000			
2	9	4	2		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan										Terdeteksinya daerah rawan pangan dan rentan pangan			14,850,000		17,000,000			
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Peta				14,850,000		17,000,000			
2	9	4	2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota										Penanganan cadangan pangan masyarakat & pemerintah daerah			8,800,000		10,000,000			
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah Lumbung Pangan dan cadangan pangan	2 Kelompok				8,800,000		10,000,000			
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan									39,392,500		45,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
2	9	5	2		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota														Tingkat pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar asal tumbuhan	39,392,500	45,000,000		
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah pertemuan, pemantauan dan pengawasan tim terpadu	4 Pengawasan					5,900,000	7,500,000			
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah dokumen registrasi pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen					6,600,000	7,500,000			
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengujian sampel pangan segar	12 Kali					26,892,500	30,000,000			
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														12,506,383,000	12,856,750,000			
					DINAS PERTANAHAN														12,506,383,000	12,856,750,000			
2	10	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										2,394,389,000	2,443,100,000			
2	10	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		4,000,000	4,200,000			
2	10	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah dokumen rentra, renja, rka dan dpa perangkat daerah	6 dokumen					1,500,000	1,600,000			
2	10	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 laporan					2,500,000	2,600,000			
2	10	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Jumlah laporan penatausahaan keuangan		2,134,074,000	2,179,800,000			
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	25 Orang					2,104,874,000	2,150,000,000			
2	10	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe											27,200,000	27,500,000			
2	10	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Salekoe					jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	15 laporan keuangan					2,000,000	2,300,000			
2	10	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												Jumlah laporan pengelolaan aset		6,600,000	6,800,000			
2	10	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Salekoe					jumlah aset yang di tatakelola	147 unit					6,600,000	6,800,000			
2	10	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												Administrasi ASN PD yang dikelola		20,585,000	21,000,000			
2	10	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah pakaian dinas yang diadakan	25 orang					12,500,000	12,800,000			
2	10	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 orang					8,085,000	8,200,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	10	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah															48,895,000	49,200,000		
2	10	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah bahan bacaac yang dibiayai	3 exsemplar					3,780,000	3,900,000		
2	10	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah SPPD yang dilaksanakan	53 SPPD					45,115,000	45,300,000		
2	10	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Jumlah barang milik daerah yang diadakan				10,000,000	10,500,000		
2	10	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jenis dan jumlah mebel yang diadakan	5 jenis/unit					2,500,000	2,700,000		
2	10	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 jenis/unit					7,500,000	7,800,000		
2	10	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				154,505,000	155,100,000		
2	10	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penogaandaan	50000 surat/buah					12,000,000	12,300,000		
2	10	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah rekening air dan listrik dan internet	2 rekening					6,930,000	7,100,000		
2	10	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	27 orang					135,575,000	135,700,000		
2	10	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				15,730,000	16,500,000		
2	10	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajak	1 unit					11,630,000	11,800,000		
2	10	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Salekoe					jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajak	11 unit					1,100,000	1,400,000		
2	10	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah peralatan dan mesin	7 buah					3,000,000	3,300,000		
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan										6,600,000	6,800,000		
2	10	2	2		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														6,600,000	6,800,000		
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah pemberian izin penanaman modal dan berusaha	3 buah					6,600,000	6,800,000		
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Persentase Penyelesaian Konflik Tanah Pemerintah (%)										31,920,000	32,500,000		
2	10	4	2		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota														31,920,000	32,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah data sengketa, konflik dan perkara	20 data			8,220,000		8,500,000			
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	3 kasus			23,700,000		24,000,000			
2	10	5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee								10,000,000,000		10,300,000,000			
2	10	5	2		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												10,000,000,000		10,300,000,000			
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota	11 bidang tanah			10,000,000,000		10,300,000,000			
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				Cakupan Luas Lahan Pemerintah yang Bersertifikat (%)								60,354,000		60,650,000			
2	10	6	2		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												60,354,000		60,650,000			
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					jumlah inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah	10 sertifikat			60,354,000		60,650,000			
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi (%)								8,100,000		8,400,000			
2	10	9	2		Penerbitan Izin Membuka Tanah												8,100,000		8,400,000			
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					pemanfaatan tanah negara	10 bidang tanah			8,100,000		8,400,000			
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal								5,020,000		5,300,000			
2	10	10	2		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota												5,020,000		5,300,000			
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	(2021) Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					adanya pemanfaatan dan penggunaan tanah	10 bidang tanah			5,020,000		5,300,000			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												21,256,348,500		22,582,754,752			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN												21,256,348,500		22,582,754,752			
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								7,477,181,783		7,665,317,603			
2	11	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		29,800,000		35,000,000			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana							Jumlah dokumen renstra,renja,RKA dan DPA Perangkat daerah	7 dokumen			29,800,000		35,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
										Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	11	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Jumlah laporan penatausahaan keuangan		6,626,062,000	6,675,000,000			
2	11	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	88 Orang					6,503,562,000	6,550,000,000			
2	11	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											122,500,000	125,000,000			
2	11	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah												Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		352,759,884	413,780,000			
2	11	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	12 buah					2,565,000	3,500,000			
2	11	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	15 buah					4,473,000	5,000,000			
2	11	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 exemplar					5,280,000	5,280,000			
2	11	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	65 SPPD					340,441,884	400,000,000			
2	11	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												Jumlah barang milik daerah yang diadakan		30,600,000	35,000,000			
2	11	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jenis dan Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Disediakan	9 Jenis/Unit					30,600,000	35,000,000			
2	11	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		322,385,899	332,894,903			
2	11	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah surat masuk,surat keluar,atk,cetak dan pengadaan	1371 surat/jenis/buah					81,419,325	85,000,000			
2	11	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah rekening air,listrik,dan internet yang dibiayai	4 rekening					118,566,574	124,494,903			
2	11	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana							Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	9					122,400,000	123,400,000			
2	11	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai		115,574,000	173,642,700			
2	11	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit					30,000,000	31,500,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program							Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional			
									Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target		Pagu Indikatif (Rp.)
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	2 unit			70,574,000	79,142,700		
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	20 unit			5,000,000	51,500,000		
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	300 M2			10,000,000	11,500,000		
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Jumlah Kajian Lingkungan yang Disusun (Buah)								26,200,000	28,000,000		
2	11	2	2	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota												26,200,000	28,000,000		
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen			26,200,000	28,000,000		
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Status Kualitas Air dan Udara								138,977,000	143,000,000		
2	11	3	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												138,977,000	143,000,000		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Predikat ADIPURA	1 Penghargaan			70,547,000	73,000,000		
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang dikelola/ditangani (Ha)								2,897,759,900	3,042,647,895		
2	11	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota												2,897,759,900	3,042,647,895		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola	36 RTH			2,897,759,900	3,042,647,895		
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Luas Sarana dan Prasarana Limbah B3 yang Berfungsi Baik (Ha)								13,100,000	14,000,000		
2	11	5	2		Penyimpanan Sementara Limbah B3												13,100,000	14,000,000		
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah B3 dan Limbah B3 yang dikelola	12 laporan			13,100,000	14,000,000		
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Persentase Izin tentang Lingkungan yang Diproses Tepat Waktu (%)								49,900,000	55,000,000		
2	11	6	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												49,900,000	55,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah koordinasi dokumen amdal	1 dokumen			49,900,000	55,000,000			
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Persentase Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Aktif								17,575,000	18,453,758			
2	11	8	2		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												17,575,000	18,453,758			
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	17 kali			17,575,000	18,453,758			
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Luas Ruang Terbuka Hijau pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah yang Dikelola dengan Baik (Ha/Thn)								41,395,000	43,464,750			
2	11	9	2		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												41,395,000	43,464,750			
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	4 Sekolah			41,395,000	43,464,750			
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu								28,454,000	30,000,000			
2	11	10	2		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota												28,454,000	30,000,000			
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan	8 kali			28,454,000	30,000,000			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Persentase cakupan area pelayanan (%)								10,565,805,817	11,542,870,746			
2	11	11	2		Pengelolaan Sampah												10,565,805,817	11,542,870,746			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah petugas kebersihan	500 orang			6,718,344,292	7,004,261,507			
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah pengelolaan TPS3R dan bank sampah	25 org			168,730,000	177,165,500			
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kendaraan operasional yang dikelola	150 buah			3,023,279,751	3,649,443,739			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												10,847,213,500	11,400,000,000			
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								6,374,711,500	6,400,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah pengelolah PJU	125 org					6,374,711,500	6,400,000,000			
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kota Palopo yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)										4,472,502,000	5,000,000,000			
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Prasarana Jalan yang dibangun	5 Unit					3,000,000,000	3,500,000,000			
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah PJU yang dibiayai	1 PJU					1,472,502,000	1,500,000,000			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														21,256,348,500	22,582,754,752			
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Status Kualitas Air dan Udara										138,977,000	143,000,000			
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah dokumen mutu air dan udara	2 Dokumen					68,430,000	70,000,000			
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Persentase cakupan area pelayanan (%)										10,565,805,817	11,542,870,746			
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	(2021) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah TPA yang dikelola	1 TPA					655,451,774	712,000,000			
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														4,256,031,000	4,440,650,000			
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														4,256,031,000	4,440,650,000			
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										3,157,535,000	3,302,350,000			
2	12	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan				2,536,503,000	2,562,750,000			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	30 Orang					2,479,733,000	2,500,000,000			
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	1000 laporan					47,520,000	52,000,000			
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah laporan akhir tahun	3 dokumen					4,750,000	5,250,000			
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD			Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah laporan keuangan bulanan semesteran dan tahunan	2 laporan					4,500,000	5,500,000			
2	12	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				7,200,000	8,700,000			
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah aset yang di tata kelolakan	11 laporan					7,200,000	8,700,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program								Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola		54,300,000	62,500,000			
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah pakaian dinas yang di adakan	70 stel			22,200,000	25,500,000			
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah asn yang mengikuti bimtek	7 orang			32,100,000	37,000,000			
2	12	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		192,760,000	236,200,000			
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah bahan dokumen	3 dokumen			5,760,000	6,200,000			
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					perjalanan dinas luar daerah	150 kali			187,000,000	230,000,000			
2	12	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		45,500,000	60,000,000			
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jenis dan jumlah peralatan mesin yang disediakan	10 unit			45,500,000	60,000,000			
2	12	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		235,711,000	270,000,000			
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah surat masuk keluar atk cetak pengandaan	467 surat			96,600,000	110,000,000			
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah rekening air listrik internet yang di biayayai	4 rekening			74,136,000	83,000,000			
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah pelayanan jasa umum kantor	35 orang			64,975,000	77,000,000			
2	12	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		85,561,000	102,200,000			
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah kendaraan dinas yang di bayarkan pajak	10 unit			45,700,000	55,200,000			
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah kendaraan dinas yang di bayarkan pajak	10 unit			2,400,000	3,000,000			
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah peralatan yang di pelihara	14 buah			17,461,000	21,000,000			
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					pemeliharaan gedung kantor	1 buah			20,000,000	23,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan							
								Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional			
								Tolok Ukur								Target			Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Penataan Administrasi Kependudukan									849,076,000	865,800,000								
2	12	2	2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk			184,776,000	190,000,000								
2	12	02	2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					pencatatan dan penatausahaan pendaftaran penduduk	10000 laporan				39,725,000	42,500,000								
2	12	02	2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					pelayanan pendaftaran penduduk	10000 laporan				145,051,000	147,500,000								
2	12	2	2	Penataan Pendaftaran Penduduk										Penataan tata cara perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk			664,300,000	675,800,000								
2	12	02	2.02 01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah pelaporan adminduk	10000 laporan				7,400,000	8,100,000								
2	12	02	2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					pengadaan KTP,el KIA,Tinta ribbon dan kertas HVS 80 gram	20000 keping				656,900,000	667,700,000								
2	12	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan									78,060,000	85,900,000								
2	12	3	2	Pelayanan Pencatatan Sipil													64,085,000	70,400,000								
2	12	03	2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah penatausahaan penerbitan dokumen	100 laporan				19,375,000	22,700,000								
2	12	03	2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah pelayanan pencatatan sipil	100 laporan				44,710,000	47,700,000								
2	12	3	2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										Jumlah pengawasan, pembinaan, penyelenggara catatan sipil			13,975,000	15,500,000								
2	12	03	2.03 01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah penatausahaan penerbitan dokumen	100 laporan				13,975,000	15,500,000								
2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Jumlah Sistem Informasi Kependudukan yang Berfungsi Baik									171,360,000	186,600,000								
2	12	4	2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan													22,150,000	24,300,000								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					pengolaan data kependudukan	100 laporan			22,150,000	24,300,000				
2	12	4	2		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												12,050,000	15,500,000				
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah pelaporan adminduk	100 laporan			12,050,000	15,500,000				
2	12	4	2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									Jumlah pengolahan administrasi kependudukan			137,160,000	146,800,000				
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah koordinasi antar lembaga	80 kegiatan			27,560,000	31,100,000				
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan								Jumlah pemanfaatan data kependudukan	100			109,600,000	115,700,000				
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											10,303,236,100	10,406,100,000					
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											10,303,236,100	10,406,100,000					
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								4,293,300,000	4,393,600,000				
2	14	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			6,186,000	8,500,000				
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dokumen renstra,renja,RKA da DPA perangkat daerah	4 dokumen			5,000,000	6,000,000				
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 laporan			1,186,000	2,500,000				
2	14	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan			3,633,025,000	3,675,000,000				
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	40 Orang			3,559,069,000	3,600,000,000				
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	1300 laKuitansi por an			71,310,000	72,000,000				
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	14 laporan			2,646,000	3,000,000				
2	14	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset			10,200,000	10,500,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target		
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah aset yang ditatakelolakan	112 unit		10,200,000	10,500,000	
2	14	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola		86,889,000	97,000,000	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	45 pasang		45,935,000	46,000,000	
2	14	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	42 orang		10,954,000	11,000,000	
2	14	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	4 orang		15,000,000	20,000,000	
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3 orang		15,000,000	20,000,000	
2	14	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		196,000,000	228,100,000	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7 buah		2,000,000	2,500,000	
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah bacaan yang dibiayai	2 eksampler		2,400,000	3,600,000	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	20 sppd		170,000,000	200,000,000	
2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolanya	5 aplikasi		21,600,000	22,000,000	
2	14	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Jumlah barang milik daerah yang diadakan		130,000,000	135,000,000	
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	6 unit		130,000,000	135,000,000	
2	14	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		131,000,000	132,500,000	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	900 surat/jenis/b uah		13,000,000	13,500,000	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	3 rekening		45,000,000	45,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika											73,000,000		73,500,000		
2	14	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai					100,000,000		107,000,000		
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit						25,000,000		26,000,000		
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	112 unit						45,000,000		50,000,000		
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	50 buah						15,000,000		15,500,000		
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	300 uni//m2						15,000,000		15,500,000		
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Rata-rata jumlah anak per keluarga										35,000,000		35,000,000		
2	14	2	2		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														35,000,000		35,000,000		
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah dokumen grand dedain yang dibuat	1 dokumen						35,000,000		35,000,000		
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Persentase PUS yang Ber KB (%)										5,946,704,100		5,948,500,000		
2	14	3	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														4,440,289,000		4,441,000,000		
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah balai penyuluhan KKBPK	9 uptd						4,440,289,000		4,441,000,000		
2	14	3	2		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														1,461,547,100		1,462,000,000		
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang diadakan	6 jenis						1,461,547,100		1,462,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
										Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	14	3	2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													44,868,000	45,500,000				
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah pelayanan kesertaan ber-KB yang terlayani	2 pelayanan			44,868,000	45,500,000				
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera I yang Meningkat Menjadi Keluarga Sejahtera (%)								28,232,000	29,000,000				
2	14	4	2		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga												28,232,000	29,000,000				
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKS yang dibentuk dan dibina	50 kelompok			28,232,000	29,000,000				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												7,073,211,000	7,354,281,250				
					DINAS PERHUBUNGAN												7,073,211,000	7,354,281,250				
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								5,942,663,000	6,199,106,250				
2	15	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			1,000,000	2,500,000				
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara, Amasangan					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 Dokumen			500,000	600,000				
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 Laporan			500,000	1,900,000				
2	15	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan			5,420,411,000	5,451,010,000				
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	70 Orang			5,373,211,000	5,400,000,000				
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	809 Laporan			46,200,000	48,510,000				
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan			500,000	600,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	16 Laporan Keuangan				500,000		1,900,000				
2	15	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											Jumlah laporan pengelolaan aset			9,600,000		9,600,000			
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah aset yang ditatakelolakan	1541 Unit				9,600,000		9,600,000				
2	15	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola			10,000,000		30,000,000				
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	1 Orang				10,000,000		30,000,000				
2	15	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			64,233,750		160,280,000				
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	50 Buah				5,000,000		5,000,000				
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Eksampler				5,280,000		5,280,000				
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	16 SPPD				53,953,750		150,000,000				
2	15	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan			50,942,250		204,000,000				
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	2 Unit				11,500,000		4,000,000				
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	3 Unit				39,442,250		200,000,000				
2	15	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			259,691,625		226,836,000				
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	1400 Surat				34,943,625		25,096,000				
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	8 Rekening				69,192,000		63,540,000				
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	14 Layanan				155,556,000		138,200,000				
2	15	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai			126,784,375		114,880,250				
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah Kendaraan dinas yang Pemeliharaan dan Pajaknya dibiayai	1 Unit				26,624,250		25,624,250				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	17 Unit			65,170,125	56,250,000			
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	33 Buah			14,017,000	11,006,000			
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	29663 M2			20,973,000	22,000,000			
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				Persentase Layanan Angkutan Darat								1,056,468,000	1,080,175,000			
2	15	2	2.1		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor												121,000,000	133,500,000			
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	800 Unit			86,000,000	93,500,000			
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Bermotor yang dibiayai	10 Unit			35,000,000	40,000,000			
2	15	2	2.1		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota												679,100,000	694,825,000			
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah Pengaturan Dan Rekayasa Lalu Lintas	204 Kali			76,000,000	79,800,000			
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah Rambu Rambu Yang Terpasang	350 Buah			113,500,000	119,175,000			
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah Pelaksanaan Pengendalian	372 Kali			489,600,000	495,850,000			
2	15	2	2.1		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan												256,368,000	251,850,000			
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	480 Kali			256,368,000	251,850,000			
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				Persentase Usaha Pelayaran Kewenangan Daerah yang Berizin								74,080,000	75,000,000			
2	15	3	2		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota												74,080,000	75,000,000			
2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan		Kota Palopo, Wara Utara, Batupasi					Jumlah Kapal GT 7 yang memiliki izin	79 Unit			74,080,000	75,000,000			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												3,370,345,700	3,629,692,000			
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												3,370,345,700	3,629,692,000			
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								2,284,175,700	2,429,692,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2	16	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														3,393,000	5,000,000		
2	16	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen	3 Dokumen					2,333,000	3,000,000		
2	16	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen	2 Dokumen					1,060,000	2,000,000		
2	16	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Jumlah laporan penatausahaan keuangan			1,954,253,000	1,960,592,000		
2	16	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Samua Kecamatan, Samua Kelurahan					Jumlah Pegawai	20 Orang					1,906,392,000	1,906,392,000		
2	16	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Orang	8 Orang					46,200,000	52,000,000		
2	16	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD														1,661,000	2,200,000		
2	16	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											Jumlah laporan pengelolaan aset			6,600,000	6,600,000		
2	16	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Orang	1 Orang					6,600,000	6,600,000		
2	16	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											Administrasi ASN PD yang dikelola			28,950,000	47,500,000		
2	16	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Stell	21 stell					6,450,000	7,500,000		
2	16	01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Aparatur	3 Orang					22,500,000	40,000,000		
2	16	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah											Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			92,583,700	156,000,000		
2	16	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Exmp	3 Exmp					3,960,000	6,000,000		
2	16	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	50 SPPD					88,623,700	150,000,000		
2	16	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Jumlah barang milik daerah yang diadakan			51,500,000	74,000,000		
2	16	01	2.07 05	Pengadaan Mebel	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah meubeleu yang diadakan	6 buah					12,000,000	22,000,000		
2	16	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah peralatan yang diadakan	7 unit					39,500,000	52,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
										Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	16	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			119,896,000	142,000,000				
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Surat	450 Surat			18,251,000	22,000,000				
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Rekening	3 Rekening			25,200,000	35,000,000				
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Pengelolah	13 Orang			76,445,000	85,000,000				
2	16	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			27,000,000	38,000,000				
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Mobil Jabatan	1 unit			12,500,000	17,500,000				
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	2 unit			8,000,000	12,000,000				
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					jumlah peralatan yang dipelihara	9 unit			2,500,000	3,500,000				
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					luas gedung kantor yang dipelihara	240 m2			4,000,000	5,000,000				
2	16	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota								189,470,000	235,000,000				
2	16	2	2		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												189,470,000	235,000,000				
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah OPD	49 OPD			4,800,000	7,000,000				
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah media dan Konten yang dikelola	1 Konten			12,000,000	24,000,000				
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah berita	450 Berita			56,400,000	75,000,000				
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Kelompok yang dibina	30 kelompok			106,020,000	112,000,000				
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah peralatan studio	3 jenis			10,250,000	17,000,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program							Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
2	16	3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi							896,700,000	965,000,000				
2	16	3	2	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											6,500,000	7,500,000				
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting				jumlah menara telekomunikasi yang diawasi	70 menara			6,500,000	7,500,000				
2	16	3	2	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											890,200,000	957,500,000				
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Boting				jumlah layanan/aplikasi egovernment	15 Aplikasi			350,000,000	350,000,000				
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Boting				jumlah Aplikasi yang dikembangkan	5 Aplikasi			535,800,000	600,000,000				
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Boting				jumlah Dokumen	1 dokumen			4,400,000	7,500,000				
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											3,778,799,000	4,017,850,000				
				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												3,778,799,000	4,017,850,000			
2	17	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah							2,970,645,000	3,167,850,000				
2	17	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		2,800,000	2,800,000				
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika				jumlah dokumen renstra,renja,RKA,DPA perangkat daerah	7 dokumen			2,800,000	2,800,000				
2	17	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan		2,530,845,000	2,583,100,000				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Pegawai	25 Orang			2,449,745,000	2,500,000,000				
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika				jumlah laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	1150 laporan			76,100,000	77,100,000				
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										2,600,000	3,000,000				
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										2,400,000	3,000,000				
2	17	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset		6,600,000	7,200,000				
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah asset yang ditatakelolakan	105 unit			6,600,000	7,200,000				
2	17	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola		9,500,000	15,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 orang				9,500,000		15,000,000			
	2		1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan				166,005,000		227,750,000		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	101 buah				2,474,000		3,000,000			
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	42 buah				5,581,000		5,750,000			
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	4746 lembar				13,420,000		13,500,000			
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 exemplar				5,280,000		5,500,000			
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	125 SPPD				139,250,000		200,000,000			
2	17	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan			6,600,000		75,000,000			
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	12 unit				6,600,000		75,000,000			
2	17	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			214,495,000		218,500,000			
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah surat masuk, suratkeluar dan atk	1750 jenis				42,129,000		43,500,000			
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening air, listrik, internet yang dibiayai	6 rekening				89,700,000		90,000,000			
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	12 bulan				82,666,000		85,000,000			
	2		1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			33,800,000		38,500,000			
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kendaraan yang pemeliharaan dan pajaknyadibiayai	6 unit				26,300,000		27,000,000			
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	33 unit				5,000,000		6,500,000			
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah dan luas kantor dipelihara	2 unit				2,500,000		5,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	17	3		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya								10,800,000	15,000,000			
2	17	3	2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota												10,800,000	15,000,000			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah KSP/USP Koperasi yang dalam Pemeriksaan dan pengawasan	292 Koperasi			10,800,000	15,000,000			
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Persentase Koperasi yang Sehat (%/Thn)								13,850,000	19,000,000			
2	17	4	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											13,850,000	19,000,000			
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Koperasi yang dalam pengawasan dan penilaian	292 Koperasi			10,800,000	15,000,000			
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Kopersasi yang mendapatkan penghargaan	38 Koperasi			3,050,000	4,000,000			
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Persentase Usaha kepariwisataan dan ekraf yang tergabung dalam koperasi (%)								9,150,000	10,000,000			
2	17	5	2		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											9,150,000	10,000,000			
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan	60 Koperasi			9,150,000	10,000,000			
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Angka Persentase Koperasi yang Aktif (%/Thn)								10,600,000	11,000,000			
2	17	6	2		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota											10,600,000	11,000,000			
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Koperasi yang mendapatkan pembinaan / pendampingan	60 Koperasi			10,600,000	11,000,000			
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (%)								451,904,000	482,500,000			
2	17	7	2		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											451,904,000	482,500,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target			
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah data base yang tersedia	1 dokumen		22,600,000	23,000,000		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan Usaha mikro	12 kegiatan		392,529,000	420,000,000		
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam pengembangan usahanya	100 usaha Mikro		5,800,000	6,000,000		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Usaha mikro yang dikembangkan	100 usaha Mikro		5,800,000	6,000,000		
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	1 kegiatan		25,175,000	27,500,000		
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha Kecil (%/Tahun)							311,850,000	312,500,000		
2	17	8	2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											311,850,000	312,500,000		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam pengembangan usahanya	120 umkm		311,850,000	312,500,000		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												6,499,579,000	5,325,000,000	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												6,499,579,000	5,325,000,000	
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah							5,386,706,000	4,750,000,000		
2	18	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		807,500	1,000,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	6 dokumen		407,500	500,000		
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 Laporan		400,000	500,000		
2	18	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan		3,666,141,000	3,601,000,000		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	40 Orang		3,593,451,000	3,600,000,000		
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	6 Laporan		72,000,000	500,000		
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	12 Laporan		690,000	500,000		
2	18	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset		9,600,000	500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah aset yang ditatakelolakan	12 Unit			9,600,000	500,000					
2	18	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			149,780,000	201,000,000					
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	12 Eksemplar			5,280,000	500,000					
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	40 SPPD			130,100,000	200,000,000					
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta penggelolaannya	3 Aplikasi			14,400,000	500,000					
2	18	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			1,474,777,500	871,000,000					
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	1000 surat/jenis/buah			264,577,500	500,000					
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang dibiayai	12 rekening			343,200,000	500,000					
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	7 jumlah layanan			867,000,000	870,000,000					
2	18	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			85,600,000	75,500,000					
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit			19,000,000	19,500,000					
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	6 Unit			44,900,000	50,000,000					
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	15 Unit			16,700,000	500,000					
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1 Unit			5,000,000	5,500,000					
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Per 100 Juta Nilai PMDN)								41,400,000	42,000,000					
2	18	2	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota												41,400,000	42,000,000					
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Tersedianya peta potensi dan peluang usaha	1 dokumen			41,400,000	42,000,000					
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang Masuk per Tahun (%/Tpn)								155,000,000	160,000,000					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program										Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	
2	18	3	2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												155,000,000	160,000,000		
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kegiatan Promosi yang dilaksanakan penanaman modal	3 Jenis Izin			155,000,000	160,000,000		
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Angka Pertumbuhan Jumlah Investor di Daerah (%)								593,900,000	371,500,000		
2	18	4	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											593,900,000	371,500,000		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Layanan Perizinan Daerah yang Dikelola	5000 Jenis Izin			370,200,000	370,500,000		
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah pemohon yang memenuhi komitmen perizinan dan non perizinan	1000 orang			172,000,000	500,000		
2	18	4	2		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											150,000,000	0		
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan			Jumlah nilai berskala nasional (PMDN/PMA)	546 juta							150,000,000	0		
2	18	4	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											593,900,000	371,500,000		
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Jenis Perizinan Daerah yang Ditangani dan Dikelola	20 Jenis Izin			51,700,000	500,000		
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase Investor dan Penanam Modal di Daerah yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan								322,573,000	1,500,000		
2	18	5	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											322,573,000	1,500,000		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	36 Kegiatan			45,600,000	500,000		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	11 Kegiatan			185,773,000	500,000		
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	48 Kegiatan			91,200,000	500,000		

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
							Capaian Program								Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
							Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											5,828,823,000	6,712,782,000	
				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											5,828,823,000	6,712,782,000	
2	19	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								2,912,293,000	3,112,500,000	
2	19	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		2,250,000	3,000,000	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA perangkat Daerah	7 dokumen		1,500,000	2,000,000	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Lakip Perangkat Daerah	1 Laporan		750,000	1,000,000	
2	19	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan		2,431,123,000	2,477,000,000	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	25 Orang		2,364,823,000	2,400,000,000	
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Yang diverifikasi	750 Laporan		64,800,000	75,000,000	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran yang disusun	1 Laporan		750,000	1,000,000	
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran yang disusun	1 Laporan		750,000	1,000,000	
2	19	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset		20,400,000	20,400,000	
2	19	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Aset yang ditatakelolahkan	5 Aset		20,400,000	20,400,000	
2	19	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		123,600,000	238,900,000	
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Aset yang ditatakelolahkan	24 Buah		3,700,000	4,500,000	
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Bahan Bacaan Yang Dibiayai	2 Eksemplar		2,400,000	2,400,000	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah SPPD Yang dilaksanakan	60 Kali		117,500,000	232,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program							Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	19	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		44,600,000	52,000,000				
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jenis dan Jumlah Meubel yang diadakan	15 Unit			17,500,000	22,000,000				
2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jenis dan Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	6 Unit			27,100,000	30,000,000				
2	19	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		224,320,000	240,000,000				
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, ATK, Cetak dan Penggandaan	1200 Surat			35,020,000	40,000,000				
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibiayai	3 Rekening			22,240,000	25,000,000				
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	5 Layanan			167,060,000	175,000,000				
2	19	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai		66,000,000	81,200,000				
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit			26,200,000	26,200,000				
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	5 Unit			19,800,000	25,000,000				
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai pemeliharaannya	32 Unit			12,000,000	15,000,000				
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat	Kota Palopo, Wara, Lagaligo					JUmlah dan luar gedung kantor yang dipelihara	300 m2			8,000,000	15,000,000				
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)								2,608,675,000	2,877,000,000				
2	19	2	2		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											1,133,375,000	1,377,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Pemuda yang mengikuti seleksi pemuda pelopor	50 Orang			64,300,000		70,000,000						
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Peserta Pelatihan keterampilan, kewirausahaan serta yang mengikuti bimtek kewirausahaan	30 Orang			51,450,000		100,000,000						
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Data yang dihasilkan	20 Data			19,000,000		24,000,000						
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan yang dibangun, direhab dan dipelihara	2 Unit			566,000,000		570,000,000						
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Pemuda yang dibina	76 Orang			500,000,000		710,000,000						
2	19	2	2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,475,300,000		1,500,000,000						
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Ormas yang menerima hibah Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan kreatifitas pemuda, temu wicara dan jumlah kegiatan kepemudaan	3 Ormas 20 Orang			1,475,300,000		1,500,000,000						
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Jumlah Event Olahraga yang Dilaksanan untuk Mendukung Kepariwisataan (Kali/Tahun)								307,855,000		723,282,000						
2	19	3	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												77,775,000		85,000,000						
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti event ditingkat propinsi	5 Cabor			77,775,000		85,000,000						
2	19	3	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi												34,655,000		145,000,000						
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah olahragawan berbakat yang dibina	19 Orang			22,950,000		132,000,000						
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah data yang dihasilkan	20 Data			11,705,000		13,000,000						
2	19	3	2.1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi												195,425,000		493,282,000						
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah orang yang mengikuti pemassalan olahraga dan olahraga rekreasi	2500 Orang			88,295,000		373,282,000						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target			Pagu Indikatif (Rp.)				
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun, direhab dan dipelihara	6 Unit					107,130,000	120,000,000						
					DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK														2,441,955,000	2,482,055,000						
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														2,418,155,000	2,455,555,000						
2	20	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										2,337,264,200	2,371,555,000						
2	20	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			3,600,000	4,600,000							
2	20	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah dokumen renstra,renja,RKA dan DPA perangkat daerah	5 dokumen				3,200,000	4,000,000							
2	20	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3 laporan				400,000	600,000							
2	20	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			1,977,855,000	1,979,455,000							
2	20	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	25 Orang				1,941,955,000	1,941,955,000							
2	20	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Laporan pertanggungjawaban yg diverifikasi	3 laporan				34,800,000	36,000,000							
2	20	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan keuangan bulanan,semesteran dan Tahunan yg disusun	2 laporan				1,100,000	1,500,000							
2	20	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset			19,800,000	23,000,000							
2	20	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah aset yang ditatakelolakan	4 org				19,800,000	23,000,000							
2	20	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola			23,500,000	25,000,000							
2	20	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	5 orang				23,500,000	25,000,000							
2	20	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			105,600,000	119,000,000							
2	20	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah komponen instalasi listrik yg diadakan	5 buah				2,500,000	3,500,000							
2	20	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah surat masuk,keluar,atk,cetak dan penggandaan	25 buah				3,000,000	4,500,000							
2	20	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah bahan bacaan yg dibiayai	3 eksampler				5,100,000	6,000,000							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		
2	20	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah SPPD yang dilaksanakan	60 kali			95,000,000	105,000,000			
2	20	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		46,000,000	50,500,000			
2	20	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yg diadakan	1 unit			18,000,000	19,500,000			
2	20	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jenis dan jumlah mebel yang diadakan	1 jenis			5,000,000	6,000,000			
2	20	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jenis dan jumlah peralatan dan mesin yg disediakan	4 jenis			23,000,000	25,000,000			
2	20	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		111,309,200	113,500,000			
2	20	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	900 surat			13,009,200	15,000,000			
2	20	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah rekening air, listrik dan internet yg dibiayai	3 rekening			44,200,000	45,500,000			
2	20	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah layanan kantor yg dilaksanakan	5 org			54,100,000	53,000,000			
2	20	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		49,600,000	56,500,000			
2	20	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah kendaraan dinas yg pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit			21,100,000	23,000,000			
2	20	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah kendaraan dinas operasional yg pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	6 unit			1,000,000	2,000,000			
2	20	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah peralatan dan mesin lainya yg dibiayai	5 unit			1,000,000	2,000,000			
2	20	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah aset yang ditatakelolakan	3 unit			1,500,000	2,500,000			
2	20	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah dan luas gedung kantor yg dipelihara	1 unit			25,000,000	27,000,000			
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Angka Tingkat Ketersediaan Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah sesuai Permendagri 86 (%)								80,890,800	84,000,000			
2	20	2	2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota												80,890,800	84,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah perangkat daerah yg aktif dalam updating data sektoral perangkat daerah	49 OPD					32,598,800	33,000,000			
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					jumlah Buku data statistik perekonomian kota palopo	60 eksampler					22,466,000	24,000,000			
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah buku data statistik potensi wilayah kota palopo	60 eksampler					25,826,000	27,000,000			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														23,800,000	26,500,000			
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Persentase Perangkat daerah yang pengelolaan Informasi sesuai SOP (%)										23,800,000	26,500,000			
2	21	2	2		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														10,000,000	12,000,000			
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah sistem elektronik yg disertifikasi keamanannya	39 OPD					5,000,000	6,000,000			
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Persentase(%) pengguna terhadap layanan keamanan informasi	39 OPD					5,000,000	6,000,000			
2	21	2	2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														13,800,000	14,500,000			
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Persentase(%) perangkat daerah dalam kirim terima berita melalui jaring Komunikasi (JKS)	800 surat					13,800,000	14,500,000			
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														2,527,140,000	2,671,050,000			
					DINAS KEBUDAYAAN														2,527,140,000	2,671,050,000			
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										2,270,720,500	2,393,050,000			
2	22	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			1,661,230	1,750,000			
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	7 Dokumen					926,780	950,000			
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan					734,450	800,000			
2	22	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Jumlah laporan penatausahaan keuangan			1,963,403,770	2,039,700,000			
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	25 Orang					1,927,140,000	2,000,000,000			
2	22	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo											34,800,000	38,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Laporan Keuangan bulanan,Semesteran dan Tahunan yang disusun	14 Laporan keuangan				1,038,770		1,200,000			
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	13 Laporan Keuangan				425,000		500,000			
2	22	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dserah									Jumlah laporan pengelolaan aset				6,000,000		6,500,000			
2	22	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah aset yang ditatakelolakan	250 unit				6,000,000		6,500,000			
2	22	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola				8,750,000		9,800,000			
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	32 orang				8,000,000		9,000,000			
2	22	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					jumlah Dokumen Anjab,Enjab yang dihasilkan	4 Dokumen				750,000		800,000			
2	22	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan				110,595,000		121,800,000			
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					jumlah dokumen yang digandakan	20000 lembar				4,820,000		5,000,000			
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Langganan Koran/Buku Perundang- Undangan	3 Ekxamplerr				3,600,000		4,800,000			
2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					jumlah Tamu yang Kunjungan	240 orang				1,925,000		2,000,000			
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	100 sppd				100,250,000		110,000,000			
2	22	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Jumlah barang milik daerah yang diadakan				16,000,000		25,000,000			
2	22	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit				16,000,000		25,000,000			
2	22	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				131,494,400		154,000,000			
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					umlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	1350 surat/jenis/buah				8,764,523		9,000,000			
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	4 rekening				33,600,000		45,000,000			
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah layanan kantor yang dibiayai	13 orang				89,129,877		100,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2	22	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai	32,816,100	34,500,000		
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	5 unit				25,150,000	26,000,000		
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	13 buah				5,743,800	6,000,000		
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo										1,922,300	2,500,000		
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Persentase Kelompok budaya binaan yang berpartisipasi dalam event kepariwisataan daerah (%)									172,137,500	185,000,000		
2	22	2	2		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Jumlah event adat yang dilaksanakan (kali/tahun)	46,727,500	50,000,000		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo										28,587,500	30,000,000		
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Kelompok/Pelaku seni dan Budaya yang di bina	20 orang				18,140,000	20,000,000		
2	22	2	2	2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Jumlah pentas kesenian yang dilaksanakan/diikuti (kali/tahun)	125,410,000	135,000,000		
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Pentas Kesenian yang Dilaksanakan/ Diikuti (Kali/Tahun)	5 Kali				125,410,000	135,000,000		
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Persentase Kelompok Kesenian Masyarakat yang Aktif Berpartisipasi dalam Event Kepariwisataaan Daerah									27,978,000	34,000,000		
2	22	3	2		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Jumlah peserta seni tradisional, tari tradisional dan sanggar seni yang dibina	27,978,000	34,000,000		
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Seni dan Budaya Tradisional yang di lestarikan	5 Seni Tradisional				27,978,000	34,000,000		
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Jumlah Event Pameran Sejarah yang Dilaksanakan (Kali/Tahun)									28,369,000	30,000,000		
2	22	4	2		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												Jumlah karya budaya yang dilestarikan	28,369,000	30,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Karya Seni dan Budaya yang dilestarikan	6 Seni Tradisional					28,369,000	30,000,000			
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Luas Lokasi Cagar Budaya yang Dikelola (Ha)										27,935,000	29,000,000			
2	22	5	2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									Jumlah cagar budaya yang pengelolaannya berbasis kemitraan (buah)					27,935,000	29,000,000			
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Lagaligo					Jumlah Cagar yang dilindungi	53 Cagar Budaya					27,935,000	29,000,000			
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														3,164,861,000	3,258,781,000			
					DINAS PERPUSTAKAAN														3,164,861,000	3,258,781,000			
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										2,835,261,000	2,909,781,000			
2	23	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu					4,075,000	4,300,000			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah dokuman renstra, renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	7 Dokumen					3,400,000	3,600,000			
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 laporan					675,000	700,000			
2	23	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan					2,320,061,000	2,320,461,000			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah Pegawai	30 Orang					2,298,861,000	2,298,861,000			
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %									19,800,000	20,000,000			
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan Keuangan					705,000	850,000			
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran yang disusun	1 Laporan Keuangan					695,000	750,000			
2	23	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset					8,400,000	8,500,000			
2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah aset yang ditatakelola	2 Laparon unit					8,400,000	8,500,000			
2	23	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola					27,500,000	32,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
2	23	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	4 Orang				12,500,000	15,000,000				
2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 Orang				15,000,000	17,000,000				
2	23	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan				93,900,000	124,000,000				
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	3 Eksemplar				3,900,000	4,000,000				
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah SPPD yang dilaksanakan	15 SPPD				90,000,000	120,000,000				
2	23	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Jumlah barang milik daerah yang diadakan				23,000,000	30,000,000				
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jenis dan Jumlah mebel yang diadakan	2 Jenis/unit				11,000,000	15,000,000				
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	2 Jenis/unit				12,000,000	15,000,000				
2	23	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				146,375,000	167,520,000				
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah surat masuk dan keluar atk, cetak dan penggandaan	700 Surat/Jenis/ B uah				21,230,000	25,000,000				
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	5 Rekening				44,520,000	47,520,000				
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	24 Layanan				80,625,000	95,000,000				
2	23	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				211,950,000	223,000,000				
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021)Pembembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah kendaraan dinas dipelihara dan pajaknya dibiayai	3 Unit				14,350,000	16,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan pajaknya dibiayai	3 Unit				17,300,000	20,000,000			
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	21 Buah				5,300,000	7,000,000			
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %			Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1 Unit/M2				175,000,000	180,000,000			
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Persentase Perpustakaan di Palopo yang Aktif (%)									329,600,000	349,000,000			
2	23	2	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Pengelolaan Perpustakaan					284,650,000	295,000,000			
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Sentuh Pustaka	22 Sekolah/Kelu rahan				5,500,000	7,500,000			
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Melakukan supervisi dan membina tenaga pustakawan yang ada pada perpustakaan sekolah dan kelurahan	8 Sekolah/Kelu rahan				2,000,000	2,500,000			
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah bahan pustaka yang dikelola dan dilestarikan	2 Kegiatan				254,150,000	260,000,000			
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Pelaksanaan pekan perpustakaan	1 Kegiatan				23,000,000	25,000,000			
2	23	2	2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat					44,950,000	54,000,000			
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah layanan operasional perpustakaan keliling	120 Sekolah				37,500,000	45,000,000			
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Pelaksanaan kegiatan lomba story telling	30 Peserta				7,450,000	9,000,000			
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													1,956,821,000	1,981,821,000			
					DINAS KEARSIPAN													1,956,821,000	1,981,821,000			
2	24	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									1,877,069,800	1,898,082,240			
2	24	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu					4,512,000	4,737,600			
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													2,256,000	2,368,800			
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													2,256,000	2,368,800			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
2	24	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			1,487,921,000	1,489,476,000				
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik						Jumlah Pegawai	20 Orang				1,456,821,000	1,456,821,000				
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				Jumlah Pegawai	3 Orang				23,100,000	24,255,000				
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan	4 Kegiatan				8,000,000	8,400,000				
2	24	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset			14,700,000	15,435,000				
2	24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				Jumlah aset yang ditata kelolakan	3 orang				14,700,000	15,435,000				
2	24	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola			10,000,000	10,500,000				
2	24	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 orang				10,000,000	10,500,000				
2	24	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			109,315,300	114,781,065				
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				Jumlah komponen Instalasi listrik yang diadakan	3 Buah				750,000	787,500				
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				jumlah bahan bacaan yang di biayai	36 Eksemplair				3,960,000	4,158,000				
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				jumlah sppd yang dilaksanakan	1 tahun				104,605,300	109,835,565				
2	24	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan			112,400,000	118,020,000				
2	24	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang di adakan	1 unit				21,400,000	22,470,000				
2	24	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				Jenis dan jumlah mebel yang diadakan	6 unit				48,000,000	50,400,000				
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	5 unit				43,000,000	45,150,000				
2	24	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			93,436,500	98,108,325				
2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung				jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, Cetak, dan Penggandaan	200 Surat				21,936,500	23,033,325				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program											Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						Jumlah Internet	12 Bulan		6,600,000	6,930,000			
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						Jumlah Layanan kantor yang dilaksanakan	5 Layanan		129,800,000	136,290,000			
2	24	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai			44,785,000	47,024,250			
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya di biayai	3 Unit		25,000,000	26,250,000			
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit		17,285,000	18,149,250			
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di biayai	10 Unit		2,500,000	2,625,000			
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Sistem Arsip Baku (%)								45,000,000	47,250,000			
2	24	2	2		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												27,000,000	28,350,000			
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						Perda dan Perwal	4 dokumen		16,500,000	17,325,000			
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	700 arsip		3,400,000	3,570,000			
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						Pengawasan arsip dinamis	1 Kegiatan		7,100,000	7,455,000			
2	24	2	2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota												14,500,000	15,225,000			
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						Akuisisi, pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	47 OPD		14,500,000	15,225,000			
2	24	2	2		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota												3,500,000	3,675,000			
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung						jumlah perangkat daerah yang menerapkan E-Arsip	10 OPD		3,500,000	3,675,000			
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat								34,751,200	36,488,760			
2	24	3	2		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun												24,400,000	25,620,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program							Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pagu Indikatif (Rp.)
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung					Penilaian dan penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	3 Kegiatan			24,400,000	25,620,000	
2	24	3	2		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota												10,351,200	10,868,760	
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Malatuntung					Penilaian dan penetapan autentitas arsip statis sesuai persyaratan penjamin keabsahan arsip	1 Kegiatan			10,351,200	10,868,760	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												35,444,558,000	40,153,434,000	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												5,210,072,000	5,269,022,000	
					DINAS PERIKANAN												5,210,072,000	5,269,022,000	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									4,124,864,000	4,140,222,000	
3	25	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		2,150,000	2,350,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, dan DPA PD yang disusun	7 Dokumen			1,100,000	1,200,000	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja PD yang dibuat	1 Dokumen			1,050,000	1,150,000	
3	25	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan		3,505,732,000	3,506,492,000	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	45 Orang			3,434,522,000	3,434,522,000	
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	700 Laporan			69,300,000	70,000,000	
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah laporan keuangan yang disusun	3 Laporan			1,910,000	1,970,000	
3	25	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola		0	0	
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	0 Orang			0	0	
3	25	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola		261,584,750	279,680,000	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Komponen Listrik yang diadakan	26 Buah			0	0	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	0 Buah			0	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Bahan Bacaan yang di biayai	4 Eksemplar				5,280,000	5,480,000				
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	80 SPPD				256,304,750	274,200,000				
3	25	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan			87,490,000	76,700,000				
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jenis dan mebel yang dibeli Jumlah mebel yang dibeli	2 Jenis 39 Unit				24,575,000	24,700,000				
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli	11 Unit 6 Jenis				62,915,000	52,000,000				
3	25	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			168,377,250	171,900,000				
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Surat masuk, Surat keluar, ATK, cetak dan pengadaan Jumlah Surat masuk, Surat keluar, ATK, cetak dan pengadaan Jumlah Surat masuk, Surat keluar, ATK, cetak dan pengadaan	5 Buah 32 Jenis 1500 Surat				32,594,250	32,700,000				
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang di biayai	3 Rekening				45,540,000	46,700,000				
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	9 layanan				90,243,000	92,500,000				
3	25	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			99,530,000	103,100,000				
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah kendaraan dinas jabatan yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit				26,150,000	27,000,000				
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	28 Unit				36,180,000	37,900,000				
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	19 Unit				6,200,000	6,900,000				
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	1 unit 15 m2				31,000,000	31,300,000				
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Thn)									83,346,000	86,900,000				
3	25	3	2		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota													29,150,000	30,300,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target		
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah kelompok nelayan yang dibina	30 Kelompok		12,400,000	13,200,000	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Kelompok yang difasilitasi	30 Kelompok		16,750,000	17,100,000	
3	25	3	2		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)											54,196,000	56,600,000	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah layanan TPI	1 lokasi		54,196,000	56,600,000	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)							437,459,000	454,550,000	
3	25	4	2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil											30,670,000	32,050,000	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Kelompok yang dibina	20 Kelompok		15,470,000	16,100,000	
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Kelompok yang didampingi/difasilitasi	30 Kelompok		15,200,000	15,950,000	
3	25	4	2		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											406,789,000	422,500,000	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah dokumen data statistik	4 dokumen		21,000,000	22,000,000	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang produktif	5 unit		48,700,000	51,000,000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah produksi bibit ikan unggul	55556 Ekor		361,439,000	375,000,000	
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton/Thn)							564,403,000	587,350,000	
3	25	6	2		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil											8,150,000	8,500,000	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah data	12 dokumen		8,150,000	8,500,000	
3	25	6	2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											19,411,000	20,100,000	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah produk yang memenuhi persyaratan / standar	4 Produk		19,411,000	20,100,000	
3	25	6	2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota											536,842,000	558,750,000	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalae					Jumlah Pemasar/Pemasok Ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	5 Pemasok		6,550,000	7,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Timur, Ponjalee						Jumlah kelompok yang difasilitasi	5 Kelompok				530,292,000	551,750,000			
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														3,454,479,000	3,471,279,000			
					DINAS PARIWISATA														3,454,479,000	3,471,279,000			
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										3,291,104,000	3,305,079,000			
3	26	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		1,200,000	1,300,000			
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan						Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	4 Dokumen				600,000	650,000			
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan						Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 Laporan				600,000	650,000			
3	26	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												Jumlah laporan penatausahaan keuangan		2,651,279,000	2,651,429,000			
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Pegawai	30 Orang				2,604,479,000	2,604,479,000			
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan											46,200,000	46,300,000			
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														600,000	650,000			
3	26	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												Jumlah laporan pengelolaan aset		6,800,000	7,000,000			
3	26	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan											6,800,000	7,000,000			
3	26	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												Administrasi ASN PD yang dikelola		16,000,000	17,200,000			
3	26	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan						Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 Orang				16,000,000	17,200,000			
3	26	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah												Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		309,960,000	314,000,000			
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan						Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	3 Exemplar				3,960,000	4,000,000			
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan											306,000,000	310,000,000			
3	26	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												Jumlah barang milik daerah yang diadakan		24,000,000	30,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan											24,000,000	30,000,000			
3	26	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				252,965,000	254,000,000			
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan											14,500,000	15,000,000			
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan				Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	5 rekening						91,600,000	92,000,000			
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan											146,865,000	147,000,000			
3	26	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai				28,900,000	30,150,000			
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan				Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharannya dibiayai	1 unit						24,200,000	25,000,000			
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan				Jumlah kendaraan dinas yang pajaknya dibiayai	4 unit						600,000	650,000			
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Amasangan											4,100,000	4,500,000			
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Angka Jumlah Pengunjung pada Destinasi Wisata Unggulan Daerah (Orang/Tahun)										44,150,000	45,700,000			
3	26	2	2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														39,600,000	40,700,000			
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah destinasi pariwisata yang dibangun	2 Lokasi						17,000,000	17,500,000			
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen kepariwisataan	12 Dokumen						9,200,000	9,500,000			
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Kelompok	3 Kelompok						13,400,000	13,700,000			
3	26	2	2		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota														4,550,000	5,000,000			
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah sosialisasi usaha kepariwisataan	1 Kali						4,550,000	5,000,000			
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan (%/Tahun)										69,350,000	70,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional			
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
3	26	3	2	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														69,350,000	70,000,000		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan	4 Event				69,350,000	70,000,000		
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata & Ekonomi Kreatif Daerah (%)									49,875,000	50,500,000		
3	26	5	2		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan				36,075,000	36,500,000		
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif	10 Kelompok				36,075,000	36,500,000		
3	26	5	2		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif													13,800,000	14,000,000		
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pelatihan	2 Kali				13,800,000	14,000,000		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													16,648,181,000	20,372,481,000		
					DINAS PERTANIAN													16,648,181,000	20,372,481,000		
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									13,493,370,800	13,614,881,000		
3	27	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu				2,734,500	5,500,000		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 Dokumen				2,073,000	4,500,000		
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah							Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Laporan				661,500	1,000,000		
3	27	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan				12,209,106,800	12,211,381,000		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	125 Orang				12,148,381,000	12,148,381,000		
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayar	9 Orang				58,800,000	60,000,000		
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah Laporan yang akan disusun	1 Dokumen				561,800	1,000,000		
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	18 Laporan Keuangan				1,364,000	2,000,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
3	27	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset		22,800,000		30,000,000				
3	27	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah aset yang ditatakelolakan	142 unit			22,800,000		30,000,000				
3	27	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola		45,586,500		50,000,000				
3	27	01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	10 orang			45,586,500		50,000,000				
3	27	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		381,960,000		426,000,000				
3	27	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	6 Buah			6,680,000		8,000,000				
3	27	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	508 pcs			10,000,000		12,000,000				
3	27	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 eksemplar			5,280,000		6,000,000				
3	27	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	300 SPPD			360,000,000		400,000,000				
3	27	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		31,000,000		35,000,000				
3	27	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jenis dan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	7 Jenis/Unit			31,000,000		35,000,000				
3	27	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		701,430,498		742,000,000				
3	27	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	2756 surat/jenis/buah			70,590,498		72,000,000				
3	27	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	38 rekening			309,840,000		320,000,000				
3	27	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	10 Jumlah layanan			321,000,000		350,000,000				
3	27	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		98,752,502		115,000,000				
3	27	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarunding					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit			25,200,000		30,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	142 Unit		40,052,502	45,000,000			
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	18 Buah		7,500,000	10,000,000			
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Luas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang pemeliharaan/rehab dibiayai	50 m2		26,000,000	30,000,000			
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Angka Populasi Ternak (Ekor/Thn)							2,637,437,100	5,146,000,000			
3	27	2	2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											59,394,000	65,000,000			
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah dokumen Pengawasan	3 Dokumen		13,800,000	0			
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kelompok tani yang diberi bibit/pupuk/pestisida	5 Kelompok		45,594,000	65,000,000			
3	27	2	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											835,194,500	900,200,000			
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah Angka Kelahiran Inseminasi Buatan	270 ekor		29,200,000	50,200,000			
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah (2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah (2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					"Jumlah Bibit Unggul yang beredar di masyarakat Jumlah kebun induk yang dikembangkan"	4500 pohon		2,417,983,500	2,550,000,000			
3	27	2	2		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											13,120,000	20,000,000			
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	12 Kali		13,120,000	20,000,000			
3	27	2	2		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer											6,400,000	10,000,000			
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pengawasan/Pemeriksaan yang dilakukan	12 Kali		6,400,000	10,000,000			
3	27	2	2.1		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota											1,193,578,600	3,500,000,000			
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Mancani					Jumlah Bibit Ayam Hasil Penetasan UPTD	130000 ekor		1,193,578,600	3,500,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
3	27	2	2.1	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain													529,750,000	650,800,000	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung						Jumlah benih/bibit ternak	137813 benih			1,000,000,000	1,200,000,000	
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung						Luas Hijauan Pakan Ternak	15 Ha			29,750,000	50,800,000	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			Persentase Lahan Sawah ber Indeks Pertanaman (IP) diatas 2									185,325,000	645,000,000	
3	27	3	2		Pengembangan Prasarana Pertanian												174,325,000	615,000,000	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Luas Lahan yang dikelola	120 Ha			164,625,000	600,000,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung						Jumlah Dokumen program dan kebutuhan kelompok tani Persentase nilai tambah dan promosi produk pertanian Persentase komoditi perkebunan yang dipromosikan*	2 dokumen			19,400,000	30,000,000	
3	27	3	2		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota												11,000,000	30,000,000	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung						Jumlah bibit unggul yang didistribusikan kemasyarakat	50 ekor			11,000,000	30,000,000	
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular									134,200,000	696,600,000	
3	27	4	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota												118,900,000	676,600,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Pengobatan Hewan yang dilaksanakan	10000 ekor			118,900,000	676,600,000	
3	27	4	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner												15,300,000	20,000,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Ternak yang disertikan	250 Ekor			15,300,000	20,000,000	
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			% Luas Lahan Pertanian yang Gagal Panen/Gagal Tanam (Ha/thn)									72,902,000	115,000,000	
3	27	5	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota												72,902,000	115,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program								Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Secara terpadu	1 kali			6,200,000	10,000,000	
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah sosialisasi GAP OPT yang dilakukan	4 kali			75,148,000	100,000,000	
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Luas Lahan yang di kendalikan	500 ha			14,928,000	25,000,000	
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Luas Lahan sawah yang diasuransi	100 Ha			14,200,000	30,000,000	
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			Persentase Kelompok Tani yang Mampu Meningkatkan Produksi/Produktifitasnya								124,946,100	155,000,000	
3	27	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											124,946,100	155,000,000	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan	12 kali			69,790,500	80,000,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara Barat, Tomarundung					Jumlah Kelompok Tani Yang Aktif	466 Kelompok			6,705,600	15,000,000	
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	3 Sekolah			48,450,000	60,000,000	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											5,474,452,000	5,962,878,000	
					DINAS PERDAGANGAN											5,474,452,000	5,962,878,000	
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								4,313,179,600	4,552,842,000	
3	30	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			5,743,750	6,825,000	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Dokumen Renstra,Renja_Rka,dan DPA Perangkat Daerah	7 Dokumen			2,728,750	3,150,000	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			3,015,000	3,475,000	
3	30	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumlah laporan penatausahaan keuangan			3,889,088,250	3,890,542,000	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	45 Orang			3,795,452,000	3,795,452,000	
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	10200 LPJ			88,300,000	89,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Keuangan Yang Dibuat	1 Laporan					2,081,250	2,415,000			
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Keuangan Yang Dibuat	17 Laporan					3,255,000	3,675,000			
3	30	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				22,800,000	24,150,000			
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Pengelolaan Aset	6 Jenis					22,800,000	24,150,000			
3	30	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola				24,525,000	32,025,000			
3	30	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Kinerja Yang Dievaluasi	67 Laporan SKP					10,025,000	11,025,000			
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah ASN Yang mengikuti BIMTEK	2 Orang					14,500,000	21,000,000			
3	30	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan				75,521,800	218,100,000			
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Diadakan	20 Buah					1,335,800	1,575,000			
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Bahan Bacaan Yang Dibiayai	4 Eksampler					4,800,000	6,000,000			
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah SPPD Yang Dilaksanakan	40 Kali					69,386,000	210,525,000			
3	30	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				249,540,800	322,350,000			
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Surat Masuk,Surat Keluar,ATK,Cetak dan Penggandaan	5400 Surat/Jenis/ Buah					44,320,860	56,700,000			
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Rekening Telepon, Air,Listrik , Internet dan Infotorial yang dibiayai	5 Rekening					136,568,000	178,500,000			
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Luas Bangunan Kantor Yang Dibersihkan	1500 m2					11,723,940	15,750,000			
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlayan Kantor Yang Dilaksanakan	5 Layanan					56,928,000	71,400,000			
3	30	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai				45,960,000	58,850,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kendaraan Dinas Yang Pemeliharaan dan Pajaknya Dibiayai	10 Unit				24,160,000	28,350,000						
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3 Unit				11,400,000	15,750,000						
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dibiayai	24 Unit				5,400,000	7,750,000						
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dan Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	500 m2				5,000,000	7,000,000						
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Persentase Peningkatan Jumlah Retribusi dari Pasar (%/Tabun)									705,660,400	840,000,000						
3	30	3	2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya													705,660,400	840,000,000						
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan Pembinaan Pedagang	2 Kegiatan				705,660,400	840,000,000						
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Persentase Distributor Barang Bersubsidi yang diawasi (%)									365,639,500	453,836,000						
3	30	4	2		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													276,050,000	327,500,000						
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Ruko Yang Dikontrak	3 Ruko				215,250,000	262,500,000						
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan Pengendalian Barang Yang Dilaksanakan	2 Kegiatan				60,800,000	65,000,000						
3	30	4	2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota													89,589,500	126,336,000						
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dan Jenis Barang yang Harganya Dipantau	2 Jenis				39,280,000	42,336,000						
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah	9 Kecamatan				50,309,500	84,000,000						
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku									65,420,000	71,200,000						
3	30	6	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan													65,420,000	71,200,000						
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah	725 Unit				65,420,000	71,200,000						

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Persentase Produk Lokal Kota Palopo yang Masuk Pasar Nasional										24,552,500	45,000,000			
3	30	7	2	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														24,552,500	45,000,000			
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Wara, Tompotika			Jumlah Promosi Dagang Yang Diikuti	2 Kali							24,552,500	45,000,000			
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														2,536,990,000	2,718,890,000			
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														2,536,990,000	2,718,890,000			
3	31	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										2,369,630,000	2,507,390,000			
3	31	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu					2,400,000	5,000,000			
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin			Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 dokumen							1,350,000	1,500,000			
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin			Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan							1,050,000	3,500,000			
3	31	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan					2,009,090,000	2,021,490,000			
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai	25 Orang							1,952,990,000	1,952,990,000			
3	31	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin			Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	2 laporan							54,000,000	65,000,000			
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin			Jumlah laporan keuangan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	18 laporan							2,100,000	3,500,000			
3	31	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset					8,400,000	8,400,000			
3	31	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin			Jumlah Aset yang ditata kelolakan	2 Orang							8,400,000	8,400,000			
3	31	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan					156,271,000	176,500,000			
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin			Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 eks							4,800,000	6,500,000			
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah	Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin			Jumlah SPPD yang dilaksanakan	40 Kali							151,471,000	170,000,000			
3	31	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Jumlah barang milik daerah yang diadakan					33,000,000	71,500,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
3	31	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jenis dan jumlah dinas jabatan yang diadakan	1 unit			18,500,000	40,000,000		
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jenis dan jumlah mebel yang diadakan	15 unit			7,500,000	16,500,000		
3	31	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	1 unit			7,000,000	15,000,000		
3	31	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		134,869,000	165,500,000		
3	31	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, Cetak dan penggandaan	1500 Surat			14,130,000	25,000,000		
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	8 Rek			66,360,000	80,000,000		
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	6 Orang			54,379,000	60,500,000		
3	31	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai		25,600,000	59,000,000		
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit			22,100,000	30,500,000		
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	6 unit			1,000,000	25,000,000		
3	31	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	4 unit			2,500,000	3,500,000		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Persentase Pertumbuhan Industri Kecil - Menengah								113,360,000	150,000,000		
3	31	2	2		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota												113,360,000	150,000,000		
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan kuantitas produksi serta pelatihan manajismn	50 IKM			58,300,000	70,000,000		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan peralatan	1 IKM			13,260,000	30,000,000		
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah pelatihan pengembangan bagi IKM pangan dan jumlah pelatihan IKM Kerajinan	60 IKM			41,800,000	50,000,000		
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				Persentase Unit Industri yang Berizin								40,000,000	45,500,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
3	31	3	2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									Jumlah Iklim yang memperoleh izin usaha industri		40,000,000	45,500,000			
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin				Jumlah sertifikat untuk IKM	5 IKM		24,500,000	25,000,000			
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin				Jumlah IKM yang dibina	15 Sertifikat		15,500,000	20,500,000			
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Persentase Industri Kecil Menengah dan Perusahaan di Kawasan Industri Kota Palopo yang Datanya Masuk dalam SII Nasional							14,000,000	16,000,000			
3	31	4	2		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								Jumlah IKM yang didata		14,000,000	16,000,000			
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah IKM yang didata	1.187 IKM		14,000,000	16,000,000			
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										2.120.384.000	2.358.884.000			
					DINAS TRANSMIGRASI										2.120.384.000	2.358.884.000			
3	32	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah							2.026.684.000	2.118.884.000			
3	32	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		858,000	1,000,000			
3	32	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7 Dokumen		530,000	600,000			
3	32	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4 Dokumen		328,000	400,000			
3	32	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumlah laporan penatausahaan keuangan		1,655,386,000	1,657,384,000			
3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Pegawai	20 Orang		1,620,384,000	1,620,384,000			
3	32	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	2 Dokumen		35,002,000	37,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
										Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
3	32	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan				247,139,996	253,000,000			
3	32	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Exsamler					2,640,000	3,000,000			
3	32	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	50 kali/org					244,499,996	250,000,000			
3	32	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan				39,400,000	86,000,000			
3	32	01	2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah kendaraan yang dibeli	1 kali/org					25,000,000	50,000,000			
3	32	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	3 unit					14,400,000	36,000,000			
3	32	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				66,544,500	96,500,000			
3	32	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	455 surat					7,686,500	12,000,000			
3	32	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah rekening yang dibayar	36 rek					16,188,000	25,000,000			
3	32	01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	3 buah					3,600,000	4,500,000			
3	32	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	200 meter persegi					39,070,000	55,000,000			
3	32	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				17,355,504	25,000,000			
3	32	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	3 unit					17,355,504	25,000,000			
3	32	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya (Ha)										93,700,000	240,000,000			
3	32	3	2	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														93,700,000	240,000,000			
3	32	03	2.01 02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah data peserta transmigrasi lokal dan non lokal	300 KK					80,500,000	240,000,000			
3	32	03	2.01 03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	(2021) Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah data kepemilikan lahan transmigrasi	300 KK					53,450,000	120,000,000			
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														82,778,975,600	83,564,562,840			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah				Sasaran Daerah				Lokasi				Indikator Kinerja												Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)		Keterangan	
																				Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional					
																				Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target				Pagu Indikatif (Rp.)	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH																				58,100,974,600		60,644,862,840											
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																				35,068,648,600		36,239,547,900											
4	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu				95,386,850		104,925,535											
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, dan DPA Perangkat Daerah		6 Dokumen				44,364,350		48,800,785										
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen				51,022,500		56,124,750										
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																Jumlah laporan penatausahaan keuangan				14,012,311,350		14,173,523,485											
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Pegawai		150 Orang				13,127,290,000		13,200,000,000										
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi		5338 LPJ				678,930,200		746,823,220										
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan semesteran dan Tahunan Yang disusun		16 Lap. Keuangan				206,091,150		226,700,265										
4	1	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																Jumlah laporan pengelolaan aset				198,900,000		220,000,000											
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah jasa jaminan Aset Milik Daerah		4 jasa				198,900,000		220,000,000										
4	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																Administrasi ASN PD yang dikelola				224,670,000		245,000,000											
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah Pakaian Dinas Lapangan yang disiapkan		40 Stel				32,000,000		35,000,000										
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek		40 Orang				192,670,000		210,000,000										
4	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah																Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola				3,039,266,800		3,210,793,480											
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah Komponen Listrik Yang diadakan		240 Buah				38,000,000		38,000,000										
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		5 Jenis				526,000,000		526,000,000										
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik				Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah Peralatan rumah Tangga yang diadakan		8 Jenis				245,000,000		245,000,000										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Bahan Bacaan dan Kerjasama Media	30 Media				150,000,000		165,000,000				
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Bahan materiakanal yang diad	100 Buah				50,000,000		55,000,000				
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah sarana yang disiapkan untuk kunjungan kerja	100 Sarana				215,000,000		235,000,000				
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	300 Keg				1,500,000,000		1,600,000,000				
4	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah sistem atau aplikasi yang tersedia serta pengelolaannya	4 Aplikasi				315,266,800		346,793,480				
4	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan			1,517,500,000		1,196,550,000				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang diadakan	2 Unit				300,000,000		300,000,000				
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang diadakan	2 Unit				300,000,000		300,000,000				
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah mebel yang diadakan	18 Unit				42,500,000		46,550,000				
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	5 Jenis				500,000,000		550,000,000				
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang diadakan	3 Unit				375,000,000		0				
4	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			5,439,857,200		5,509,200,000				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Surat Yang Terkirim dan Masuk	3000 Surat				212,934,600		230,000,000				
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Rekening Listrik, Air dan Internet yang dibayarkan	40 Rekening				1,770,722,600		1,800,000,000				
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jasa				627,000,000		650,000,000				
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah pengelola Administrasi Umum Kantor	50 Orang				2,829,200,000		2,829,200,000				
4	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			1,421,166,000		1,560,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah jasa Pemeliharaan biaya pajak yang disiapkan	20 Unit				487,500,000		520,000,000			
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah jasa Pemeliharaan biaya pajak yang disiapkan	20 Unit				402,025,000		440,000,000			
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit				131,641,000		150,000,000			
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di rehab	5 Unit				400,000,000		450,000,000			
4	1	1	2.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													1,231,329,000		1,261,329,000			
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH yang disiapkan	12 Bulan				181,329,000		181,329,000			
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disiapkan	20 Stel				150,000,000		150,000,000			
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Pelaksanaan Medical Checkup KDH dan WKDH Yang disiapkan	12 Bulan				300,000,000		330,000,000			
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Penyediaan Operasional KDH dan WKDH yang disiapkan	12 Bulan				600,000,000		600,000,000			
4	1	1	2.1		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah													1,976,400,000		2,226,400,000			
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disiapkan	12 Bulan				1,000,000,000		1,200,000,000			
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disiapkan	12 Bulan				800,000,000		850,000,000			
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disiapkan	12 Bulan				176,400,000		176,400,000			
4	1	1	2.1		Penataan Organisasi													1,014,161,400		1,222,123,400			
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Perangkat Daerah Yang ditata Kelembagaannya dan Analisis Jabatan	49 Perangkat Daerah				241,269,000		274,303,000			
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Perangkat Daerah Yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Tata kelola	49 Perangkat Daerah				167,911,000		270,186,000			
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Dokumen Implementasi Reformasi Birokrasi	49 Dokumen				80,360,000		82,000,000			
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Tersedianya Dokumen Lakip Perangkat Daerah	49 Dokumen				524,621,400		595,634,400			
4	1	1	2.1		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan													4,897,700,000		5,309,703,000			
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Keprotokoleran yang dilaksanakan	1500 Kegiatan				1,022,000,000		1,850,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Naskah Pidato/Sambutan Yang disusun	1500 Kegiatan					4,858,320,000	4,858,320,000			
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan Walikota dan wakil Walikota Yang diliput	1500 Kegiatan					3,915,080,000	3,911,086,000			
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														21,777,924,000	22,262,375,000			
4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan														6,804,000,000	6,926,810,000			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Umum	9 Laporan					132,066,500	150,350,000			
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan dan Dokumen Penyelesaian Tapal Batas, Jumlah Laporan Hasil MusreNbang Kelurahan Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Kelurahan/Lomba Kelurahan, Jumlah laporan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Insentif RT,RW dan LPMK, Laporan Hasil Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayaaahn, Laporan Penyusunan Kebijakan Dana Kelurahan	1 Laporan 48 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 63 Laporan 1 Laporan				6,447,269,750	6,550,800,000				
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Administrasi Otonomi Daerah, Jumlah Laporan dan Dok penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Jumlah Laporan Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Laporan 4 Laporan 7 Laporan					224,663,750	225,660,000			
4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat														7,520,000,000	7,655,700,000			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	8 Laporan					1,665,025,000	1,675,000,000			
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Lembaga Keagamaan Terkait Kesejahteraan Sosial	6 Lembaga					361,275,000	387,000,000			
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Lembaga Keagamaan Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1454 Orang					5,493,700,000	5,593,700,000			
4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum														7,154,000,000	7,202,791,000			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Penyusunan Produk Hukum	425 Produk Hukum					422,410,000	422,430,000			
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum	3 Perkara					6,668,937,000	6,717,708,000			
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Perda, Perwal dan Keputusan walikota yang didokumentasikan dan dikelola	425 Produk Hukum					62,653,000	62,653,000			
4	1	2	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah														299,924,000	477,074,000			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Naskah Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri	23 Dokumen					229,158,200	197,074,000			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)						
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Naskah Kerjasama Anatar Daerah Dalam Negeri dan Luar Negeri	1 Dokumen			7,000,000	25,000,000					
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	8 Dokumen			63,765,800	255,000,000					
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												1,254,402,000	2,142,939,940					
4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian												349,999,200	700,000,000					
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Laporan			68,607,200	150,000,000					
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Pengendalian Perekonomian	4 Laporan			157,731,000	200,000,000					
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Fasilitasi Penebitan Kartu Usaha Mikro Kecil Jumlah Laporan Pendataan UMN dan Pengimputan data UMN Ke Sistem SIKP	4 Laporan 4 Laporan			123,661,000	350,000,000					
4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan												219,100,000	295,000,000					
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan fasilitasi penyusunan program pembangunan	16 laporan			92,400,000	125,000,000					
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	1 Laporan			19,600,000	45,000,000					
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	12 Laporan			107,100,000	125,000,000					
4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												435,302,800	885,439,940					
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika									185,789,900	406,139,940					
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah paket pengadaan melalui E-Procurement	4 Laporan			189,918,200	388,800,000					
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh PBJ	8 Dokumen			59,594,700	90,500,000					
4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam												250,000,000	262,500,000					
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan	1 Dokumen			94,244,000	98,956,200					
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan	1 Dokumen			86,877,000	91,220,850					
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan	1 Dokumen			68,879,000	72,322,950					
4	2				SEKRETARIAT DPRD												24,678,001,000	22,919,700,000					
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									19,810,721,000	19,052,420,000					

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program									
								Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target
4	2	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		10,000,000	10,000,000	
4	02	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Dokumen renstra, renja, RKA, dan DPA Perangkat DAerah	4 Dokumen			7,500,000	7,500,000	
4	02	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			2,500,000	2,500,000	
4	2	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan		3,424,493,000	3,515,870,000	
4	02	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Pegawai	45 Orang			3,308,623,000	3,400,000,000	
4	02	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	300 Laporan SPJ			111,200,000	111,200,000	
4	02	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Laporan Keuangan Bulan, Semesteran dan yang Di susun	3 Laporan Keuangan			4,670,000	4,670,000	
4	2	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset		12,000,000	12,000,000	
4	02	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah aset yang ditatakelolakan	5 jenis			12,000,000	12,000,000	
4	2	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola		300,000,000	300,000,000	
4	02	01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan teknis	15 orang			300,000,000	300,000,000	
4	2	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		680,000,000	680,000,000	
4	02	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah bahan bacaan yang di biayai	1 Tahun			230,000,000	230,000,000	
4	02	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah SPPD yang Dilaksanakan	1 Tahun			450,000,000	450,000,000	
4	2	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Jumlah barang milik daerah yang diadakan		395,000,000	395,000,000	
4	02	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika				Jumlah Pengadaan Barang Daerah	70 Unit			395,000,000	395,000,000	
4	2	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		1,075,550,000	1,075,550,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar, Atk, cetak dan Penggadaan	1 Tahun				75,000,000	75,000,000				
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang dibiayai	1 Tahun				272,850,000	272,850,000				
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Layanan kantor yang di laksanakan	1 Tahun				727,700,000	727,700,000				
4	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			149,000,000	149,000,000				
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kendaraan Dinas yang pemeliharaan dan pajaknya di biayai	3 kendaraan				82,000,000	82,000,000				
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang pemeliharaan dan pajaknya di biayai	3 kendaraan				67,000,000	67,000,000				
4	2	1	2.2		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD													10,339,958,000	10,375,000,000				
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan	25 Orang				10,064,958,000	10,100,000,000				
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Pakaian Anggota Dewan diadakan	50 atribut				225,000,000	225,000,000				
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah anggota dewan yang di Medical Check Upme	25 orang				50,000,000	50,000,000				
4	2	1	2.2		Layanan Administrasi DPRD													3,424,720,000	2,540,000,000				
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah SPPD yang dilaksanakan	672 SPPD				3,093,720,000	2,200,000,000				
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	60 item/paket				331,000,000	340,000,000				
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Persentase Prolegda yang Ditetapkan Menjadi Regulasi Daerah									4,867,280,000	3,867,280,000				
4	2	2	2		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD													1,815,000,000	815,000,000				
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Perda yang di hasilkan	20 perda				1,815,000,000	815,000,000				
4	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran													20,000,000	20,000,000				
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen				10,000,000	10,000,000				
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen				10,000,000	10,000,000				
4	2	2	2		Peningkatan Kapasitas DPRD													1,849,800,000	1,849,800,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Bimbingan Teknis DPRD yang dilaksanakan	1 Tahun				875,000,000		875,000,000			
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang tersedia	20 dokumentasi				130,000,000		130,000,000			
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kelompok pakar dan tim ahli	1 Tahun				316,800,000		316,800,000			
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Tenaga Ahli fraksi	1 Tahun				528,000,000		528,000,000			
4	2	2	2.1		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat													1,062,480,000		1,062,480,000			
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kunjungan kerja dalam daerah	4 kali				20,000,000		20,000,000			
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali				1,042,480,000		1,042,480,000			
4	2	2	2.1		Fasilitasi Tugas DPRD													120,000,000		120,000,000			
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD terlaksana	4 kali				120,000,000		120,000,000			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													51,725,545,500		52,822,370,000			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													5,395,362,500		5,566,000,000			
5	1				PERENCANAAN													5,395,362,500		5,566,000,000			
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									4,030,525,000		4,121,500,000			
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			13,162,000		14,000,000			
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 dokumen				9,362,000		10,000,000			
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 dokumen				3,800,000		4,000,000			
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			3,152,713,000		3,163,500,000			
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	35 Orang				3,095,363,000		3,100,000,000			
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	1 dokumen				52,000,000		56,500,000			
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	14 dokumen				5,350,000		7,000,000			
5	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola			70,000,000		75,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	5 orang			70,000,000		75,000,000				
5	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			340,437,500		382,500,000				
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	50 buah			4,500,000		5,000,000				
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah alat rumah tangga yang diadakan	43 buah			6,120,000		6,500,000				
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	60 exp			47,800,000		51,000,000				
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jenis bahan material yang diadakan	150 m2			15,000,000		20,000,000				
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	35 SPPD			267,017,500		300,000,000				
5	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			421,712,500		450,500,000				
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	1350 surat			35,000,000		40,000,000				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening listrik dan internet yang dibiayai	2 rekening			146,200,000		155,000,000				
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	35 unit			9,250,000		10,500,000				
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	9 layanan			231,262,500		245,000,000				
5	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			32,500,000		36,000,000				
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit			27,000,000		29,500,000				
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	16 unit			5,500,000		6,500,000				
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Tingkat Kesesuaian Capaian Kinerja Tahunan Terhadap Target Kinerja Tahunan (%)								648,800,000		691,500,000				
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan												301,600,000		329,500,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah berita acara kesepakatan terhadap rancangan awal RKPD	1 exemplar					14,550,000		15,000,000		
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah berita acara kesepakatan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas maupun program, kegiatan dan sub kegiatan lintas perangkat daerah, indikator kinerja serta target dan kebutuhan pendanaan	1 exemplar					15,950,000		19,500,000		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah berita acara kesepakatan terhadap sasarna dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD	1 exemplar					82,000,000		85,000,000		
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan Perwal	3 dokumen					189,100,000		210,000,000		
5	1	2	2		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah														0		95,000,000		
5	01	02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %			Jumlah Laporan Format Data System Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	1 laporan					0		95,000,000		
5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah														56,000,000		60,000,000		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah platform SIPD yang dikelola	1 sistem					56,000,000		60,000,000		
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah														291,200,000		302,000,000		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Renja, Renstra, RKPD dan RPJMD	4 laporan					129,900,000		135,000,000		
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan APBD, APBN dan DAK	3 dokumen					161,300,000		167,000,000		
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Tingkat Kesesuaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah (%)										716,037,500		753,000,000		
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia														242,375,000		257,000,000		
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Laporan evaluasi pencapaian target TPB/SDGs	1 laporan					43,350,000		47,000,000		
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target Matrik PUG Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target RDA KLA Pelaksanaan Musrenbang Anak Tahun 2021	1 laporan 1 laporan 1 kegiatan					84,225,000		90,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) koordinasi dengan Tim Pembina Kab/Kota Sehat Provinsi dan Koordinasi dengan TNP2K, TKPKD Provinsi Movev Terhadap program/kegiatan dokumen SPKD rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan Kab/Kota Sehat dan Movev Penanggulangan Kemiskinan daerah (LP2KD)	1 dokumen 2 Laporan 13 OPD 17 kali					114,800,000	120,000,000			
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)															196,525,000	206,000,000		
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan	1 dokumen						71,262,500	75,500,000		
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kegiatan	2 dokumen						125,262,500	130,500,000		
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah															277,137,500	290,000,000		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	4 laporan						23,500,000	25,000,000		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan hasil koordinasi penanganan permukiman kumuh	4 laporan						122,850,000	130,000,000		
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan / dokumen masterplan RTH	2 dokumen						130,787,500	135,000,000		
5	2				KEUANGAN															33,809,880,000	34,394,100,000		
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH															22,929,730,000	23,234,100,000		
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah												6,829,730,000	6,624,100,000		
5	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu				3,500,000	4,500,000			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	6 Dokumen						2,500,000	3,000,000		
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP dan SAKIP)	2 Laporan						1,000,000	1,500,000		
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatusahaan keuangan					4,366,630,000	4,472,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	50 Orang			4,114,630,000		4,200,000,000				
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Laporan Pertanggungjawaban yang di Verifikasi	1800 Laporan			250,000,000		270,000,000				
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan yang disusun	15 Laporan			2,000,000		2,500,000				
5	2	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset		15,000,000		17,500,000				
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Aset yang di Tatakelola	100 Unit			15,000,000		17,500,000				
5	2	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola		25,000,000		27,500,000				
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah ASN yang memperoleh Pelayanan kepegawaian tepat waktu	45 Orang			10,000,000		12,500,000				
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang			15,000,000		15,000,000				
5	2	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola		415,600,000		515,600,000				
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Bahan Bacaan yang dibiayai	14 Eksemplar			15,600,000		15,600,000				
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	60 SPPD			400,000,000		500,000,000				
5	2	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		820,000,000		585,000,000				
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit			650,000,000		500,000,000				
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	2 Unit			40,000,000		20,000,000				
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Mebel yang diadakan	5 Buah			10,000,000		15,000,000				
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	11 Unit			120,000,000		50,000,000				
5	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		867,500,000		880,000,000				
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	2000 Surat			17,500,000		20,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Rekening Air, Listrik dan Internet yang dibiayai	8 Rekening			350,000,000		360,000,000				
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jasa Layanan Kantor yang dilaksanakan	4 Jasa Layanan			500,000,000		500,000,000				
5	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				316,500,000		121,500,000				
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit			26,500,000		26,500,000				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	25 Unit			40,000,000		40,000,000				
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	20 Unit			25,000,000		30,000,000				
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara	95 m2			225,000,000		25,000,000				
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Tingkat Kesesuaian Pagu pada Dokumen Penanggaran Terhadap Dokumen Perencanaan (%)								13,490,000,000		13,735,000,000				
5	2	2	2		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												1,550,000,000		1,440,000,000				
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah KUA dan PPAS yang ditetapkan	2 Dokumen			35,000,000		40,000,000				
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Perubahan KUA dan PPAS yang ditetapkan	2 Dokumen			35,000,000		40,000,000				
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah RKA SKPD	49 Dokumen			40,000,000		45,000,000				
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Perubahan RKA SKPD	49 Dokumen			40,000,000		45,000,000				
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah DPA SKPD	49 Dokumen			35,000,000		40,000,000				
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Perubahan DPA SKPD	49 Dokumen			35,000,000		40,000,000				
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Perda dan Perkada APBD yang ditetapkan	2 Dokumen			165,000,000		170,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumah Perda dan Perkada Perubahan APBD yang ditetapkan	2 Dokumen			165,000,000		170,000,000				
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumah Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran yang ditetapkan	1 Dokumen			200,000,000		0				
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Pembinaan Penganggaran SKPD	30 SKPD			800,000,000		850,000,000				
5	2	2	2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												1,600,000,000		1,660,000,000				
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah dokumen pencairan yang diterbitkan	4000 SP2D			950,000,000		950,000,000				
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan	1000 Dokumen			600,000,000		650,000,000				
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Pembinaan Penatausahaan Keuangan SKPD	25 SKPD			50,000,000		60,000,000				
5	2	2	2		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												1,420,000,000		1,610,000,000				
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Laporan Rekon SPJ SKPD	588 Laporan			800,000,000		900,000,000				
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Laporan Rekon LK SKPD	588 Laporan			600,000,000		650,000,000				
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah LKPD	1 Dokumen			50,000,000		55,000,000				
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Perda dan Perwal yang ditetapkan tepat waktu	2 Dokumen			200,000,000		250,000,000				
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Sidang TGR	4 Sidang			120,000,000		150,000,000				
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah SKPD yang dibina	12 SKPD			50,000,000		55,000,000				
5	2	2	2		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												8,900,000,000		9,000,000,000				
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Bunga Utang yan dibiayai	1 Kali			2,400,000,000		2,500,000,000				
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Pelaksanaan Kegiatan Darurat	1 Keg			6,500,000,000		6,500,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
5	2	2	2.1		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah													20,000,000	25,000,000				
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi				20,000,000	25,000,000				
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Tingkat Pemenuhan Dokumen Pengelolaan Barang yang Memenuhi SAP									2,610,000,000	2,875,000,000				
5	2	3	2		Pengelolaan Barang Milik Daerah													2,610,000,000	2,875,000,000				
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Buku Standar Biaya yang ditetapkan	1 Dokumen				170,000,000	200,000,000				
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Daftar Rencana Kebutuhan Barang	1 Dokumen				80,000,000	85,000,000				
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Penatusahaan BMD sesuai peraturan perundang undangan	5 Laporan				650,000,000	700,000,000				
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Laporan Inventarisasi Barang	1 Laporan				150,000,000	175,000,000				
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	1 Laporan				800,000,000	850,000,000				
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Nilai yang handal dan akurat pada BMD	1 Laporan				250,000,000	300,000,000				
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan BMD	1 Laporan				350,000,000	375,000,000				
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	1 Laporan				60,000,000	65,000,000				
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Salekoe					Jumlah Laporan BMD	1 Laporan				100,000,000	125,000,000				
					BADAN PENDAPATAN DAERAH													10,880,150,000	11,160,000,000				
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									7,387,591,800	7,492,813,890				
5	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			2,534,600	2,661,330				
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	4 dokumen				1,215,000	1,275,750				
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2 laporan				1,319,600	1,385,580				
5	2	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			5,982,957,800	6,022,948,190				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	40 Orang					5,580,150,000		5,600,000,000		
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	1715 laporan					400,954,000		421,001,700		
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														1,018,800		1,069,740		
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran yang disusun	1 laporan					835,000		876,750		
5	2	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				47,700,000		50,085,000		
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah aset yang ditatakelola	11 jenis					47,700,000		50,085,000		
5	2	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola				70,600,000		74,130,000		
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah laporan Kinerja yang dievaluasi	39 laporan SKP					34,600,000		36,330,000		
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	3 orang					36,000,000		37,800,000		
5	2	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola				635,690,500		662,475,025		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan	30 jenis					10,210,000		10,720,500		
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan	2 jenis					212,852,500		223,495,125		
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 jenis					8,160,000		8,568,000		
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	200 kali					404,468,000		419,691,400		
5	2	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				530,108,900		556,614,345		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah surat keluar dan masuk	10000 surat					18,142,700		19,049,835		
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah rekening air, listrik, dan internet yang dibiayai	36 rekening					241,000,000		253,050,000		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	48 layanan					270,966,200		284,514,510		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target			
5	2	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			118,000,000		123,900,000				
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	39 unit				59,900,000		62,895,000				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	2 unit				19,100,000		20,055,000				
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	3 jenis				19,000,000		19,950,000				
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1 unit				20,000,000		21,000,000				
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Tingkat Kesesuaian Realisasi Pendapatan Daerah dengan Target Pendapatan Daerah (%/Thn)								3,492,558,200		3,667,186,110				
5	2	4	2		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah												3,492,558,200		3,667,186,110				
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah potensi pajak dan retribusi daerah	11 jenis				234,112,000		245,817,600				
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah revisi perda pajak dan retribusi yang dibuat	1 jenis	1 jenis			18,063,000		18,966,150				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah regulasi yang disosialisasikan kepada masyarakat	2 jenis				25,540,000		26,817,000				
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah pemutakhiran data subjek dan objek pajak	17000 objek				560,602,000		588,632,100				
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah STTS PBB-P2 dan DHKP yang diterbitkan	40000 surat				354,358,200		372,076,110				
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah SSPD yang diterbitkan	7000 lembar				376,110,000		394,915,500				
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah laporan PAD yang diverifikasi	12 laporan				238,802,000		250,742,100				
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah SPTPD pajak yang diterbitkan	5500 lembar				568,600,000		597,030,000				
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting				Jumlah Laporan pengaduan pajak dan retribusi yang ditindaklanjuti	200 laporan				194,200,000		203,910,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program								Target			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah reklame yang diterbitkan Jumlah Tempat Usaha, Alat Transaksi Pajak Online (M-POS) yang diawasi	10000 lembar 131 alat			648,003,000	680,403,150					
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring pemungutan pajak daerahnya	12 Unit			274,168,000	287,876,400					
					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												10,211,702,000	10,435,000,000					
					KEPEGAWAIAN													6,795,350,000	6,935,000,000				
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									4,559,602,000	4,630,000,000				
5	3	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			6,000,000	6,400,000				
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	7 Dokumen			4,000,000	4,200,000					
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Dokumen			2,000,000	2,200,000					
5	3	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			3,667,802,000	3,676,200,000				
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	45 Orang			3,592,602,000	3,600,000,000					
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika									73,200,000	74,000,000					
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen			2,000,000	2,200,000					
5	3	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset			7,800,000	8,100,000				
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah aset yang ditatakelolakan	100 Unit			7,800,000	8,100,000					
5	3	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola			40,000,000	50,000,000				
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	15 Orang			40,000,000	50,000,000					
5	3	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			293,800,000	315,300,000				
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	10 Buah			3,000,000	3,500,000					
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	6 Eksemplar			10,800,000	11,800,000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah SPPD yang dilaksanakan	350 SPPD			280,000,000	300,000,000				
5	3	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Jumlah barang milik daerah yang diadakan		27,000,000	30,000,000				
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	3 Unit			27,000,000	30,000,000				
5	3	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		481,200,000	505,000,000				
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	11000 Jenis			116,000,000	125,000,000				
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	2 Rekening			124,000,000	130,000,000				
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	2 Layanan			241,200,000	250,000,000				
5	3	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		36,000,000	39,000,000				
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	14 Unit			21,000,000	22,000,000				
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	24 Buah			15,000,000	17,000,000				
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Persentase PNS yang ditempatkan sesuai Syarat Jabatan & Syarat Kompetensinya									2,235,748,000	2,305,000,000				
5	3	2	2		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											Jumlah laporan kebutuhan pengadaan dan pemberhentian ASN	1 laporan	807,300,000	830,000,000				
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah orang yang dilayani dalam proses pengadaan PNS	4000 Orang			604,800,000	620,000,000				
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah berkas pensiun dan pemberhentian yang diproses	100 Berkas			53,800,000	55,000,000				
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah lembaga profesi ASN yang dibina	1 Lembaga			80,900,000	85,000,000				
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika						Jumlah data dan informasi kepegawaian yang ditangani	4500 Data			67,800,000	70,000,000				
5	3	2	2		Mutasi dan Promosi ASN											Jumlah laporan mutas dan promosi ASN	1 laporan	1,097,448,000	1,135,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah berkas mutasi ASN yang diproses	1200 Berkas			70,600,000	75,000,000		
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah berkas kepangkatan ASN yang di proses	1000 Berkas			103,985,000	110,000,000		
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah laporan pengembangan karir dan promosi aparatur	3 Laporan			922,863,000	950,000,000		
5	3	2	2		Pengembangan Kompetensi ASN										Jumlah pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan dan diikuti	1 kegiatan	216,000,000	220,000,000		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah aparatur yang akan mengikuti sertifikasi aparatur (org/thn)	30 Orang			216,000,000	220,000,000		
5	3	2	2		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										Pertumbuhan jumlah aparatur yang diberi penghargaan (%)		115,000,000	120,000,000		
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah aparatur yang diberi penghargaan	50 Orang			28,000,000	30,000,000		
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah aparatur yang diproses pelanggaran disiplin	10 Orang			87,000,000	90,000,000		
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												3,416,352,000	3,500,000,000		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)								3,416,352,000	3,500,000,000		
5	4	2	2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										Jumlah pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan dan diikuti		3,416,352,000	3,500,000,000		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah aparatur yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim)	150 Orang			3,416,352,000	3,500,000,000		
					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												2,308,601,000	2,427,270,000		
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												2,308,601,000	2,427,270,000		
5	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								2,089,331,500	2,203,270,000		
5	5	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		1,000,000	1,020,000		
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												500,000	510,000		
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Laporan			500,000	510,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja												Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
5	5	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														Jumlah laporan penatausahaan keuangan		1,860,601,000	1,956,100,000			
5	05	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah Pegawai	20 Orang					1,808,601,000	1,900,000,000				
5	05	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	500 Laporan					51,000,000	55,000,000					
5	05	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	2 Laporan Keuangan					1,000,000	1,100,000					
5	5	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dserah													Jumlah laporan pengelolaan aset		6,000,000	6,000,000				
5	05	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Aset yang ditatakelolakan	167 Unit					6,000,000	6,000,000					
5	5	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah													Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		71,473,130	80,280,000				
5	05	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	4 Eksampelar					5,280,000	5,280,000					
5	05	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	30 SPPD					66,193,130	75,000,000					
5	5	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													Jumlah barang milik daerah yang diadakan		20,786,520	22,000,000				
5	05	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan kantor	6 Buah					20,786,520	22,000,000					
5	5	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		95,920,850	102,600,000				
5	05	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan	600 Surat					20,448,650	21,000,000					
5	05	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah rekening internet yang dibayarkan	1 Rekening					6,600,000	6,600,000					
5	05	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Semua Kelurahan					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	8 Layanan					68,872,200	75,000,000					
5	5	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai		33,550,000	35,270,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program											Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit			25,570,000	27,000,000			
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	3 Unit			600,000	620,000			
5	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah peralatan dan mesin yang pemeliharannya dibiayai	16 Unit			3,000,000	3,150,000			
5	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Luas Kantor yang dipelihara	30 Meter Persegi			4,380,000	4,500,000			
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Jumlah Inovasi Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, dan Teknologi yang diwujudkan								219,269,500	224,000,000			
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan												35,050,000	36,000,000			
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen			35,050,000	36,000,000			
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan												37,825,000	38,000,000			
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen			37,825,000	38,000,000			
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												73,019,500	74,000,000			
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen			34,499,500	35,000,000			
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen			38,520,000	39,000,000			
5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi												73,375,000	76,000,000			
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen Hasil Pemenuhan unsur-unsur Sagu Teknopark	1 Dokumen			36,510,000	38,000,000			
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Dokumen Hasil Workshop Inovasi Daerah	1 Dokumen			36,865,000	38,000,000			
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												7,952,524,550	8,131,359,200			
6	1				INSPEKTORAT DAERAH												7,952,524,550	8,131,359,200			
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								5,770,654,550	5,898,956,100			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
6	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														200,000	2,620,000			
6	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 Dokumen					100,000	120,000			
6	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen					100,000	2,500,000			
6	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														5,022,449,000	5,034,402,000			
6	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	47 Orang					4,988,749,000	5,000,000,000			
6	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	1974 Laporan					33,600,000	34,272,000			
6	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun L	19 Laporan					100,000	130,000			
6	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														15,000,000	20,000,000			
6	01	01	2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	2 Orang					15,000,000	20,000,000			
6	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah														320,087,800	361,000,000			
6	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	156 Buah					2,887,800	3,000,000			
6	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	3 Eksamplir					7,200,000	8,000,000			
6	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah SPDP yang dilaksanakan	70 SPDP					310,000,000	350,000,000			
6	1	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														60,400,000	70,000,000			
6	01	01	2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang disediakan	13 Buah					60,400,000	70,000,000			
6	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														297,078,750	346,934,100			
6	01	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	35 Surat/ Jenis/Buah					57,817,000	60,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	4 Rekening					127,920,000	153,504,000			
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	6 Jenis					111,341,750	133,430,100			
6	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				55,439,000	64,000,000				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit					11,000,000	14,000,000			
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiaya	2 Unit					17,000,000	20,000,000			
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	38 Unit					13,400,000	15,000,000			
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah SPPD yang dilaksanakan	500 M2					14,039,000	15,000,000			
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Persentase Perangkat Daerah yang Menjalankan SPIP										2,150,895,000	2,195,233,100			
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal														1,446,295,000	1,893,853,100			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46 LHP					477,780,000	847,335,600			
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	47 LHP					587,225,000	598,969,500			
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Reviu Laporan Kinerja	11 Laporan					86,430,000	103,716,000			
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan					144,860,000	173,832,000			
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan Monev Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Laporan					150,000,000	170,000,000			
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														704,600,000	301,380,000			
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	10 Laporan					100,000,000	120,000,000			
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan					604,600,000	181,380,000			
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Rata-Rata Nilai PMPRB Organisasi Perangkat Daerah										30,975,000	37,170,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program							Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional			
								Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target		Pagu Indikatif (Rp.)
6	1	3	2	Pendampingan dan Asistensi													30,975,000	37,170,000	
6	01	03	2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Boting					Jumlah Laporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Laporan				30,975,000	37,170,000	
7				UNSUR KEWILAYAHAN													52,718,666,536	53,333,962,381	
7	1			KECAMATAN WARA													6,835,227,500	6,875,313,500	
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah									5,305,264,000	5,345,100,000	
7	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			9,500,000	9,600,000	
7	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Semua Kelurahan Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 Dokumen				12,000,000	12,100,000	
7	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3 Laporan				3,500,000	3,550,000	
7	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			5,090,243,000	5,127,550,000	
7	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	70 Orang				5,063,443,000	5,100,000,000	
7	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah SPPD yang dilakukan	4 SPPD				47,600,000	49,000,000	
7	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	17 Laporan Keuangan				3,000,000	3,050,000	
7	1	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset			6,000,000	7,000,000	
7	01	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah aset yang ditatakelolakan	20 Unit				6,000,000	7,000,000	
7	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			36,681,000	37,400,000	
7	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	2 Eksemplar				2,400,000	2,400,000	
7	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	9 SPPD				34,281,000	35,000,000	
7	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai			136,640,000	137,200,000	
7	01	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	1500 surat/jenis/buah				11,000,000	11,050,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	21 Rekening			15,540,000		16,000,000								
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	8 Jasa Layanan			110,100,000		110,150,000								
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai			26,200,000		26,350,000								
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit			16,800,000		16,850,000								
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	7 Unit			2,000,000		2,050,000								
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	1 Unit			7,400,000		7,450,000								
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)								596,835,000		596,935,000								
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												584,635,000		500,285,000								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Amasangan					Jumlah laporan organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 Laporan			96,650,000		96,650,000								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Boting					Jumlah laporan organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 Laporan			98,535,000		98,535,000								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Dangerakko					Jumlah laporan organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 Laporan			97,266,000		97,266,000								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Lagaligo					Jumlah laporan organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 Laporan			97,567,000		97,567,000								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Tompotikka					Jumlah laporan organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 Laporan			96,804,000		96,804,000								
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Pajalesang					Jumlah laporan organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 Laporan			97,813,000		97,813,000								
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Kota Palopo, Wara, Amasangan						Jumlah surat keterangan non perizinan yang dikeluarkan			12,200,000		12,300,000								
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Semua Kelurahan					Jumlah laporan AJB, PBB dan ahli waris yang dibuat	12 Laporan			6,800,000		6,850,000								
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko					Jumlah laporan AJB, PBB dan ahli waris yang dibuat	12 Laporan			5,400,000		5,450,000								

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program								Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Rata-rata LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)								896,952,500	897,052,500	
7	1	3	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												14,600,000	14,700,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko				Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang dan IMB yang dibuat	12 Laporan			7,300,000	7,350,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko				Jumlah laporan organisasi sosial dan kemasyarakatan	12 Laporan			7,300,000	7,350,000	
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											882,352,500	882,352,500	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko				Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	5 Unit			882,352,500	882,352,500	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial								36,176,000	36,226,000	
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											36,176,000	36,226,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Dangerekkko				Jumlah petugas babinsa/babinkamtibmas	14 Orang			36,176,000	36,226,000	
7	1				KECAMATAN WARU UTARA											5,624,453,510	5,718,628,510	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah								4,721,275,000	4,813,650,000	
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			600,000	1,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											600,000	1,000,000	
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumlah laporan penatausahaan keuangan			4,543,759,000	4,622,900,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Pegawai	55 Orang			4,520,959,000	4,600,000,000	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo				Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	923 Laporan			22,800,000	22,900,000	
7	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Jumlah laporan pengelolaan aset			15,000,000	15,500,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo				jumlah aset yang ditatakelola Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	2 jenis 923 Laporan			15,000,000	15,500,000	
7	1	1	2		Administrasi Umum											0	0	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100 %							0	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah												Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan		46,100,000	54,250,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah aset yang ditatakelolakan jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	2 jenis 10 buah 923 Laporan					1,750,000	1,850,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah aset yang ditatakelolakan jumlah bahan bacaan yang dibiayai jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	2 jenis 2 eksampler 10 buah 923 Laporan					2,400,000	2,400,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah aset yang ditatakelolakan jumlah bahan bacaan yang dibiayai jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan jumlah SPPD yang dilaksanakan Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	2 jenis 2 eksampler 10 buah 10 SPPD 923 Laporan					41,950,000	50,000,000	
7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		86,566,000	90,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah aset yang ditatakelolakan jumlah bahan bacaan yang dibiayai jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan jumlah SPPD yang dilaksanakan jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan penggandaan Laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi	2 jenis 2 eksampler 10 buah 10 SPPD 700 surat 923 Laporan					24,266,000	25,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	3 rekening					14,100,000	15,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	5 layanan					48,200,000	50,000,000	
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai		29,250,000	30,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	2 unit					19,000,000	19,100,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	2 unit		3,550,000	3,600,000						
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	5 buah		3,700,000	3,800,000						
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1200 unit/M2		3,000,000	3,500,000						
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)							595,461,000	595,761,000						
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan		587,061,000	587,161,000						
7	01	02	2.02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Batupasi					jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	3 jenis		95,919,000	95,919,000						
7	01	02	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Penggoli					jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	3 jenis		96,228,000	96,228,000						
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Sabbamparu					jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	3 jenis		96,817,000	96,817,000						
7	01	02	2.02	04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Luminda					jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	3 jenis		95,550,000	95,550,000						
7	01	02	2.02	05	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Salobulo					jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	3 jenis		97,787,000	97,787,000						
7	01	02	2.02	06	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Pattene					jumlah jenis layanan yang dilaksanakan	3 jenis		96,360,000	96,360,000						
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									Jumlah surat keterangan non perizinan yang dikeluarkan		8,400,000	8,600,000						
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah surat keterangan non perizinan yang dikeluarkan	1 lembar		8,400,000	8,600,000						
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase rata-rata LPM, LSM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)							261,517,510	262,217,510						
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											8,400,000	8,500,000						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik (2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan layanan pemberdayaan	1 tahun		16,800,000	17,000,000						
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									Jumlah warga/masyarakat at yang hadir dalam Musrenbann		253,117,510	253,717,510						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah warga/peserta yang hadir dalam musrenbang	100 tahun					13,400,000	14,000,000			
7	1	3	2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					Jumlah sarana prasarana kelurahan yang diadakan	3 unit					239,717,510	239,717,510			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase Kelurahan yang bebas konflik sosial (%)										46,200,000	47,000,000			
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									Jumlah koordinasi yang dilaksanakan					46,200,000	47,000,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Utara, Salobulo					jumlah koordinasi yang dilaksanakan	5 kali					46,200,000	47,000,000			
7	1				KECAMATAN WARU TIMUR														7,479,699,500	7,578,556,500			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										6,253,743,000	6,352,100,000			
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu				6,000,000	7,000,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA perangkat daerah	5 Dokumen					3,000,000	3,500,000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5 Dokumen					3,000,000	3,500,000			
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan					5,993,711,000	6,056,100,000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	85 Orang					5,937,716,000	6,000,000,000			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan											29,400,000	29,400,000			
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	5 Laporan Keuangan					2,665,000	2,700,000			
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	3 Laporan Keuangan					23,930,000	24,000,000			
7	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				16,200,000	17,000,000			
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah aset yang ditatakelola	20 unit					16,200,000	17,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
7	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah														Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan	62,541,000	96,000,000		
7	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadak	25 Buah						3,265,000	35,000,000		
7	01	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jenis dan Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	9 Unit						600,000	600,000		
7	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah bahan bacaan yang dibiaya	17 Eksemp						20,400,000	20,900,000		
7	01	01	2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah tamu yang difasilita	211 Orang						5,276,000	5,500,000		
7	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	15 SPPD						33,000,000	34,000,000		
7	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai	175,291,000	176,000,000		
7	01	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	450 surat/jenis/bu u						19,915,600	20,000,000		
7	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiaya	24 Rekening						73,775,400	74,000,000		
7	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	5 Rekening						81,600,000	82,000,000		
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)											607,745,000	607,745,000		
7	01	02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Benteng					Jumlah Warga Yang dilayani Di Kantor Kelurahan	120 Orng						86,262,000	86,262,000		
7	01	02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Surutanga					Jumlah Warga Yang dilayani Di Kantor Kelurahan							85,612,000	85,612,000		
7	01	02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Pontap					Jumlah Warga Yang dilayani Di Kantor Kelurahan							86,743,000	86,743,000		
7	01	02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Malatunrung					Jumlah Warga Yang dilayani Di Kantor Kelurahan							85,773,000	85,773,000		
7	01	02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Salekoe					Jumlah Warga Yang dilayani Di Kantor Kelurahan							83,697,000	83,697,000		
7	01	02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Salotellue					Jumlah Warga Yang dilayani Di Kantor Kelurahan							84,679,000	84,679,000		
7	01	02	2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Ponjalae					Jumlah Warga Yang dilayani Di Kantor Kelurahan							94,979,000	94,979,000		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															550,411,500	550,911,500		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target			Pagu Indikatif (Rp.)	
7	1	3	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														21,000,000	21,500,000			
7	01	03	2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah Layanan yang dilakukan	5 Orng					21,000,000	21,500,000			
7	1	3	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														529,411,500	529,411,500			
7	01	03	2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Benteng					Jumlah sarana prasarana kelurahan yang diadakan	3 unit					529,411,500	529,411,500			
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase Kelurahan yang bebas konflik sosial (%)										67,800,000	67,800,000			
7	1	4	2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									Jumlah koordinasi yang dilaksanakan					67,800,000	67,800,000			
7	01	04	2.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Timur, Semua Kelurahan					Jumlah Pengamana yang ada di wilayah kecamatan	18 Orng					67,800,000	67,800,000			
7	1			KECAMATAN WARA BARAT														5,580,395,000	5,628,824,000			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah										4,289,771,000	4,331,000,000			
7	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu				2,741,000	4,000,000			
7	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah dokumen Renstra,Renja,RKA dan DPA Perangkat daerah	4 Dokumen					1,500,000	1,500,000			
7	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	6 Laporan					1,241,000	2,500,000			
7	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan				4,120,159,000	4,148,300,000			
7	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	55 Orang					4,072,359,000	4,100,000,000			
7	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan											46,800,000	46,800,000			
7	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah laporan akhir tahun	1 laporan					500,000	1,000,000			
7	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan											500,000	500,000			
7	1	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset				12,600,000	12,600,000			
7	01	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah aset yang ditatakelolakan	1 unit					12,600,000	12,600,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur				Target
7	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														22,360,000	25,000,000			
7	01	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah pakaian dinas yang diadakan	28 orang					11,200,000	13,000,000			
7	01	01	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	2 orang					11,160,000	12,000,000			
7	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah														46,037,000	49,100,000			
7	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah komponen listrik yang diadakan	50 buah					1,500,000	2,000,000			
7	01	01	2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 buah					4,400,000	5,000,000			
7	01	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah peralatan rumah tangga	1 buah					1,800,000	2,000,000			
7	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	24 eksemplar					2,400,000	2,600,000			
7	01	01	2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah tamu yang difasilitasi	200 orang					7,137,000	7,500,000			
7	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	6 SPPD					28,800,000	30,000,000			
7	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				65,494,000	69,000,000			
7	01	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah atk Jumlah cetak Jumlah penggandaan	212 atk 20 eksemplar 8000 eksemplar					33,942,000	35,000,000			
7	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah air Jumlah Internet Jumlah rekening listrik	12 bulan 12 bulan 12 bulan					17,706,000	19,000,000			
7	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah layanan kantor yang disediakan	2 layanan					13,846,000	15,000,000			
7	1	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				20,380,000	23,000,000			
7	01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah kendaraan dinas	4 kendaraan dinas					16,500,000	18,000,000			
7	01	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah peralatan dan mesin yang dibiayai	13 unit					2,380,000	3,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit				1,500,000	2,000,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)									519,942,000	520,942,000		
7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													12,000,000	13,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah peningkatan efektifitas pemerintahan	1 kegiatan				12,000,000	13,000,000		
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan						
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Tomarunding										97,296,000	97,296,000		
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Battang										103,343,000	103,343,000		
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Lebang										96,990,000	96,990,000		
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Battang Barat										100,021,000	100,021,000		
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Padang Lambe										98,292,000	98,292,000		
7	1	2	2		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum													12,000,000	12,000,000		
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kegiatan				12,000,000	12,000,000		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Rata-rata LPM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)									729,882,000	731,882,000		
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													729,882,000	731,882,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah warga yang hadir	250 orang				12,000,000	13,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang diadakan	4 kelurahan				705,882,000	705,882,000		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah kelompok masyarakat yang dilayani	5 kelompok				12,000,000	13,000,000		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase Kelurahan yang bebas konflik sosial (%)									40,800,000	45,000,000		
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								Jumlah koordinasi yang dilaksanakan					40,800,000	45,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja											Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target			Pagu Indikatif (Rp.)	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Barat, Semua Kelurahan					Jumlah Polisi dan TNI yang bersinergi	12 orang				40,800,000	45,000,000				
7	1				KECAMATAN WARU SELATAN													5,082,829,100	5,108,339,840				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													4,310,535,000	4,354,645,740				
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			1,500,000	1,650,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah dokumen renstra, renja, RKA dan DPA	17 dokumen				1,000,000	1,100,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Laporan Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	3 laporan				500,000	550,000				
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			4,124,702,600	4,155,850,000				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	55 Orang				4,073,822,000	4,100,000,000				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Laporan Pertanggungjawaban yang diverifikasi	150 Nomor BKU				50,545,100	55,500,000				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang disusun	1 laporan				335,500	350,000				
7	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola			7,000,000	8,000,000				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	14 orang				7,000,000	8,000,000				
7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola			46,986,500	52,113,350				
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Komponen instalasi Listrik yang diadakan	20 buah				2,608,500	2,869,350				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	131 buah				2,935,000	3,228,500				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Cetak yang dibiayai	20 buah				2,250,000	2,475,000				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	1 eksampler				1,200,000	1,320,000				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah tamu yang difasilitasi	777 orang				15,655,000	17,220,500				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja												Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	5 SPPD					22,338,000		25,000,000				
7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				83,165,900		89,852,390				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Surat Masuk, Surat Keluar ATK, Cetak dan Penggandaan	700 Surat					5,664,900		6,231,390				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah rekening air, Listrik, dan internet yang dibiayai	5 Rekening					16,601,000		16,601,000				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Unit					2,700,000		3,000,000				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Layanan Kantor yang dilaksanakan	12 Pelayanan					58,200,000		64,020,000				
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				47,180,000		47,180,000				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajak yang dibiayai	1 Unit					23,100,000		23,100,000				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Kendaraan Dinas Opersional yang pemeliharaan dan Pajaknya Yang dibiayai	12 Unit					1,650,000		1,650,000				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	12 Unit					8,250,000		8,250,000				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah dan luas gedeung kantor yang dipelihara	1 Unit					14,180,000		14,180,000				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)										392,351,000		392,351,000				
7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Takkalala					Jumlah biaya Opersional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK,dll Yang dibiayai						98,301,000		98,301,000				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Songka					Jumlah biaya Opersional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK,dll Yang dibiayai						97,455,000		97,455,000				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Sampoddo					Jumlah biaya Opersional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK,dll Yang dibiayai						96,141,000		96,141,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Binturu					Jumlah biaya Operasional Kelurahan, Laporan Jumlah ATK,dll Yang dibiayai					96,254,000	96,254,000				
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													4,200,000	4,200,000				
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					jumlah laporan yang dibuat, laporan AJB, PBB dan Ahli Waris	12 laporan				4,200,000	4,200,000				
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)									361,343,100	361,343,100				
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													361,343,100	361,343,100				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah laporan yang dibuat, laporan musrembang dan IMB	4 laporan				4,200,000	4,200,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Semua Kelurahan					Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	4 kelurahan				352,943,100	352,943,100				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Laporan Yang dibuat, Laporan organisasi Sosial, Ranstra dan Keagamaan	4 laporan				4,200,000	4,200,000				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial									18,600,000	0				
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									Jumlah koordinasi yang dilaksanakan				18,600,000	0				
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara Selatan, Songka					Jumlah Laporan Yang dibuat, Laporan Babinsa dan Laporan Babinkamtibmas	12 laporan				18,600,000	0				
7	1				KECAMATAN BARA													6,537,941,000	6,624,701,905				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5,301,929,000	5,413,119,905				
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			250,000	1,000,000				
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA perangkat daerah	7 Dokumen				100,000	500,000				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	7 Laporan				150,000	500,000				
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan			5,057,741,000	5,127,600,000				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Palopo, Bara, Temmalebba,					Jumlah Pegawai	55 Orang				10,063,182,000	10,200,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Laporan pertanggung jawaban yang diverifikasi	150 Laporan			25,800,000		26,800,000						
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan			400,000		1,000,000						
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	1 Laporan			150,000		300,000						
7	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset		14,400,000		15,500,000						
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah aset yang ditatakelolakan	1 Jenis			14,400,000		15,500,000						
7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola		35,283,095		40,900,000						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	10 Buah			2,439,000		3,500,000						
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	2 eksemplar			2,400,000		2,400,000						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	12 SPPD			30,444,095		35,000,000						
7	1	1	2.1		Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		3,203,000		3,500,000						
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jenis dan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	12 Jenis/unit			3,203,000		3,500,000						
7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		156,501,500		182,169,500						
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah surat masuk, surat keluar, ATK, cetak dan penggandaan	12 Jenis/unit/Bu ah			7,832,000		8,500,000						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah rekening air, listrik dan Internet yang dibiayai	12 Rekening			15,257,000		18,257,000						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	12 layanan			133,412,500		155,412,500						
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		34,550,405		42,450,405						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	18 unit			23,405,500		25,405,500						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja									Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	6 Buah		1,100,000		2,000,000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	450 Unit/M2		10,044,905		15,044,905			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)							496,500,000		497,050,000			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan							
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Temmalebba					Jumlah laporan yang dihasilkan	120 Dokumen		99,185,000		99,185,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Balandai					Jumlah laporan yang dihasilkan			98,489,000		98,489,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Rampoang					Jumlah laporan yang dihasilkan			99,185,000		99,185,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan To'Bulung					Jumlah laporan yang dihasilkan			97,791,000		97,791,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kelurahan Buntu Datu					Jumlah laporan yang dihasilkan			97,550,000		97,550,000			
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											4,300,000		4,850,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah laporan yang dihasilkan	12 Laporan		650,000		850,000			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah laporan yang dihasilkan	12 Laporan		3,650,000		4,000,000			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)							713,512,000		714,532,000			
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											713,512,000		714,532,000			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah laporan yang dihasilkan	12 Laporan		7,630,000		8,650,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Semua Kelurahan					Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang diadakan	4 kelurahan		705,882,000		705,882,000			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial							26,000,000		0			
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		26,000,000		0			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Bara, Temmalebba					Jumlah laporan yang dihasilkan	12 Dokumen		26,000,000		0			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)		
7	1			KECAMATAN MUNGKAJANG												4,915,670,000	5,013,033,000				
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,779,107,000	3,875,950,000				
7	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			1,000,000	1,100,000				
7	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah	7 Dokumen			500,000	550,000				
7	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3 Laporan			500,000	550,000				
7	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah laporan penatausahaan keuangan			3,534,809,000	3,625,050,000				
7	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	45 Orang			3,511,859,000	3,600,000,000				
7	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021)Pengembang an Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang									22,000,000	24,000,000				
7	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan yang akan disusun	5 laporan			600,000	650,000				
7	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan disusun	2 laporan Keuangan			350,000	400,000				
7	1	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Jumlah laporan pengelolaan aset			13,800,000	13,900,000				
7	01	01	2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah Aset yang ditatakelolakan	12 Unit			13,800,000	13,900,000				
7	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola			22,050,000	22,100,000				
7	01	01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	53 Orang			22,050,000	22,100,000				
7	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah									Administrasi ASN PD yang dikelola			61,100,000	66,000,000				
7	01	01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah komponen instalansi Listrik yang diadakan	90 Buah			3,500,000	3,600,000				
7	01	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	2 Eksemplar			2,400,000	2,400,000				
7	01	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	10 SPPD			55,200,000	60,000,000				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
								Capaian Program							Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional			
								Tolok Ukur	Target								Tolok Ukur		Target
7	1	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Jumlah barang milik daerah yang diadakan		8,000,000	8,500,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang						Jenis dan jumlah peralatan dan mesin diadakan	1 Unit			8,000,000	8,500,000	
7	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		88,102,000	88,300,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak, dan penggandaan	3 surat/jenis/buah				16,902,000	16,950,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah rekening, air, listrik, dan internet yang dibiayai	3 Rekening				13,800,000	13,850,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	5 Kegiatan				57,400,000	57,500,000	
7	1	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai		50,246,000	51,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah Kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	13 Unit				26,950,000	27,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	15 Buah				3,800,000	4,000,000	
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah meubel yang pemeliharannya di biayai	20 Buah				1,496,000	1,500,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	681 M2				18,000,000	18,500,000	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)									399,791,000	399,851,000	
7	1	2	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													630,000	650,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan				630,000	650,000	
7	01	02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan											Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan		397,901,000	397,901,000	
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kelurahan Mungkajang					Jumlah laporan kegiatan operasional	16 Kegiatan				99,794,000	99,794,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
																	Pagu Indikatif (Rp.)		
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kelurahan Murante									99,385,000	99,385,000	
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kelurahan Latuppa									100,571,000	100,571,000	
7	01	02	2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kelurahan Kambo									98,151,000	98,151,000	
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												1,260,000	1,300,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan			630,000	650,000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan			630,000	650,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)								712,142,000	712,232,000	
7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												630,000	650,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan yang dihasilkan	1 Laporan			630,000	650,000	
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												711,512,000	711,582,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah laporan Pelaksanaan musrenbang	5 Laporan			5,630,000	5,700,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang diadakan	4 Unit			705,882,000	705,882,000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial								24,630,000	25,000,000	
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		24,630,000	25,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Mungkajang, Mungkajang					Jumlah petugas babinsa dan babikamtibmas	10 orang			24,630,000	25,000,000	
7	1				KECAMATAN SENDANA												4,703,660,000	4,777,111,200	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												4,274,579,000	4,345,330,200	
7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		750,000	850,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					jumlah dokumen renstra,renja,RKA dan DPA perangkat daerah	7 dokumen			250,000	300,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	4 laporan			500,000	550,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
7	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Jumlah laporan penatausahaan keuangan		4,071,214,000	4,138,850,000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	55 Orang		4,032,664,000	4,100,000,000			
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana								37,800,000	38,000,000			
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				jumlah laaporan akhir tahun yang disusun	1 laporan akhir tahun			250,000	300,000			
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan yang disusun	17 laporan keuangan			500,000	550,000			
7	1	1	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Jumlah laporan pengelolaan aset		7,200,000	7,500,000			
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				Jumlah aset yang ditatakelolakan	18 unit			7,200,000	7,500,000			
7	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Administrasi ASN PD yang dikelola		41,274,800	43,230,000			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				Jumlah bahan bacaan yang dibayai	3 eksemplar			3,180,000	3,230,000			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				Jumlah SPPD yang dilaksanakan	7 SPPD			38,094,800	40,000,000			
7	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		134,040,200	134,600,200			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				Jumlah surat masuk, surat keuar, atk, cetak dan penggandaan	560 surat/jenis/buah			13,010,000	13,500,000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana								11,500,000	11,550,000			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	6 jumlah layanan			109,530,200	109,550,200			
7	1	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai		20,100,000	20,300,000			
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana				Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 unit			1,000,000	1,050,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah kendaraan dinas opeasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	10 unit				400,000		450,000			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah peralatandan mesin lainnya yang dibiayai	12 buah				6,700,000		6,750,000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana										12,000,000		12,050,000			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)									402,629,000		403,279,000			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Peta										99,432,000		99,432,000			
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Mawa										98,690,000		98,690,000			
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Purangi										96,957,000		96,957,000			
7	1	2	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Sendana										96,550,000		96,550,000			
7	1	2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan				9,000,000		9,050,000			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah Laporan kependudukan	12 laporan				9,000,000		9,050,000			
7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat													2,000,000		2,600,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah Laporan Terkait non perizinan	36 laporan				500,000		600,000			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah Laporan PBB, AJB, Ahli waris	36 laporan				1,500,000		2,000,000			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)									7,252,000		8,502,000			
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan													5,252,000		6,002,000			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang	5 laporan				5,250,000		6,000,000			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Semua Kelurahan					Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang diadakan	4 kelurahan				2,000		2,000			
7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													2,000,000		2,500,000			
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdyaan Masyarakat	12 laporan				2,000,000		2,500,000			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial									19,200,000		20,000,000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional	
										Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur
7	1	4	2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		19,200,000		20,000,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Sendana, Sendana					Jumlah Babinsa dan Bhabin kamtibmas	8 orang			19,200,000		20,000,000			
7	1			KECAMATAN TELLUWANUA													5,958,790,926		6,009,453,926			
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5,213,537,000		5,263,900,000			
7	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		4,650,000		5,500,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah Dokumen Renstra, RKA dan DPA Perangkat Daerah	3 Dokumen			3,000,000		3,500,000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3 Laporan			1,650,000		2,000,000			
7	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Jumlah laporan penatausahaan keuangan		4,958,115,000		5,000,000,000			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	70 Orang			4,958,115,000		5,000,000,000			
7	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											Administrasi ASN PD yang dikelola		27,600,000		29,000,000			
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Maroangin					Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan kepegawaian tepat waktu	3 Orang			27,600,000		29,000,000			
7	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah											Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelola		47,980,000		50,300,000			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	150 Buah			1,000,000		1,500,000			
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 Buah			1,500,000		1,800,000			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jenis logistik kantor yang diadakan	1 Jenis			1,000,000		1,500,000			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	48 Exemplar			4,080,000		4,500,000			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah SPPD yang dilaksanakan	20 SPPD			40,400,000		41,000,000			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program								Pagu Indikatif (Rp.)		
									Tolok Ukur	Target							Pagu Indikatif (Rp.)		
7	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan		10,000,000	10,700,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	1 Unit			10,000,000	10,700,000	
7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai		129,742,000	132,000,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah surat masuk, surat keluar, atk, cetak dan pengadaan	1220 Surat			21,142,000	22,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	3 Rekening			19,200,000	20,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	5 Orang			89,400,000	90,000,000	
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharannya dibiayai		35,450,000	36,400,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	1 Unit			25,950,000	26,200,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibiayai	4 Buah			2,000,000	2,200,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah dan Luas gedung kantor yang dipelihara	669 M2			7,500,000	8,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rata-Rata Tingkat Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Layanan yang Diselesaikan Tepat Waktu (%)								678,008,000	678,008,000	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										Jumlah jenis layanan yang dilaksanakan		678,008,000	678,008,000	
7	1	2	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kelurahan Mancani					Jumlah warga yang dilayani di Kantor Kelurahan				96,691,000	96,691,000	
7	1	2	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Batu Walenrang					Jumlah warga yang dilayani di Kantor Kelurahan				96,600,000	96,600,000	
7	1	2	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Maroangin					Jumlah warga yang dilayani di Kantor Kelurahan				96,513,000	96,513,000	
7	1	2	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Pentoangan					Jumlah warga yang dilayani di Kantor Kelurahan				95,954,000	95,954,000	
7	1	2	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kelurahan Jaya					Jumlah warga yang dilayani di Kantor Kelurahan				98,007,000	98,007,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
7	1	2	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kelurahan Salubatang					Jumlah warga yang dilayani di Kantor Kelurahan				96,937,000	96,937,000			
7	1	2	2.02	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kelurahan Sumarambu					Jumlah warga yang dilayani di Kantor Kelurahan				97,306,000	97,306,000			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)								16,845,926	16,845,926			
7	1	3	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											16,845,926	16,845,926			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang diadakan	7 kelurahan			16,845,926	16,845,926			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase kelurahan yang bebas konflik sosial								50,400,000	50,700,000			
7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								Jumlah koordinasi yang dilaksanakan			50,400,000	50,700,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Telluwanua, Semua Kelurahan					Jumlah Pengamanan DiWilayah Kecamatan	18 Orang			50,400,000	50,700,000			
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											6,138,360,890	5,384,300,000			
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											6,138,360,890	5,384,300,000			
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,030,064,400	3,110,800,000			
8	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu			12,000,000	12,700,000			
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah dokumen renstra, renja , RKA, dan DPA perangkat Daerah	4 DDDdDokumen			1,000,000	1,200,000			
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6 Laporan			11,000,000	11,500,000			
8	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumlah laporan penatausahaan keuangan			2,670,819,000	2,747,400,000			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Pegawai	30 Orang			2,623,619,000	2,700,000,000			
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah SPJ yang diverifikasi	120 SPJ			46,200,000	46,200,000			
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik	Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Laporan keuangan bulanan, semeteran dan tahunan yang disusun	12 Laporan Keuangan			1,000,000	1,200,000			
8	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Jumlah laporan pengelolaan aset			7,200,000	7,400,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur		Target			Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur			Target
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						Jumlah aset yang ditata kelolaan	119 Unit			7,200,000	7,400,000	
8	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah										Jumlah sub kegiatan administrasi umum yang ditatakelolakan			103,600,000	103,900,000	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan													4,800,000	4,900,000	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													98,800,000	99,000,000	
8	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										Jumlah barang milik daerah yang diadakan			28,500,000	29,000,000	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Jenis dan Jumlah peralatan mesin yang disediakan	16 Unit					28,500,000	29,000,000	
8	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah jasa penunjang urusan daerah yang dibiayai				174,925,400	176,000,000	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													20,826,000	21,000,000	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah rekening air, listrik dan internet yang dibiayai	36 rekening				58,107,000	59,000,000	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah layanan kantor yang dilaksanakan	48 jumlah layanan				95,992,400	96,000,000	
8	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang emeliharaannya dibiayai				33,020,000	34,400,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan dinas yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	7 Unit				13,200,000	13,800,000	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kendaraan dinas operasional yang pemeliharaan dan pajaknya dibiayai	7 Unit				12,820,000	13,500,000	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah bahan bacaan yang dibiayai	12 Buah				7,000,000	7,100,000	
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													113,000,000	115,000,000	
8	1	2	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													113,000,000	115,000,000	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah kebijakan teknis dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan , Bhineka Tunggal Ika dan Seajara kebangsaan	6 Kegiatan				137,400,000	138,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program						Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional
																				Tolok Ukur		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja										Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program				Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional				
									Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur		Target		Tolok Ukur			Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaperan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, perangkat Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dari Partai politik, Pemilu, Pemilukada serta Situasi Politik Daerah	4 Kegiatan					28,550,000		29,500,000		
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Angka Pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar											1,400,000,000		550,000,000	
8	1	4	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan															1,400,000,000		550,000,000	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Jumlah Ormas yang menerima hibah	5 Ormas						1,400,000,000		550,000,000	
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Edukasi (%)											131,314,000		134,500,000	
8	1	5	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya															131,314,000		134,500,000	
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Program Kerja yang akan dilaksanakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Kegiatan					8,600,000		9,000,000		
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebijakan Teknis yang akan dilaksanakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Persen					32,950,000		33,500,000		
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Kegiatan					19,500,000		20,500,000		
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Kegiatan					70,264,000		71,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
									Capaian Program								Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur		Target						Tolok Ukur			Target		Tolok Ukur		Target	
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)								510,790,000	516,000,000							
8	1	6	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												510,790,000	516,000,000							
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebijakan yang akan dilaksanakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, tenaga Kerja Asing, dan lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi dibidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Persen			9,200,000	9,500,000							
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, tenaga Kerja Asing, dan lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi dibidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Kegiatan			21,600,000	22,500,000							
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, tenaga Kerja Asing, dan lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi dibidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Kegiatan			86,600,000	87,500,000							
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kebijakan Teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, tenaga Kerja Asing, dan lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi dibidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Kegiatan			20,940,000	21,500,000							
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	(2021) Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik		Kota Palopo, Wara, Tompotika					Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 Kegiatan			372,450,000	375,000,000							

BAB. VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Kota Palopo tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 dan sekaligus menjadi target kinerja pada RKPD 2021 :

6.1. Capaian, Target serta Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 6.1
Capaian, Target dan Proyeksi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Palopo

No	19 Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	Target 2020	Proyeksi 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	77.98	77.98	78.04
2	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.75	10.39	10.45
3	Angka Harapan Hidup (Thn)	70.79	70.34	70.36
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	8.35	7.15
5	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	85.77	81	82
6	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	0.15	0	0
7	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	12.3	11.47	12
8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	83.08	81.12	81.28
9	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	12.38	15	10
10	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	79.95	76.93	76.98
11	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	52.7	66	68
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	52.43	75	80
13	Level SPIP Daerah (Point)	3	3	3
14	Pertumbuhan PDRB (%)	6.75	4.16	7.18
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.32	11.81	9.03
16	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	43.02	37.3	37.5
17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	1.5	1.3	2.4
18	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.54	0.13	0.19
19	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	5.2	2.3	2.84

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pemerintah Kota Palopo Tahun 2021

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	6.75	4.16	7.18
2	Laju inflasi (%/Tahun)	1.91	3.30	3.20
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	43.02	37.3	37.5
4	Paritas Daya Beli (Ribuan/Tahun)	12,986	12,866	13,048
5	Indeks Gini (Angka)	0.338	0.337	0.335
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92.18	92.36	92.85
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.82	8.35	7.15
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	324,233	271,988	284,427
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14,370	14,829	14,532
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	7.82	8.35	7.15
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.15	1.585	1.503
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.29	0.45	0.38
	Indeks Kesehatan	78.14	77.53	77.61
	Indeks Pendidikan	77.69	77.66	78.37
	Indeks Pengeluaran	78.12	77.45	77.91
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	77.98	77.98	78.4
12	Angka melek huruf (%)	98.4	100	100
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.75	10.39	10.45
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.07	15.15	15.17
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.79	70.34	70.36
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0	0	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)		1.22	0.64
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)		100	100
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	60.49	59.57	60.63
	Angka Partisipasi Anakatan Kerja Laki-Laki	74.85	73.97	79.3

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47.37	42.67	43.42
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	64.58	63.24	64.47
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki	79.16	82.15	83.66
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	51	45.71	46.6
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	10.32	11.81	9.03
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	89.68%	87.47	90.95
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	75.40%	74.76	76.85
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	54.25%	53.86	55.09
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	25.07%	26.65	26.75
	Laki – Laki		18.3	18.45
	Perempuan		8.35	8.3
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	26.09%	39.91	39.86
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.08	81.12	81.28
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	16.83%	16.8	16.82
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.6	91.65	91.7
30	Penguatan cadangan pangan (%)		87.53	92.7
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)		0	0
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)		16.8	16.53
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		3	3
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)	25,025		
	Padi	20,288	36,040	37,842
	Jagung	4,737	5,847	6,139
	Ubi Kayu	n/a	181	182
	Ubi Jalar	n/a	5.27	5.53
	Sagu		17	18
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	4404.99	3343.53	3377.13
	Daging (Ruminansia) Ton	601.82	252.53	255.13
	Daging Sapi (Ton)	596.87	252.2	254.8
	Daging Kerbau (Ton)	1.03	0.33	0.33
	Daging Kambing (Ton)	3.92	1	1

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
	Daging Unggas (Ton)	3803.16	3091	3122
	Daging Ayam Kampung (Ton)	123.77	157	158
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	3,666.04	2934	2964
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	13.36	8,62	8,71
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1422.3	1814	1833
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1222.384	1623	1639
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	86.872	45.92	46.39
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	113.08	145.9	147.41
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)		3	3
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	2018.66		
	Kelapa Dalam	17.70	32.88	33.38
	Kopi	50.96	68	69
	Kopi Robusta	n/a	68	69
	Kopi Arabika	n/a	0.01	0.01
	Cengkeh'	n/a	132	134
	Kakao	1,950	400	450
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)		2	2
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)		0.03	0.03
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)		0.19	0.19
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		1.3	1.35
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)		2	2
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24.41%	24.3	24.6
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.72%	2.62	2.95
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a
45	Pertumbuhan Industri (%)		22.5	22.8
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	0.25	0.3
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	110.51	110.65	117,815
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	54.85	52	53
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	98.23	98.12	104.13
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	76.59%	78.6	79.53
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	n/a	1.83	2.06
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	n/a
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	12	19	21
10	Rasio ketergantungan	47.98	47.58	47.14
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR			
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1.	Pendidikan			
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)		64.5	64.8
2	Angka Partisipasi Kasar			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	105.99	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	86.02	86	87
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	110.74	87	88
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)			
	Tidak/Belum Bersekolah (%)		5.8	5.7
	Tamat SD/ sederajat (%)		11	10
	Tamat SMP/ sederajat (%)		23	22
	Tamat SMA (%)		38	39
	Tamat SMK (%)		4	5
	Tamat Perguruan Tinggi (%)		18	18
	Diploma I/II (%)		0.6	0.7
	Diploma III (%)		3	3.1
	Diploma IV/S1-S3 (%)		14.1	14.2
4	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99.44	99.5	99.6
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	78.11	78	78.1
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	67.4	66.7	66.8
5	Angka partisipasi sekolah (%)			
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	997	1000	1000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	991.7	1000	1000

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	844.3	884.8	883.9
6	Angka Putus Sekolah:			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)		0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)		0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)		7	6
7	Angka Kelulusan:			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)		100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)		100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)		100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)		100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)		100	100
9	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)		100	100
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)		100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)		33	33
	SD/MI (per 10,000)	77	36	36
	SMP/ MTS (per 10,000)		26	26
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)		27	27
	SMA/MA/SMK		27	27
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)		672	691
	SD/MI (per 10,000)		640	656
	SMP/ MTS (per 10,000)		731	752
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)		109	120
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)		0.59	0.6
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata pendidikan menengah (per 10.000)		2.2	2.3
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)		100	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	100	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	98.42	100	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)		100	100

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
2.	Kesehatan			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0.61	1	1
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	99.39	99	99
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	5.79	1	1
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4.27	4	3
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	30.47	60	55
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	8.41	9	10
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	3	4
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0.63	5	5
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	6	5	5
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	86.23%	71.8	72.5
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	101.67%	96	96.45
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	93.75%	96.35	96.9
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	Tidak ada Kasus	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	-	80.76	78.55
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	98.48%	87.2	88.9
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	0	0	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	9.20%	8.9	9.7
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	118.91%	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	224.79	210	200
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	91.41%	81.3	82.5
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	39.76%	64.15	64.85
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	5	7	8
26	Angka kejadian Malaria (per 1000)	0.62	14	13
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a	n/a
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang	100	100	100

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
	tepat (%)			
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%)	0.04%	0.03	0.02
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	n/a	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	n/a	2.1	2.4
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	99.76%	100	100
35	Cakupan puskesmas (%)	133.33	133,33	133,33
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	62.50%	75	76
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	100.00%	93.1	93.3
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	99.53%	91.6	91.9
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	76.42%	70.3	73.4
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	73.92%	68	72
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	97.93	97.98	98.5
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	100
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	Tidak ada Kasus	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Pekerjaan Umum:			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	69.57%	64	68
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	27	29	29
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a		
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	71.60%	71.52	72
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	2.14%	1.32	1.34
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	-	-
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	97.03	97.03	97

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	50.1	35	30
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	8.87%	8.85	8.8
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)		20	25
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	3.93%	5	6
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	73.55%	72	73
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)		20.5	21.2
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	95.61	100	100
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	97.28	95	100
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0.15	0.14	0.13
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.1%	4.7	4.8
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.52	1.8	1.9
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.82	1.9	2
3	Penataan Ruang:			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)		3,982	3,984
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.95%	76.96	76.97
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)		52	54
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya		n/a	n/a
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan		n/a	n/a
7	Ketaatan terhadap RTRW		100	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Rasio rumah layak huni	0.19	0.19	0.2
2	Rasio permukiman layak huni (%)	92.26%	95.12	95.78
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	91.44%	91.40	97.40
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	93.58	97.62	98.1
5	Persentase permukiman yang tertata (%)	99.25	100	100
6	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	0.15	0.1	0.8
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	4.31	15	10

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	0.47	5	3
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	25.79	30	35
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	100	100
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	95,62	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	9.09%	13.13	15.15
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	65.59%	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	95,62	100	100
6.	Sosial			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	54,97	79.26	79.41
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	55.09	79.45	79.62
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	60.3	79.45	79.62
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)		12	13
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	41.43	2.61	3.12
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	9.50	6.64	5.81
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)		12.5	10.2
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	11.00	82	83
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	53.12	6	7

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
4	Keselamatan dan perlindungan (%)		27	28
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	54.82	45	50
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)		0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1.13	1.12	1.5
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)		1	1.5
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	46.45	20	25
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	0	11	12
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	0	14	18
12	Rasio lulusan S1/S2/S3		10.3	10.5
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	9.27%	12	13
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	28.00%	20	20
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)		3.3	3.4
4	Rasio KDRT (per 10.000)	1	3	3
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)			
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	91.45%	45.71	46.6
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)		100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)		30	40
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)		20	30
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)		100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)		30	40
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	9.09	23	25
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)		15	20

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD			
	APM Perempuan pada Tingkat SD		100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD		100	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP			
	APM Perempuan pada Tingkat SMP		81.5	81.7
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP		79	80
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA			
	APM Perempuan pada Tingkat SMA		71	72
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA		72	73
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		43.3	43.85
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi		n/a	n/a
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi		n/a	n/a
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		n/a	n/a
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	43.48%	n/a	n/a
3	Pangan			
1	Ketersediaan pangan utama (%)		11.4	11.6
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)		2154	2154
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)		2100	2100
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)		54	54
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	86.00	88	89
4	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	27.84%	1.8	1.9
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	28.57%	2	2
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	100%	100	100
5	Lingkungan Hidup			
Kabupaten/Kota				
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Belum ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Belum ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah			
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemara Ringan	Baik	Baik
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Belum tersedia	n/a	n/a

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	27.27	40.2	40.4
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota			
	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)	0	1	1
	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)	0	1	1
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Belum Ada	Ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100%	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	90.27%	91.75	93.48
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	4.12%	4.77	5.4
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	67.83%	70	73
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	87.02%	88.37	93.27
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	77.98	78
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)		100	100
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.67	0.83	0.85
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.94	0.87	0.9
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.38	0.8	0.85
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah	Sudah

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	93.84	95	97
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	2.5	2.5	2.5
4	Persentase LSM aktif (%)	2.78%	6	7
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	4.17	7	9
6	Persentase PKK aktif	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		n/a	n/a
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		n/a	n/a
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.18	2.29	2.28
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	n/a	n/a
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	0	Ada
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)		0	2
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	36.73%	45	50
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	0	2
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	0	0
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	0	0
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	0	0
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	75.74%	78.42	80.29

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		n/a	n/a
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	3	7	6
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12.35%	17	14
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21.92%	23	24
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	32.04%	37.05	31.66
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	74.12%	82.43	86.07
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	60.61%	66.04	69.78
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	54.38%	49.77	51.06
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11	0.11	0.11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	20.44	11	12
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	23.93%	27.11	30.35
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	13.20	9	10
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	66.44%	66	67
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	100%	2.74	3.15
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	100%	83.78	98.22
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	21	22
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	41.32%	84.1	84.15

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
9	Perhubungan			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.323.604	1,464,415	1,523,904
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	1381	702	737
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	10.6	3.73	3.94
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	99.1%	24.7	25.96
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	56.4%	71	72
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	16	22	23
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,323,252	1,463,897	1,523,350
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	607,024	609,144	613,037
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	1,942,818	2,032,555	2,102,153
10	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.35	3.55	3.65
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.9	0.88	0.9
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	86	86.2	86.3
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.23	0.25	0.26
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.5	0.5	0.55
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Persentase koperasi aktif (%)	25.34	25.5	30
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	99.91	30.2	30.4
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)		100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	75.37	100	100
12	Penanaman Modal			
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	78	50	75
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	130,740	130,000	135,000
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	13.65	9	10
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		25	30
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	70.20%	71	72

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.77	1.9	1.95
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	59.26	40	41
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	32.53	68.3	68.5
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	28.2	68.3	68.5
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	4	30	40
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	4	8	9
14	Statistik			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada
15	Persandian			
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	79.59%	76	78
16	Kebudayaan			
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	14	15	15
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	99.33%	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	0	3	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	52	50	50
17	Perpustakaan			
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	10.15	9.45	9.55
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.49	48	49
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.13	1.21	1.22
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1,246	1,254	1,316
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	404	1,332	1,382
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	67	100	100
18	Kearsipan			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	24.49%	6	8
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	7	7
Layanan Urusan Pilihan				
1.	Pariwisata			
1	Kunjungan wisata (%)	115.83%	100	100
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2	2.5

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
3	PAD sektor pariwisata (%)	5.12%	4.3	4.4
2.	Pertanian			
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		17.43	17.40
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)		n/a	n/a
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)		n/a	n/a
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)		n/a	n/a
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)			
	Padi	20,288	36,040.00	37,842.00
	Jagung	4,737	5,847	6,139
	Ubi Kayu	n/a	181	182
	Ubi Jalar	n/a	5.27	5.53
	Sagu	n/a	17	18
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)			
	Padi	6.41	6.51	6.61
	Jagung	7.10	7.25	7.36
	Ubi Kayu	n/a	28	29
	Ubi jalar	n.a	13	14
	Sagu		0.3	0.35
7	Cakupan bina kelompok petani		52	53
3	Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik		100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik		100	100
4	Perdagangan			
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-1,004,760	-700,000	-650,000
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)		12	13
5	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	2.45%	3	4
6	Transmigrasi			
1	Persentase transmigran swakarsa		0	0
7	Perikanan			
1	Produksi perikanan (%)	93.33%	100	100
2	Konsumsi ikan (%)	98.54%	100	100

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	7.75%	4.9	5.1
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	11.00%	81	82
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	n/a
Penunjang Urusan				
1.	Perencanaan Pembangunan			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	98	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	100	100
2.	Keuangan			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA		0	0
3	Persentase SILPA terhadap APBD	3.56%	2	2
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)			
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0.3%	0	0
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0.74%	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20.17%	20	20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	29.59%	10	10
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)			
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	56.7	52	53
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	43.3	48	47
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	6.56	1.95	2
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam)	103/894		

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi 2019	Target Tahun	
			2020 (P- RKPD)	2021
	Pelajaran)			
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0.67%	1.1	1.2
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	37.97%	35	40
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	960	949	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2213	2262	2284
4.	Penelitian dan pengembangan			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	11	12
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	50	40	45
	Penerapan SIDA:			
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	n/a	3	4
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	36.3	36	37
5.	Pengawasan			
1	Persentase tindak lanjut temuan	75	100	100
2	Persentase pelanggaran pegawai	0.91	0.02	0.01
3	Jumlah temuan BPK	12	15	14
6.	Sekretariat Dewan			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada.A	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada.A	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada.A	Ada	Ada

6.2. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Sesuai Permendagri 100 Tahun 2018, Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3
Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2019 dan Target 2021

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2019	Target 2021
	Aspek Pelayanan Dasar			
I	SPM Bidang Pendidikan		100	
	Pendidikan Dasar			
1	Persentase penduduk Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	100
	Pendidikan Kesetaraan			
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	100	100
	Kesetaraan			
	Pendidikan Anak Usia Dini			
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	100
II	SPM Bidang Kesehatan		84.06	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2019	Target 2021
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.27	100
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99.79	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	96.86	100
	Pelayanan kesehatan balita			
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	68.33	100
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.93	100
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	50.66	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	74.82	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	41.88	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus			
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	87.03	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100	100
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis			
11	Persentase penduduk terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	%	95.17	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2019	Target 2021
	manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan			
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum			
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari		89.51	100
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	81.7	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik			
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	97.31	100
IV	SPM Bidang Perumahan		100	100
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana			
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah			
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100
V	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		79.8	100
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	90.37	100
	Pelayanan informasi rawan bencana			
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	88.88	100
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	84.17	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
4	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	70	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi			

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian 2019	Target 2021
	korban kebakaran			
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	65.59	100
VI	SPM Bidang Sosial			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti		100	100
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota			
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100

6.3. Sustainable Development Goals

Target pencapaian SDGs Kota Palopo berikut sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo. Berikut adalah capaian dan target SDGs Kota Palopo Tahun 2019, proyeksi 2020 dan Target 2021 :

Tabel 6.4
Capaian dan Target
SDGs Kota Palopo 2019, Proyeksi 2020 dan Target 2021

TARGET	INDIKATOR	CAPAIAN 2019	TARGET 2020	PROYEKSI 2021
TUJUAN 1				
TANPA KEMISKINAN				
Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	8.1	7.64	7.15
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100	100	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	47	57	67
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	100	100	100
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3000	3000	3000
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di	100	100	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	fasilitas kesehatan.			
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	76.54	78.42	80.29
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	90	95	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat,	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	91	95	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
termasuk keuangan mikro.				
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	1	0.5	0
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100	100	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.				
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	4	4	4
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 Juta	500 Juta	250 Juta
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	1	0
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	61.15	62.80	63.10
Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari	Pend. 20, Kes 25 Perlindu n Sos 5	Pend. 21, Kes 26 Perlindu n Sos 6	Pend. 22, Kes 27 Perlindu n Sos 7

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. TUJUAN 2	total belanja pemerintah.			
TANPA KELAPARAN				
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	8.2	8	7.8
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1.79	1.22	0.64
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 14, Berat 30	Sedang 13, Berat 29	Sedang 12, Berat 28
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	7.98	6.98	5.98
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	20	15	10
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	20	15	10

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1	0.5	0
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0	0	0
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	60	70	80
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	91.6	91.65	91.7
TUJUAN 3				
KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA				
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Ibu (AKI).	65	60	55
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	100	100	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
	ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.			
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100	100	100
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	1	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	4	4	3
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	1	1
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Persentase kelahiran yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100	100	100
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.04	0.038	0.036
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	230	210	200

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
lainnya.				
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1,700	1400	1,300
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Jumlah kelurahan yang mencapai eliminasi malaria.	1	2	3
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Persentase kelurahan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	1	2	3
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi tekanan darah tinggi.	11	10	9
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	25	24	23
Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	2	1.5	1
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	72	74	76
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49	76.54	78.42	80.29

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	tahun yang berstatus kawin.			
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23	24	24
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	12	11	10
Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	Total Fertility Rate (TFR).	3	2.75	2.5
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Unmet need pelayanan kesehatan.	11	10	10
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	100	100	100
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100	100	100
Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.				
Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100	100	100
TUJUAN 4				
PENDIDIKAN BERKUALITAS				
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	85	90	95
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	100	100	100

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	10.36	10.39	10.45
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	100	100	100
Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD/MI (100), SMP/MTs (100)	SD/MI (100), SMP/MTs (100)	SD/MI (100), SMP/MTs (100)
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	100	100	100
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100, dan 100	100, dan 101	100 dan 100
Pada tahun 2030, secara signifikan	Persentase guru TK, SD,	SD (55),	SD (57),	SD (59),

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. TUJUAN 5	SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	SMP 60, SMA 65 SMK 55	SMP 62, SMA 67 SMK 58	SMP 64, SMA 69, SMK 59
KESETARAAN GENDER				
Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	3	4	5
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0	0	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	60	70	80
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	9	7	6

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20	21	22
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	30	29	28
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	20%	17%	14%
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	71%	73%	75%
TUJUAN 6				
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK				
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	90	95	100
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	505 m3/detik	510 m3/detik	515 m3/detik
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100	100	100
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	91	92	93

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.				
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9	9	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	9	9	9
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah Kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	183 Skala Lingkun gan	186 Skala Lingkun gan	189 Skala Lingkun gan
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	60	70	80
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	1	2
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar	Memenuhi Standar

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	Ada	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Ada	Ada	Ada
Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Ada	Ada	Ada
TUJUAN 8				
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI				
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7.14	4.16	7.18
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	PDB per kapita.	37.1	37.3	37.5
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	72.66	74.76	76.85
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	25.6	26.65	26.75

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	20	25	30
Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	9.81	9.51	9.03
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.22	1.23	1.24
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah wisatawan mancanegara.	1,100	1150	1,220
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	113,900	119,600	125,580
TUJUAN 9				
INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR				
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	3.00%	3.06%	3.10%
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	5%	6.36%	7%

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	2,400	250000.00%	2,600
Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	25%	25.00%	25%
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.1	10.00%	0.11
TUJUAN 10				
BERKURANGNYA KESENJANGAN				
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Koefisien Gini.	0.339	0.337	0.335
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.1	7.64	7.15
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	39	41	43
TUJUAN 11				
KOTA DAN PEMUKIMAN YANG				

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
BERKELANJUTAN				
Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93	95	97
Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	15	20	25
Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	44	45	46
Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Ada	Ada	Ada
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	25	20	15
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	750 JUTA	500 JUTA	250 JUTA

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	100	100	100
Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	Jumlah kelurahan yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.	Ada	ADA	Ada
Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0
TUJUAN 12				
KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB				
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	430	460	500
Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2	3	4
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional,	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI	1	2	3

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	ISO 14001.			
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	1	2	3
Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	1	2	3
TUJUAN 13				
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM				
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	1	0
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0
TUJUAN 15				
EKOSISTEM DARATAN				
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	60	61	62
Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	10	12	14
TUJUAN 16				
PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH				
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	4	3	2
Secara signifikan mengurangi segala	Kematian disebabkan	0	0	0

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	konflik per 100.000 penduduk.			
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	4	3	2
Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	80	85	90
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	4	3	2
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	4	3	2
Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	4	3	2
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	B	BB
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	60	65	70
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	64	66	68

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
	(Provinsi/ Kabupaten/Kota).			
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100	100	100
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	5	6	7
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	7	8	9
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	100	100	100
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	100	100	100
Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	100	100	100
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	1	2	3
TUJUAN 17				
KEMITRAAN MENCAPAI TUJUAN				
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	3	3.5	4
Memperkuat mobilisasi sumber daya	Rasio penerimaan pajak	0.63	0.74	0.84

TARGET	INDIKATOR	CAPAIA N 2019	TARGET 2020	PROYEK SI 2021
domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	terhadap PDB.			
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	1	1	1
Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	1	1	1
Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	60	70	80
Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	85	90	95

BAB. VII

P E N U T U P

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Palopo, Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Palopo disusun dengan mempedomani beberapa dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo 2018-2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019;
- b. Perda Nomor 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Selatan yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- c. RPJMN 2020-2024

RKPD Tahun 2021 Kota Palopo merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Palopo 2018-2023 sehingga secara efektif pula akan mengakomodir pencapaian tujuan dan sarana pembangunan daerah termasuk strategi, arah kebijakan serta program pembangunan dan program perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2021 ini berorientasi pada proses dengan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis dan Atas bawah dan bawah atas serta memperhatikan substansi pendekatan holistik-tematik, integrative dan spasial.

Dokumen RKPD sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional memuat tema, prioritas RKPD dan arah kebijakan serta program prioritas yang sifatnya strategis dan berupa matriks rencana program dan kegiatan prioritas setiap Perangkat Daerah disertai dengan pagu anggaran yang sifatnya indikatif dan menjadi pedoman sinergitas bagi setiap pelaku pembangunan.

Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis Kota Palopo, maka titik berat pembangunan Tahun 2021 diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan wilayah dan pengurangan kesenjangan wilayah, pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar, penanganan lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana, pemantapan pemerintahan dan transformasi layanan public dan peningkatan ekonomi dan produktifitas daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antar Prioritas Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Olehnya sebagai tindak lanjut atas penyusunan RKPD Kota Palopo 2021, Perangkat Daerah segera menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan berpedoman pada substansi dokumen ini. Sehingga diharapkan dapat menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegiatan

prioritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan umum anggaran dan Prioritas plafon anggaran sementara pada tahun 2021.

WALIKOTA PALOPO



Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH